

POLITIK KAIN TIMUR: Instrumen Meraih Kekuasaan



Yogyakarta, 2015

Didedikasikan untuk:
NAYLA ALIYA RAFIFA
engkau tanda ke-Mahabesaran-Nya.

**Politik Kain Timur:
Instrumen Meraih Kekuasaan**

Hak cipta © Penerbit PolGov, 2015
All rights reserved

Penulis: Haryanto
Editor: Dewi Kharisma Michellia
Pemeriksa Aksara: Sudiana Sasmita
Desain Sampul: Winarso Nugroho
Tata Letak Isi: Dwi Fajar W.

Cetakan I, Agustus 2015

Diterbitkan oleh Penerbit PolGov
Penerbit PolGov khusus menerbitkan buku-buku politik dan pemerintahan, berada di bawah payung Research Centre for Politics and Government (PolGov).

Research Centre for Politics and Government (PolGov) adalah lembaga riset dan publikasi dari Jurusan Politik dan Pemerintahan (JPP) Fisipol UGM. Saat ini, PolGov berfokus ke dalam empat tema kunci sesuai dengan kurikulum JPP, yaitu: 1) politik lokal dan otonomi daerah, 2) partai politik, pemilu, dan parlemen, 3) HAM dan demokrasi, 4) reformasi tata kelola pemerintahan dan pengembangan sistem integritas.

Lt. 4 Gedung Fisipol UGM
Jl. Sosio Yustisia, Bulaksumur, Yogyakarta 55281
<http://jpp.fisipol.ugm.ac.id>
Telp./Fax: (0274) 552212S
Surel: polgov.ugm@gmail.com

Foto Kain Timur diambil oleh Suroso pada acara bedah buku di awal terbit dalam rangka HUT Sorong Selatan ke-12 dan HUT Proklamasi Kemerdekaan ke-70 di Teminabuan, Sorong Selatan pada 15 Agustus 2015

Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog dalam Terbitan (KDT)

Haryanto

Politik Kain Timur: Instrumen Meraih Kekuasaan
Penulis: Haryanto; Editor: Dewi Kharisma Michellia
Cet.1 — Yogyakarta: Penerbit PolGov, Agustus 2015

xxiv+228 hlm. 15x23 cm

ISBN 978-602-71962-2-3

1. Sosial/Politik

I. Judul

PENGANTAR¹

Oleh: Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, M.B.A.

KAMI memberi apresiasi atas penerbitan buku dengan judul *Politik Kain Timur: Instrumen Meraih Kekuasaan* ini. Keunikan yang membuat buku ini berbeda dengan berbagai penulisan sebelumnya yang membahas tentang Kain Timur di masyarakat Kepala Burung dan khususnya Sorong Selatan adalah bahwa bagaimana filosofi dari Permainan Kain Timur yang menjadi tradisi, budaya, dan adat masyarakat di wilayah kepala burung dapat diadopsi dan diimplementasikan dalam kegiatan politik modern di zaman ini, khususnya dalam pelaksanaan Pilkada.

Selain itu, cara penulisan yang tidak hanya berbicara secara konseptual, tetapi menjadikan Otto Ihalauw sebagai aktor utama—yang juga adalah Bupati Sorsel—sebagai bukti empirik implementasi dari pemanfaatan sumber daya tradisi atau adat dalam menggalang dukungan dalam Pilkada membuat buku ini sempurna dan menarik untuk dibaca. Buku ini juga merupakan pembelajaran khususnya bagi mereka yang memiliki potensi dan berkemauan untuk menjadi pemimpin di wilayah Sorsel, maupun

1 Pengantar dari Prof. Baltasar Kambuaya, M.B.A. ini disampaikan pada acara bedah buku “Politik Kain Timur” dalam rangka memperingati HUT Sorong Selatan ke-12 dan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-70, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Sorong Selatan pada 15 Agustus 2015 di Teminabuan. Hadir juga sebagai pembahas ialah: (1) Dr. Suriel Mofu, S.Pd., M.E.D., M.Phil., (2) Dr. Johz R. Mansoben, M.A., (3) Pdt. Herman Saud, MTh., (4) Drs. Thontji Wolas Krenak—yang sekaligus menjadi moderator.

di mana saja yang masyarakatnya masih kuat memegang tradisi, adat, dan budayanya. Bahwa tradisi itu juga merupakan salah satu sumber daya untuk penggalangan massa.

Buku ini juga memberikan sinyal kepada kita bahwa di dalam tradisi, adat, dan budaya itu, pasti terdapat nilai-nilai filosofi positif yang dapat diadopsi untuk kepentingan yang lebih besar, terutama dalam menjalankan pemerintahan. Ini juga merupakan implementasi dari prinsip pembangunan berdasarkan tiga tungku, yaitu Pemerintah, Agama, dan Adat.

Tradisi, adat, dan budaya ini merupakan salah satu sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk menggalang dukungan dalam mendapatkan kedudukan dan kekuasaan serta pengaruh. Bukan saja dalam proses Pilkada, melainkan juga di dalam menjalankan kepemimpinan sesudah memenangkan Pemilihan.

Fokus utama pembahasan buku ini adalah pada pemanfaatan tradisi oleh seorang aktor untuk meraih kekuasaan di dalam mekanisme Pilkada. Selain itu, dibahas juga tentang Penggunaan Sumber Daya (*resources*) seorang aktor dalam konteks pemanfaatan tradisi, di tengah masyarakat yang masih terkait etnisitasnya.

Kami melihat bahwa beberapa bentuk dari permainan Kain Timur yang sejalan dengan ide pembahasan buku ini, yaitu penggalangan dukungan menggunakan sumber daya tradisi, antara lain:

1. Hubungan adat antarkeluarga kedua belah pihak pascaperkawinan:

Atas dasar perkawinan, dan pasca pembayaran maskawin, maka untuk tetap menjaga hubungan antara pihak laki-laki dan perempuan, ada satu fase tradisi yang harus dilakukan. Pihak wanita dapat menyediakan, memberikan, dan membantu kain timur kepada pihak laki-laki, kapan saja, dan di mana saja diperlukan. Pemberian itu nantinya wajib dikembalikan pada suatu waktu tertentu. Rumusnya adalah: Kembali Pokok ditambah bunga, dan hadiah atau persen, dan anak. Nilai dari pokok dapat berupa

kain timur yang sama, atau kain yang lainnya yang memiliki nilai sama atau lebih tinggi. Ini yang dimaksud dalam tulisan buku ini sebagai “ Saling Mengunci”.

2. Jaringan pertukaran Kain Timur

Perjalanan panjang satu kain timur, melibatkan banyak individu, etnis, budaya, kelompok, bahkan *cross border* (distrik dan kabupaten). Hubungan kekeluargaan, kerabat, dan persaudaraan, dapat dibangun melalui jaringan perjalanan kain timur tersebut.

Jaringan tersebut dapat juga menjadi satu potensi besar di dalam upaya menggalang massa dan dukungan dalam rangka mendapat kedudukan dan kekuasaan dalam Pilkada.

3. Sanksi

Ketidakmampuan dalam mengembalikan kain timur kepada pihak pemberi mengandung sanksi yang sangat berat, dan ini dihadapi turun-temurun. Sanksi sosial atau dinilai tidak mampu akan berkaitan dengan harga diri dan martabat.

Politik Permainan Kain Timur

Pada prinsipnya, di dalam Politik Permainan Kain Timur, kedudukan, kekuasaan, dan pengaruh tidak bergantung pada banyak atau sedikitnya kepemilikan kain timur, tetapi pada strata didalam kelompok etnis tersebut.

Jumlah kepemilikan kain timur melekat secara langsung pada hierarki atau strata dalam etnis. Mereka yang berada pada strata lebih tinggi memiliki kain timur lebih banyak baik dalam jumlah dan nilainya, dan sebaliknya mereka yang berada pada strata lebih rendah tidak memiliki kain timur dalam jumlah banyak baik kuantitas dan kualitasnya.

Di Maibrat, misalnya, kekuasaan dan kepemilikan kain timur itu berada pada kelas atas (bobot), kekuasaan itu tidak direbut atau dikuasai oleh mereka yang berasal dari kelas bawah (*ra kinya*), walaupun mereka memiliki banyak kain timur.

Di dalam permainan kain timur, bukan soal jumlah kain timur yang membuat seseorang mempunyai kedudukan atau pengaruh, melainkan kualitas, nilai dari kain yang dimiliki, dan kebanyakan berada dan dimiliki oleh kelas atas (bobot). Kain Timur dapat dibedakan dalam berbagai jenis sesuai nilainya dan peruntukannya dalam berbagai acara adat yang akan dilaksanakan.

Sementara itu, terkait kedudukan, kekuasaan, dan pengaruh melekat dengan strata atau status di dalam kelompok etnis di masyarakat. Kedudukan, kekuasaan, dan pengaruh ada pada kelas atas, *big man*, *bobot*. Kelompok ini memiliki kedudukan, kekuasaan, dan pengaruh yang kuat, dan bertanggung jawab atas keberadaan kelompok etnisnya

Kelompok ini memiliki kain timur yang berkualitas, nilainya tinggi, yang tidak dimiliki oleh kelompok kelas bawah. Politik permainan kain timur di gerakan dan dikendalikan oleh kelompok bobot. Seseorang pada posisi strata bawah tidak mendapat kedudukan, kekuasaan, dan pengaruh, walaupun dia memiliki jumlah kain timur yang banyak.

Seseorang dalam kelompok etnis yang berkedudukan sebagai bobot memang perlu memiliki kain timur dalam jumlah yang banyak, baik jenis maupun nilainya, untuk dapat membantu warga dalam kelompoknya kelas bawah yang menghadapi permasalahan kain timur, misalnya, kain kepala untuk pembayaran maskawin, denda perkara, dan juga dalam hal proses memberi dan membayar kembali pinjaman, yang dalam buku ini disebut pemberi dan penerima.

Otto Ihalauw sebagai Aktor Utama

Menjadikan sosok Otto Ihalauw sebagai aktor utama dalam buku ini, dinilai tepat, karena berdasarkan pengalaman yang luas dan panjang dari yang bersangkutan yang telah memulai kariernya sebagai seorang pamong yang sukses di wilayah Sorsel.

Perjalanan pengalaman yang panjang tersebut membuatnya memahami dengan baik bagaimana tradisi, adat, dan budaya etnis yang mendiami wilayah Sorsel. Salah satunya adalah politik permainan kain timur yang dilakukan oleh etnis Tehit, Maibrat, dan juga Moi.

Pemahaman terhadap tradisi, adat, dan budaya, serta menyadari betapa pentingnya faktor tersebut dalam keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan, maka yang bersangkutan menjadikan tradisi, adat dan budaya ini salah satu sumber daya yang harus dikelola. Hasil dari pengelolaan yang dilakukan tersebut, Otto Ihalauw dapat mengadopsi filosofi politik permainan kain timur untuk diimplementasikan pada politik modern khususnya penggalangan dukungan untuk meraih kekuasaan melalui Pilkada.

Ini bukan hanya konsep yang abstrak, melainkan sesuatu yang bisa dapat dilaksanakan di lapangan. Hal ini terbukti dari keberhasilan Otto Ihalauw dalam mendapat dukungan kuat dari masyarakat dan memenangkan Pilkada Bupati di Sorsel tahun 2010, di tengah euforia orang Papua untuk menjadi tuan di negerinya sendiri, yang menegaskan bahwa bupati haruslah orang asli Sorong Selatan.

Penutup

Filosofi Politik Permainan Kain Timur ialah pola, teknik, dan sistemnya yang mengandung makna positif di dalam penyelenggaraan pemerintahan modern, khususnya dalam menggalang dukungan atau massa dalam meraih kedudukan maupun perebutan kekuasaan. Bukti empirik sebagaimana telah dilakukan oleh Otto Ihalauw dalam menggalang dukungan untuk meraih kekuasaan dalam Pilkada menjadi fakta yang kuat dalam melegitimasi tesis penulisan buku ini.

Investasi yang dilakukan oleh Otto Ihalauw selama menjabat *caretaker* dan juga periode pertama kepemimpinannya adalah

bagian penting lain yang perlu ditelaah dalam kaitannya dengan upaya penggalangan dukungan untuk meraih kekuasaan pada periode berikutnya, tentunya selain implementasi filosofi politik permainan kain timur itu sendiri.

Investasi yang dilakukan aktor utama dengan bekerja dan bertindak secara adil, jujur, dan peduli terhadap masyarakat di kampung, menghargai dan menghormati tradisi dan adat, serta strukturnya (pemimpin informal) menjadi sangat penting. Selain itu, karakter pribadi Otto Ihalauw yang rendah hati, penuh kasih, sikap yang dilandasi rasa takut akan Tuhan, merupakan pemberian yang mahal, dan telah diterima dengan baik oleh masyarakat, maka pada waktunya wajib dapat dikembalikan melalui dukungan suara pada Pilkada. Inilah FILOSOFI POLITIK PERMAINAN KAIN TIMUR, yang telah dipahami dan diadopsi serta diimplementasikan dengan sempurna oleh OTTO IHALAUW. Kiranya bermanfaat. Syalom.

SEPATAH KATA

PUJI syukur Alhamdulillah buku ‘POLITIK *KAIN TIMUR*: Instrumen Meraih Kekuasaan’ bisa diterbitkan. Sejatinya, buku ini dapat dinyatakan sebagai disertasi penulis dalam versi ‘ringkas’. Disertasi dalam bentuk utuh penulis ajukan pada Program Studi Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Kajian dalam disertasi ini membahas perihal upaya seorang aktor meraih kekuasaan melalui mekanisme kontestasi pemilihan kepala daerah atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan Pilkada.

Sulit untuk dimungkiri bahwa kekuasaan merupakan kata yang paling atraktif dalam dunia politik. Upaya memperoleh, mempertahankan, dan memperbesar kekuasaan—dengan cara apa pun upaya itu dilakukan—menjadi bahasan menarik dalam kajian ilmu politik. Kekuasaan seolah dipandang sebagai tujuan untuk diraih karena kekuasaan dinilai akan mendatangkan kepatuhan kepada mereka yang menggenggamnya. Oleh karenanya, kekuasaan dipandang sebagai tujuan dari pertanyaan klasik yang selama ini sering mengemuka, yakni bagaimana seorang aktor bisa memperoleh, mempertahankan, ataupun memperbesar kekuasaan? Namun, pertanyaan itu bisa menghadirkan pertanyaan yang tak kalah penting, yakni bagaimana seorang aktor menggalang dukungan untuk meraih kekuasaan. Tak bisa dimungkiri, kekuasaan yang diperoleh melalui cara kontestasi

pemilihan, untuk memperolehnya diperlukan adanya dukungan massa. Ketiadaan dukungan bisa menghadirkan persoalan terkait dengan legitimasi kekuasaan tersebut.

Mobilisasi dukungan dapat dilakukan melalui beragam instrumen. Partai politik adalah instrumen yang paling sering dimanfaatkan untuk keperluan tersebut. Selain partai politik, terdapat sejumlah instrumen lain yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan mobilisasi dukungan dalam rangka meraih kekuasaan. Kajian ini memfokuskan pada pemanfaatan tradisi yang ada di masyarakat sebagai instrumen mobilisasi dukungan. Adapun alasannya, salah satunya, adalah karena tradisi (paling tidak esensi dari tradisi tersebut) masih relatif kental mewarnai aktivitas kehidupan di tengah masyarakat yang di dalamnya sedikit banyak masih diwarnai adanya pengelompokan berdasarkan etnisitas. Selain itu, alasan lainnya adalah lantaran partai politik di masyarakat tersebut ditengarai tampak belum optimal dalam menjalankan fungsinya, termasuk dalam hal penggalangan massa.

Kajian ini dilakukan di Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat. Pemilihan kepala daerah atau Pilkada yang diselenggarakan pada 2010 merupakan Pilkada kedua di kabupaten ini. Kandidat yang berhasil memenangkan kontestasi Pilkada adalah aktor yang berlatar belakang etnis non-Papua dengan perolehan suara 60,35%. Hasil ini menunjukkan bahwa upaya pemanfaatan etnisitas untuk mobilisasi dukungan dapat dinyatakan tidak lagi menjadi jawaban yang memuaskan. Demikian pula halnya dengan pemanfaatan partai politik sebagai instrumen mobilisasi dukungan yang juga tidak optimal; hal ini karena dalam pandangan masyarakat, partai-partai politik tak ubahnya kelompok-kelompok etnis.

Temuan kajian ini menunjukkan bahwa mobilisasi dukungan ditentukan oleh kemampuan aktor (kandidat) memanfaatkan tradisi pertukaran *kain timur*. Kemampuan aktor (kandidat) dalam memanfaatkan tradisi pertukaran tersebut ditentukan oleh sumber

daya yang dimilikinya. Dalam Pilkada Sorong Selatan pada 2010, aktor (kandidat) yang memenangkan kontestasi pemilihan beretnis non-Papua, berstatus sebagai kandidat petahana, dan memiliki sumber daya normatif, personal, dan keahlian yang berasal dan ada di ranah negara dan ranah masyarakat. Berbekal sumber daya tersebut, aktor (kandidat) memanfaatkan tradisi pertukaran *kain timur* sedemikian rupa untuk menghadirkan mobilisasi dukungan dalam aktivitas pemerintahan dan kemasyarakatan sekaligus aktivitas elektoral (pemilihan).

Berdasarkan pada kajian yang dilakukan, studi ini menyatakan bahwa tradisi yang bisa dimanfaatkan sebagai instrumen untuk menghadirkan dukungan adalah tradisi pertukaran. Tradisi pertukaran, sebagaimana halnya tradisi pertukaran *kain timur*, menghadirkan pola hubungan timbal-balik (*reciprocal*) bercorak *patronage* antara pihak pemberi dengan pihak penerima. Dalam posisinya sebagai *patron*, pihak pemberi menjamin kelangsungan hidup pihak penerima dengan pemberian yang dilakukannya; sementara itu, pihak penerima dalam posisinya sebagai *client* menunjukkan loyalitas atas pemberian yang diterima. Mobilisasi dukungan mengalir sebagai bentuk loyalitas *client* terhadap *patron*.

Selain itu, mobilisasi dukungan juga bisa dijelaskan melalui kekuatan yang terkandung dalam tradisi pertukaran itu sendiri. Hal ini karena tradisi pertukaran berhasil 'saling mengunci' antara pihak pemberi dan pihak penerima. Mekanisme pertukaran ini 'saling mengunci' dengan membebaskan kewajiban bagi pihak penerima untuk melakukan pengembalian sebagai balasan. Mekanisme pertukaran seperti ini akan berlangsung terus-menerus tanpa terputus. Pihak penerima berkewajiban melakukan pemberian balasan, dan pihak yang menerima pemberian balasan berkewajiban melakukan pemberian balik sebagai bentuk pengukuhan; demikian mekanisme pertukaran ini berlangsung tanpa terputus.

Kajian ini dilakukan di Kabupaten Sorong Selatan pada saat penyelenggaraan Pilkada 2010. Oleh karena itu, mekanisme Pilkada yang berlangsung kala itu didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku pada kurun waktu itu.

Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berjasa membimbing dalam menulis disertasi serta mengujinya. Terima kasih tak terhingga kepada Prof. Dr. Tadjuddin Noer Effendi, M.A. dan Prof. Dr. Pratikno, M.Soc. Sc., selaku promotor dan ko-promotor; serta dewan penguji yang diketuai Dekan Fisipol UGM Dr. Erwan Agus Purwanto, dengan dewan penguji Prof. Dr. Purwo Santoso, M.A., Dr. Suharko, M.Si., Dr. Aris Arif Mundayat, M.A., Prof. Dr. Heddy Shri Ahimsa Putra, M.A., dan Prof. Dr. Ngadisah, M.A.

Ucapan terima kasih juga saya tujukan kepada pemberi dana beasiswa melalui skema Nufu dari Pemerintah Norwegia. Terkait dengan itu, ungkapan terima kasih untuk Olle T rnuquist dan Kristian Stokke (keduanya dari Oslo University, Norwegia) serta Uyangoda Jayadeva (dari Colombo University, Sri Lanka). Mereka bertiga memberi masukan berharga untuk penulisan disertasi dalam forum diskusi yang diselenggarakan baik di Yogyakarta, Oslo, maupun Colombo.

Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM Yogyakarta, dalam hal ini para petingginya, terima kasih saya sampaikan atas izin belajar dan dukungan yang diberikan untuk penulisan disertasi. Demikian pula kepada teman-teman di Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, atau yang lebih dikenal dengan JPP, terima kasih atas dorongan, kesempatan, dan bantuannya sehingga saya bisa menyelesaikan ‘tugas’ yang dibebankan Jurusan untuk sekolah lagi. Matur nuwun untuk teman-teman staf pengajar JPP: Pak Josef, Pak Mashuri, Bu Lien, Bu Ratna, Mas Tik, Mas Purwo, Mas Conny, Mas Bambang, Gus Gaffar Karim, Gung Ari, Mada, Linda, Wawan, Nanang, Acong, Bayu, Sigit, Azizah, Hanif, Nova, dan Ayik. Demikian pula terima

kasih untuk staf administrasi JPP: Mbak Nur, Anna, Indah, Ali Minanto, Alwan, Megeng, dan Sayadi. Tak lupa, ucapan terima kasih juga saya layangkan kepada PolGov *Research Centre* JPP yang telah bersedia untuk menerbitkan tulisan ini.

Terima kasih tak terhingga juga saya sampaikan kepada teman-teman yang tergabung dalam komunitas ‘Es-Tiga’ atau ‘Sekolah Senin Sore’ (Mas Conny, Gung Ari, Bu Ratna, dan Bli Ngruh) di mana saya bisa berdiskusi secara intens dengan sesama siswa yang sedang menyelesaikan studi S-3. Khususnya, kepada Mas Cornelis ‘Conny’ Lay, seperti yang sering saya ungkapkan di berbagai forum, Anda-lah orang yang bisa ‘memaksa dan menjebak’ saya untuk sekolah lagi; tanpa Anda, mungkin saya tidak menulis disertasi, dan tentunya buku ini tak akan bisa diterbitkan. Sekali lagi, terima kasih banyak kepada Mas Conny atas ‘paksaan dan jebaknya’.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Drs. Otto Ihalauw, M.A., Bupati Kabupaten Sorong Selatan; Beliau dengan senang hati meluangkan waktu di tengah kesibukannya memimpin Sorong Selatan dengan membuka diri untuk memberi informasi yang berharga bagi penelitian yang saya lakukan. Bahkan, beliau menyambut sangat baik di awal terbit buku ini dengan menyelenggarakan acara bedah buku “Politik Kain Timur” dalam rangka memperingati HUT Sorong Selatan ke-12 dan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-70 di Teminabuan, Sorong Selatan. Acara ini diselenggarakan pada 15 Agustus 2015 dengan menghadirkan para pembahas yang pakar dan memahami tradisi Kain Timur. Para pembahas antara lain: *Pertama*, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya yang pernah menjabat Menteri Lingkungan Hidup pada periode 2011-2014, Rektor Universitas Cenderawasih pada periode 2005-2011, dan juga seorang tokoh Papua sekaligus tokoh nasional yang lahir di Ayamaru, Maybrat. *Kedua*, Dr. Suriel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil. yang menjabat Rektor Universitas Negeri Papua pada periode 2012-2015, seorang tokoh Papua dan berasal dari Biak. *Ketiga*, Dr. Johz R. Mansoben, M.A. yang

merupakan dosen sekaligus antropolog senior dari Universitas Cenderawasih Jayapura. Beliau meluangkan waktu untuk memberi komentar khusus terhadap buku ini. *Keempat*, Pdt. Herman Saud, M.Th. yang merupakan tokoh agama, anggota MRP, Ketua Sinode GKI di Tanah Papua pada masa bakti 1996-2005, dan beliau berasal dari Aifat, Maybrat. *Kelima*, Drs. Thontji Wolas Krenak yang merupakan anggota MRP, wartawan senior di Suara Pembaruan, dan berasal dari Tehit, Sorong Selatan. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih untuk diskusi dan masukannya dari para pembahas sehingga buku ini bisa dicetak lebih baik.

Ungkapan terima kasih tertuju pula kepada Drs. Suroso, M.A., Drs. Yunus Duwith, M.A., Drs. Martinus Salamuk, Drs. Michael Momot, Drs. Pieter Konjol, M.A., Drs. Hengky Gogoba, M.A., dan sejumlah informan lainnya (maaf, tak bisa disebut satu demi satu). Dalam kesempatan ini, saya tak lupa berterima kasih kepada masyarakat Sorong Selatan, terutama yang berasal dari kelompok etnis Maybrat (Ayamaru, Aifat, dan Aitinyo), Tehit, dan Imekko serta kelompok pendatang (khususnya yang tergabung dalam kelompok BBM) atas waktu yang diberikan sehingga penelitian bisa berjalan lancar.

Adalah kepada A. Suidiana Sasmita, seorang anak muda yang energik, terima kasih tak terhingga saya sampaikan di mana dia banyak membantu melakukan penelitian untuk penulisan disertasi. Pengenalan dan pemahaman saya tentang Papua, khususnya Sorong Selatan, banyak sekali atas bantuan Sudi; dia yang menuntun dan mengenalkan saya bertemu dengan para informan yang awalnya sedikit sulit ditemui. Dia sebagai teman, sahabat, adik atau bahkan sebagai anak saya yang bisa dengan intens untuk diajak berdiskusi tentang temuan lapangan selama penelitian berlangsung. Inspirasi tak terduga terkadang datang darinya untuk menghasilkan analisis yang tak diperkirakan sebelumnya. Sekali lagi, terima kasih tak terhingga untuk Suidiana.

Kepada keluarga, tak lupa saya ucapkan terima kasih. Keluarga yang merelakan waktu yang menjadi semakin sempit untuk bercengkerama bersama. Kepada Endang, dan kedua anak saya Mita (Almarhum) dan Viki, serta si kecil Nayla, terima kasih banyak atas pengorbanan waktu yang diberikan dan atas dorongannya. Semoga kita bisa berkumpul dalam intensitas yang lebih sering.

Akhir kata, saya membuka masukan baik berupa saran atau kritik bagi kajian yang tertuang dalam tulisan ini. Masukan akan sangat berharga untuk perbaikan kajian sejenis di masa mendatang.

Bulaksumur, Agustus 2015

Daftar Isi

SEPATAH KATA — v

DAFTAR ISI — xix

DAFTAR TABEL — xx

DAFTAR GAMBAR — xxi

I. TRADISI SEBAGAI INSTRUMEN MERAIH KEKUASAAN — 1

Kekuasaan dan Mobilisasi Dukungan — 8

1. Kekuasaan dan Cara Perolehannya — 8

2. Mobilisasi Dukungan dan Sumber Daya — 11

3. Sumber Daya, Tradisi, dan Mobilisasi Dukungan — 17

II. MASYARAKAT SORONG SELATAN — 25

Sorong Selatan: Kabupaten Pemekaran di Wilayah ‘Kepala
Burung’ — 25

Kelompok-kelompok Etnis di Sorong Selatan — 28

1. Kelompok-kelompok Etnis Papua — 33

2. Kelompok Etnis Pendatang — 38

3. Interaksi Kelompok Etnis — 39

Corak Hubungan Patronage dalam Bingkai Kesetiaan Primordial
— 41

‘Kami’ dan ‘Mereka’ dalam Masyarakat — 46

III. MASYARAKAT SORONG SELATAN DAN TRADISI PERTUKARAN KAIN TIMUR — 53

Sekilas Tradisi Masyarakat Sorong Selatan — 53

Esensi Tradisi Pertukaran Kain Timur — 53

1. Mengenal “Kain Timur” — 59
2. ‘Kompleks Kain Timur’ — 63
3. Tradisi Pertukaran Kain Timur, Kepemimpinan Pria Berwibawa, dan Meramu — 69

IV. OTTO IHALAUW: AKTOR NON-PAPUA DALAM PILKADA 2010 — 77

Otto Ihalauw: Seorang Birokrat Non-Papua yang menjadi Bupati — 78

1. Latar Belakang Keluarga — 78
2. Perjalanan Karier di Jajaran Birokrasi — 80
3. Perjalanan Karier di Pentas Politik — 83

Otto Ihalauw di Tengah Kelompok-kelompok Etnis — 89

1. Pengangkatan sebagai Anak Adat Suku Tehit — 89
2. Pemahaman Otto Ihalauw terhadap Masyarakat — 91
 - a. Pemahaman tentang Karakter Masyarakat — 91
 - b. Pemahaman tentang Tradisi — 94
 - c. Persepsi Masyarakat terhadap Otto Ihalauw — 99

Otto Ihalauw dan Sumber Daya — 103

Tipe Sumber Daya — 103

1. Sumber Daya Normatif — 103
2. Sumber Daya Personal — 108
3. Sumber Daya Keahlian — 110

Asal-usul Sumber Daya — 111

1. Sumber Daya Negara — 111
2. Sumber Daya Masyarakat — 116

V. PARTAI POLITIK DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM BINGKAI POLITIK ETNISITAS DAN POLITIK KAIN TIMUR — 123

Keberadaan Partai-partai Politik — 123

Partai Politik di tengah Sikap ‘Kami’ dan ‘Mereka’ — 130

Partai Politik dalam Irama Tradisi Pertukaran Kain Timur — 135
Pilkada 2010: Kemenangan Otto Ihalauw — 140

**VI. TRADISI PERTUKARAN KAIN TIMUR DAN
MOBILISASI DUKUNGAN — 145**

**Politik Kain Timur: Mobilisasi dalam Aktivitas Pemerintahan dan
Kemasyarakatan — 145**

1. Mobilisasi Dukungan di Ranah Birokrasi — 146
2. Mobilisasi Dukungan di Ranah Politik — 157
3. Mobilisasi Dukungan di Ranah Kemasyarakatan — 160

**Politik Kain Timur: Mobilisasi Dukungan dalam Aktivitas
Elektoral — 171**

1. Mobilisasi Dukungan dalam Tahap Pencalonan — 171
2. Mobilisasi Dukungan dan Pembentukan Tim Sukses — 179
3. Mobilisasi Dukungan dalam Tahap Kampanye — 183
4. Mobilisasi Dukungan untuk Mengawal Hari Pemilihan /
Penghitungan Suara — 191

**VII. TRADISI, MOBILISASI, DAN KEKUASAAN: SEBUAH
REFLEKSI — 199**

Tradisi dan Mobilisasi Dukungan untuk Meraih Kekuasaan — 199

Catatan Penutup — 208

Agenda ke Depan — 214

DAFTAR PUSTAKA — 217

INDEKS — 225

TENTANG PENULIS — 228

Daftar Tabel

Tabel 2-1	Distrik di Kabupaten Sorong Selatan — 27
Tabel 2-2	Sebaran Kelompok Etnis — 47
Tabel 5-1	Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik pada Pemilihan Legislatif 2009 — 124
Tabel 5-2	Asal Etnis Anggota DPRD 2009-2014 dan Distrik Penyumbang Suara — 133
Tabel 5-3	Pasangan Calon Bupati/ Wakil Bupati Peserta Pilkada Sorong Selatan, 2010 — 141
Tabel 6-1	Latar Belakang Etnisitas Pejabat Eselon II — 149
Tabel 6-2	Latar Belakang Etnisitas Kepala Distrik — 150

Daftar Gambar

- Gambar 1 1. Mobilisasi Dukungan Kandidat — 22
- Gambar 3 1 Hubungan siberetik antara Religi, Ekonomi dan Politik — 68
- Gambar 7 1 Hubungan Langsung — 204
- Gambar 7 2 Hubungan Tidak Langsung — 204
- Gambar 7 3 Kombinasi hubungan langsung dan tidak langsung — 204

I

Tradisi sebagai Instrumen Meraih Kekuasaan

PADA UMUMNYA, kekuasaan dipandang sebagai jawaban dari pertanyaan klasik yang dikemukakan, yakni mengenai bagaimana seseorang berusaha untuk memperoleh, mempertahankan, dan memperbesar kekuasaan. Namun, pertanyaan klasik ini bisa pula menghadirkan suatu pertanyaan yang tak kalah penting, yakni mengenai bagaimana seseorang melakukan upaya mobilisasi dukungan untuk meraih kekuasaan. Tidak bisa dimungkiri bahwa pada umumnya dukungan massa diperlukan untuk meraih kekuasaan. Tanpa dukungan semacam itu, umumnya hadir persoalan terkait legitimasi dari kekuasaan yang diperolehnya.

Dalam upaya meraih kekuasaan, seorang aktor bisa melakukan mobilisasi dukungan melalui berbagai ragam instrumen. Partai politik menjadi salah satu instrumen yang sering dimanfaatkan untuk melakukan mobilisasi dukungan. Selain partai politik, terdapat sejumlah instrumen lain yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan mobilisasi dukungan dalam rangka meraih kekuasaan. Kajian dalam buku ini akan membahas salah satu metode mobilisasi dukungan yang memanfaatkan keberadaan dan keberlangsungan tradisi di masyarakat.

Pemanfaatan suatu tradisi di masyarakat adalah salah satu instrumen untuk meraih kekuasaan, salah satunya, adalah karena tradisi masih relatif kental mewarnai aktivitas di tengah masyarakat lantaran adanya pengelompokan berdasarkan etnisitas. Terkait dengan hal itu, kajian dalam tulisan ini berfokus pada bagaimana

seorang aktor memanfaatkan tradisi sebagai instrumen untuk melakukan mobilisasi dukungan demi meraih kekuasaan melalui mekanisme pemilihan yang berlangsung di tengah masyarakat, dalam hal ini melalui mekanisme Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada).

Sehubungan dengan hal itu, kajian ini terkategori sebagai studi mobilisasi politik, yakni upaya aktor melakukan penggalangan atau mobilisasi dukungan dari massa untuk meraih kekuasaan. Umumnya, dalam rangka memobilisasi dukungan, seorang aktor bisa memanfaatkan berbagai instrumen dan cara demi meraih kekuasaan.

Studi mobilisasi, terutama yang memanfaatkan tradisi dalam masyarakat, juga terkait erat dengan studi politik identitas. Bahkan, karenanya, studi mobilisasi kerap disamakan sebagai studi politik identitas. Padahal, adanya jebakan dari penyamaan ini sangat jelas, yakni identitas (khususnya yang berupa etnisitas) cenderung dijadikan satu-satunya jawaban terhadap mobilisasi dukungan yang dilakukan aktor untuk meraih kekuasaan. Hal ini seakan-akan menutup penjelasan yang berbeda terhadap fenomena mobilisasi dukungan meraih kekuasaan melalui Pilkada dalam masyarakat berbasis etnisitas.

Dalam kajian politik Indonesia kontemporer, khususnya yang dilakukan di ranah lokal, studi mobilisasi yang dikaitkan dengan studi politik identitas antara lain telah dilakukan oleh Andrianto (2001), Sugiono (2001), Syarkawi (2007), dan Ramandey (2008). Studi tersebut mengkaitkan upaya mobilisasi sebagai proses identifikasi dan pendefinisian pada identitas tertentu, seperti etnis dan agama. Beberapa tahun terakhir, kajian politik Indonesia yang bercorak studi politik identitas merupakan penjelas atas fenomena politik pasca-Orde Baru. Kajian-kajian tersebut mencantumkan pula penelitian-penelitian terkait upaya meraih kekuasaan dalam kontestasi pemilihan umum. Dengan kata lain, kajian-kajian tersebut menekankan bahwa seorang aktor dapat memperoleh kekuasaan lantaran berhasil memanfaatkan politik identitas.

Namun demikian, kajian dalam tulisan ini tidak mengaitkan mobilisasi dengan politik identitas; sebagaimana disinggung di atas, kajian ini memfokuskan pada pemanfaatan tradisi oleh seorang aktor demi meraih kekuasaan di dalam mekanisme pemilihan umum—di mana buku ini berfokus pada kasus Pilkada. Kajian ini juga membahas pendayagunaan sumber daya (*resources*) seorang aktor dalam konteks pemanfaatan tradisi di tengah masyarakat yang masih terkait dengan etnisitas.

Kajian dalam tulisan ini dilakukan di ranah lokal, yakni di Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat. Kabupaten Sorong Selatan menjadi lokus kajian didasarkan atas pertimbangan bahwa tradisi masih lekat mewarnai aktivitas masyarakat. Pertimbangan lain, pada masyarakat di kabupaten ini masih terasa kehadiran identitas kelompok, dalam hal ini kehadiran etnisitas. Selain dua pertimbangan tersebut, serangkaian argumen lain juga mendasari pemilihan kajian pada politik lokal, khususnya di Kabupaten Sorong Selatan.

Argumen pertama mengacu pada makin pentingnya arena politik lokal dalam memahami politik Indonesia kontemporer. Tumbangnya rezim Orde Baru pada 1998 telah menghadirkan sistem politik demokratis yang salah satu indikasinya adalah terbukanya peluang bagi partisipasi warga dalam ruang politik. Sistem politik sentralistik Orde Baru—yang ditandai kuatnya kontrol pemerintah pusat (Gaffar, 1999)¹—yang telah runtuh kemudian digantikan oleh pemerintahan yang terdesentralisasi

1 Kondisi politik era Orde Baru dilukiskan oleh Gaffar (1999: 150-152) dengan besarnya kekuasaan Pemerintah Pusat, yang salah satunya ditandai oleh kekuatan dan dominasi Kantor Kepresidenan. Kondisi ini menjadikan segala urusan penyelenggaraan pemerintahan sangat tergantung pada pemerintah pusat. Dilukiskan pula oleh Uhlin (1997: 41-62) bahwa kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal didominasi oleh pemerintah pusat yang salah satunya tampak pada proses pemilihan pemimpin lokal. Terkait dengan pemilihan pemimpin lokal di era Orde Baru, Malley (2001: 149-153) memberi ilustrasi dengan memaparkan kasus pemilihan Gubernur KDH Tk. I Provinsi Riau yang menunjukkan betapa besar kewenangan Pemerintah Pusat. Gubernur yang diangkat adalah calon yang memperoleh jumlah suara pada urutan kedua, dan calon yang memperoleh jumlah suara terbanyak dalam pemilihan yang dilakukan DPRD Provinsi Riau justru tidak diangkat.

yang terwujud di daerah-daerah. Hal ini antara lain ditandai dengan ditetapkannya sistem pemerintahan dengan basis otonomi daerah.

Jika pada era Orde Baru kehadiran para pemimpin lokal ditentukan Pemerintah Pusat (Sidel, 2005: 85-99) dan mereka cenderung memainkan peran sebagai perpanjangan tangan negara serta melakukan kooptasi terhadap masyarakat (Antlov, 1994),² maka keruntuhan rezim Orde Baru menjadikan rekrutmen dan peran para pemimpin lokal lebih ditentukan oleh masyarakat dan pemerintah lokal.³ Implementasi otonomi daerah kemudian menjadikan aktor politik di daerah lebih *immune* terhadap intervensi pusat (Baswedan, dalam Nordholt dan van Klinken, 2007: ix-xii). Kajian dinamika politik lokal dalam satu dekade terakhir ini dijelaskan melalui studi antara lain Eindhoven(2007),⁴

2 Peran pemimpin lokal pada era Orde Baru dilukiskan oleh Antlov (1994:73) sebagai layaknya ‘pegawai’ pemerintah pusat. Sehubungan dengan hal itu, dinyatakan bahwa “*The commitment and tasks of leaders have changed, from being oriented to the wants and needs of the local population, to managing the priorities of the New Order. In this way, leaders have become officials.*”

3 Rekrutmen pemimpin lokal dilakukan melalui mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung (selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan Pilkada). Sampai saat ini, format Pilkada sebagai mekanisme pemilihan terus mengalai penyempurnaan.

Dalam rangka penyempurnaan Pilkada, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 sebagai payung hukum mengalami perubahan, dan perubahan untuk kali kedua diterapkan melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2008. Penyempurnaan juga dilakukan terkait dengan pihak penyelenggara Pilkada; dan untuk itu dikeluarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

Upaya penyempurnaan format Pilkada menunjukkan bahwa demokratisasi politik melalui mekanisme Pilkada masih berada pada tahap transisi sekaligus konsolidasi. Hal ini paralel dengan kajian yang dilakukan Mietzner dan Aspinall (2010:1-20) yang menyatakan bahwa demokratisasi di Indonesia berada pada tahap transisi dalam rangka konsolidasi ke arah corak demokrasi yang mapan.

4 Dalam studinya di Mentawai, Eindhoven (2007) mengkaji persaingan elite dalam memperebutkan kekuasaan. Dikarenakan keterbatasan infrastruktur partai politik, para elite bersaing dengan memanfaatkan politik identitas, dalam hal ini etnisitas, sebagai instrumen untuk membangun kolusi dengan birokrasi dalam rangka meraih kekuasaan.

Aragon (2007),⁵ Tanasaldy (2007),⁶ van Klinken (2007),⁷ dan Subianto (2009).⁸

Argumen berikutnya mengacu pada pentingnya memahami etnisitas dalam kajian politik kontemporer di ranah lokal. Fenomena etnisitas ini begitu mengemuka di ranah lokal terutama setelah runtuhnya Orde Baru. Hal ini berbeda ketika rezim Orde Baru berkuasa, identitas seperti etnis, agama, ras, dan kelas/golongan (perkara SARA) secara politis merupakan wilayah terlarang, dan menyiratkan bahwa segala macam wacana publik menyangkut topik-topik ini diawasi pemerintah (Nordholt dan van Klinken, 2007: 31). Setelah Orde Baru runtuh, pewacanaan isu SARA yang semula dibatasi menjadi topik hangat dalam kajian politik Indonesia.

Fenomena etnisitas di Papua adalah juga salah satu daerah yang menarik untuk dikaji. Dasar pertimbangan yang terpenting adalah karena indikasi adanya gerakan separatis berbasis etnisitas di tengah masyarakat setempat untuk memisahkan diri dari NKRI.⁹ Kajian politik identitas yang menunjukkan adanya upaya pemisahan Papua dari NKRI tersebut dilakukan antara lain oleh Pigay (2000), Osborne (2001), Karoba (2005), Hadi (2007),¹⁰ dan Wonda (2007). Selain itu, politik identitas juga memunculkan adanya wacana Papuanisasi bagi Papua, di mana hal

5 Studi yang dilakukan Aragon (2007) di Poso, Sulawesi Tengah, terkait dengan pemanfaatan politik identitas, yakni agama dan etnisitas, oleh para elite untuk memperkuat daya tawar dalam rangka memperebutkan kekuasaan.

6 Kajian yang dilakukan Tanasaldy (2007) di Kalimantan Barat menunjukkan bahwa politik identitas, dalam hal ini etnisitas, melalui *power-sharing* berhasil meredakan kekerasan di antara kelompok etnis berbeda.

7 Melalui kajian dalam *Perang Kota Kecil*, van Klinken (2007) menyatakan bahwa politik identitas yang menghangat pada era pasca-Orde Baru menghadirkan kekerasan berupa konflik di beberapa kota di Indonesia. Dalam salah satu bab buku tersebut, dilukiskan proses pembentukan identitas; dan warna identitas tersebut menjadi menonjol dalam bahasan bab-bab berikutnya yang menganalisis konflik antarkelompok.

8 Subianto melakukan kajian tentang politik etnis dan munculnya para birokrat etnis Dayak dalam pemilihan kepala daerah di enam kabupaten Provinsi Kalimantan Barat.

9 Gerakan memisahkan diri dari NKRI dilakukan melalui Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang mengupayakan Papua menjadi negara merdeka yang berdiri sendiri.

10 Khususnya Bab IV yang berjudul 'Papua: Antara Separatisme dan Otonomi Khusus'.

ini menunjukkan menguatnya polarisasi orang asli Papua dengan orang non-Papua. Kajian tentang munculnya wacana Papuanisasi antara lain disinyalir melalui studi oleh Timmer (2007: 608-613) dan Widjojo (2009: 55-63).

Indikasi lain terkait menonjolnya politik identitas di Papua adalah diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.¹¹ Pasal-pasal dari Undang-Undang tersebut yang terkait dengan politik identitas adalah pasal yang mengatur tentang Majelis Rakyat Papua (MRP)¹² dan pasal yang mengatur jabatan Gubernur/Wakil Gubernur.¹³ Kendati demikian, politik identitas tidak hanya menghadirkan persaingan dalam memperebutkan kekuasaan melalui mekanisme Pilkada, yakni antara kandidat asli Papua dengan kandidat pendatang, atau kandidat non-Papua, tetapi memunculkan pula persaingan internal di antara sesama orang asli Papua. Persaingan ini cenderung berbasis pada kelompok etnis yang berdiam di wilayah pantai dengan kelompok etnis yang ada di wilayah pedalaman (Meitzner, 2009: 259-282).

Di ranah kabupaten/kota, Undang-Undang Otonomi Khusus tidak memberlakukan syarat bahwa hanya orang asli Papua yang diperuntukkan bagi jabatan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. Hal ini karena dalam undang-undang tersebut tidak menyebutkan keharusan agar pemilihan Bupati/Walikota untuk mengutamakan orang asli Papua. Namun, rekomendasi Majelis Rakyat Papua (MRP) di tahun 2010 mendorong adanya keharusan untuk mengutamakan orang asli Papua dalam menduduki jabatan Bupati/Walikota. Hampir semua Bupati/

11 Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 juga berlaku bagi Provinsi Papua Barat.

12 Majelis Rakyat Papua (MRP) adalah representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.

13 Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur harus diisi oleh orang asli Papua. Adapun yang dimaksudkan dengan orang asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.

Walikota yang dipilih di Provinsi Papua dan Papua Barat adalah orang asli Papua.

Akan tetapi, di Kabupaten Sorong Selatan, yakni pada Pilkada yang diselenggarakan di tahun 2010, terdapat fenomena berbeda. Kandidat yang berasal dari etnis non-Papua memenangkan kontestasi dengan perolehan suara sebesar 60,35 %.¹⁴ Dalam rangka memobilisasi dukungan, upaya pemanfaatan etnisitas tidak terlampaui memuaskan karena kandidat tersebut berasal dari etnis non-Papua (pendatang). Demikian pula halnya dengan pemanfaatan partai politik untuk dijadikan instrumen mobilisasi dukungan, upaya terkait hal tersebut tidak memberikan hasil optimal; hal ini karena dalam pandangan masyarakat partai politik tak ubahnya kelompok-kelompok etnis (atau kelompok-kelompok marga).¹⁵

Kehidupan masyarakat Sorong Selatan yang berbasis pada etnisitas tak bisa lepas dari tradisi. Salah satu tradisi yang esensinya masih dijadikan rujukan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari adalah tradisi pertukaran *Kain Timur*.¹⁶ Terkait dengan mobilisasi dukungan, isu etnisitas dan partai politik tak bisa memberi jawaban memuaskan untuk menghadirkan dukungan sehingga tradisi yang ada menjadi fenomena menarik untuk menghadirkan mobilisasi

14 KPU Kabupaten Sorong Selatan, 2010. Sebagai kandidat non-Papua, Otto Ihalauw berpasangan dengan Samsuddin Anggiluli; perolehan suara sebesar 60,35 % untuk pasangan ini menjadikan Pilkada 2010 yang diikuti lima pasang calon berlangsung hanya dalam satu putaran.

15 Bagi masyarakat Sorong Selatan, suatu partai politik dipandang sebagai 'wakil' dari kelompok etnis (atau kelompok marga) tertentu karena mayoritas dari anggotanya berasal dari kelompok tersebut. Dengan demikian, apabila partai politik dijadikan instrumen dalam mobilisasi dukungan, hasil cenderung tidak begitu memuaskan terlebih lagi bagi aktor beretnis non-Papua. (Wawancara dengan beberapa informan dilakukan secara terpisah, dengan Suroso dan Yunus Duwit pada 15 Juli 2010, Ahmad Samsuddin pada 18 Juli 2010, dan Michael Momot pada 19 Juli 2010, di Teminabuan, Sorong Selatan).

16 Dalam wawancara dengan Michael Momot (Ketua Dewan Anak Suku Tehit) pada 19 Juli 2010 di Teminabuan, Sorong Selatan, ia menyatakan bahwa esensi dari tradisi pertukaran Kain Timur adalah kewajiban dalam melakukan pengembalian balasan bagi setiap orang yang menerima pemberian. Esensi dari tradisi ini masih dijadikan rujukan di masyarakat, dan mayoritas anggota masyarakat akan berupaya melakukan pemberian balasan sebagai bentuk pengembalian atas sesuatu yang pernah diterimanya.

dukungan. Fenomena ini menghadirkan pertanyaan mengenai bagaimana aktor memanfaatkan tradisi pertukaran *Kain Timur* sebagai instrumen mobilisasi dukungan untuk meraih kekuasaan.

Berdasarkan uraian di atas, kajian mobilisasi dukungan dalam tulisan ini lebih difokuskan pada upaya aktor non-Papua (Ambon) dalam rangka memperoleh kekuasaan melalui mekanisme Pilkada yang berlangsung pada 2010. Aktor memanfaatkan tradisi yang melekat di masyarakat, yakni pertukaran *Kain Timur* untuk meraih kekuasaan.

Kekuasaan dan Mobilisasi Dukungan

Sebagaimana diungkap di atas, fokus kajian ini adalah pada upaya yang dilakukan seorang aktor demi memperoleh kekuasaan melalui mekanisme Pilkada. Terkait hal itu, diperlukan seperangkat konsep tentang kekuasaan dan mobilisasi dukungan. Kajian konsep diawali dengan bahasan tentang kekuasaan dan cara perolehannya, dilanjutkan bahasan mobilisasi dukungan dan sumber daya, dan diakhiri dengan bahasan sumber daya, tradisi, dan mobilisasi dukungan.

1. Kekuasaan dan Cara Perolehannya

Konsep kekuasaan, sebagaimana diungkapkan Laswell dan Kaplan (Budiardjo, 1984:9) dapat dinyatakan sebagai kemampuan seseorang untuk memengaruhi tingkah laku orang lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku orang yang disebut berakhir sesuai dengan keinginan dari orang yang berkuasa tersebut. Sementara itu, konsep kekuasaan yang dikemukakan para penulis lain menunjukkan pengertian yang relatif sama dengan pendapat Laswell dan Kaplan. Walaupun berbeda, perbedaan terletak pada penekanannya.¹⁷ Dalam pengertian yang lebih

17 Pendapat yang dikemukakan Dahl (1978: 29) mengaitkan kekuasaan dengan perilaku memengaruhi orang atau pihak lain. Dinyatakannya A memiliki kekuasaan atas B, apabila A dapat memengaruhi B untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak dikehendaki B. Pengertian ini mengandung makna bahwa apabila A memengaruhi B untuk melakukan hal yang sesuai dengan kehendak B, maka hal tersebut tidak dapat

sempit, kekuasaan dinyatakan oleh Surbakti (1992: 58) sebagai kemampuan memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik sehingga keputusan itu menguntungkan dirinya, kelompoknya, ataupun masyarakat pada umumnya.

Pembahasan mengenai kekuasaan tak bisa terlepas dari bahasan mengenai kewenangan (*authority*) dan legitimasi. Kewenangan pada hakikatnya merupakan kekuasaan, tetapi kekuasaan tidak selalu berupa kewenangan. Kekuasaan dan kewenangan dibedakan dalam keabsahannya. Kewenangan adalah kekuasaan yang memiliki keabsahan, sedangkan kekuasaan tidak selalu memiliki keabsahan (Surbakti, 1992: 85). Apabila kekuasaan dimaknai sebagai kemampuan memengaruhi atau memerintah, dan kewenangan dimaknai terkait ada atau tidaknya hak untuk berkuasa, maka legitimasi lebih berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap kewenangan yang ada. Legitimasi merujuk pada kesediaan masyarakat untuk menerima dan mengakui ataupun tidak menerima dan tidak mengakui hak seseorang yang memiliki wewenang untuk membuat dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat seluruh anggota masyarakat. Oleh karenanya, dapat dinyatakan bahwa legitimasi adalah penerimaan atau pengakuan masyarakat terhadap hak seseorang atau sekelompok orang untuk memerintah serta membuat dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat seluruh anggota masyarakat.

Dalam kaitannya dengan jabatan bupati yang diperebutkan melalui mekanisme Pilkada, dapat dinyatakan bahwa posisi jabatan bupati dilekati kewenangan. Adapun artinya, jabatan bupati dilekati dengan kekuasaan yang memiliki keabsahan. Hal ini karena

dikategorikan sebagai kekuasaan. Pendapat yang dikemukakan Mochtar Mas'od dan Nasikun (1987: 22) menyatakan bahwa kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi pikiran atau tingkah laku orang atau sekelompok orang lain sehingga orang yang dipengaruhi itu bersedia melakukan sesuatu yang sebetulnya enggan dilakukannya. Sementara itu, Andrain (1992: 130) berpendapat bahwa kekuasaan dapat didefinisikan sebagai penggunaan sejumlah besar sumber daya untuk memperoleh kepatuhan dari orang lain. Kekuasaan pada dasarnya dianggap sebagai hubungan, karena pemegang kekuasaan menjalankan kontrol atas sejumlah orang lain.

jabatan bupati diperoleh melalui Pilkada yang mekanismenya diakui keabsahannya berdasarkan peraturan formal yang berlaku. Apabila hal ini dikaitkan dengan legitimasi, kewenangan yang melekat pada jabatan bupati dinyatakan terlegitimasi (*legitimate*) karena ada penerimaan dan pengakuan dari masyarakat terhadap kewenangan itu. Penerimaan dan pengakuan dari masyarakat atas kewenangan bupati dimanifestasikan dalam bentuk pemilihan yang dilakukan anggota masyarakat dalam Pilkada.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa jabatan bupati merupakan posisi atau kedudukan yang dilekati kekuasaan. Dengan pernyataan lain, dapat dinyatakan bahwa jabatan bupati merupakan salah satu sumber kekuasaan.¹⁸ Sehubungan dengan itu, hal yang perlu dibahas adalah bagaimana cara memperoleh atau meraih kedudukan yang terlekati kekuasaan. Suatu kedudukan atau posisi bisa diperoleh melalui berbagai macam cara.¹⁹ Salah satu di antaranya adalah melalui dukungan anggota masyarakat. Orang yang dipilih dan memperoleh dukungan terbanyak dari anggota masyarakat dalam mekanisme pemilihan ditetapkan sebagai orang yang berhak untuk memperoleh kedudukan atau posisi jabatan yang diperebutkan. Pada umumnya, cara memperoleh dukungan ini dapat ditemukan di masyarakat yang menganut paham demokrasi.

Selain melalui dukungan dari anggota masyarakat, kedudukan atau posisi yang terlekati kekuasaan juga dapat diperoleh melalui cara pewarisan. Cara ini menunjukkan bahwa kedudukan atau jabatan yang dipegang seseorang diperoleh melalui pemberian dari pemegang kedudukan sebelumnya. Pewarisan kedudukan mengandung arti bahwa pihak yang memperoleh warisan secara otomatis juga memperoleh kekuasaan yang melekat pada kedudukan tersebut. Pada umumnya, cara pewarisan kedudukan

18 Terkait dengan sumber-sumber kekuasaan, Budiardjo (1984: 13) menyatakan ada tiga sumber kekuasaan, yakni kedudukan, kekayaan, dan kepercayaan.

19 Paling tidak tiga cara untuk memperoleh atau meraih kedudukan yang dilekati kekuasaan, yakni cara dukungan, pewarisan, dan pembelian (Budiardjo, 1994: 13).

berlangsung di masyarakat yang memiliki adat istiadat. Mereka menyepakati bahwa kedudukan tersebut dapat diberikan dengan cara pewarisan.

Kedudukan dapat pula diperoleh melalui cara pembelian. Berbeda dengan perolehan kedudukan melalui dukungan anggota masyarakat ataupun cara pewarisan, cara memperoleh kedudukan melalui pembelian menunjukkan bahwa untuk dapat memegang kedudukan atau posisi jabatan tertentu, seseorang bisa membeli atau menukar dengan harga yang setimpal dengan kedudukan atau posisi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan yang melekat pada kedudukan dapat dibeli atau dipertukarkan sesuai dengan harga yang disepakati bersama. Cara pembelian kedudukan ini bisa berlangsung di semua corak masyarakat. Mulai dari masyarakat tradisional hingga masyarakat modern atau masyarakat bercorak demokratis hingga masyarakat bercorak non-demokratis.

Dengan diterapkannya sistem politik yang bercorak demokratis, posisi jabatan bupati di Indonesia diperebutkan melalui mekanisme pemilihan yang diikuti sejumlah aktor sebagai kandidat. Mekanisme pemilihan, yang dikenal dengan Pilkada, menghasilkan seorang aktor sebagai pemenang yang berhak menduduki posisi jabatan bupati dan memperoleh kekuasaan yang melekat pada jabatan tersebut. Untuk memenangkan kontestasi Pilkada, seorang aktor harus memperoleh jumlah suara pemilih paling banyak; untuk keperluan itu, yang bersangkutan harus mampu memobilisasi dukungan massa sebanyak mungkin. Untuk memperoleh kekuasaan, seorang aktor harus mampu melakukan mobilisasi dukungan agar memenangkan kontestasi Pilkada.

2. Mobilisasi Dukungan dan Sumber Daya

Dalam kajian ini, sebagaimana sekilas diungkap di awal tulisan ini, mobilisasi berkaitan erat dengan aksi kolektif, yakni pengerahan massa untuk mencapai tujuan bersama (Wilson, 1973; Davis, *et. al.*, 2005). Kendati mobilisasi yang dilakukan seorang aktor sebagai

tindakan kolektif, hal tersebut tidak menutup kemungkinan mobilisasi tersebut dimanfaatkan untuk mewujudkan kepentingan sang aktor. Aktor memanfaatkan tindakan kolektif (salah satunya dengan mobilisasi massa) untuk meraih kekuasaan/posisi jabatan tertentu, dalam hal ini jabatan sebagai bupati.

Salah satu faktor sebagai penjelas bagi hadirnya mobilisasi adalah adanya sumber daya (*resources*).²⁰ Oleh karenanya, seorang aktor membutuhkan sumber daya untuk menjadikan massa yang mulanya tidak bertindak (tidak melakukan dukungan) untuk kemudian menjadi bersedia bertindak (melakukan dukungan) sehingga pada gilirannya massa mengambil peran pada proses politik tertentu. Sumber daya atau *resources* merupakan segala hal yang memiliki potensi untuk digunakan meraih tujuan.²¹ Andrain (1992: 132-135) menyatakan bahwa paling tidak terdapat lima tipe sumber daya yang dapat digunakan aktor untuk mobilisasi dukungan, yakni: sumberdaya fisik, ekonomi, normatif, personal, dan ahli (informasi).²²

20 Sebagaimana halnya dengan gerakan sosial, mobilisasi sebagai aksi kolektif dapat dijelaskan atau dianalisis melalui faktor-faktor kesempatan politik, mobilisasi sumber daya, dan proses pembingkaihan (McAdam, McCarthy dan Zald, ed., 1996).

21 Perihal ragam sumber daya, kesepakatan belum tercapai terkait dengan jenis atau ragamnya. Budiardjo (1984: 13) menyebutnya sebagai sumber kekuasaan yang terdiri dari kedudukan, kekayaan, dan kepercayaan. Sebagaimana dikutip Muhtadi (2012: 118-119); Tilly (1978) menekankan jejaring informal dan formal sebagai sumber daya; Klandermans (1997) menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan sumber daya yang dapat menghadirkan tindakan kolektif; Maguire (1995) membedakan sumber daya menjadi yang *tangible* dan yang *intangible*; Oberschall (1973) dan McCarthy & Zald (1987) mengidentifikasi jenis sumber daya seperti dana, jaringan komunikasi, komitmen moral, kepercayaan, dan legitimasi.

Sementara itu, sumber daya yang dibutuhkan aktor bisa dinyatakan sebagai modal baginya untuk melakukan mobilisasi dukungan. Oleh karenanya, dalam pemaknaannya sebagai modal, sumber daya dapat tampil dalam bentuk modal sosial, modal kultural, modal ekonomi, dan modal simbolik (Bourdieu, 1986).

Tanpa mengcilkan pendapat di atas tentang sumber daya, dalam studi ini, jenis atau ragam sumber daya mengacu pada pendapat Andrain (1992) yang meliputi sumber daya fisik, ekonomi, normatif, personal, dan keahlian (informasi). Adapun dasar pertimbangan studi ini mengacu pada jenis atau ragam sumber daya tersebut karena pendapat Andrain dipandang relatif komprehensif.

22 Bahasan tipe sumber daya didasarkan pada pendapat Andrain (1992: 132-135) dan sumber-sumber lain yang disebutkan. Ulasan pendapat Andrain dapat pula dilihat pada Haryanto (2005: 46-48)

Tipe sumber daya fisik dikaitkan dengan kekuatan fisik, seperti kepemilikan atas senjata. Kekuatan fisik yang dimiliki seorang aktor merupakan potensi untuk memperoleh kepatuhan dari massa. Kepatuhan tersebut hadir karena massa menghindari cedera fisik yang disebabkan sumber daya fisik yang dimiliki sang aktor. Aktor dengan kekuatan fisik yang dimilikinya bisa memaksa hadirnya kepatuhan dari massa. Semakin besar kekuatan fisik yang dimiliki seorang aktor mengartikan bahwa yang bersangkutan memiliki sumber daya yang semakin besar, dan hal tersebut merupakan potensi baginya untuk semakin mudah memperoleh kepatuhan massa untuk dimobilisir.

Tipe sumber daya ekonomi dapat berwujud seperti kekayaan, pendapatan, hak milik, ataupun kontrol atas barang dan jasa. Aktor yang memiliki sumber daya jenis ini dapat memanfaatkannya dengan cara memberi imbalan material untuk memperoleh kepatuhan massa. Apabila imbalan materi tersebut sangat dibutuhkan pihak yang menerima, maka kepatuhan yang diberikan penerima imbalan juga menjadi semakin besar; demikian pula sebaliknya. Pada umumnya, imbalan materi dapat berwujud sesuatu hal yang sulit atau bahkan tidak mungkin dapat dipenuhi sendiri oleh pihak yang diberi imbalan. Massa yang memperoleh pemberian akan mematuhi keinginan aktor yang diwujudkan dalam bentuk kesediaan untuk dimobilisasi.

Sumber daya normatif antara lain dapat berwujud kebenaran moral, religiositas, tradisi, atau kewenangan yang sah (*legitimate*); sumber daya ini memberi 'hak moral' bagi pemiliknya untuk menjalankan kekuasaan. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa aktor yang memiliki sumber daya normatif dapat memperoleh kepatuhan massa karena yang bersangkutan memiliki kualitas tertentu, seperti sifat bijak menurut ukuran moral dan bijak menurut pemahaman agama, ataupun memiliki wewenang yang sah menurut norma atau aturan hukum yang berlaku. Sumber daya normatif hanya dapat diterapkan dalam suatu masyarakat di mana ada persamaan keyakinan yang dimiliki aktor

dan keyakinan yang ada dan berlaku di masyarakat. Mobilisasi dukungan dapat berlangsung tatkala massa meyakini bahwa sang aktor memiliki hak moral untuk dipatuhi.

Sumber daya personal mengacu pada kualitas pribadi yang dimiliki aktor untuk memperoleh kepatuhan dari massa. Seorang aktor dengan karisma yang melekat pada dirinya merupakan gambaran seorang pemegang sumber daya personal yang dapat menyebabkan massa tertarik dan patuh kepadanya. Merujuk pada beberapa kasus, seperti kasus kualitas pribadi Churchill dan Castro, Andrain (1992) menyatakan bahwa kualitas pribadi seperti karisma atau popularitas yang menonjol memiliki pengaruh relatif besar untuk menghadirkan kepatuhan massa tatkala situasi yang ada di masyarakat tidak stabil. Lebih lanjut Andrain menyatakan bahwa Churchill dengan kualitas pribadinya mengobarkan semangat bangsa Inggris melawan Jerman; demikian pula halnya dengan Castro dengan kualitas pribadinya yang menonjol mampu menjatuhkan rezim Batista dan menegakkan tatanan politik baru di Kuba. Churchill dan Castro memperoleh kepatuhan massa dalam situasi politik yang tidak stabil, dan mereka memperoleh kepatuhan tersebut karena sumber daya personal yang dimilikinya. Maka, mobilisasi massa bisa berlangsung karena sumber daya personal yang dimiliki aktor.

Sumber daya keahlian antara lain dapat berwujud penguasaan atas informasi, pengetahuan ataupun keahlian teknis lainnya yang ada pada diri sang aktor. Pada umumnya, sumber daya keahlian lebih banyak digunakan untuk memperoleh kepatuhan massa di masyarakat maju dibandingkan di masyarakat kurang maju. Aktor yang memiliki sumber daya keahlian dalam jumlah banyak dan beragam cenderung lebih mudah memperoleh kepatuhan massa yang pada gilirannya mudah pula untuk dimobilisasi. Demikian pula sebaliknya, sedikitnya jumlah dan ragam sumber daya keahlian bisa menjadi penyebab relatif sulit hadirnya kepatuhan massa untuk dimobilisasi.

Seorang aktor tidak harus memiliki semua tipe atau jenis sumber daya untuk dapat memperoleh kepatuhan massa. Seorang aktor dimungkinkan bisa memobilisasi dukungan walau yang bersangkutan hanya memiliki beberapa tipe sumber daya. Hal yang menentukan untuk memperoleh kepatuhan massa bukan terletak pada jumlah dari ragam sumber daya yang dimiliki, tetapi terletak pada efektivitas pemanfaatan sumber daya.

Dalam kajian ini, selain ditelisik melalui lima tipe sumber daya di atas, sumber daya yang dimiliki aktor dianalisis pula melalui asal usulnya. Hal ini karena aktor (kandidat) yang bersangkutan berposisi sebagai kandidat petahana (*incumbent*); dan dalam posisi tersebut, kandidat petahana berpeluang dan bisa memanfaatkan sumber daya yang berasal dari negara (*state resources*) sekaligus sumber daya yang berasal dari luar negara (*non-state resources*) yang dikenal pula sebagai sumber daya masyarakat.

Sumber daya negara adalah sumber daya yang keberadaannya di ranah negara tetapi dapat dimanfaatkan oleh aktor untuk memenuhi kepentingan atau kebutuhan pribadinya. Sebagai contoh, sumber daya yang berupa kewenangan untuk mengelola anggaran pemerintah, kewenangan mengangkat pejabat birokrasi, ataupun kewenangan merumuskan kebijakan-kebijakan formal lainnya yang mengikat masyarakat. Sumber daya negara tersebut dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memobilisasi dukungan bagi sang aktor guna meraih tujuan.

Sementara itu, sumber daya yang berasal dari non-negara atau sumber daya masyarakat merupakan sumber daya yang keberadaannya tidak berada di ranah negara. Keberadaan sumber daya jenis ini dapat dibangun di tengah kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, jaringan kelompok etnis yang dibangun sang aktor merupakan sumber daya yang berasal dari non-negara; sumber daya ini dapat dimanfaatkan untuk menyosialisasikan ide atau gagasan yang pada gilirannya bisa dimanfaatkan untuk memobilisasi dukungan kepada sang aktor.

Lima tipe sumber daya sebagaimana diuraikan di atas bisa berasal dari ranah negara atau masyarakat. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan bahwa tipe sumber daya tertentu bisa berasal dan berada di ranah negara sekaligus ranah masyarakat, seperti tipe sumber daya normatif dan sumber daya personal. Sebagai ilustrasi, sumber daya normatif yang dimiliki sang aktor bisa berasal dan berada di ranah negara sekaligus ranah masyarakat; hal ini karena sang aktor merupakan pemimpin formal menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sekaligus yang bersangkutan merupakan figur yang diangkat sebagai tokoh (pemimpin) masyarakat berdasarkan tradisi yang berlaku. Demikian pula halnya dengan sumber daya personal, karisma dari sang aktor bisa berasal dan berada di ranah negara sekaligus ranah masyarakat; hal ini karena karisma yang dimiliki aktor tersebut diperolehnya berkat kepemimpinan formal yang disandanginya sekaligus berkat kepopulerannya di tengah masyarakat.

Sebagaimana disinggung di atas, seorang aktor yang berposisi sebagai kandidat petahana memiliki peluang lebih besar untuk mengakses sumber daya negara dibandingkan kandidat lainnya. Kandidat yang tidak sedang menjabat cenderung memanfaatkan sumber daya masyarakat karena akses terhadap sumber daya negara sangat kecil. Sementara itu, kandidat petahana justru dapat memanfaatkan sumber daya negara dan sumber daya masyarakat secara simultan. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa secara teoretik pemanfaatan sumber daya negara dan sumber daya masyarakat dapat dilakukan secara simultan dan dapat pula dilakukan secara terpisah (sendiri-sendiri).

Akan tetapi, besarnya sumber daya yang dimiliki seorang aktor (kandidat) tidak secara otomatis sama dengan besarnya mobilisasi dukungan yang terjadi. Bahkan dapat dinyatakan bahwa apa pun tipe sumber daya dan dari mana asal usulnya tidak secara langsung dapat menghadirkan mobilisasi dukungan. Pendayagunaan atau pemanfaatan sumber daya untuk menghasilkan mobilisasi dukungan tergantung pada kemampuan atau keterampilan sang

aktor dalam mengorganisasikan sumber daya itu sendiri (Andrain, 1992: 144-151).²³ Oleh karenanya, pengorganisasian sumber daya harus dilakukan sedemikian rupa agar menghasilkan kepatuhan massa yang bersedia untuk dimobilisasi. Pengorganisasian sumber daya untuk memperoleh kepatuhan yang menghadirkan mobilisasi dukungan selain tergantung pada kemampuan atau keterampilan aktor (kandidat) dalam mendayagunakan sumber daya, juga tergantung pada corak sistem politik yang ada di masyarakat. Diperlukan keterampilan berbeda untuk melakukan mobilisasi di masyarakat yang bercorak demokratis dan yang bercorak otoriter. Di masyarakat yang bercorak demokratis, aktor dengan bekal sumber daya yang dimiliki dituntut terampil memengaruhi massa untuk memberi dukungan secara sukarela. Sedangkan di masyarakat yang bercorak otoriter, aktor bisa melakukan tekanan atau paksaan dalam melakukan mobilisasi untuk memperoleh dukungan.

3. Sumber Daya, Tradisi, dan Mobilisasi Dukungan

Mobilisasi dukungan tidak berlangsung di ruang hampa, tetapi berlangsung dalam suatu lingkungan sosial (*social environment*) di mana kontestasi memperebutkan kekuasaan diselenggarakan. Dalam lingkungan sosial tersebut interaksi berlangsung antarwarga yang dipandu seperangkat aturan (institusi) (Helmke dan Levitsky, 2004: 725-740; Lauth, 2000: 21-50; North, 1990: 36-53). Di tengah masyarakat, interaksi antarwarga tersebut bisa dibentuk oleh institusi informal dan bisa pula dibentuk oleh institusi formal. Institusi informal bisa diterjemahkan sebagai seperangkat aturan yang dibuat oleh masyarakat untuk mengatur interaksi di antara anggota masyarakat itu sendiri; dan institusi formal bisa dimaknai sebagai seperangkat aturan yang dibuat oleh

23 Andrain (1992: 144-151) menyatakan bahwa untuk memperoleh kepatuhan, selain tergantung pada kemampuan atau keterampilan dalam mendayagunakan sumber daya, seorang kandidat juga perlu mempertimbangkan jumlah dan distribusi sumber daya dan motivasi dalam mendayagunakan sumber dayanya.

pihak ketiga, yakni pihak di luar masyarakat yang bersangkutan.²⁴ Institusi informal bisa berwujud nilai, norma, ataupun tradisi yang ada dan dibentuk oleh masyarakat bersangkutan. Sementara itu, institusi formal bisa dimaknai sebagai seperangkat aturan yang dibuat pihak ketiga, dalam hal ini negara, untuk mengatur interaksi anggota masyarakat. Institusi formal bisa terwujud dalam peraturan perundangan yang memiliki kekuatan memaksa ataupun mengatur interaksi antara warga.

Tradisi adalah salah satu bentuk dari institusi informal karena terbentuk dan sekaligus dibentuk oleh masyarakat di mana tradisi tersebut berada. Tradisi, sebagai institusi informal, menjadi rujukan yang ditaati oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pada umumnya, tradisi telah berlangsung dalam kurun waktu relatif lama. Seiring perjalanan waktu, tak jarang tradisi mulai ditinggalkan atau tidak begitu ketat dijadikan rujukan masyarakat. Kalaupun masih dijadikan rujukan, maka rujukan itu lebih terarah pada esensi dari tradisi itu sendiri.

Demikian pula halnya dengan tradisi di tengah masyarakat Sorong Selatan. Perubahan yang berlangsung di masyarakat menjadikan tradisi yang berumur ratusan tahun sulit atau jarang diketemukan sebagaimana bentuk aslinya. Meskipun bentuk asli dari tradisi sulit atau jarang diketemukan, masyarakat masih tetap menjadikan esensi dari tradisi tersebut sebagai rujukan. Pada saat ini, salah satu tradisi masyarakat Sorong Selatan yang jarang hadir dalam bentuk aslinya adalah tradisi pertukaran *Kain Timur*. Esensi dari tradisi ini adalah bahwa adanya kewajiban melakukan pengembalian balasan atas pemberian yang diterima. Tradisi ini masih tetap menjadi falsafah masyarakat Sorong Selatan dalam kehidupan sehari-hari.

24 Institusi informal bisa berwujud nilai, norma, ataupun tradisi yang terbentuk dan dibentuk oleh masyarakat; dan institusi formal bisa berwujud peraturan-peraturan formal yang dibuat pihak ketiga, dalam hal ini negara. Institusi informal dan formal menjadi panduan interaksi di antara anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Esensi tradisi pertukaran *Kain Timur* menjadi institusi informal yang memandu anggota masyarakat berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi pertukaran *Kain Timur* sebagai seperangkat aturan yang dibentuk oleh masyarakat Sorong Selatan bisa dimanfaatkan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu yang melibatkan masyarakat. Salah satunya adalah bahwa tradisi ini bisa dimanfaatkan sebagai instrumen untuk menggalang atau memobilisasi massa.

Untuk bisa memanfaatkan tradisi sebagai instrumen mobilisasi, diperlukan kemampuan dari aktor yang akan memanfaatkannya. Kemampuan aktor memanfaatkan tradisi sebagai instrumen tak bisa lepas dari sumber daya yang dimilikinya. Aktor harus memiliki sumber daya yang menjadikannya mengetahui dan memahami esensi tradisi tersebut. Dengan tidak mengurangi manfaat sumber daya normatif dan sumber daya personal, aktor harus memiliki sumber daya keahlian untuk bisa mengerti dan memahami tradisi pertukaran *Kain Timur* di Sorong Selatan yang telah berkembang sejak ratusan tahun lalu. Sumber daya keahlian terkait hal tersebut dapat berwujud penguasaan atas informasi, pengetahuan ataupun keahlian teknis lainnya. Aktor dengan sumber daya keahlian akan lebih mudah mengerti dan memahami tradisi di masyarakat.

Akan tetapi, sumber daya yang dimiliki aktor tidak secara otomatis bisa mengerahkan massa dalam bentuk mobilisasi dukungan. Sebagaimana diungkap pada paparan di atas, pendayagunaan sumber daya untuk menghasilkan mobilisasi dukungan tergantung pada kemampuan atau keterampilan aktor dalam mengorganisasikan sumber daya itu sendiri (Andrain, 1992: 144-151). Adapun yang dimaksudkan pengorganisasian sumber daya merujuk pada kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia seefektif mungkin.

Sehubungan dengan hal itu, diperlukan pertimbangan bahwa pengorganisasian sumber daya untuk memperoleh kepatuhan yang bisa menghadirkan mobilisasi dukungan juga tergantung pada lingkungan sosial (*social environment*) di masyarakat. Di

masyarakat dengan lingkungan sosial sederhana, diperlukan kemampuan atau keterampilan yang sesuai dengan karakter masyarakat yang sederhana; demikian pula halnya di masyarakat dengan lingkungan sosial yang kompleks juga diperlukan kemampuan atau keterampilan yang sesuai dengan karakter masyarakat yang kompleks.

Untuk memperoleh mobilisasi dukungan dari masyarakat Sorong Selatan, diperlukan kemampuan dan keterampilan dalam hal mendayagunakan sumber daya sesuai dengan lingkungan sosial yang ada, yakni dengan memahami lebih dalam hal-hal terkait karakter masyarakat Sorong Selatan. Berbekal pengetahuan dan penguasaan informasi yang memadai, aktor bisa memahami keberadaan kelompok-kelompok etnis beserta karakter dan tradisinya; pada gilirannya, pemahaman tersebut bisa diolah dan dimanfaatkan untuk menggalang massa. Dengan pengetahuan dan pemahaman atas tradisi pertukaran *Kain Timur*, aktor bisa memanfaatkan tradisi sebagai instrumen untuk memperoleh kepatuhan massa dalam bentuk mobilisasi dukungan.

Selain dibentuk oleh institusi informal, seperti tradisi pertukaran *Kain Timur*, interaksi antarwarga di masyarakat bisa pula dibentuk oleh institusi formal. Sebagaimana diungkap di atas, institusi formal bisa dimaknai sebagai seperangkat aturan yang dibuat oleh pihak ketiga, yakni pihak di luar masyarakat yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal itu, interaksi antarwarga di Kabupaten Sorong Selatan selain dipandu oleh tradisi pertukaran *Kain Timur*, juga ditentukan oleh berlakunya institusi formal, seperti halnya peraturan perundang-undangan yang dibuat pihak ketiga, dalam hal ini negara, yang memiliki kekuatan memaksa untuk mengatur interaksi antarwarga.

Keberadaan institusi informal dan formal selaras dengan pendapat Coleman (1994: 57) tentang lingkungan sosial (*social environment*). Sehubungan dengan hal ini, Coleman menyatakan bahwa lingkungan sosial dibedakan menjadi lingkungan sosial alami (*the natural social environment*) dan lingkungan sosial

terbangun (*the constructed social environment*). Lingkungan sosial alami merupakan lingkungan yang tumbuh secara otonom ketika hubungan sosial sederhana berkembang dan memperluas struktur. Dalam lingkungan sosial alami, karena terbentuk dan tumbuh secara otonom, hadir pula institusi informal seperti halnya nilai, norma, ataupun tradisi. Sementara itu, lingkungan sosial terbangun merupakan organisasi-organisasi yang terbentuk dari hubungan-hubungan sosial kompleks. Lingkungan sosial terbangun tidak tumbuh secara alami melalui kepentingan-kepentingan para aktor yang merupakan para pihak di dalam hubungan; tetapi disusun melalui interaksi dengan aktor dari luar, dan tiap hubungan hanya bisa berlangsung melalui keterkaitannya dengan hubungan lain yang merupakan bagian dari organisasi yang sama. Oleh karena itu, alam lingkungan sosial terbangun hadir melalui peraturan perundangan yang dibuat oleh pihak ketiga, dalam hal ini negara, yang memiliki kekuatan mengikat untuk mengatur keberlangsungan interaksi antarwarga.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa seorang aktor dalam melakukan mobilisasi dukungan berada di tengah interaksi antarwarga yang dipandu seperangkat aturan, baik yang berupa institusi informal maupun formal. Institusi informal dapat dinyatakan berada dalam lingkungan sosial alami, dan institusi formal berada dalam lingkungan sosial terbangun. Dalam konteks Sorong Selatan sebagai lokus studi, aktor yang melakukan mobilisasi dukungan berada di tengah masyarakat yang diatur dan dipandu nilai, norma, dan tradisi yang ada dan berkembang di masyarakat sekaligus diatur dan dipandu oleh peraturan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan Pilkada.

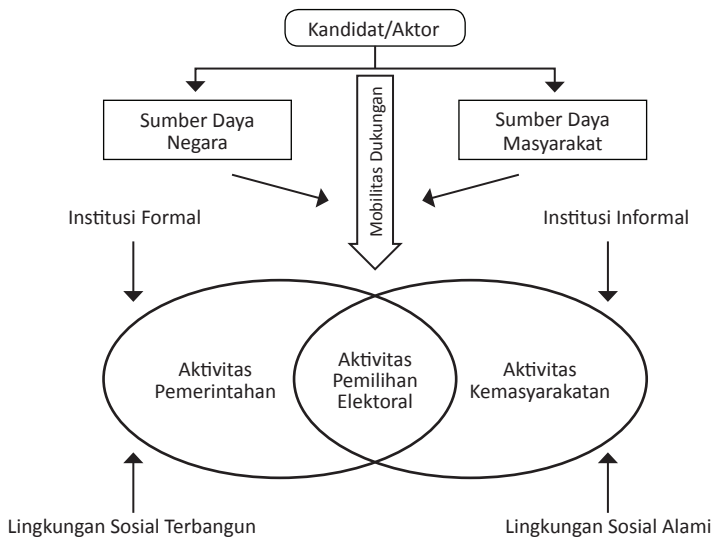
Dengan mengacu pada pendapat Helmke dan Levitsky (2004: 725-740)²⁵, keberadaan institusi informal dan institusi formal dimungkinkan dalam posisi saling melengkapi. Seperangkat nilai,

25 Keberadaan institusi informal dan institusi formal dimungkinkan dalam posisi saling melengkapi (*complementary*), menggantikan (*substitutive*), mengakomodasi (*accomodative*), dan kompetisi (*competitive*).

norma, dan tradisi di lingkungan sosial alami saling melengkapi dengan peraturan perundangan formal dalam lingkungan sosial terbangun untuk mengatur dan memandu interaksi antarwarga, termasuk dalam hal memilih kepala daerah melalui mekanisme Pilkada. Dalam konteks Sorong Selatan, tradisi pertukaran *Kain Timur* dan tradisi lain yang ada dan tumbuh di masyarakat saling melengkapi dengan peraturan perundangan formal yang dibuat negara untuk mengatur interaksi warga dalam memilih kepala daerah.

Berdasarkan uraian di atas, dalam kontestasi Pilkada, aktor yang melakukan mobilisasi dukungan berada dalam lingkungan sosial alami yang di dalamnya berlaku seperangkat aturan informal sekaligus berada dalam lingkungan terbangun yang di dalamnya berlaku seperangkat aturan formal. Dalam memobilisasi dukungan, aktor memanfaatkan sumber daya, baik yang berasal dari negara maupun masyarakat. Upaya mobilisasi dukungan tersebut dipaparkan dalam gambar berikut ini.

Gambar 1-1. Mobilisasi Dukungan Kandidat



Gambar tersebut menunjukkan bahwa dalam melakukan mobilisasi dukungan, aktor berbekal sumber daya negara dan sumber daya masyarakat; mobilisasi dukungan tersebut dilakukan di masyarakat yang di dalamnya berlaku seperangkat aturan informal dan formal. Seperangkat aturan informal, atau institusi informal, berwujud tradisi yang ada dan tumbuh di masyarakat. Sementara itu, seperangkat aturan formal, atau institusi formal, termanifestasikan dalam wujud peraturan formal penyelenggaraan pemerintahan dan peraturan tentang Pilkada.

Berdasarkan uraian di atas, studi ini dalam rangka menganalisis penggalangan dukungan memilah mobilisasi dalam aktivitas pemerintahan, mobilisasi dalam aktivitas sosial kemasyarakatan, dan mobilisasi dalam aktivitas elektoral. Pembahasan mobilisasi dukungan dalam aktivitas pemerintahan meliputi bahasan mobilisasi dukungan di ranah birokrasi dan di ranah politik secara umum. Pembahasan mobilisasi dukungan dalam aktivitas sosial kemasyarakatan meliputi bahasan terkait dengan pemahaman kandidat non-Papua terhadap masyarakat Sorong Selatan dan bahasan tentang pemanfaatan pemahaman tersebut dalam upaya mobilisasi dukungan. Pembahasan mobilisasi dukungan dalam aktivitas elektoral meliputi bahasan mobilisasi baik dalam proses pencalonan maupun pemenangan di hari pemungutan/penghitungan suara.

II

Masyarakat Sorong Selatan

BAB INI memaparkan masyarakat Sorong Selatan dari sisi etnisitas. Profil ringkas Sorong Selatan sebagai kabupaten pemekaran mengawali bahasan bab ini. Bahasan difokuskan pada ulasan kelompok-kelompok etnis di dalamnya, selanjutnya, dikemukakan bahasan terkait interaksi kelompok, baik di antara sesama kelompok asli maupun di antara kelompok asli dengan kelompok pendatang. Uraian pada bab ini diakhiri dengan bahasan mengenai hasil temuan bahwa kesetiaan primordial pada masyarakat setempat masih relatif kental, dan pada ujungnya hal tersebut menghadirkan sikap ‘kami’ dan ‘mereka’ di kalangan warga masyarakat.

Sorong Selatan: Kabupaten Pemekaran di Wilayah ‘Kepala Burung’

Sorong Selatan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat. Kabupaten ini adalah hasil pemekaran dari Kabupaten Sorong. Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2002²⁶, Sorong Selatan ditetapkan sebagai kabupaten yang berdiri sendiri lepas dari Kabupaten Sorong sebagai kabupaten induk. Pusat

26 Undang-Undang No. 26 Tahun 2002 menetapkan pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama.

pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan berada di Teminabuan, sebuah kota yang mulai tumbuh di sisi selatan dari wilayah ‘kepala burung’ Papua.

Pelacakan terhadap keberadaan Kabupaten Sorong Selatan bisa dilakukan dengan menyimak bergulirnya roda sejarah. Bahwasannya, berjalannya sistem pemerintahan di Papua dapat disimak melalui dibentuknya beberapa afdeling (pembagian wilayah/distrik). Setelah mengalami beberapa kali perubahan, sejak 1 Juli 1954, di Papua dibentuk beberapa afdeling, yakni Holandia, Geelvinkbaai (Teluk Geelvink), Centraal-Nieuw-Guinea (Papua Tengah), Zuid-Nieuw-Guinea (Papua Selatan), Fak-fak, dan West-Nieuw-Guinea (Papua Barat). Dalam satu afdeling, terdapat beberapa *onderafdeling*. Bagian berbentuk ‘kepala burung’ (dilihat dari peta) dari Papua berada dalam lingkup afdeling West-Nieuw-Guinea; dan di antara beberapa *onderafdeling* yang ada dalam cakupan afdeling West-Nieuw-Guinea, terdapat *onderafdeling* Teminabuan (Schoorl, 2001: 603-604). Dengan demikian, jalannya roda pemerintahan di wilayah Kabupaten Sorong Selatan sudah berlangsung relatif lama yang berpusat di *onderafdeling* Teminabuan. Saat ini, Teminabuan menjadi ibukota dari Kabupaten Sorong Selatan.

Wilayah Kabupaten Sorong Selatan yang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong (kabupaten induk) berdasarkan pada undang-undang pembentukannya terdiri dari sepuluh distrik, yang kemudian dimekarkan kembali menjadi 14 distrik.²⁷ Hal menarik dari perjalanan pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan adalah adanya upaya pemekaran kabupaten baru yang berasal dari beberapa distrik di kabupaten ini. Pemekaran atau pembentukan kabupaten baru tersebut berasal dari enam distrik yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Sorong Selatan; distrik-distrik

27 Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2002, Kabupaten Sorong Selatan terdiri dari Distrik-distrik: Sawiat, Mare, Aifat, Aifat Timur, Kokoda, Inanwatan, Teminabuan, Ayamaru, Aitinyo, dan Moswaren. Kemudian dilakukan pemekaran dengan membentuk empat distrik baru, yakni distrik-distrik: Seremuk, Wayer, Matemani Kais, dan Ayamaru Utara.

itu mekar menjadi kabupaten baru, yakni Kabupaten Maybrat.²⁸ Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa dalam kurun waktu relatif singkat, tak lebih dari tujuh tahun, Sorong Selatan sebagai kabupaten baru harus melepaskan sebagian wilayahnya demi kehadiran kabupaten baru lainnya.

Dalam perkembangannya, beberapa distrik dimekarkan setelah pemekaran Kabupaten Maybrat. Distrik-distrik tersebut dimekarkan demi efektivitas dan efisiensi jalannya roda pemerintahan. Dengan adanya pemekaran tersebut, Kabupaten Sorong Selatan terdiri atas 13 distrik sebagai berikut:

Tabel 2-1. Distrik-distrik di Kabupaten Sorong Selatan

No.	Distrik	Ibu Kota
1	Inanwatan	Mate
2	Kokoda	Tarof
3	Kokoda Utara	Atori
4	Kais	Kais
5	Matemani	Mugim
6	Moswaren	Moswaren
7	Teminabuan	Teminabuan
8	Konda	Bariat
9	Seremuk	Haha
10	Saifi	Sayal
11	Wayer	Wayer
12	Sawiat	Wensnahan
13	Fokour	Pasir Putih

Sumber: *Sorong Dalam Angka 2011*, hlm. 30.

28 Beberapa distrik dalam Kabupaten Sorong Selatan yang dimekarkan menjadi Kabupaten Maybrat adalah Distrik-distrik Aifat, Aifat Timur, Aitinyo, Ayamuru, Ayamuru Utara, dan Mare. Kabupaten Maybrat dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2009.

Kelompok-kelompok etnis di Sorong Selatan

Merujuk pada pendapat Petersen (1982), Guibernau, dan Rex (1999), serta Hutchinson dan Smith (1996), kata etnis dapat dimaknai sebagai sekumpulan orang yang berasal dari keturunan sama, berlatar belakang sejarah dan budaya sama, dan bertempat tinggal dalam kelompok pada teritori tertentu. Mereka bersolidaritas dalam kelompok yang ikatannya kuat dan punya kesadaran terhadap kepentingan bersama. Sementara itu, etnisitas mengacu bukan pada sifat yang melekat (*property*) pada kelompok, melainkan lebih merujuk pada aspek yang berhubungan atau berkaitan dengan etnis. Etnisitas merujuk pada konsep relasi yang berdasar atas pengategorian kumpulan orang yang membentuk dan dibentuk oleh kepentingan kolektif.

Dikarenakan kajian ini membahas mobilisasi dukungan, etnisitas dipahami dari pendekatan *instrumentalis*, bukan pendekatan primordialis ataupun *konstruktivis*.²⁹ Hal ini karena etnisitas diberlakukan bukan sebagai atribut yang mengikat para anggota kelompok etnis seperti persamaan darah (keturunan), agama, tradisi, ataupun bahasa, melainkan etnisitas diberlakukan sebagai instrumen atau alat untuk berlangsungnya mobilisasi.

Memang tak dapat dimungkiri kehadiran kelompok-kelompok etnis pada awalnya lebih dikarenakan adanya nilai primordial yang relatif kuat di masyarakat, di mana nilai primordial tersebut menjadi pengikat bagi para anggota kelompok. Seiring perjalanan waktu, etnisitas tidak lagi hanya sekadar dimaknai sebagai pengikat para anggota kelompok saja; etnisitas lebih merupakan instrumen untuk menggalang dukungan guna meraih tujuan, termasuk meraih kekuasaan melalui mekanisme Pilkada.

Dalam konteks untuk memahami masyarakat Sorong Selatan, pendapat Furnival (1976:446-469) tentang masyarakat

29 Hutchinson dan Smith (1996: 8-9) menyatakan bahwa etnisitas dapat dipahami dari pendekatan *primordialis* dan *instrumentalis*. Selain dua pendekatan tersebut, Abdillah (2002: 76-77) menyatakan bahwa etnisitas juga dapat dipahami dari pendekatan *konstruktivis*.

majemuk perlu dijadikan dasar rujukan. Masyarakat majemuk, demikian Furnival menyatakan, adalah masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih golongan dalam suatu tatanan sosial yang hidup berdampingan, tanpa berbaur satu dengan lainnya, dalam satu unit politik. Dalam masyarakat majemuk, kebutuhan sosial bersifat terbatas dalam lingkup tertentu (*sectional*) di mana tidak ada permintaan sosial yang berlaku untuk semua kelompok yang terpisah antara satu dengan lainnya.

Mengacu pada pendapat Furnival tersebut, masyarakat Sorong Selatan tidak bisa dikategorikan sebagai masyarakat majemuk. Meskipun demikian, di dalamnya terdapat beberapa kelompok etnis. Uraian berikut menjelaskan tentang masyarakat Sorong Selatan yang tidak masuk dalam kategori masyarakat majemuk.

Masyarakat Sorong Selatan, sebagaimana halnya masyarakat Papua pada umumnya, terdiri dari beberapa kelompok atas dasar etnisitas (Miedema dan Reesink (ed.), 2004).³⁰ Mereka dapat dipilah dalam kelompok yang terdiri dari orang beretnis Papua asli dan kelompok pendatang yang berlatar belakang etnis non-Papua. Kelompok etnis Papua asli di Sorong Selatan ialah orang Tehit, orang Imekko, dan orang Maybrat.

Dalam konteks etnisitas, orang Tehit termasuk kelompok etnis dengan jumlah warga yang relatif besar dan di dalamnya terdiri dari beberapa kelompok lagi yang disebut berdasarkan tempat tinggal (permukiman). Oleh karena itu, dikenal adanya kelompok Tehit Sawiat, Tehit Imyan, Tehit Salakhma, dan sebagainya. Meski dalam kelompok lebih besar, ikatan etnisitas sebagai orang Tehit masih relatif kental di antara mereka.

30 Keberadaan kelompok-kelompok etnis di Papua merupakan suatu hal yang tak terbantahkan. Miedema dan Reesink (ed.) dalam buku mereka *One Head, Many Faces* melukiskan bahwa pada kawasan Kepala Burung, lokasi dari Kabupaten Sorong Selatan, dapat ditemukan beberapa kelompok etnis yang penamaannya atas dasar pertimbangan area dari kelompok berdomisili, bahasa, atau dialek kelompok, nama pemimpin/tokoh kelompok, ataupun terkadang bisa jadi diperoleh dari nama baru yang berasal dari luar kelompok (2004: 9-11).

Demikian pula halnya dengan orang Imekko. Sebutan Imekko mengacu pada kawasan yang terletak di bagian selatan dari Kabupaten Sorong Selatan, yakni kawasan Inanwatan, Matemani, Kais dan Kokoda; sebutan Imekko merupakan kependekan dari nama-nama kawasan tersebut. Mereka yang bertempat tinggal atau bermukim di kawasan itu dikenal sebagai orang Imekko. Mereka terdiri dari orang-orang dengan latar belakang etnis beragam, yakni etnis Bira, Iwaro, Negiro/Mate, Kiso, Ameyode, dan Awee. Dikarenakan mereka bertempat tinggal di kawasan yang sama dan bermata pencaharian relatif sama, maka mereka dikenal sebagai orang Imekko. Pada saat ini, mereka yang tinggal di kawasan Imekko jarang disebut berdasarkan nama etnis mereka: Bira, Awee, ataupun Iwaro; mereka lebih sering disebut sebagai orang beretnis Imekko sesuai dengan kawasan di mana mereka bertempat tinggal.

Sementara itu, orang Maybrat terdiri dari orang beretnis Ayamaru, Aifat, dan Aitinyo. Mereka disebut sebagai orang Maybrat karena bertempat tinggal di kawasan yang sama, yakni di bagian utara dari Kabupaten Sorong Selatan yang berupa kawasan pegunungan dengan kondisi tanah tidak begitu subur. Oleh karenanya, mereka yang berasal dari etnis Ayamaru, Aifat, dan Aitinyo punya karakter yang relatif sama, yakni berwatak relatif keras sebagaimana kondisi alam dari kawasan tempat mereka bermukim yang gersang dan tidak begitu subur.

Orang Ayamaru, Aifat, dan Aitinyo lebih dikenal sebagai orang beretnis Maybrat. Hal ini dikarenakan bahasa yang ada pada tiga kelompok etnis tersebut berakar pada bahasa yang sama, yakni bahasa Mey. Selain itu, mereka juga bertempat tinggal di kawasan yang sama, kawasan yang dikenal sebagai Maybrat. Orang Maybrat, dalam kesehariannya, tak jarang juga disebut sebagai kelompok A3 yakni: Ayamaru, Aifat, dan Aitinyo.

Selain mereka yang termasuk dalam kelompok etnis Papua asli, terdapat pula penduduk yang beretnis non-Papua. Status mereka sebagai pendatang yang berasal dari beragam etnis non-

Papua, seperti Bugis, Buton, Makassar (orang yang berasal dari tiga kelompok etnis ini dikenal sebagai orang BBM), Ambon/Maluku, Jawa, ataupun mereka yang datang dari Sulawesi Tenggara dan Nusa Tenggara Timur.

Dalam kajian ini, mereka yang bertempat tinggal di Kabupaten Sorong Selatan dipilah menjadi orang Papua asli yang terdiri dari orang-orang Tehit yang berada dalam kelompok etnis Tehit, orang-orang yang bermukim di kawasan Imekko yang tergabung kemudian dikenal sebagai kelompok etnis Imekko, dan orang-orang Ayamaru, Aifat, dan Aitinyo yang tergabung dalam kelompok etnis Maybrat. Sementara itu, para pendatang yang berasal dari beragam etnis non-Papua dikelompokkan sebagai etnis pendatang.

Komposisi jumlah anggota kelompok etnis Tehit, Imekko, dan Maybrat relatif seimbang. Namun, seiring lepasnya wilayah Maybrat sebagai kabupaten sendiri, komposisi anggota kelompok etnis Maybrat mengalami sedikit perubahan (lihat Tabel 2-2).³¹ Hal ini karena sebagian dari orang Maybrat pindah menjadi penduduk Kabupaten Maybrat dan sebagian lainnya tetap menjadi penduduk dan berdomisili di wilayah Kabupaten Sorong Selatan. Tabel 2-2 berikut menunjukkan sebaran kelompok etnis di Kabupaten Sorong Selatan.

Tabel 2-2. Sebaran Kelompok etnis

Kelompok etnis	Distrik	Jumlah (Perkiraan)
Tehit: • Tehit (asli) • Sawiat • Imyan • Salakhma • Saifi • Ogit	• Teminabuan dan Seremuk • Sawiat, Fokour • Seremuk • Sawiat • Saifi • Konda	35 %

31 Maybrat menjadi kabupaten yang berdiri sendiri berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat.

Tabel 2-2. Sebaran Kelompok etnis

Kelompok etnis	Distrik	Jumlah (Perkiraan)
Imekko: • Bira • Iwaro • Negiro/Mate • Kaiso • Ameyode • Awee	• Inanwatan • Matemani • Matemani • Kais • Kokoda • Kokoda Utara	35 %
Maybrat: • Ayamaru • Aifat • Aitinyo	• Moswaren • Wayer	20 %
Non-Papua*)	• Teminabuan • Moswaren	10 %

Sumber: Diolah dari data lapangan

Catatan:*) Orang non-Papua terdiri dari orang Jawa (mayoritas transmigran dan berdomisili di Distrik Moswaren), orang Bugis, Buton, dan Makassar, serta orang Sulawesi Tenggara dan Maluku, mayoritas mereka berdiam di Distrik Teminabuan.

Sebagaimana halnya orang Papua asli pada umumnya, mayoritas anggota kelompok-kelompok etnis di Kabupaten Sorong Selatan juga berdomisili di kawasan tertentu. Kelompok etnis Tehit berdiam di kawasan dataran rendah, kelompok etnis Imekko bertempat tinggal di kawasan pantai atau dataran rendah, dan kelompok etnis Maybrat berdomisili di kawasan dataran tinggi atau pegunungan. Sementara itu, sebagian besar kelompok etnis pendatang non-Papua berdomisili di daerah transmigran dan ibukota Teminabuan. Bermukimnya penduduk asli dan pendatang di kawasan tertentu di kemudian waktu menandakan bahwa kawasan tersebut merupakan kantong permukiman kelompok etnis tertentu.

1. Kelompok-kelompok etnis Papua

Sebagaimana dipaparkan dalam tabel 2-2 di atas, kelompok etnis Tehit mendiami kawasan dataran rendah di Sorong Selatan. Sebagian besar dari mereka bermukim di Distrik Teminabuan, Sawiat, Fokour, Saifi dan Konda. Perkiraan jumlah anggota kelompok etnis Tehit sebanyak 35% dari jumlah penduduk Sorong Selatan. Jumlah ini tersebar di beberapa distrik yang berdasarkan data BPS memiliki luas 25% dari luas wilayah Kabupaten Sorong Selatan.

Orang Tehit secara umum berkarakter terbuka dan mudah diajak berkompromi. Informan mengungkapkan karakter ini sebagai berikut:

“Sebagai orang Tehit, saya tidak menutup diri dengan kehadiran orang luar; dan dalam kehidupan sehari-hari kami berinteraksi dengan semua orang yang ditemui, termasuk saudara-saudara yang non-Papua. Dalam beraktivitas, kami saling menyesuaikan dengan orang luar, baik yang berasal dari sesama orang Papua dan berasal dari kelompok etnis lain maupun orang luar beretnis non-Papua.”³²

Karakter yang melekat pada orang Tehit tersebut tak lepas dari pengaruh letak domisili kelompok etnis Tehit. Mayoritas dari mereka berdomisili di dataran rendah, di mana kondisi ini relatif memudahkan mereka berinteraksi dengan orang luar atau pendatang. Hal ini tampak di Distrik Teminabuan (terutama Kelurahan Kaibus dan Kohoin) sebagaimana para pendatang non-Papua dari Jawa, Bugis, Buton, Makassar banyak bermukim di sana.

Selain berkarakter terbuka dan mudah berkompromi, orang Tehit juga berkarakter cenderung kurang gigih dalam bekerja. Hal ini di antara lain dikarenakan pengaruh lingkungan alam yang relatif subur di mana kelompok etnis Tehit berdomisili. Lantaran mayoritas orang Tehit yang banyak bermukim di dataran rendah,

32 Wawancara dengan Michael Momot, Ketua Dewan Adat Suku Tehit, pada 21 Juli 2010 di Teminabuan, Sorong Selatan.

mereka lebih banyak mengandalkan hidup dengan cara berladang. Kondisi alam tempat tinggal orang Tehit banyak ditumbuhi pohon sagu. Pohon sagu yang tumbuh secara liar memudahkan orang Tehit dalam memperoleh makanan. Untuk memenuhi kebutuhan pangan, mereka cukup menebang dan menogok sagu; aktivitas ini tidak membutuhkan banyak tenaga, cukup dilakukan 1-2 orang. Hasil dari satu pohon sagu dapat dikonsumsi lebih dari setengah bulan tergantung besar kecilnya pohon. Kondisi ini menyebabkan orang Tehit tidak perlu bekerja keras untuk memenuhi bahan makanan sebagai kebutuhan dasar sehingga mereka cenderung berkarakter malas. Apabila persediaan sagu habis, mereka akan bergeser ke tempat lain yang masih banyak ditumbuhi pohon sagu. Kebiasaan hidup berladang dengan berpindah-pindah tempat mewarnai kehidupan mereka.

Bila dicermati dengan saksama, uraian di atas menunjukkan bahwa dalam menjalani kehidupan, orang Tehit cenderung menyesuaikan diri dengan lingkungan alam yang seolah-olah memanjakannya. Walaupun dilekati sikap terbuka, mereka terkesan sebagai orang yang kurang gigih dalam melakukan pekerjaan. Oleh karenanya, stereotipe yang hadir bagi orang Tehit adalah bahwa mereka beretos kerja rendah, terbuka, dan bersedia untuk melakukan kompromi.

Kelompok etnis Imekko berdomisili di wilayah pantai dan dataran rendah. Mereka berdomisili antara lain di Distrik Inanwatan, Matemani, Kais, Kokoda, dan Kokoda Utara. Jumlah anggota kelompok etnis Imekko diperkirakan sebanyak 35% atau sama banyaknya dengan jumlah anggota kelompok etnis Tehit. Hal ini bisa dilihat di lima distrik tersebut yang memiliki luas 40% dari wilayah Kabupaten Sorong Selatan.

Karakter orang Imekko tidak jauh berbeda dengan karakter orang Tehit. Mereka dapat dinyatakan relatif lemah lembut, cenderung malas, mudah diajak kompromi, dan terbuka. Karakter ini muncul karena kondisi alam yang berupa dataran rendah dan

pantai di mana kebanyakan orang Imekko berdomisili. Dalam memenuhi kebutuhan bahan makanan, mereka cukup mendayung perahu untuk mencari ikan di laut. Dalam kehidupannya, orang Imekko yang berdomisili di dataran rendah dan pantai relatif mudah bertemu dan berinteraksi dengan orang dari luar kelompoknya. Terkait karakter orang Imekko yang cenderung kurang menyukai kompetisi dinyatakan oleh seorang informan:

“Di wilayah Imekko, bahan makanan mudah diperoleh. Lingkungan sekitar menyediakan bahan makanan dalam jumlah melimpah. Kalau butuh sagu, kami tinggal menogok sagu; dan kalau butuh ikan, kami tinggal tangkap di sungai. Bahan makanan sudah disediakan alam; di belakang rumah, hutan, dan sungai.”³³

Selain karakternya, hal lain yang menarik dari kelompok ini bagi para pengkaji Antropologi adalah bahwa sebagian dari anggotanya memeluk agama Islam di tengah umat Nasrani yang merupakan agama mayoritas dari kelompok etnis mereka. Pada kenyataannya, solidaritas orang Imekko sendiri memang lebih mengacu pada kesamaan kelompok etnis, bukan pada dasar kesamaan agama.

Sementara itu, kelompok etnis Maybrat berdomisili di kawasan dataran tinggi atau pegunungan. Kelompok etnis Maybrat yang terdiri dari orang Ayamaru, orang Aifat, dan orang Aitinyo bermukim di Distrik Wayer dan Moswaren, dan beberapa dari mereka di ibukota Teminabuan. Secara geografis, Distrik Wayer dan Moswaren yang berdekatan dengan Kabupaten Maybrat yang terletak di utara Kabupaten Sorong Selatan menyebabkan orang Maybrat banyak bermukim di dua distrik tersebut. Jumlah orang Maybrat yang bermukim di Kabupaten Sorong Selatan diperkirakan sebanyak 20% dari total seluruh penduduk.

Tidak seperti orang Tehit dan Imekko, kehidupan orang Maybrat tidak dimanjakan oleh alam. Dataran tinggi yang berupa

33 Wawancara dengan Hengky Gogoba, berlatar belakang kelompok etnis Imekko, pada 18 Juli 2010 di Teminabuan, Sorong Selatan..

alam pegunungan kapur menjadikan mereka harus bekerja keras untuk memperoleh bahan makanan; mereka harus menanam ubi-ubian sebagai makanan utama karena hanya terdapat relatif sedikit pohon sagu di daerah mereka. Untuk bertahan hidup, orang Maybrat harus menebang pohon, membakar, dan membersihkan hutan untuk ditanami ubi, pisang, pepaya, dan sejenisnya. Mereka harus merawat dan menjaga tanaman dari gangguan binatang yang setiap saat dapat merusaknya. Cara ini tidak hanya dilakukan oleh satu atau dua keluarga saja. Upaya membuka hutan sampai dengan menjaga tanaman dari ancaman binatang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa keluarga (biasanya satu kampung). Mereka sering berpindah ke tempat lain apabila tumbuhan yang mereka tanam tidak memberi hasil baik. Kondisi ini menunjukkan betapa keras perjuangan yang harus dilalui orang Maybrat untuk bertahan hidup.

Sedemikian sulitnya orang Maybrat menjalani kehidupan merupakan salah satu faktor yang menjadikan mereka berkarakter keras. Dibandingkan dengan orang Tehit dan Imekko, orang Maybrat dikenal sebagai orang berkarakter keras, ulet, pantang menyerah, dan cenderung menyukai persaingan. Demikian pula, solidaritas sebagai kelompok lebih menonjol karena mereka secara bersama-sama (gotong royong) dalam mengolah lahan demi kelangsungan hidupnya. Terkait dengan karakter orang Maybrat diperoleh informasi berikut:

“Orang Maybrat berwatak keras; itu karena lingkungannya juga keras. Mereka tinggal di gunung kapur yang tidak subur dan tandus. Supaya bisa makan, mereka harus bekerja keras, harus menanam dulu atau mencari makan. Itu yang membuat etos kerja orang Maybrat tinggi; mereka mau bersaing dan di sanalah ada harga diri tinggi.”³⁴

34 Wawancara dengan Yunus Duwit, berlatar belakang kelompok enis Maybrat, pada 15 Juli 2010 di Teminabuan, Sorong Selatan.

Akan tetapi, pada dasarnya orang Tehit, Imekko, dan Maybrat bergantung pada alam dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup. Apabila suatu tempat tidak lagi memungkinkan mereka memperoleh bahan makanan, mereka akan bergeser pindah ke tempat lain yang memungkinkan mereka dalam memenuhi kebutuhan bahan makanan. Hal ini paralel dengan budaya meramu sebagaimana dikemukakan oleh Koentjaraningrat (2002: 74). Karakter sebagai peramu yang melekat pada orang Papua masih tampak hingga saat ini. Mereka cenderung akan meninggalkan pekerjaannya apabila ada yang lebih menjanjikan penghasilan lebih baik.

Selain esensi budaya meramu yang masih dirasakan keberadaannya, orang-orang Papua yang bermukim di Sorong Selatan juga punya tradisi yang sama. Terkait dengan tradisi orang Tehit, Imekko, dan Maybrat, dapat dinyatakan bahwa mereka punya tradisi yang relatif sama. Ketiga kelompok etnis ini punya tradisi yang esensinya sama walaupun wujud luarnya berbeda. Etnis Tehit dan Maybrat punya tradisi pertukaran *Kain Timur* (Mansoben, 1994: 67-84; Massink, 2001: 471-489, Sanggenafa dan Koentjaraningrat, 1994: 156-172). Sementara itu, etnis Imekko punya tradisi pertukaran menggunakan keramik dan manik-manik sebagai alat tukar dan barang pemberian.³⁵

Walaupun wujudnya berbeda, esensi atau prinsip dari tradisi pertukaran *Kain Timur* dan tradisi pertukaran keramik adalah sama, yakni bahwasannya siapa yang menerima pemberian wajib mengembalikan dengan jumlah lebih besar. Sehubungan dengan hal tersebut, Boelaars (1986:134) menyatakan bahwa suatu pemberian pembukaan disusul dengan pengembalian balasan yang lebih berharga, dan pengembalian balasan itu disusul lagi dengan pemberian pengukuhan. Apabila terjadi kelalaian dalam

35 Wawancara dengan Michael Momot, Ketua Dewan Adat Suku Tehit, pada 19 Juli 2010; dan Dominggus Aifufu, Tokoh Masyarakat Imekko, pada 4 Agustus 2010. Kedua narasumber menyatakan bahwa tradisi *Kain Timur* ada di kelompok etnis Tehit dan Maybrat, sementara itu di kelompok etnis Imekko substansi dari tradisi *Kain Timur* tampil dalam wujud benda keramik seperti guci, piring, dan mangkok.

pembayaran kembali, maka keadaannya tidak terbatas hanya pada pernyataan kemarahan atau teriakan yang menyampaikan ancaman dari masyarakat, tetapi dapat pula terjadi pemukulan sampai mati sebagai upaya terakhir untuk memperoleh pengembalian. Singkatnya, dengan memberi lebih banyak, yang bersangkutan akan menerima balasan lebih banyak juga.³⁶

2. Kelompok Etnis Pendatang

Selain orang-orang beretnis Papua, kehadiran pendatang dari luar juga mewarnai aktivitas kehidupan di Sorong Selatan. Pada umumnya, mayoritas pendatang yang berasal dari Jawa berstatus transmigran. Kelompok pendatang yang berasal dari Sulawesi Selatan yang lebih dikenal dengan kelompok Bugis, Buton, Makassar, dan dari Maluku serta kepulauan Nusa Tenggara Timur sebagian besar beraktivitas di sektor informal.

Jumlah pendatang dibandingkan penduduk asli Papua relatif kecil, sekitar 10%; dan mayoritas dari mereka berdomisili di ibukota Teminabuan dan Distrik Moswaren. Orang Jawa yang berstatus transmigran lebih banyak terkonsentrasi di Distrik Moswaren dan bekerja di sektor perkebunan. Sementara itu, kelompok etnis Bugis, Buton, Makassar yang bekerja di sektor ekonomi riil bermukim di wilayah yang konsentrasi penduduknya padat, seperti di Distrik Teminabuan. Mayoritas dari mereka bermukim di sekitar pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi sehari-hari.

Dibandingkan dengan orang Papua asli, para pendatang beretos kerja relatif tinggi. Hal yang mengindikasikan mereka beretos kerja relatif tinggi antara lain dari tampak didominasinya kegiatan sektor ekonomi riil oleh mereka. Sehubungan dengan hal itu, seorang pendatang beretnis non-Papua menginformasikan bahwa sebagai pendatang dia harus bekerja keras untuk hidup.

36 Boelaars (1986) menulis tentang orang Aifat; orang Aifat bersama-sama dengan orang Ayamaru dan Aitinyo termasuk dalam etnis Maybrat punya tradisi *Kain Timur*.

Dia tidak bisa hanya mengandalkan gajinya sebagai seorang guru untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhannya, ia membuka usaha warung kelontong yang berukuran tidak begitu besar. Hal ini serupa dengan apa yang juga dikerjakan oleh teman-temannya sesama pendatang. Pendatang tidak mengandalkan penghasilan dari satu jenis pekerjaan saja, kebanyakan pendatang juga mencari penghasilan dari berdagang.³⁷

Sementara itu, kegiatan para pendatang yang mayoritas bergerak di sektor ekonomi riil tidak paralel dengan kegiatan mereka di bidang politik. Mereka berkecenderungan bersikap acuh untuk terlibat aktif dalam kegiatan politik dan menyadari adanya kesulitan untuk mengambil peran aktif di pentas politik di tengah mayoritas masyarakat asli Papua.

3. Interaksi Kelompok etnis

Walaupun setiap kelompok etnis cenderung hidup mengelompok di kawasan tertentu, dalam kesehariannya kelompok etnis yang satu tidak terpisah dari kelompok etnis lainnya. Hal yang paling nyata adalah bahwa para anggota kelompok etnis saling berinteraksi dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Salah satu tempat berinteraksi adalah pasar; dan pasar yang cukup besar sebagai tempat interaksi jual beli hanya terdapat di Teminabuan.³⁸ Keberadaan pasar membuka peluang berlangsungnya interaksi antarwarga, baik yang berasal dari kelompok etnis Papua asli maupun kelompok etnis pendatang. Interaksi orang asli dengan para pendatang berlangsung lebih intens di pasar karena kegiatan ekonomi riil lebih banyak dilakukan oleh kelompok etnis pendatang. Interaksi di bidang ekonomi tersebut pada gilirannya

37 Wawancara dengan Ansar Sija, berlatar belakang kelompok etnis pendatang (Bugis, Buton, Makassar), pada 17 Juli 2010 di Teminabuan, Sorong Selatan.

38 Pasar Ampera di Teminabuan merupakan pasar paling besar; kelompok-kelompok etnis, baik asli maupun pendatang, berinteraksi di pasar tersebut untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi. Pasar Ampera mulai akhir tahun 2010 diupayakan pindah ke pasar yang baru di Wersar; tetapi sampai saat ini Pasar Ampera masih tetap ramai sebagai tempat berinteraksi antarwarga dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi.

menghadirkan pembauran antarwarga walaupun identitas kelompok tetap ada.

Demikian pula interaksi yang terjadi di bidang pendidikan dan kesehatan.³⁹ Di bidang pendidikan, Sekolah Menengah Umum hanya terdapat di Teminabuan dan Inanwatan. Interaksi antarwarga dari berbagai kelompok etnis bisa berlangsung tatkala mereka memerlukan pelayanan pendidikan tingkat menengah. Hal ini dibuktikan bahwa untuk mengenyam pendidikan tingkat menengah atas, warga harus ke Teminabuan atau Inanwatan; melalui sarana pendidikan tersebut, interaksi antarwarga bisa berlangsung. Di bidang kesehatan, interaksi antarwarga dimungkinkan berlangsung di Rumah Sakit Umum Daerah di Teminabuan. Dalam rangka memberi pelayanan kesehatan yang memadai, hanya Rumah Sakit Umum Daerah yang terbilang bisa menyediakannya; kondisi ini memungkinkan terjadinya interaksi antarwarga dari kelompok-kelompok etnis yang berbeda.

Dalam hal interaksi antar kelompok etnis sebagaimana diungkap di atas, menarik untuk disimak pernyataan informan pendatang yang mengungkapkan bahwa interaksi antara pendatang dengan penduduk asli berlangsung setiap saat. Interaksi bisa berlangsung di pasar, di puskesmas ataupun di terminal. Anak-anak pendatang juga berbaur dan bermain dengan anak-anak penduduk asli; mereka bersekolah di tempat yang sama.⁴⁰

Berlangsungnya kehidupan yang membaur antara kelompok sesama kelompok etnis asli Papua maupun antara kelompok etnis asli dengan kelompok pendatang menjadikan masyarakat Sorong Selatan tidak bisa dimasukkan ke dalam kategori masyarakat majemuk sebagaimana dikemukakan Furnival (1976). Namun demikian, kelompok-kelompok etnis yang beragam tidak dapat

39 Sekolah Menengah Umum hanya ada di Teminabuan dan Inanwatan, dan Rumah Sakit Umum Daerah ada di Teminabuan (Tim BPS Kabupaten Sorong Selatan, *Kabupaten Sorong Selatan dalam Angka 2010*).

40 Wawancara dengan Ansar Sija, berlatar belakang dari kelompok etnis pendatang (Bugis, Buton, Makassar) pada 17 Juli 2010 di Teminabuan, Sorong Selatan.

diabaikan keberadaanya. Terdapatnya beberapa kelompok etnis dengan karakter yang beragam, menjadikan masyarakat Sorong Selatan bisa dinyatakan sebagai masyarakat berbasis etnisitas.

Dalam konteks kajian penelitian ini, keberadaan kelompok-kelompok etnis di Sorong Selatan beserta karakter masyarakatnya berpengaruh terhadap berlangsungnya mobilisasi dukungan. Etnisitas tak pelak lagi bisa dimanfaatkan sebagai isu untuk mendorong bagi hadirnya mobilisasi dukungan.

Corak Hubungan Patronase dalam Bingkai Kesetiaan Primordial

Hubungan antar sesama anggota masyarakat di Sorong Selatan dapat dinyatakan bercorak *patronase*. Corak hubungan *patronase* menunjukkan hubungan antara dua pihak dalam posisi yang tidak sederajat (Legg, 1983: 26-29; Pelras, 2009: 21; Eisenstadt dan Roniger, 1980: 48; Abercrombie dan Hill, 1976: 420-426). Satu pihak berposisi sebagai *patron*, dan pihak lain yang berada pada posisi sub-ordinat sebagai *client*. Hubungan yang berlangsung antara *patron* dengan *client* merupakan hubungan pertukaran yang bersifat simbiose-mutualis, yakni hubungan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. *Patron* mencukupi kebutuhan, baik ekonomi maupun politik, dan memberi perlindungan kepada *client*; sementara *client* memberikan kesetiaan dan kepatuhan kepada *patron*.

Pola hubungan *patronase* yang ditandai hadirnya *patron* dan *client* masih terasa di Sorong Selatan. Pola hubungan ini bisa diketemukan tidak hanya dalam kelompok etnis asli, namun juga dirasakan ada dalam kelompok etnis pendatang. Pada kelompok etnis asli, pola hubungan *patronase* menghadirkan tokoh-tokoh etnis sebagai *patron*, dan para anggota kelompok dalam posisi sebagai *client*.⁴¹ Sementara itu, walaupun tidak sekental pada

41 Tokoh-tokoh etnis yang berperan sebagai *patron* pada umumnya menduduki posisi jabatan struktural pemerintahan. Hal ini karena pengisian posisi jabatan struktural lebih didasarkan pada pertimbangan keterwakilan etnisitas.

kelompok etnis asli, pola hubungan ini memunculkan sejumlah orang, yang secara ekonomi dan politik menonjol, sebagai *patron* bagi suatu kelompok etnis pendatang yang berposisi sebagai *client*.⁴²

Dalam posisinya sebagai *patron*, keputusan yang diambil oleh tokoh-tokoh etnis dipatuhi oleh para anggota kelompoknya. Keputusan para tokoh tersebut ditentukan melalui musyawarah para anggota kelompok. Ketika tidak ada kesepakatan dalam merumuskan keputusan, maka para tokoh punya kewenangan untuk mengambil keputusan. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan adalah kepentingan kelompok. Terkait hal ini, seorang informan menyatakan:

“Saat kata sepakat dari para anggota kelompok tidak berhasil dicapai, orang yang dituakan dalam kelompok punya kewenangan untuk mengambil keputusan. Keputusan yang diambil tokoh dengan mempertimbangkan kepentingan atau kebutuhan bersama, dan keputusan ini harus ditaati oleh para anggota kelompok. Tokoh punya kewenangan untuk mengambil keputusan karena mereka adalah panutan para anggota kelompok.”⁴³

Kehadiran pola hubungan patronase di Sorong Selatan, sebagaimana dipaparkan di atas, tidak lepas dari tradisi pertukaran *Kain Timur*. Berlangsungnya tradisi ini bisa memunculkan orang yang disebut *bobot* (Barnett, 1959: 1013-1019), yakni orang yang mampu mengumpulkan dan memiliki sebanyak mungkin *Kain Timur* dari hasil pertukaran yang dilakukan. Orang yang tidak mampu mengembalikan pemberian yang diterima dalam proses pertukaran *Kain Timur* akan terbebani utang sampai yang bersangkutan mampu melakukan pemberian balasan. Dalam kondisi berutang seperti itu, umumnya muncul suasana ketergantungan terutama bagi orang yang tidak mampu melakukan pemberian balasan kepada *bobot*. Dari situasi ini,

42 Menonjol secara ekonomi dan politik, Haji Nur dan Haji Muhadi dijadikan *patron* bagi para pendatang dari kelompok Bugis, Buton, dan Makassar.

43 Wawancara dengan Michael Momot, Ketua Dewan Adat Suku Tehit, pada 19 Juli 2010 di Teminabuan, Sorong Selatan.

muncul hubungan patronase antara *bobot* dengan orang yang tidak mampu melakukan pemberian balasan. Orang tersebut, dan juga warga masyarakat lainnya, tergantung pada *bobot* yang diposisikan sebagai *patron* karena mampu memenuhi kebutuhan melalui mekanisme pertukaran *Kain Timur*. Sehubungan dengan hal itu, banyaknya *Kain Timur* yang dikumpulkan oleh seorang *bobot* akan berkorelasi positif secara langsung dengan besarnya pengaruhnya di masyarakat.

Pola hubungan patronase semacam itu relatif lebih kental dalam kelompok marga. Hal ini sebagaimana diungkapkan Ketua Dewan Adat Suku Tehit yang menyatakan pendapatnya sebagai berikut:

“Dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil, peran pimpinan lebih terasa. Pemimpin kelompok lebih memperhatikan dan berupaya mencukupi kebutuhan anggota-anggotanya, bahkan membelanya bila bertengkar dengan kelompok lain. Sebaliknya, dengan lebih diperhatikan dan dipenuhi kebutuhannya, para anggotanya menjadi lebih patuh kepada pemimpinnya.”⁴⁴

Pola hubungan patronase yang relatif kental juga tampak pada ilustrasi berikut ini. Ilustrasi kesetiaan tokoh marga bisa disimak melalui upaya yang dilakukan para anggota marga untuk menempatkan salah seorang tokoh marga dalam posisi jabatan birokrasi pemerintahan. Upaya yang dilakukan tidak sekadar lewat jalan mengusulkan, tetapi sampai pada tindakan pengerahan massa guna mendukung atau mempertahankan tokohnya untuk menduduki posisi jabatan pada jajaran birokrasi pemerintahan.⁴⁵ Tindakan dukungan yang dilakukan anggota kelompok tersebut

44 Wawancara dengan Michael Momot, Ketua Dewan Adat Suku Tehit, pada 19 Juli 2010 di Teminabuan, Sorong Selatan.

45 Demonstrasi dilakukan massa sebagai bentuk kesetiaan agar tokoh atau *patron*-nya menduduki posisi jabatan birokrasi. Demonstrasi yang berlangsung pada Rabu, 6 Mei 2009, menuntut pembatalan pelantikan pejabat eselon III dan IV; para demonstran menuntut agar tokoh atau *patron*-nya dilantik menempati posisi jabatan birokrasi. Demonstrasi ini mengindikasikan kesetiaan massa kepada *patron*-nya; dan penulis menyaksikan persiapan demonstrasi tersebut.

dapat dimaknai sebagai bentuk kesetiaan dan kepatuhan *client* kepada tokohnya sebagai *patron*. Pada sisi lain, sang tokoh sebagai *patron* berkewajiban memberi perlindungan kepada massa dari kelompoknya, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi.

Pola hubungan patronase ini juga tampak pada saat berlangsungnya Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2009. Satu kampung yang dihuni marga suku Tehit memutuskan mendukung dan memilih salah satu calon anggota DPRD Sorong Selatan. Keputusan yang diambil oleh tokoh marga itu dipatuhi oleh para anggota marga, walau beberapa di antara mereka memilih calon berbeda. Mereka yang tidak mematuhi keputusan dikenai sanksi berupa pengucilan dan bahkan dipaksa berpindah domisili.⁴⁶ Mayoritas warga kampung mematuhi keputusan tersebut karena menyadari posisinya sebagai *client* yang harus menunjukkan loyalitasnya kepada tokoh marga sebagai *patron*. Di sisi lain, tokoh marga melindungi para anggotanya dari ancaman atau intimidasi yang kadang terjadi selama penyelenggaraan Pileg 2009.

Berdasarkan temuan lapangan, sebagaimana diungkap di atas, pola hubungan patronase masih tampak kental di masyarakat. Kentalnya pola hubungan tersebut dapat dinyatakan tidak lepas dari kesetiaan primordial di tengah masyarakat. Pola hubungan ini diketemukan tidak hanya pada tingkatan kelompok etnis, tetapi juga pada tingkat marga. Temuan lapangan yang didasarkan pada pengamatan menunjukkan bahwa kesetiaan primordial masih relatif kuat di kalangan penduduk asli. Kesetiaan terhadap kelompok-kelompok etnis di mana mereka menjadi anggotanya masih terasa kental. Orang Tehit cenderung mendahulukan kepentingan kelompoknya daripada kepentingan kelompok etnis lainnya. Demikian pula dengan orang Imekko dan Maybrat;

46 Mayoritas penduduk kampung Seribau menaati keputusan tokoh marga untuk memilih calon tertentu sebagai anggota DPRD Sorong Selatan pada Pileg 2009; mereka yang tidak menaati keputusan tersebut dikenai sanksi pengucilan, bahkan diminta untuk berpindah tempat tinggal.

mereka lebih mengutamakan kepentingan kelompoknya daripada kepentingan kelompok lainnya.

Selain itu, temuan data lapangan juga mengungkapkan bahwa corak hubungan patronase dan kesetiaan primordial diketemukan tidak hanya pada kelompok etnis asli, tetapi juga terdapat pada kelompok etnis pendatang (non-Papua). Hal yang membedakan taraf kesetiaan pada kelompok etnis asli dan kelompok etnis pendatang terletak pada 'pengikat' kesetiaan para anggotanya. Bila kesetiaan orang Papua asli terletak pada kesamaan etnisitas, maka kesetiaan para pendatang terletak pada kesamaan status sebagai 'orang luar atau pendatang'. Dalam posisinya sebagai orang luar, warga pendatang membutuhkan jaminan keamanan baik secara fisik maupun ekonomi; dan kebutuhan tersebut kerap berhasil menjadi tali pengikat bagi para pendatang dalam interaksi sehari-hari. Para pendatang yang berasal dari berbagai kelompok etnis merasa menjadi satu bagian dari kelompok yang sama karena adanya kebutuhan untuk memperoleh jaminan keamanan fisik dan ekonomi demi menjamin kelangsungan hidupnya. Dalam hal ini, seorang pendatang menyatakan bahwa yang menjadi daya ikat di antara ia dengan pendatang lainnya adalah perasaan senasib sepenanggungan. Para pendatang memiliki kesamaan kebutuhan saat datang ke Sorong Selatan, yakni untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Untuk keperluan itu, para pendatang membutuhkan situasi yang aman. Dalam situasi itu, pihak yang mampu menjamin rasa aman biasanya akan dijadikan tokoh panutan di kalangan pendatang.⁴⁷

Selain kepatuhan bercorak patronase terhadap tokoh dan adanya kesetiaan primordial terhadap kelompok, orang-orang Tehit, Imekko, ataupun Maybrat juga dilekati harga diri yang relatif tinggi. Berdasarkan pengamatan lapangan, mereka menjunjung tinggi martabat kelompok dan bersedia berkorban apabila keberadaan kelompoknya dilecehkan. Ilustrasi yang diperoleh dari

47 Wawancara dengan Ansar Sija, berlatar belakang kelompok etnis pendatang (Bugis, Buton, Makassar) pada 17 Juli 2010 di Teminabuan, Sorong Selatan.

pengamatan lapangan terkait dengan harga diri yang relatif tinggi adalah adanya semangat atau keinginan kuat untuk bersaing agar memperoleh predikat ‘paling’ di antara kelompok-kelompok yang ada. Bahkan, persaingan tidak hanya berlangsung di antara sesama kelompok etnis. Demi mempertahankan atau menjaga martabat, persaingan bisa berlangsung bahkan di antara anggota-anggota dalam keluarga inti. Hal ini menunjukkan harga diri yang relatif tinggi melekat pada masyarakat, terutama di kalangan orang Tehit, Imekko, dan Maybrat. Harga diri yang relatif tinggi tersebut diungkapkan oleh informan yang berlatar belakang etnis pendatang sebagai berikut:

“Kesetiaan yang tinggi terhadap kelompok etnis menjadi penyebab harga diri yang tinggi pada kelompok itu. Kesetiaan yang tinggi ini pula menjadi penyebab adanya sikap bersaing dan tak mau kalah dari kelompok lain. Mereka saling bersaing merebut status tinggi di antara sesama kelompok etnis.”⁴⁸

Dalam kaitannya dengan mobilisasi dukungan, berlakunya corak hubungan patronase pada masyarakat yang kesetiaan primordialnya masih relatif kental membuka peluang bagi tokoh etnis untuk melakukan peran yang signifikan dalam memobilisasi para anggota. Sehubungan hal itu, aktor (kandidat) bisa tidak secara langsung melakukan mobilisasi massa; mobilisasi bisa dilakukan melalui perantara tokoh etnis yang pada umumnya menduduki posisi jabatan struktural pemerintahan. Untuk keperluan itu, dituntut adanya kemampuan aktor (kandidat) dalam memanfaatkan ketokohan dari tokoh etnis tersebut untuk memobilisasi dukungan.

Kami’ dan ‘Mereka’ dalam Masyarakat

Keberadaan beberapa kelompok etnis dan berlangsungnya corak hubungan patronase dalam bingkai kesetiaan primordial

48 Wawancara dengan Suroso, berlatar belakang kelompok etnis pendatang (Jawa), pada 15 Juli 2010 di Teminabuan, Sorong Selatan.

menghadirkan sikap ‘kami’ dan ‘mereka’ di kalangan warga masyarakat. Meskipun, apabila disimak lebih mendalam, kehadiran sikap tersebut juga memberi kontribusi dalam memperkokoh keberadaan kelompok-kelompok etnis. Dengan demikian, ada hubungan timbal-balik kelompok etnis dengan sikap ‘kami’ dan ‘mereka’.

Sikap ‘kami’ dan ‘mereka’ yang mempertegas kehadiran kelompok-kelompok etnis ternyata tidak mengantarkan masyarakat Sorong Selatan menjadi masyarakat majemuk sebagaimana dikemukakan Furnival (1976). Kelompok-kelompok etnis di Sorong Selatan tidak terfragmentasi secara ketat sebagaimana diungkap Furnival; dalam kehidupan sehari-hari interaksi antar kelompok etnis yang berbeda tetap berlangsung dan berbaur satu sama lainnya.

Masyarakat Sorong Selatan tidak hanya tersekat dalam kelompok etnis, mereka juga tersekat dalam kelompok paling kecil yang disebut *kereth*. Kelompok etnis terdiri dari beberapa sub-etnis, dan satu sub-etnis terdiri dari beberapa kelompok semacam marga yang di dalamnya terdiri dari beberapa *kereth*.⁴⁹ Oleh karenanya, pengelompokan dalam masyarakat dapat dinyatakan berlangsung secara berjenjang. Sebagai ilustrasi, kelompok etnis Tehit terbagi ke dalam beberapa sub-etnis seperti Tehit Sawiat, Tehit Imyan, Tehit Salakhma; kelompok etnis Imekko terbagi ke dalam sub-etnis seperti Bira, Iwaro, Awee; dan kelompok etnis Maybrat terdiri dari beberapa sub-etnis seperti Ayamaru, Aifat, Aitinyo. Setiap sub-etnis terbagi ke dalam beberapa marga yang dikenal melalui nama belakang seseorang, misalnya Safflembolo, Momot, Kambuaya; dan dalam setiap marga, ada beberapa *kereth*.

49 *Kereth* merujuk pada kelompok yang terdiri dari beberapa keluarga inti yang masih berhubungan darah satu dengan lainnya, seperti keluarga inti anak pertama, keluarga inti anak kedua, dan seterusnya. Beberapa *kereth* mengelompok dalam marga, dan beberapa marga mengelompok dalam sub-etnis, dan selanjutnya beberapa sub-etnis mengelompok dalam kelompok etnis besar, misal kelompok etnis Tehit, Imekko, dan Maybrat (Wawancara dengan Michael Momot dan Dominggus Aifufu, pada 19 Juli 2010 di Teminabuan, Sorong Selatan).

Sementara itu, kelompok etnis pendatang non-Papua terbagi lagi ke dalam beberapa kelompok berdasarkan asalnya, seperti Jawa, Bugis, Buton, Makassar, dan Maluku.

Terkait dengan pengelompokan masyarakat tersebut, warga punya kesetiaan yang berjenjang pula. Kesetiaan yang paling mendasar ditujukan kepada keluarga inti (*batih*), kemudian melebar pada kesetiaan terhadap pada *kereth*, melebar lagi menjadi kesetiaan kepada marga, dan terakhir kesetiaan kepada kelompok etnis. Salah seorang tokoh adat menyatakan sebagai berikut:

“Bagi kami yang beretnis asli, kesetiaan tidak hanya ditujukan kepada kelompok etnis. Kami tunduk dan patuh kepada kelompok etnis, tetapi kami lebih tunduk dan patuh kepada *kereth* karena pertalian darah yang dekat di antara sesama anggota. Kesetiaan yang lebih dalam lagi kami haturkan kepada keluarga inti dari masing-masing individu.”⁵⁰

Kesetiaan kepada kelompok, disadari atau tidak disadari, memunculkan sikap ‘kami’ dan ‘mereka’ di kalangan warga masyarakat. ‘Kami’ menunjukkan sebagai ‘bagian’ dari kelompok atau *in-group*, dan ‘mereka’ menunjukkan ‘bukan bagian’ dari kelompok atau *out-group* (Eriksen, 1994: 23-42).

Kesetiaan berjenjang yang memunculkan sikap ‘kami’ dan ‘mereka’ menunjukkan adanya kesamaan sekaligus perbedaan. Sebagai ilustrasi, apabila anggota masyarakat berhadapan dengan orang-orang dari kelompok marga lain, walaupun dari kelompok etnis yang sama, maka ke-‘kami’-an mengacu pada lingkup kesamaan marga. Namun, ketika anggota kelompok etnis asli berinteraksi dengan anggota kelompok etnis asli lainnya, maka ke-‘kami’-an mengacu pada lingkup kesamaan kelompok etnis. Demikian pula, ketika orang asli Papua berinteraksi dengan orang non-Papua, maka ke-‘kami’-an menunjukkan kesamaan sebagai orang asli Papua. Yang disebut sebagai ‘mereka’ adalah orang di luar marganya ketika interaksi terjadi pada lingkup kelompok

50 Wawancara dengan Michael Momot, Ketua Dewan Adat Suku Tehit, pada 19 Juli 2010 di Teminabuan, Sorong Selatan.

etnis; 'mereka' adalah orang di luar etnisnya ketika interaksi terjadi pada lingkup orang Papua asli; dan 'mereka' dapat pula merujuk pada orang non-Papua ketika interaksi berlangsung di antara orang asli Papua dengan pendatang non-Papua.

Sementara itu, pada kelompok etnis non-Papua, ikatan mengacu pada etnisitas masing-masing. Sebagai misal, pendatang dari Jawa lebih mengedepankan ke-'kami'-an berdasarkan pertimbangan kesamaan sebagai orang Jawa. Demikian halnya dengan orang Bugis, Buton, Makassar, Ambon, ataupun yang berasal dari Nusa Tenggara Timur, ke-'kami'-an mengacu pada asal etnisitas masing-masing. Namun, ketika berhadapan dengan orang asli Papua, kelompok etnis pendatang non-Papua menjadikan sesama pendatang sebagai 'kami', dan orang Papua sebagai 'mereka'.

Apabila dibandingkan, sikap 'kami' dan 'mereka' pada orang asli dan pada pendatang, tampak pemilahan sikap 'kami' dan 'mereka' pada para pendatang relatif lebih cair. Hal ini berarti cara para pendatang dalam bersikap sebagai 'kami' dan memosisikan orang asli sebagai 'mereka' tidak seketal atau setegas orang Papua bersikap sebagai 'kami' dan para pendatang sebagai 'mereka'.

Adanya sikap 'kami' dan 'mereka' tak jarang memunculkan persaingan yang berujung konflik antarkelompok. Adanya sikap 'kami' dan 'mereka' menjadikan warga menempatkan martabat dan harga diri kelompok pada tingkat yang relatif tinggi. Dalam pandangan warga, kelompoknya adalah yang terbaik dibandingkan kelompok-kelompok lain. Penghargaan dan pembelaan terhadap kelompok dilakukan karena sikap ke-'kami'-an yang mengikat mereka.

Dalam konteks Pilkada 2010, sikap 'kami' dan 'mereka' yang muncul di masyarakat tak jarang mengacu pada perbedaan kelompok yang lebih kecil dari kelompok etnis, semacam marga. Hal ini karena beberapa kandidat berasal dari kelompok etnis yang sama, tetapi dengan marga berbeda. Sebagaimana diketahui,

Pilkada di Sorong Selatan diikuti lima pasangan calon yang berasal dari beragam kelompok etnis. Dari pasangan-pasangan calon tersebut, dua kandidat bupati berasal dari kelompok etnis Tehit; seorang kandidat berasal dari marga Flassy, yaitu Dance Yulian Flassy, dan kandidat lainnya berasal dari marga Safflembolo, yaitu Yunus Safflembolo. Bagi orang yang berasal dari marga Flassy, sebutan 'kami' mengacu pada sesama orang Flassy; dan sebutan 'mereka' ditujukan kepada orang di luar marga Flassy walau sama-sama berasal dari kelompok etnis Tehit. Demikian pula bagi orang yang berasal dari marga Safflembolo, sebutan 'kami' mengacu pada sesama orang Safflembolo; dan sebutan 'mereka' ditujukan orang di luar marga Safflembolo walau beretnis sama.

Munculnya sikap 'kami' dan 'mereka' juga menjadi salah satu penyebab sulit bersatunya kelompok-kelompok etnis. Bahkan di antara kelompok-kelompok etnis Papua asli muncul rasa kurang percaya satu kelompok terhadap kelompok lainnya. Ketidakpercayaan di antara sesama kelompok etnis terkait dengan perilaku atau tindakan pejabat pemerintah. Pejabat yang menduduki posisi jabatan tertentu berkecenderungan untuk mengisi jabatan pada tingkat staf dengan orang-orang yang berasal dari kelompok yang sama dengan dirinya; orang-orang yang berasal dari kelompok lain cenderung disingkirkan.⁵¹ Perilaku pejabat tersebut mempertegas pemilahan antara 'kami' dan 'mereka'; 'kami' adalah sesama anggota kelompok dan 'mereka' adalah bukan anggota kelompok. Hal ini membuktikan pula bahwa kesetiaan primordial masih relatif kuat dalam kehidupan bermasyarakat.

Kehadiran sikap 'kami' dan 'mereka' ternyata memunculkan rasa kurang percaya di antara kelompok etnis, terutama antara kelompok etnis asli yang satu terhadap kelompok etnis asli yang lainnya. Adanya rasa kurang percaya di antara kelompok etnis asli tersebut paralel dengan temuan studi yang dilakukan Timmer

51 Wawancara dengan Septon Athabu, pada 17 Juli 2010 di Teminabuan, Sorong Selatan.

(2007: 595-625) terkait sikap orang Papua terhadap elite yang berasal dari kelompok etnis asli. Dinyatakan dalam studi Timmer bahwa kecenderungan rasa tidak percaya terhadap para elite asli menghadirkan kecenderungan untuk lebih percaya kepada para elite pendatang yang beretnis non-Papua. Sementara itu, temuan studi menunjukkan bahwa rasa kurang percaya di antara sesama kelompok etnis asli menjadikan penduduk asli sulit bersatu dan bekerja sama; bahkan mereka cenderung memercayai dan bisa bekerja sama dengan para pendatang beretnis non-Papua.⁵²

Walaupun sikap ‘kami’ dan ‘mereka’ berpotensi memunculkan eksklusivitas kelompok, tetapi pembauran antarkelompok tetap berlangsung. Sementara itu, kehidupan eksklusif kelompok tidak mungkin terjadi di Sorong Selatan; hal ini dikarenakan setiap kelompok harus berinteraksi dengan kelompok lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana dibahas pada uraian terdahulu, pemenuhan kebutuhan di bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan menjadikan warga dari berbagai kelompok berbaur satu dengan yang lain.

Meskipun pembauran kelompok-kelompok etnis berlangsung, temuan lapangan menunjukkan bahwa sikap ‘kami’ dan ‘mereka’ tak jarang menghadirkan persaingan antarkelompok yang berujung pada konflik. Pembauran yang dilakukan melalui aktivitas bersama di sektor ekonomi riil yang berlangsung di pasar-pasar ternyata sulit untuk mengikis adanya sikap ‘kami’ dan ‘mereka’. Hal ini menunjukkan masih relatif kuatnya kesetiaan primordial melekat di masyarakat.

Dalam kaitannya dengan mobilisasi dukungan, sikap ‘kami’ dan ‘mereka’ dimanfaatkan untuk menggalang dukungan dalam rangka meraih kekuasaan. Sikap ‘kami’ bisa memperkuat solidaritas kelompok dalam mobilisasi. Agar bisa disebut sebagai bagian dari ‘kami’, anggota kelompok harus melibatkan diri

52 Wawancara dengan Suroso pada 24 Juli 2010 di Teminabuan, Sorong Selatan; dan wawancara dengan seorang sopir angkutan umum trayek Kota Teminabuan, Kota Sorong, pada 26 Juli 2010.

dalam mobilisasi. Apabila anggota kelompok tidak melibatkan diri dalam mobilisasi, yang bersangkutan dianggap bukan lagi bagian dari 'kami', melainkan sebagai bagian dari 'mereka'; sebagai konsekuensinya, yang bersangkutan akan disingkirkan apabila kelompoknya berhasil meraih kekuasaan.

III

Masyarakat Sorong Selatan dan Tradisi Pertukaran Kain Timur

URAIAN pada bab ini diawali dengan paparan tentang kebiasaan yang mentradisi di masyarakat Sorong Selatan. Tradisi yang berlaku di tengah masyarakat Sorong Selatan secara umum dipaparkan sebagai pengantar, yang selanjutnya dibarengi uraian terkait dengan tradisi pertukaran *Kain Timur*. Ulasan tentang tradisi ini mencakup bahasan jenis atau ragam *Kain Timur*, ‘kompleks *Kain Timur*’, dan keterkaitan tradisi ini dengan tipe kepemimpinan pria berwibawa atau dikenal dengan *big man*.

Tipe kepemimpinan pria berwibawa atau *big man* menghadirkan *bobot*, yakni seorang tokoh yang menjalankan peran memimpin masyarakat. Tradisi pertukaran *Kain Timur* bisa menjadikan seseorang menjadi *bobot*. Tradisi pertukaran ini bisa dimanfaatkan *bobot* untuk mempertahankan, bahkan memperbesar, pengaruh yang dimilikinya.

Sekilas Tradisi Masyarakat Sorong Selatan

Tradisi masyarakat Sorong Selatan bersumber dari adat istiadat yang masih terpelihara sejak zaman nenek moyang mereka sampai sekarang ini. Terkait dengan tradisi orang Tehit, Imekko, dan Maybrat, dapat dinyatakan bahwa mereka memiliki tradisi yang sama. Ketiga kelompok etnis ini punya tradisi yang esensinya sama walaupun wujud luarnya memiliki perbedaan. Etnis Tehit dan Maybrat memiliki tradisi pertukaran *Kain Timur* (Massink,

1997: 471-489, Sanggenafa dan Koentjaraningrat, 1994: 156-172), dan etnis Imekko punya tradisi pertukaran keramik sebagai alat tukar dan barang pemberian.⁵³ Walaupun wujudnya berbeda, pada prinsipnya tradisi pertukaran *Kain Timur* dan tradisi pertukaran keramik adalah sama; siapa yang menerima pemberian wajib mengembalikan dengan jumlah lebih besar. Terkait dengan tradisi pertukaran *Kain Timur*, Boelaars (1986: 134) berpendapat bahwa adalah lazim apabila suatu pemberian pembukaan disusul dengan pemberian balasan yang lebih berharga, dan pemberian balasan itu disusul lagi dengan pemberian pengukuhan. Lebih lanjut dinyatakan, apabila terjadi kelalaian pada pihak penerima dalam melakukan pembayaran kembali, maka keadaannya tidak terbatas hanya pada pernyataan kemarahan atau teriakan-teriakan yang menyampaikan pesan ancaman. Upaya pembunuhan dan pemukulan sampai mati merupakan kemungkinan yang bisa terjadi apabila kelalaian melakukan pengembalian ada pada pihak penerima. Boelaars menyatakan pula bahwa dengan melakukan pemberian lebih banyak berarti yang bersangkutan akan menerima balasan lebih banyak juga.⁵⁴

Gambaran di atas menunjukkan bahwa esensi yang terkandung dalam tradisi pertukaran *Kain Timur* dan keramik mengisyaratkan adanya kewajiban bagi pihak penerima untuk mengembalikan sesuatu yang telah diterima disertai *bunga* sebagai tambahannya. Apabila pihak penerima melalaikan atau mengingkari kewajiban itu, maka yang bersangkutan akan dikenai sanksi. Esensi dari tradisi tersebut tidak berbeda dengan pemberian hadiah atau sumbangan sebagaimana disebut oleh Mauss (1990) dan Hyde (1983) sebagai *gift*. Konsep pemberian

53 Wawancara dengan Michael Momot, Ketua Dewan Adat Suku Tehit, pada 19 Juli 2010; dan Dominggus Aifufu, tokoh masyarakat Imekko, pada 4 Agustus 2010. Kedua narasumber menyatakan bahwa tradisi *Kain Timur* ada di kelompok etnis Tehit dan Maybrat, sementara itu di kelompok etnis Imekko substansi dari tradisi *Kain Timur* tampil dalam wujud benda keramik seperti guci, piring, dan mangkok.

54 Boelaars (1986) menulis tentang orang Aifat; orang Aifat bersama-sama dengan orang Ayamaru dan Aitinyo termasuk dalam etnis Maybrat yang memiliki tradisi *Kain Timur*.

gift atau hadiah menghadirkan mekanisme memberi, menerima, dan mengembalikan pemberian yang diterima. Konsep *gift* ini secara tidak langsung menciptakan hubungan yang mengikat antara pemberi dan penerima. Demikian pula halnya dengan esensi tradisi pertukaran *Kain Timur* dan keramik juga menciptakan hubungan yang mengikat antara pihak pemberi dan penerima.

Pembahasan mengenai tradisi pertukaran *Kain Timur* tidak dapat dilepaskan dari model atau tipe kepemimpinan yang berlangsung di kawasan ini, yakni kepemimpinan pria berwibawa atau *local big-man* (Mansoben, 1994: 61-115). Dalam tipe kepemimpinan ini, pemimpin mendapatkan kedudukan melalui upaya-upaya tertentu, bukan berdasarkan garis keturunan. Di kawasan 'kepala burung' Papua, orang atau tokoh yang dipatuhi sebagai pemimpin harus mampu menunjukkan kemampuan untuk mengumpulkan sejumlah *Kain Timur*, dan kemampuan ini menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah orang yang memang memiliki kelebihan dibandingkan dengan orang kebanyakan.⁵⁵

Kepemimpinan pria berwibawa, sebagaimana dinyatakan Mansoben, mensyaratkan bahwa seorang pemimpin selain harus kaya, juga harus berkemampuan untuk berdagang, pandai berdiplomasi dan berperang, juga bersikap murah hati. Bersikap murah hati dimaknai sebagai perbuatan memberikan sumbangan atau hadiah kepada orang atau pihak lain. Pada hakikatnya, tindakan bermurah hati yang dilakukan seorang pemimpin bertujuan untuk memperluas pengaruhnya. Semakin banyak sumbangan yang diberikan, semakin banyak pengembalian yang diterima; pengembalian tersebut pada gilirannya memperkuat

55 Seseorang bisa menjadi pemimpin, disebut dengan istilah *bobot*, apabila mampu mengumpulkan sejumlah *Kain Timur*, atau *bo*. Untuk mengumpulkan *Kain Timur* dalam jumlah banyak, yang bersangkutan harus bertindak murah hati, yakni memberikan *Kain Timur* kepada sejumlah pihak dengan harapan memperoleh pengembalian dalam jumlah lebih banyak. Sehubungan dengan hal itu, seseorang harus kaya dan murah hati untuk menjadi pemimpin; dan yang bersangkutan harus bisa berdiplomasi (pintar bicara) dalam konteks perputaran atau sirkulasi *Kain Timur* (Mansoben, 1994: 61-115).

posisinya sebagai pemimpin. Oleh karena itu, pemberian hadiah atau sumbangan dapat dipergunakan untuk kepentingan politik pihak pemberi. Hal ini dikarenakan konsep *gift* dalam konteks pemberian hadiah atau sumbangan menunjukkan tidak adanya hal yang bersifat gratis.

Selain tradisi pertukaran *Kain Timur*, tradisi meramu juga masih terus berlangsung di Sorong Selatan. Tradisi meramu (Koentjaraningrat, 2002: 74) adalah kebiasaan masyarakat untuk mencari makan dengan cara berladang di satu tempat untuk kemudian berpindah ke tempat lain. Bila satu tempat tidak lagi memberi hasil ladang yang baik, maka ladang tersebut akan ditinggalkan dan masyarakat tersebut akan berpindah ke tempat lain yang menjanjikan hasil ladang lebih baik. Tradisi meramu dikenal oleh kelompok-kelompok etnis asli Papua. Mayoritas orang Tehit bermukim di dataran rendah dan mereka mengandalkan kehidupannya dengan cara meramu. Hal ini karena orang Tehit seolah-olah dimanjakan alam untuk memenuhi kebutuhan sagu sebagai makanan pokok. Banyaknya pohon sagu yang tumbuh secara liar menjadikan orang Tehit tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh makanan. Pekerjaan mereka cukup dengan menebang dan menogok pohon sagu; dan aktivitas ini tidak membutuhkan banyak tenaga, cukup dilakukan satu atau dua orang saja. Hasilnya, satu pohon sagu dapat dikonsumsi lebih dari setengah bulan tergantung dari isinya. Kondisi ini menunjukkan bahwa orang Tehit tidak perlu bekerja keras untuk memenuhi bahan makanan sebagai kebutuhan dasar. Apabila sagu tersebut habis, mereka akan bergeser ke tempat lain yang masih banyak ditumbuhi pohon sagu untuk kemudian ditogok.⁵⁶

Demikian pula halnya dengan orang Imekko dan Maybrat yang juga mengenal tradisi meramu. Orang Imekko yang hidup di wilayah pantai dan dataran rendah dimanjakan alam melalui kemudahan dalam hal menangkap ikan dan berladang.

56 Kebiasaan hidup meramu orang Tehit diceriterakan oleh Michael Momot, Ketua Dewan Adat Suku Tehit, pada 19 Juli 2010 di Teminabuan, Sorong Selatan.

Esensi tradisi meramu berlaku pada orang Imekko dalam hal menangkap ikan. Mereka dengan mudah berpindah dari satu lokasi penangkapan ke lokasi lainnya yang diperkirakan memberi hasil lebih banyak. Sementara itu, tradisi meramu pada orang Maybrat tidak karena dimanjakan alam, orang Maybrat menjalani hidup meramu justru dikarenakan lingkungan alam yang tidak subur (Sanggenafa dan Koentjaraningrat, 1994: 159). Orang Maybrat hidup sebagai petani ladang berpindah-pindah dengan menggunakan teknik *slash and burn cultivation* (Mansoben, 1994: 68). Mereka bekerja keras untuk memperoleh bahan makanan di satu lokasi dan akan berpindah ke lokasi lain apabila tumbuhan yang mereka tanam tidak memberikan hasil baik.

Bahasan tentang tradisi pertukaran *Kain Timur* di Sorong Selatan menunjukkan bahwa interaksi antar warga tidak dibatasi dalam ruang lingkup kelompok etnis. Tradisi pertukaran *Kain Timur* bisa berlangsung lintas kelompok etnis karena didasarkan pada mekanisme *gift* tanpa mempertimbangkan asal usul kelompok. Selain itu, esensi dari tradisi pertukaran *Kain Timur* dan tipe kepemimpinan pria berwibawa dapat diketemukan di semua kelompok etnis asli. Sementara itu, bahasan tentang tradisi meramu menunjukkan bahwa semua kelompok etnis asli memiliki tradisi ini sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Sorong Selatan bukan masyarakat majemuk sebagaimana dimaksud Furnival; masyarakat Sorong Selatan adalah masyarakat yang terdiri dari beberapa kelompok etnis yang dapat berinteraksi satu dengan lainnya.

Esensi Tradisi Pertukaran *Kain Timur*

Saat ini, untuk menemukan berlangsungnya transaksi pertukaran *Kain Timur* terbilang sulit. Namun demikian, pertukaran *Kain Timur* sebagai tradisi masih berlangsung di tengah kehidupan masyarakat Sorong Selatan. Di tengah kehidupan sehari-hari, esensi yang terkandung dalam tradisi

pertukaran *Kain Timur* mewarnai interaksi di antara anggota masyarakat, baik interaksi antarindividu maupun antarkelompok. Sebagaimana diungkap di atas, esensi yang terkandung dalam tradisi pertukaran *Kain Timur* mengisyaratkan adanya kewajiban bagi pihak penerima untuk mengembalikan sesuatu yang telah diterima disertai *bunga* sebagai tambahannya. Apabila pihak penerima melalaikan atau mengingkari kewajiban itu, maka yang bersangkutan akan dikenai sanksi.

Pengamatan lapangan menunjukkan bahwa mereka yang menerima pemberian dibebani kewajiban untuk melakukan pengembalian atas sesuatu yang diterimanya lantaran mereka merasa khawatir akan dikenai sanksi bila tidak mampu melakukan pengembalian balasan. Sanksi yang paling dikhawatirkan adalah sanksi sosial, di mana mereka bisa dikucilkan dari pergaulan kelompok bila tidak mampu melakukan pengembalian balasan; dan sanksi pengucilan merupakan hukuman yang relatif berat bagi masyarakat Sorong Selatan.

Pengamatan lapangan di atas paralel dengan pernyataan Ketua Dewan Adat Suku Tehit bahwa berlangsungnya tradisi pertukaran *Kain Timur* pada saat ini sulit diketemukan, tetapi esensi dari tradisi itu masih dijadikan panduan bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Terkait dengan hal itu, Ketua Dewan Adat Suku Tehit menyatakan bahwa:

“Kami yang hidup di sini, baik itu orang Tehit, Maybrat dan Imekko bahkan pendatang sekalipun, masih dipengaruhi tradisi dalam kehidupan sehari-hari. Kami berupaya untuk melakukan pengembalian balasan bila kami diberi sesuatu. Pengembalian balasan merupakan kewajiban yang harus dilakukan, apabila kami tidak melakukannya, kami akan dikenai sanksi; dan kami tentu merasa takut terutama kalau sanksinya adalah dikucilkan dari pergaulan.”⁵⁷

57 Wawancara dengan Michael Momot, Ketua DAS Tehit, pada 19 Juli 2010 di Teminabuan, Sorong Selatan.

Berdasarkan pengamatan lapangan, pernyataan di atas lebih tepat ditujukan bagi orang asli Papua, dalam hal ini orang Tehit, Maybrat, dan Imekko. Walaupun dinyatakan pendatang dalam kehidupannya yang dipengaruhi tradisi pertukaran ini, hal ini dikarenakan para pendatang tidak bisa dilepaskan dari pergaulan sehari-hari dengan orang asli. Pertimbangan yang dilakukan cenderung tidak dipengaruhi tradisi tersebut.

1. Mengenal “Kain Timur”

Kain Timur ialah sejenis kain ikat (*ikat-colth*) yang dapat ditemukan di pedalaman ‘kepala burung’ Papua (*the vogelkopt of New Guinea*). Berdasarkan studi yang dilakukan Elmberg (1955), Pouwer (1957), dan Kamma (1970), Mansoben (1994) menyatakan bahwa *Kain Timur* berasal dari Kepulauan Nusa Tenggara dan Kepulauan Maluku masuk ke daerah ‘kepala burung’ diperkirakan semenjak paruh pertama abad ke-16. Lebih lanjut, Mansoben menyatakan bahwa masuknya *Kain Timur* ke wilayah ‘kepala burung’ dan pantai barat Papua dapat ditelusuri melalui aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh para pedagang Nusa Tenggara dan Maluku. Melalui aktivitas perdagangan tersebut, akhirnya tradisi *Kain Timur* yang ada di pantai barat Papua berlanjut masuk ke wilayah pedalaman ‘kepala burung’.⁵⁸

Selain itu, terkait keberadaan *Kain Timur* berkembang pula mitos yang memaparkan asal usulnya. Mansoben (1994: 71-72)

58 Mansoben (1994: 75-76) menulis bahwa masuknya *Kain Timur* ke wilayah pedalaman ‘kepala burung’ dan pantai barat Irian Jaya (Papua) dapat ditelusuri lewat catatan-catatan sejarah dari Tome Pires dan Haga yang menyatakan bahwa pada awal abad ke-16, Pati Cucuf (Pati Usuf), Raja Grisee (Gersik), di pantai utara pulau Jawa melakukan perdagangan dengan Kepulauan Maluku dan Banda dengan menggunakan kapal-kapalnya sendiri. Rute perjalanan kapal-kapal Pati Usuf ke Kepulauan Maluku dan Banda itu melewati pulau-pulau Bali, Lombok, Sumba, dan Bima. Dari pulau-pulau ini, para pedagang Gersik membeli kain-kain yang berkualitas kurang baik—bila dibandingkan dengan kain patola yang berasal dari Gujarat, India, yang diperdagangkan di Jawa—untuk kemudian dijual di Banda. Selanjutnya, kain yang berkualitas kurang baik tersebut diperdagangkan untuk memperoleh budak, sagu, dan kulit massoi. Kemudian, kain tersebut dijual kepada penduduk pantai ‘kepala burung’, Irian Jaya; dan melalui penduduk pantai inilah kain tersebut masuk ke wilayah pedalaman ‘kepala burung’.

menuturkan salah satu mitos yang menyatakan bahwa *Kain Timur* diberikan oleh *tagu*, yaitu makhluk halus atau roh yang mendiami tempat-tempat tertentu, kepada nenek moyang pada waktu lampau. Mitos lainnya menyatakan bahwa *Kain Timur* dibawa oleh burung *taun-taun* (*hornbill*) yang merupakan penjelmaan dari nenek moyang; ada pula mitos yang menceritakan bahwa *Kain Timur* berasal dari dalam tanah, dipancing dari sungai atau diketemukan dalam batang kayu.⁵⁹ Sementara itu, Massink (2001) menuturkan asal usul *Kain Timur* dengan mengutip studi Schoorl yang mengisahkan mitos kemunculan *Kain Timur*. Dikisahkan seorang wanita yang tengah istirahat berbantalkan batu, wanita tersebut tertidur dan bermimpi bahwa ada ular di bawah bantal batu. Tat kala wanita ini terbangun, ia bangkit dan meraih parang seraya menggelundungkan batu; di sana, tidak diketemukannya ada ular sebagaimana mimpinya, tetapi yang ada adalah selembar kain, dan kain itu diyakini sebagai *Kain Timur*.

Jenis *Kain Timur* dapat dibedakan menjadi dua kategori, yakni yang bersifat sakral dan yang bersifat profan (Mansoben, 1994: 73-74, Massink, 2001: 475-477, Sanggenafa dan Koentjaraningrat, 1994: 162-166). *Kain Timur* yang dikategorikan sakral merupakan *Kain Timur* yang dipandang keramat dan disebut *wan* atau kain pusaka. *Wan* memiliki fungsi magis-religius. Kain ini dimiliki secara turun-temurun, dari ayah sebagai anak laki-laki tertua yang diturunkan kepada anak laki-lakinya yang tertua; dan kain ini dimanfaatkan untuk menjalin kontak dengan leluhur. Kontak dengan leluhur dilakukan di dalam rumah tengkorak tempat penyimpanan tengkorak para leluhur yang disebut sebagai *sachefra*. *Kain Timur* yang berkategori sebagai *wan* atau kain pusaka dapat dimanfaatkan pada saat pemiliknya mengalami kesulitan, misalnya anggota keluarga terkena penyakit atau mengalami kegagalan panen. Dalam keadaan seperti ini, *wan* atau kain pusaka dimanfaatkan dengan cara membentangkannya di

59 Dalam penuturannya, Mansoben mengutip studi yang dilakukan Elmberg (1955) dan Kamma (1970).

dalam *sachefra* seraya meminta mereka dibebaskan dari kesulitan yang tengah dihadapi.

Sementara itu, *Kain Timur* yang termasuk dalam kategori profan merupakan *Kain Timur* yang tidak berfungsi magis-religius. *Kain Timur* berkategori profan lebih berfungsi sebagai alat tukar sosial-ekonomis, dapat dipergunakan dalam hubungan tukar-menukar sebagai hadiah antarteman, dalam upacara perkawinan sebagai alat bayar mas-kawin, dan dalam kegiatan dagang sebagai alat tukar. *Kain Timur* berkategori ini disebut *bo* atau juga disebut sebagai *kain jalan*.⁶⁰

Selain pengategorian berdasarkan fungsi sakral atau profan, dalam studi yang dilakukan oleh Pouwer, sebagaimana dikutip Mansoben (1994: 73), *Kain Timur* dapat pula dikategorikan berdasarkan penggunaannya dalam bertransaksi. Dalam hal ini, terdapat dua jenis *Kain Timur*, yakni *Kain Timur* yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak yang lain tanpa mengharapkan penerimaan kembali *Kain Timur* dari pihak penerima. *Kain Timur* dalam kategori ini biasanya dinamakan 'kasih mati', yang artinya hilang dari pihak pemilik sejak digunakan sebagai alat tukar atau alat bayar. Dalam kategori ini termasuk *Kain Timur* yang digunakan untuk membayar mas-kawin, menukar hasil kebun, membayar tanah, ataupun membayar dukun. Sementara itu, jenis lainnya adalah *Kain Timur* yang digunakan untuk ditukarkan dengan *Kain Timur* lain. Kegiatan ini berkaitan dengan peningkatan prestise pribadi, bukan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Sementara itu, Elmberg (1955) sebagaimana ditulis Mansoben (1994: 75), mengategorikan *Kain Timur* menurut ukuran dari kain tersebut. Ada tiga jenis *Kain Timur* berdasarkan kategori ini. *Pertama*, jenis kain yang dinamakan *oan*, yakni *Kain Timur*

60 *Kain timur* berjenis profan yang berfungsi sebagai pembayar mas-kawin dan alat bayar disebut oleh orang Maybrat dengan nama *ru-ra*, yang berarti burung manusia, sebab harus terbang dan membuat keuntungan (Mansoben, 1994: 74-75, yang mengutip studi Elmberg, Schoorl, dan Miedema).

berukuran 2x2 meter; jenis ini merupakan *kepala kunci* atau yang paling berharga dibandingkan jenis lainnya. Dua jenis kain lainnya berukuran lebih kecil, yakni 1x1 meter dan 60 cmx40 cm.

Dalam hal pengategorian *Kain Timur*, Sanggenafa dan Koentjaraningrat (1994: 162-166) dalam studinya tentang orang Karon (salah satu kelompok etnis di wilayah ‘kepala burung’) menulis bahwa terdapat 12 jenis *Kain Timur*. Hal yang sama dinyatakan Kamma (1970), sebagaimana dikutip Mansoben, bahwa di Maybrat *Kain Timur* bahkan dapat diklasifikasikan menjadi 12 klas dan 550 sub-klas yang masing-masing dengan nama dan artinya sendiri.

Bahasan dalam studi ini difokuskan pada *Kain Timur* berjenis profan, bukan pada kain yang berjenis sakral atau kain pusaka yang berfungsi magis-religius. Dinyatakan oleh Massink (2001: 477) bahwa tokoh penting dalam hal kepemilikan dan peredaran *Kain Timur* adalah mereka yang disebut dengan *bobot*. Dikarenakan warisan yang kemudian terdapat status kepemilikan atas *wan* atau kain pusaka yang bersifat sakral, seseorang bisa diterima di kalangan atas masyarakat dan disebut *bobot*. Oleh karena itu, apabila memiliki *wan* atau kain pusaka, *bobot* akan dapat memonopoli hubungan dengan leluhur; yang oleh karena itu pula, ia akan memiliki peluang besar untuk memiliki *bo* atau *Kain Timur* yang berfungsi sosial-ekonomis sebagai alat tukar.

Sebagaimana disinggung di atas, dalam perkembangannya terjadi monopoli kepemilikan *Kain Timur* di tangan sejumlah kecil orang yang berstatus sebagai *bobot*. Oleh karenanya, tak berlebihan apabila Miedema (dalam Massink, 2001: 481) mensinyalir berlangsungnya ‘kapitalisme *Kain Timur*’ di wilayah ‘kepala burung’. Dalam kondisi seperti ini, sebagian besar warga mengalami kesulitan untuk memiliki *Kain Timur* yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Kesulitan ini membawa dampak, antara lain, sulitnya seorang pemuda untuk kawin karena tidak mampu menyediakan *Kain Timur* sebagai mas-kawin, atau

kesulitan seseorang untuk membayar denda. Sehubungan dengan hal tersebut, tulisan Massink (2001: 481-486) menyatakan karena kesulitan mengumpulkan dan memiliki *Kain Timur* dialami sebagian besar warga, Pemerintah Hindia Belanda yang tatkala itu masih ada di tanah Papua melarang penggunaan *Kain Timur* sebagai alat tukar.

Pelarangan penggunaan *Kain Timur* sebagai alat tukar tidak berarti menghilangkan esensi dari tradisi pertukaran *Kain Timur*. Sebagaimana disinggung di atas, esensi dari tradisi pertukaran *Kain Timur* mengisyaratkan bahwa pihak yang menerima pemberian punya kewajiban untuk melakukan pengembalian sebagai balasan atas pemberian yang telah diterima beserta tambahannya sebagai bunga. Sampai saat ini, berdasarkan pada pengamatan lapangan dan wawancara dengan sejumlah informan⁶¹, diketahui bahwa esensi tradisi pertukaran *Kain Timur* masih dijadikan rujukan sebagian besar warga Sorong Selatan dalam kehidupan sehari-hari. Warga masyarakat masih memegang tradisi bahwa mengembalikan pemberian yang diterima adalah suatu kewajiban, dan masyarakat menyadari ada sanksi bagi dirinya apabila kewajiban melakukan pengembalian balasan tidak dilakukan.

2. 'Kompleks Kain Timur'

Dalam fungsinya sebagai alat tukar, tradisi pertukaran *Kain Timur* menghadirkan sistem pertukaran yang dikenal sebagai '*kompleks Kain Timur*'. '*Kompleks kain timur*' merujuk pada sistem pertukaran dalam pembentukan kesatuan sosial yang lebih luas daripada sistem ekonomi yang bersifat *self-support*, yang biasanya terbatas kesatuan sosial berbentuk keluarga batih (Mansoben, 1994: 71). '*Kompleks Kain Timur*' yang merujuk pada sistem pertukaran tersebut sebagai 'sistem tukar-menukar *Kain Timur* yang berpacara'. Berlangsungnya pertukaran *Kain*

61 Wawancara dengan Yunus Duwit pada 15 Juli 2010, Martinus Salamuk pada 16 Juli 2010, dan Michael Momot pada 19 Juli 2010. Semua wawancara dilakukan di Teminabuan, Sorong Selatan.

Timur menghadirkan kesatuan sosial yang tidak hanya berbasis pada kelompok marga atau *clan*, tetapi bisa pula menghadirkan kesatuan sosial atas dasar sistem pertukaran (tukar-menukar) antara anggota masyarakat. Untuk mengetahui sistem pertukaran *Kain Timur*, atau yang dikenal sebagai '*kompleks Kain Timur*', perlu diulas terlebih dahulu sistem perkawinan yang ada. Hal ini karena '*kompleks Kain Timur*' berkaitan sangat erat dengan sistem perkawinan antar golongan kesukuan (*tribal*) yang ada di wilayah pedalaman 'kepala burung' (Mansoben, 1994: 72).

Mansoben (1994: 72-73), dengan mengutip studi yang dilakukan Galis (1956), Elmberg (1968), Kamma (1970), dan Miedema (1984), menyatakan bahwa sistem perkawinan antara penduduk yang terbentuk dalam kelompok-kelompok kekerabatan kecil dan terbatas diatur secara ketat melalui prinsip pertukaran saudara perempuan; seorang laki-laki yang tidak punya saudara perempuan tidak akan dapat kawin. Meskipun demikian, kadang-kadang babi dan budak juga diterima sebagai pengganti saudara perempuan sehingga seorang laki-laki yang tidak punya saudara perempuan dapat kawin. Pada masa itu, sering terjadi peperangan antar kelompok atau antarsuku, babi yang punya nilai penting sebagai alat tukar dalam sistem perkawinan sulit untuk dibawa menempuh jarak yang jauh. Hal ini berbeda dengan alat tukar yang berasal dari wilayah pantai seperti gelang kulit kerang, manik-manik, ataupun piring batu yang relatif mudah untuk dibawa menempuh jarak jauh. *Kain Timur* yang masuk ke pedalaman melalui pantai dinilai sebagai benda langka, dan karenanya bernilai sangat tinggi di wilayah pedalaman dan punya arti penting untuk peningkatan status sosial. Oleh karenanya, *Kain Timur* mengambil alih fungsi sebagai pembayar mas-kawin. Dengan demikian, *Kain Timur* dalam sistem perkawinan di antara penduduk pedalaman 'kepala burung' berfungsi sebagai pengganti sistem perkawinan dan tukar-menukar antara saudara perempuan. Dalam perkembangannya, *Kain Timur* menjadi benda pembayar mas-kawin yang lebih penting di antara benda-

benda lainnya. Lebih lanjut, Mansoben mengutip studi Miedema yang menyatakan bahwa bila pada masa lalu seorang laki-laki yang tidak punya saudara perempuan tidak dapat kawin, pada waktu sekarang seorang laki-laki yang tidak punya *Kain Timur* tidak dapat kawin.

Lebih lanjut, Mansoben (1994: 73-75) menyatakan bahwa bila semula *Kain Timur* hanya dipakai sebagai alat bayar mas-kawin, tetapi kemudian diterima sebagai alat bayar pada umumnya seperti digunakan untuk membeli obat suanggi, untuk mengongkosi upacara inisiasi, untuk menyewa seseorang membunuh atau menculik orang lain. Mansoben, dengan mengutip studi Miedema, menyatakan bahwa *Kain Timur* memperoleh suatu nilai ekonomi, dan melalui nilai ini *Kain Timur* berkedudukan penting dalam kehidupan masyarakat.

Transaksi-transaksi yang berlangsung di masyarakat menghadirkan '*sirkulasi Kain Timur*', yakni transaksi-transaksi yang menggambarkan perputaran *Kain Timur*. Transaksi-transaksi tersebut biasanya dilakukan di tempat-tempat khusus dan pada kesempatan-kesempatan tertentu (Mansoben, 1994: 79-80). Tempat transaksi *Kain Timur* berlangsung berupa bangunan yang disebut *sachefra* atau rumah pesta tengkorak, dan bangunan yang disebut *seblach bach* atau rumah pesta pertandingan (*spelhuis*). Sementara itu, momen bagi pelaksanaan transaksi adalah saat berlangsungnya suatu upacara atau pesta tertentu, misal pada upacara pembayaran tulang orang yang telah meninggal dunia, pada upacara inisiasi, atau pada pesta pernikahan. Di rumah bangunan *sachefra* yang bersifat sakral dan di rumah bangunan *seblach bach* yang bersifat profan berlangsung '*sirkulasi Kain Timur*'.

Berdasarkan pada tulisan Mansoben (1994: 79-82) dapat dituturkan bahwa atas prakarsa *bobot* dibangun rumah upacara dan dikumpulkan bahan makanan dan *Kain Timur* untuk disimpan di dalam rumah upacara. Jika semua persiapan yang dibutuhkan

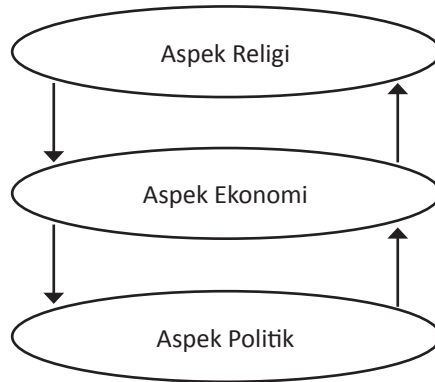
untuk menyelenggarakan upacara sudah siap, maka pemrakarsa (dalam hal ini *bobot*) mengundang semua kerabat. Upacara pembayaran tulang berupa pemberian sejumlah *Kain Timur* oleh pemrakarsa (*ego*) kepada ibunya yang disaksikan kerabat dari pihak ayah dan ibu, dan dilanjutkan dengan penyerahan pemberian dari pihak istri kepada *ego*. Tahap upacara ini terdiri dari dua mata acara, yaitu pembayaran tulang kepada pihak ibu oleh *ego* yang bertindak sebagai pemrakarsa, dan penyerahan *Kain Timur* (yang disebut *ru-ra*) dari pihak istri kepada *ego*. Upacara pada tahap ini bersifat sakral dan diselenggarakan di rumah upacara *sachefra*.

Lebih lanjut, Mansoben menuturkan, upacara yang bersifat sakral ini disusul oleh upacara yang bersifat profan di rumah pesta *seblach bach*. Acara dalam upacara yang bersifat profan berupa pembagian *ru-ra* atau pemberian yang diterima dari pihak istri oleh pemrakarsa kepada para hadirin. Oleh karenanya, *ru-ra* dapat dinyatakan masuk dalam 'sirkulasi *Kain Timur*'. Setiap penerima *ru-ra* berhak penuh atas penggunaannya, misalnya bisa digunakan sebagai alat pembayar mas-kawin ataupun untuk membayar denda. Selang beberapa waktu, demikian penuturan Mansoben yang mengutip studi Pouwer, pemrakarsa upacara (dalam hal ini *bobot*) mengundang para *debitor*-nya untuk mengembalikan utang-utangnya. Pembayaran kembali itu biasanya disertai dengan suatu *toegift*, suatu pemberian tambahan. Pemberian tambahan ini terkadang bisa dua kali lipat lebih banyak daripada apa yang pernah diterima. Kemudian, dituturkan bahwa pada saat pelaksanaan pengembalian utang dilukiskan sebagai saat yang menegangkan, sebab terjadi proses tawar-menawar antara pemberi dan penerima. Semua barang (dalam hal ini *Kain Timur* berjenis *ru-ra*) yang harus dikembalikan dan barang yang dijadikan tambahan diperiksa dengan teliti. Apabila tidak terjadi kesepakatan, maka kepada *debitor*-nya diminta untuk menambah barang sebagai tambahan. Jika pemrakarsa merasa puas dengan nilai dan kualitas dari benda yang dipergunakan untuk membayar utang, maka *debitor* dipandang sudah memenuhi kewajibannya,

yakni melakukan pengembalian balasan disertai bunga sebagai tambahan.

Uraian sebagaimana dituturkan Mansoben di atas menempatkan pemrakarsa (*bobot*) sebagai titik sentral dalam 'sistem tukar-menukar *Kain Timur* berupacara'. Pemrakarsa dapat dinyatakan bisa mempertemukan kelompok-kelompok yang berbeda asalnya, baik yang berasal dari kerabat pihak pria (suami), dari pihak wanita (istri), ataupun dari teman-teman mereka yang berasal dari kelompok marga atau klan berbeda. Pertemuan yang diprakarsai *bobot* tersebut berlangsung atas perantaraan suatu upacara ritual, yakni *upacara pembayaran tengkorak*. Hal ini menunjukkan bahwa aspek religi berperan sebagai media pertemuan antara kelompok-kelompok yang berbeda tadi. Pemanfaatan upacara ritual sebagai media pertemuan, demikian dituturkan Mansoben, juga berfungsi sebagai media pertemuan untuk kepentingan ekonomi, yakni berlangsungnya proses tukar-menukar *Kain Timur* yang pada gilirannya mengangkat prestise sosial bagi yang terlibat. Dengan demikian, upacara tukar-menukar tersebut mengandung tiga dimensi, yakni: religi, ekonomi, dan politik. Aspek religi dalam proses tukar-menukar dapat dinyatakan sebagai pendorong bagi seseorang untuk berprestasi di bidang ekonomi, dan keberhasilan di bidang ekonomi bisa mendatangkan kekuasaan politik yang mengangkat prestise sosial seseorang. Kekuasaan yang diperoleh seseorang tersebut menjadi mantap karena memperoleh pengabsahan religi. Demikian pula sebaliknya, kekuasaan politik yang mantap memungkinkan bertambah banyaknya keberhasilan seseorang di bidang ekonomi, di mana keberhasilan di bidang ekonomi merupakan syarat mutlak terselenggaranya intensifikasi upacara-upacara ritual.

Lebih lanjut, Mansoben menyatakan bahwa dalam proses tukar-menukar *Kain Timur*, aspek-aspek religi, ekonomi, dan politik terkait satu dengan lainnya dalam hubungan *sibernetik* sebagaimana ditampilkan dalam gambar berikut ini.

Gambar 3-1. Hubungan *sibernetik* antara Religi, Ekonomi, dan Politik

Sumber: Mansoben, 1994:82

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa mekanisme pertukaran *Kain Timur* tidak bisa lepas dari aspek religi, ekonomi, dan politik. Namun, sebagaimana telah disinggung pada uraian terdahulu, Pemerintah Hindia Belanda yang saat itu masih berada di tanah Papua melarang penggunaan *Kain Timur* sebagai alat tukar. Semenjak itu, pertukaran *Kain Timur* menjadi semakin jarang dilakukan dan bahkan dapat dinyatakan tidak lagi berlangsung di masyarakat. Walaupun demikian, pelarangan penggunaan *Kain Timur* sebagai alat tukar tidak berarti menghilangkan esensi dari tradisi pertukaran *Kain Timur*. Esensi dari tradisi pertukaran *Kain Timur* mengisyaratkan bahwa pihak yang menerima pemberian berkewajiban untuk melakukan pengembalian sebagai balasan atas pemberian yang telah diterima beserta tambahannya sebagai bunga. Terkait dengan esensi pertukaran *Kain Timur*, Mansoben mengutip hasil studi yang dilakukan Elmberg yang menyatakan bahwa *Kain Timur* harus selalu bergerak, artinya harus secara terus-menerus beredar dari satu orang kepada orang lainnya, dan peredaran itu harus membawa keuntungan. Prinsip ini dinyatakan dalam ungkapan: *to bo saw, murio tefo*, artinya ‘saya menerima satu, saya mengembalikan banyak’ (Mansoben, 1994: 80).

Pada saat ini, berdasarkan pengamatan lapangan, esensi tradisi pertukaran *Kain Timur* yang mengisyaratkan bahwa pihak penerima berkewajiban melakukan pengembalian balasan masih terasa keberadaannya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Sorong Selatan. Sebagai ilustrasi, suatu keluarga yang menerima pemberian berupaya untuk melakukan pemberian balasan dalam jumlah dan nilai yang lebih banyak. Upaya melakukan pengembalian balasan wajib dilakukan karena apabila tidak dilakukan maka keluarga tersebut akan terkena sanksi sosial. Pada saat ini, sanksi sosial terwujud dalam bentuk pengucilan di keseharian, dan pengucilan merupakan sanksi yang dirasakan paling berat bagi masyarakat Sorong Selatan.

3. Tradisi Pertukaran Kain Timur, Kepemimpinan Pria Berwibawa, dan Tradisi Meramu

Tipe kepemimpinan 'pria berwibawa atau juga dikenal sebagai tipe kepemimpinan *'big man'* merupakan bentuk atau tipe kepemimpinan politik yang ditandai adanya kewibawaan (*authority*) yang dimiliki seseorang atas dasar kemampuannya untuk mengalokasikan dan merelokasikan sumber-sumber daya yang penting untuk umum (Masoben, 1994: 62).⁶² Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa tipe kepemimpinan pria berwibawa atau *'big man'* ditandai oleh adanya upaya pencapaian (*achievement*) berdasarkan kualitas kemampuan perorangan, bukan atas dasar garis keturunan. Dalam tipe kepemimpinan ini, upaya pencapaian tampak pada kemampuan seseorang untuk memanfaatkan sumber daya guna mencapai tujuan.

Terkait dengan upaya pencapaian tersebut, ada pendapat yang menyatakan bahwa upaya itu bisa menghadirkan ketidakstabilan dalam tipe atau bentuk kepemimpinan *'big man'* itu sendiri (van Bakel *et. al.*, 1986 dalam Mansoben, 1994: 62). Implikasi dari

62 Mansoben mengutip pendapat Sahlins (1963) dan Claessen (1984) dalam mengemukakan pendapat tentang konsep *big man*.

ketidakstabilan tersebut adalah bahwa dalam tipe kepemimpinan ini terbuka kesempatan yang sama bagi setiap anggota masyarakat, terutama kaum pria yang sudah dewasa, untuk bersaing merebut kedudukan pemimpin.

Selain terlekatinya ciri adanya upaya pencapaian, tipe kepemimpinan pria berwibawa juga mengisyaratkan bahwa seseorang bisa menjadi pemimpin bila yang bersangkutan punya kekayaan. Hal ini didasarkan pada studi-studi etnografi yang menunjukkan bahwa atribut yang digunakan untuk mengukur kemampuan seseorang untuk menjadi pemimpin adalah kekayaan (Chowing, dalam Mansoben, 1994: 63).⁶³ Lebih lanjut, dinyatakan bahwa meski kekayaan merupakan atribut penting, untuk menjadi pemimpin, seseorang tidak dapat hanya mengupayakan semata-mata dengan kekayaan saja. Selain kekayaan, untuk menjadi pemimpin orang tersebut harus terlekatinya karakter murah hati. Sikap murah hati harus ditampilkan melalui tindakan nyata, seperti membagikan sumbangan atau hadiah pada saat upacara ritual atau pesta perkawinan.

Sebagaimana dinyatakan Mansoben (1994: 83), dalam tipe kepemimpinan pria berwibawa atau *big man*, seseorang perlu pula punya kemampuan untuk berdiplomasi (pintar bicara) dalam rangka memanfaatkan atau memanipulasi sumber-sumber daya. Sikap murah hati tidak cukup menjadikan seseorang sebagai pemimpin tanpa disertai kemampuan berdiplomasi, yakni kemampuan menawarkan maksud dengan perkataan menarik agar tawarannya mendapatkan persetujuan dari pihak lain. Kemampuan berdiplomasi ini tidak ubahnya dengan kemampuan berdagang,⁶⁴ di mana dengan kemampuan atau kepintarannya

63 Menurut kebanyakan studi etnografi tentang kepemimpinan, '*big man*' atau pria berwibawa dan seperti yang disimpulkan Chowing, dinyatakan bahwa kekayaan merupakan wujud nyata kemampuan di bidang ekonomi; oleh karenanya, kekayaan merupakan salah satu atribut dalam tipe kepemimpinan '*big man*' yang mensyaratkan adanya upaya pencapaian.

64 Kemampuan berdagang sebagai syarat untuk bisa menjadi pemimpin politik dilukiskan oleh Pouwer, sebagaimana dikutip Mansoben (1994: 65-66), sebagai berikut: "... dia menjual *sauger* (tuak)-nya dengan harga setalen, uang setalen itu diberikan kepada

berbicara seseorang bisa memanfaatkan dan memanipulasi sumber-sumber daya itu untuk memperoleh keuntungan yang pada gilirannya mengantarkannya menjadi pemimpin. Dalam konteks ini, dapat dinyatakan adanya hubungan antara aspek ekonomi dengan aspek politik, di mana kekayaan dan kemampuan berdiplomasi (berdagang) bisa mengantarkan seseorang menjadi pemimpin yang berkuasa.

Sebagaimana diungkap di atas, bahwa untuk menjadi pemimpin dibutuhkan upaya pencapaian (*achievement*), dan untuk menghadirkan upaya tersebut diperlukan kemampuan yang salah satu indikatornya berupa kekayaan. Terkait dengan hal tersebut, orang yang memiliki dan mengumpulkan *Kain Timur* dalam jumlah banyak berpeluang untuk menjadi pemimpin. Hal ini karena *Kain Timur* dinilai sebagai harta kekayaan bagi masyarakat di pedalaman 'kepala burung'. Sementara itu, pihak yang memiliki dan mampu mengumpulkan *Kain Timur* dalam jumlah banyak adalah *bobot*; dan oleh karenanya *bobot* berpotensi menduduki posisi pemimpin di masyarakat. Sehubungan dengan hal ini, Massink (2001: 477) menulis bahwa *bobot* memperoleh *Kain Timur* yang bersifat sakral (yang disebut *wan*) karena warisan; oleh karenanya yang bersangkutan bisa memonopoli hubungan dengan leluhur melalui upacara ritual yang pada gilirannya melalui upacara ritual tersebut ia bisa memiliki banyak *bo* atau *Kain Timur* bersifat profan. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa *bobot* diidentikkan dengan orang kaya yang diindikasikan punya kemampuan untuk memanfaatkan dan memanipulasi sumber daya untuk bisa menjadi pemimpin yang berkuasa.

Sebagaimana dibahas pada uraian terkait dengan 'Kompleks *Kain Timur*' di atas, seorang *bobot* menjalankan peran sentral dalam transaksi pertukaran *Kain Timur*, baik dalam upacara yang

ipar-iparnya. Ia menerima kembali dari ipar-iparnya dua talen (50 sen). Uang 50 sen itu diberikan kepada ipar-iparnya yang lain. Darinya, ia menerima kembali satu rupiah. Demikianlah uang setalen itu beredar terus sampai mencapai 25 rupiah. Jika ada orang yang berhasil seperti ini, maka ia dapat disebut *bobot*, pemimpin."

diselenggarakan di rumah *sachefra* ('rumah pesta tengkorak') untuk keperluan ritual yang bersifat religius ataupun di rumah *sablach bach* ('rumah pesta pertandingan') untuk keperluan yang bersifat profan (Mansoben, 1994: 79-82). Dalam kegiatan berpacara tersebut, *bobot* dengan bekal *Kain Timur* yang dimiliki melakukan transaksi dengan pihak-pihak lain yang menjadi rekannya. Dalam transaksi tersebut, setiap *bobot* punya rekan, sebagaimana diungkap Mansoben (1994: 77) yang mengutip studi yang dilakukan Kamma (1970: 139), bervariasi antara 8 hingga 60 orang; dan rekan-rekan tersebut juga punya rekan-rekan lain lagi sehingga secara keseluruhan mereka membentuk suatu jaringan 'teman dagang' yang meliputi seluruh wilayah pedalaman 'kepala burung'.

Dalam hal bertransaksi tersebut, demikian tulis Mansoben selanjutnya, setiap penerima berusaha mengembalikan kepada pemberi sejumlah *Kain Timur* yang lebih banyak dan dari bahan yang berkualitas lebih baik dari apa yang diterimanya. Tindakan ini membawa dampak, yakni di satu pihak mendatangkan keuntungan materi bagi penerima, dan di pihak lain menyebabkan naiknya prestise bagi pemberi. Adanya dampak tersebut yang disertai adanya pandangan untuk selalu mengembalikan dalam jumlah lebih banyak kepada pihak pemberi memunculkan persaingan yang terus-menerus untuk saling memberi dan mengembalikan. Persaingan terutama terjadi di antara sesama *bobot* yang berupaya untuk menaikkan prestise diri. Hal ini paralel dengan studi Pouwer (1957: 304) sebagaimana dikutip Mansoben (1994: 78) yang menyatakan bahwa tujuan tukar-menukar *Kain Timur* bukan untuk mencapai kesejahteraan sosial, melainkan untuk mendapatkan prestise; atau dengan perkataan lain, tujuan pertukaran *Kain Timur* adalah untuk mencapai kedudukan terpandang dalam masyarakat.

Di masyarakat, kekayaan (memiliki *Kain Timur* dalam jumlah banyak) menjadikan seseorang bisa punya pengikut, dan yang bersangkutan punya hak untuk membuat keputusan. Dalam konteks ini, tampak keterkaitan aspek ekonomi dengan aspek

politik. Seorang *bobot* dengan kemampuan di bidang ekonomi yang diindikasikan melalui kekayaan *Kain Timur* yang dimiliki bisa membangun hubungan sosial dengan warga masyarakat lainnya. Sehubungan dengan hal itu, Mansoben (1997: 78) menyatakan bahwa hubungan sosial yang terbangun bisa bercorak simetris dan bisa pula bercorak asimetris. Hubungan yang bercorak simetris menunjukkan hubungan yang berlangsung antar *bobot* dalam kedudukan atau posisi dan peran yang relatif sama. Sementara itu, hubungan yang bercorak asimetris menunjukkan hubungan yang berlangsung antara seorang *bobot* dengan anggota-anggota masyarakat lainnya yang tidak berstatus *bobot*. Hubungan yang bercorak asimetris menyerupai hubungan *patron-client*, di mana *bobot* berperan sebagai *patron* dan anggota masyarakat lain yang bukan *bobot* (terutama anak buah *bobot* yang disebut *kusema*) berperan sebagai *client*. Kedudukan dan peran *bobot* dalam hubungan bercorak asimetris menjadi penting karena dapat menggunakan wewenang yang diperoleh dari kedudukannya untuk 'memaksakan' kehendaknya terhadap orang lain.

Seorang *bobot*, untuk menjadi pemimpin sebagaimana disinggung di atas, juga harus bersifat murah hati. Adapun artinya, untuk menjadi pemimpin, seorang *bobot* harus tidak segan memberi bantuan kepada orang lain. Pemberian bantuan atau sumbangan ini paralel dengan konsep *gift* sebagaimana dikemukakan Mauss (1990) dan Hyde (1983), di mana pada gilirannya bantuan atau sumbangan itu secara tidak langsung akan membentuk ikatan antara pihak pemberi dan pihak penerima. Misalnya, seorang *bobot* memberi bantuan berupa peminjaman *Kain Timur* kepada orang yang membutuhkan untuk pembayaran mas-kawin, maka terjalin ikatan hubungan di antara keduanya.

Hubungan di antara pihak pemberi dan pihak penerima tersebut, sebagaimana tercermin pula dalam transaksi pertukaran *Kain Timur*, selain membentuk kekuatan pengikat sekaligus juga merupakan kekuatan pendorong bagi pihak penerima untuk melakukan pengembalian balasan kepada pihak pemberi. Dari

sisi pandang politik, dinyatakan oleh Mansoben (1994: 63) bahwa melakukan pemberian merupakan modal bagi pihak pemberi untuk mengikat pihak penerima, di mana pihak penerima diikat menjadi pendukung guna mencapai tujuan politiknya. Semakin banyak bantuan atau sumbangan diberikan, menjadi semakin banyak pula orang yang diikat sebagai pendukung; dan hal ini berarti pula semakin kuat kedudukan politik dari pihak pemberi.

Terkait dengan pemberian bantuan atau sumbangan, menarik disimak pendapat Bailey (dalam Mansoben, 1994: 63) yang menyatakan bahwa pemberian yang digunakan untuk kepentingan politik merupakan 'racun' bagi pihak penerima. Hal ini karena pemberian yang terus-menerus dilakukan secara sepihak dapat menciptakan hubungan yang bercorak asimetrisme, di mana pihak pemberi berperan sebagai *patron* dan pihak penerima berperan sebagai *client*.

Dalam konteks tipe kepemimpinan pria berwibawa atau *big man*, hubungan yang menciptakan ketergantungan pihak penerima kepada pihak pemberi sangat relevan. Seorang *bobot* yang berkeinginan menjadi pemimpin berkuasa akan memanfaatkan dan memanipulasi kekayaan (dalam hal ini *Kain Timur*) yang dimilikinya untuk memperoleh dukungan dari penerima bantuan atau sumbangan darinya.

Terkait dengan bahasan di atas, perlu disimak bahwa berlangsungnya tradisi pertukaran *Kain Timur* tidak bisa dipisahkan dari berlangsungnya tradisi meramu yang juga ada di Sorong Selatan. Sebagaimana telah disinggung pada uraian terdahulu, tradisi meramu juga adalah salah satu kebiasaan masyarakat Sorong Selatan di masa lalu. Pada masa lalu, orang Tehit yang mayoritas bermukim di dataran rendah yang subur seolah-olah dimanjakan alam untuk memenuhi kebutuhan sagu sebagai makanan pokok. Banyaknya pohon sagu yang tumbuh secara liar menjadikan orang Tehit tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh makanan. Apabila persediaan sagu

habis, mereka akan bergeser ke tempat lain yang masih banyak ditumbuhi pohon sagu untuk kemudian ditogok. Sementara itu, orang Imekko yang hidup di wilayah pantai dan dataran rendah dimanjakan alam melalui kemudahan dalam hal menangkap ikan dan berladang. Mereka akan dengan mudah berpindah dari satu lokasi penangkapan ke lokasi lainnya yang diperkirakan memberi hasil lebih banyak. Demikian pula halnya dengan orang Maybrat, tradisi kehidupan meramu pada orang Maybrat tidak karena dimanjakan alam, mereka menjalani hidup meramu justru karena lingkungan alam yang tidak subur. Orang Maybrat bekerja keras untuk memperoleh bahan makanan di satu lokasi, dan akan berpindah ke lokasi lain apabila tumbuhan yang mereka tanam tidak memberikan hasil yang baik.

Esensi tradisi kehidupan meramu menunjukkan bahwa hasil yang lebih baik dan menguntungkan dijadikan bahan pertimbangan seseorang dalam melakukan aktivitas pekerjaan. Dalam kaitannya dengan esensi tradisi pertukaran *Kain Timur*, pemberian yang diterima adalah pemberian yang dinilai paling menguntungkan baginya. Seseorang akan beralih pada tawaran pemberian lain, apabila tawaran pemberian yang lain tersebut memberikan hasil yang lebih baik dan menguntungkan baginya.

Ringkasnya, dalam kaitannya dengan esensi tradisi pertukaran *Kain Timur*, makna dari esensi tradisi kehidupan meramu bisa ditunjukkan ketika seseorang berhadapan dengan dua atau lebih pemberian yang ditawarkan, di mana ia akan menerima tawaran yang lebih baik dan menguntungkan baginya dengan menolak tawaran lain. Lalu, pilihan yang lebih baik itu akan ditepatinya untuk bisa dibalas dengan pengembalian.

IV

Otto Ihalauw: Aktor Non-Papua dalam Pilkada 2010

BAB INI membahas salah satu aktor yang memperebutkan kekuasaan melalui mekanisme Pilkada yang diselenggarakan di Kabupaten Sorong Selatan pada 2010. Dalam posisinya sebagai kandidat yang berkontestasi memperebutkan kekuasaan, Otto Ihalauw melakukan upaya mobilisasi dukungan guna memenangkan Pilkada. Keberhasilan Otto Ihalauw melakukan mobilisasi dukungan ditentukan, salah satunya, oleh sumber daya yang dimilikinya. Oleh karena itu, dalam bab ini dipaparkan ragam dan asal usul sumber daya yang dimiliki dan dimanfaatkan Otto Ihalauw untuk melakukan mobilisasi dukungan.

Pembahasan mengenai ragam dan asal usul sumber daya yang dimiliki Otto Ihalauw diawali dengan latar belakang dan rekam jejak Otto Ihalauw baik di jajaran birokrasi maupun di pentas politik. Selain itu, bahasan tentang ragam dan asal usul sumber daya yang dimiliki Otto Ihalauw juga bisa ditelusuri melalui interaksinya dengan kelompok-kelompok etnis yang ada.

Dengan mengetahui latar belakang kehidupan, rekam jejak, dan interaksinya dengan masyarakat, bab ini akan mengungkap sejauh mana pemahaman Otto Ihalauw terhadap masyarakat di mana dia hidup dan beraktivitas. Bahasan mengenai hal tersebut menjadi penting karena bisa menuntun untuk menunjukkan ragam dan asal usul sumber daya yang dimiliki Otto Ihalauw, di mana sumber daya tersebut pada gilirannya dimanfaatkan sebagai

modal untuk meraih kekuasaan melalui mekanisme Pilkada. Di antara lima sumber daya sebagaimana yang dinyatakan Andrain (1992: 132-135), Otto Ihalauw memiliki tiga di antaranya, yakni sumber daya normatif, sumber daya personal, dan sumber daya keahlian. Meskipun demikian, dia tidak memiliki sumber daya fisik dan sumber daya ekonomi.⁶⁵

Untuk melengkapi bahasan ragam dan asal usul sumber daya yang dimiliki Otto Ihalauw, dipaparkan pula persepsi masyarakat yang masih kental ikatan etnisitasnya terhadap Otto Ihalauw. Hal ini penting dikemukakan karena persepsi masyarakat yang dimobilisasi ikut menentukan keberhasilan dari mobilisasi itu sendiri.

Otto Ihalauw: Seorang Birokrat Non-Papua yang menjadi Bupati

Bahasan diawali ringkasan latar belakang keluarga Otto Ihalauw dan dilanjutkan dengan ulasan perjalanan karier Otto Ihalauw sebagai seorang non-Papua di jajaran birokrasi pemerintahan. Bahasan diakhiri dengan ulasan perjalanan karier politik Otto Ihalauw dari pejabat (*caretaker*) bupati hingga menjadi bupati definitif.

1. Latar Belakang Keluarga

Walaupun lahir dan besar di tanah Papua, dengan cepat dapat ditebak bahwa Otto Ihalauw bukan orang Papua asli. Ihalauw sebagai nama keluarga menunjukkan bahwa Otto berlatar

⁶⁵ Sumber daya fisik tampil dalam wujud senjata yang bisa mencederai atau membunuh; sumber daya ekonomi tampil dalam bentuk seperti kekayaan, pendapatan, atau kontrol atas barang dan jasa. Berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan sejumlah informan, Otto Ihalauw tidak memiliki dan memanfaatkan sumber daya fisik karena penggunaan sumber daya jenis ini tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; dia juga tidak memiliki dan memanfaatkan sumber daya ekonomi karena sebelum menjadi bupati, ia berposisi sebagai pegawai negeri sipil (seorang birokrat) yang dilarang peraturan perundangan untuk melakukan kegiatan sebagai pengusaha yang memungkinkan dirinya menguasai sumber daya ekonomi (Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Usaha Swasta).

belakang etnis Ambon/Maluku. Lahir di Manokwari pada 4 November 1958 dari pasangan A. D. Ihalauw (Alm.) dan I. M. Wattimena, Otto adalah anak ketujuh dari sebelas bersaudara. Bersama saudara-saudaranya, Otto Ihalauw menghabiskan masa anak-anak sampai remaja di Manokwari. Oleh karena itu, walau beretnis non-Papua, kehidupan Otto Ihalauw mulai usia dini sudah tersosialisasi dengan nilai dan tradisi masyarakat Papua di sekitarnya.

Latar belakang keluarga besar Otto Ihalauw dapat dinyatakan berperan besar dalam membentuknya sebagai individu yang sederhana dan religius. Dari garis ayah, kakek Otto adalah seorang tokoh agama sekaligus sebagai pengabar Injil di kawasan Sorong Selatan; dan dari garis ibu, kakek Otto dikenal sebagai tenaga pendidik. Sementara itu, ayahnya adalah seorang birokrat karier pada jajaran pemerintah daerah setempat. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika nuansa kehidupan birokrasi sudah dikenalnya sejak kecil.

Otto Ihalauw dilahirkan dalam keluarga yang religius. Sebagai seorang kristiani yang taat, Otto Ihalauw dikenal aktif sebagai donatur terhadap kegiatan yang diselenggarakan gereja di mana dia sebagai salah seorang jemaatnya. Ketaatan dalam kehidupan religi berdampak pula dalam kehidupan sehari-hari, di mana Otto Ihalauw dikenal sebagai individu yang perasa terhadap penderitaan orang lain dan juga sebagai individu yang relatif mudah memaafkan kesalahan orang lain. Perjalanan karier di jajaran birokrasi dan di panggung politiknya diwarnai karakter tersebut.

Selain itu, latar belakang keluarga pendidik yang diperoleh dari garis ibu menjadi pendorong bagi Otto Ihalauw dalam menempuh jenjang pendidikan. Pendidikan dasar hingga tamat SLTP ditempuh di Manokwari, sementara itu jenjang pendidikan SLTA ditekuni di kota Sorong hingga 1977. Dunia pendidikan tinggi diawali di kota Jayapura di mana Otto Ihalauw menyelesaikan pendidikan jenjang Diploma-III di Akademi

Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) pada 1981, dan kemudian dilanjutkan di Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) Jakarta yang diselesaikan pada 1989. Di tengah kesibukan sebagai pejabat pemerintah daerah, Otto Ihalauw mengikuti kuliah pada jenjang Strata-2 Program Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada dengan mengambil konsentrasi Politik Lokal dan Otonomi Daerah yang dimulai pada 2007 dan diselesaikan pada 2011.

2. Perjalanan Karier di Jajaran Birokrasi

Karier Otto Ihalauw pada jajaran birokrasi pemerintahan diawali setelah yang bersangkutan menamatkan pendidikan di Akademi Pemerintahan Dalam Negeri, Jayapura. Berawal sebagai pegawai staf, jenjang jabatan yang pertama diemban adalah sebagai Kepala Subbagian Pengendalian dan Pelaksanaan Program pada Bagian Pembangunan Setwilda Kabupaten Sorong pada 1984. Dalam rangka meniti jenjang kariernya, Otto Ihalauw mengikuti pendidikan lanjut di Institut Ilmu Pemerintahan, Jakarta, yang diselesaikan pada 1989.

Selepas mengikuti pendidikan di Institut Ilmu Pemerintahan, Otto diberi kepercayaan untuk menduduki posisi Kepala Seksi Pengumpulan Data pada Bappeda Kabupaten Sorong hingga 1991. Pada 1991 hingga 1993, ia diangkat sebagai Kepala Subbagian Perangkat Wilayah/Daerah pada Bagian Pemerintahan Setwilda Kabupaten Sorong; dan pada 1993 diangkat sebagai pejabat kepala wilayah distrik (kecamatan) Teminabuan. Pada 1996, Otto Ihalauw diangkat sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setwilda Kabupaten Sorong yang dijabatnya hingga tahun 2000. Sejak tahun 2000 hingga 2001, yang bersangkutan menduduki jabatan sebagai Asisten I Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong, dan selanjutnya menduduki posisi sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat pada kabupaten yang sama sampai tahun 2003.

Karier Otto Ihalauw sebagai seorang birokrat dapat dikatakan tanpa rintangan yang berarti; hal ini terlihat dari rekam jejak

di mana yang bersangkutan mengawalinya dari jajaran staf hingga menduduki beberapa jabatan struktural. Selain pernah menduduki jabatan struktural sebagai kepala dinas, Otto Ihalauw pernah pula menduduki jabatan kepala wilayah, dalam hal ini sebagai camat atau kepala distrik Teminabuan. Pengalaman sebagai seorang kepala distrik tentunya memberi pengalaman tersendiri yang merupakan nilai lebih bagi Otto Ihalauw dalam hal berhubungan dengan masyarakat. Terlebih lagi, posisi sebagai kepala distrik Teminabuan menjadikan Otto Ihalauw tidak asing dalam berinteraksi dengan masyarakat setempat, di mana Teminabuan di kemudian hari menjadi ibukota dari Kabupaten Sorong Selatan.

Pada saat menjabat sebagai Kepala Distrik Teminabuan, Otto Ihalauw diangkat menjadi bagian dari keluarga besar etnis Tehit. Tepatnya pada 1996, Otto Ihalauw diangkat sebagai anak adat suku Tehit melalui upacara adat. Pengangkatan sebagai anak adat suku Tehit tidak lepas dari jasa Otto Ihalauw yang terpandang di hadapan para tetua adat. Mereka menganggap Otto Ihalauw sebagai pejabat pemerintah yang bersedia menampung dan menyalurkan aspirasi etnis Tehit.⁶⁶

Pengangkatan Otto Ihalauw sebagai anak adat etnis Tehit menjadikannya diterima sebagai layaknya orang Papua asli. Dalam kesehariannya sebagai seorang birokrat, Otto Ihalauw tidak menunjukkan bahwa dirinya adalah orang non-Papua sehingga masyarakat menerima kehadirannya sebagai anak adat Tehit. Anggota masyarakat yang berasal dari luar etnis Tehit juga menerima kehadiran Otto Ihalauw sebagai birokrat dengan tangan terbuka karena yang bersangkutan memberi perlakuan sama kepada setiap kelompok etnis yang ada. Walaupun berstatus sebagai anak adat etnis Tehit, Otto Ihalauw tidak mengistimewakan kelompok etnis Tehit secara berlebihan, ia selalu mengupayakan adanya perlakuan yang egaliter bagi semua

66 Wawancara dengan Michael Momot, Ketua Dewan Adat Suku Tehit, pada 19 Juli 2010 di Teminabuan, Sorong Selatan.

anggota masyarakat tanpa memandang asal usul etnis. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Michael Momot, Ketua Dewan Adat Suku Tehit, yang mengungkapkan:

“Otto Ihalauw pernah menjabat sebagai Kepala Distrik Teminabuan, beliau bersikap dan bertindak adil. Tidak memihak kepada salah satu kelompok etnis yang ada. Otto Ihalauw sempat diangkat sebagai anak adat Suku Tehit, tetapi memberi perlakuan sama ke semua kelompok. Kelompok etnis asli ataupun pendatang diperlakukan sama”.⁶⁷

Sikap dan perilaku adil dan tidak memihak yang dilakukan Otto Ihalauw memunculkan persepsi positif dari masyarakat bahwa yang bersangkutan merupakan seorang birokrat yang mampu memimpin dengan tidak memihak pada salah satu etnis tertentu; dan persepsi masyarakat ini merupakan modal baginya untuk membangun basis dukungan pada saat yang bersangkutan berkompetisi di arena Pilkada.

Selain hal tersebut di atas, Otto Ihalauw juga dicitrakan sebagai seorang pejabat pemerintahan yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Berlatar belakang etnis non-Papua menjadikan dirinya seolah-olah tanpa sekat untuk bergaul dengan para pejabat birokrasi asli Papua yang masih kental ikatan etnisitasnya. Di kalangan jajaran birokrasi, Otto Ihalauw dikenal sebagai orang yang tekun dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas kewajibannya serta dikenal pula sebagai orang yang perasa dan pemaaf. Penerimaan terhadap pribadi Otto Ihalauw di kalangan birokrasi merupakan modal baginya untuk lebih mudah membangun basis dukungan dan jaringan yang diperlukan pada saat berkompetisi dalam Pilkada.

Selain itu, Otto Ihalauw juga dilukiskan sebagai figur atau pribadi yang mudah bergaul, terbuka, dan sederhana. Karakter ini sebagaimana diungkapkan oleh seorang informan yang menyatakan bahwa:

67 Wawancara dengan Michael Momot, Ketua Dewan Adat Suku Tehit, pada 19 Juli 2010 di Teminabuan, Sorong Selatan.

“Otto Ihalauw sebagai seorang bupati, tetapi pribadinya terbuka dan sederhana. Beliau punya nomor ponsel yang bisa diketahui dan diakses setiap saat oleh masyarakat umum. Warga bisa menghubunginya setiap saat, dan beliau akan menjawab kalau tidak sibuk. Warga senang dengan sikapnya yang terbuka dan tidak membeda-bedakan dalam pergaulannya.”⁶⁸

Bahasan di atas menunjukkan bahwa latar belakang keluarga yang religius, perjalanan karier sebagai seorang birokrat, dan pengangkatannya sebagai anak adat suku Tehit, bisa dijadikan bekal bagi Otto Ihalauw untuk memobilisasi dukungan. Kesederhanaan, keramahan, ketaatan beribadah, dan sifat pemaaf yang dimiliki Otto Ihalauw merupakan hasil didikan dalam lingkungan keluarga, dan sifat-sifat itu dapat dinyatakan sebagai sumber daya personal Otto Ihalauw. Pendidikan formal yang diraih dan perjalanan karier menjadikan Otto Ihalauw punya pengetahuan dan kemampuan yang relatif tinggi di bidangnya; dan hal itu dapat dinyatakan sebagai sumber daya keahlian Otto Ihalauw. Sementara itu, pengangkatannya sebagai anak adat suku (etnis) Tehit menjadikan Otto Ihalauw punya sumber daya normatif karena yang bersangkutan punya hak dan kewajiban sebagaimana layaknya anak adat suku (etnis) Tehit.

3. Perjalanan Karier di Pentas Politik

Karier Otto Ihalauw sebagai seorang birokrat terbilang berjalan tanpa rintangan berarti, dan keberhasilannya sebagai birokrat menjadi modal baginya untuk menapaki karier dalam arena politik. Berbekal pengalaman menduduki berbagai posisi jabatan karier dalam birokrasi di Pemerintah Kabupaten Sorong dan keberhasilannya membangun relasi di antara sesama birokrat, mengantarkannya diangkat sebagai pejabat (*caretaker*) Bupati Sorong Selatan. Jabatan sebagai pejabat bupati diembannya periode 2003-2005.

68 Wawancara dengan Michael Momot; hal senada juga dikemukakan oleh Suroso dan Yunus Duwit. Wawancara dengan tiga informan tersebut dilakukan secara terpisah pada 19 Juni 2010 di Teminabuan, Sorong Selatan.

Sebagaimana diketahui, Kabupaten Sorong Selatan merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Sorong. Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2002, ditetapkan bahwa Sorong Selatan sebagai kabupaten yang berdiri sendiri lepas dari Kabupaten Sorong sebagai kabupaten induk. Sehubungan dengan hal itu, pengisian jabatan pejabat (*caretaker*) bupati dipersiapkan sebelum dipilih pejabat yang definitif. Penunjukan Otto Ihalauw sebagai pejabat (*caretaker*) bupati Sorong Selatan dapat dinyatakan sebagai titik awal yang bersangkutan menapakkan kaki di arena politik. Proses penunjukan sebagai pejabat (*caretaker*) bupati mengalami beberapa hambatan. Pada tahap awal proses penunjukan, nama Otto Ihalauw tidak masuk dalam bursa pencalonan. Nama Otto Ihalauw masuk bursa pencalonan tatkala timbul ketegangan yang mengarah pada terjadinya pertikaian antaretnis yang mendukung masing-masing calon. Sebagaimana diketahui, pada awal pencalonan diajukan beberapa nama dari kelompok etnis berbeda, dan untuk menetapkan salah satu di antaranya memunculkan dilema karena konflik etnis akan muncul dengan ditetapkan salah satu di antara calon-calon tersebut. Situasi seperti ini membuka peluang bagi Otto Ihalauw yang notabene berasal dari etnis non-Papua masuk dalam bursa pencalonan. Dengan argumentasi untuk menghindari konflik antaretnis, ditetapkan Otto Ihalauw yang berasal dari luar Papua sebagai pejabat Bupati Sorong Selatan hingga terpilihnya bupati definitif (Kocu, 2007: 69-70).⁶⁹ Penunjukan Otto Ihalauw sebagai pejabat bupati cukup mengejutkan bagi banyak kalangan karena di awal proses penunjukkan namanya tidak muncul dalam bursa pencalonan. Keputusan menunjuk Otto Ihalauw sebagai pejabat Bupati merupakan keputusan untuk menurunkan ketegangan yang potensial dapat memicu konflik antaretnis, terutama menurunkan

69 Proses awal penetapan pejabat (*caretaker*) bupati Sorong Selatan diajukan nama Simon Tenau yang berlatar belakang etnis Aifat (etnis Aifat dapat dimasukkan dalam kelompok etnis yang lebih besar, yakni Maybrat) dan Hengki Momot yang beretnis Tehit. Penetapan menunjukan siapa yang diangkat menjadi pejabat Bupati memunculkan pertikaian yang melibatkan kelompok etnis Aifat berhadapan dengan kelompok etnis Tehit. Situasi seperti ini yang mendorong John Piet Wanane, Bupati Sorong (kabupaten induk), menempatkan Otto Ihalauw sebagai pejabat bupati Sorong Selatan.

ketegangan yang melibatkan etnis Aifat berhadapan dengan etnis Tehit.

Lika-liku perjalanan karier politik Otto Ihalauw sampai diangkat sebagai pejabat (*caretaker*) bupati sebagaimana diuraikan di atas menggambarkan bahwa posisinya sebagai orang yang berasal dari etnis non-Papua memberi keuntungan baginya. Posisi sebagai orang non-Papua dimanfaatkan sedemikian rupa olehnya untuk memperoleh kemenangan pada Pilkada pertama pada 2005 dalam rangka pemilihan bupati definitif. Demikian pula halnya pada Pilkada 2010, dengan posisi sebagai orang luar Papua, Otto Ihalauw berupaya mempertahankan kedudukannya sebagai bupati Sorong Selatan.

Sekitar dua tahun sebagai pejabat bupati, Otto Ihalauw memutuskan untuk maju dalam Pilkada untuk pemilihan bupati definitif yang diselenggarakan pada 2005. Dalam Pilkada 2005, Otto Ihalauw menggandeng Herman Tom Dedaida sebagai calon wakil bupati. Herman Tom Dedaida adalah seorang Papua asli, etnis Imekko, dan seorang akademisi yang mengajar di Universitas Negeri, Manokwari. Adapun yang mengusungnya dalam Pilkada adalah gabungan beberapa partai, yakni PNBK, PPDI, dan PDI-P. Bentuk dukungan yang datang ini pun penuh dengan dinamika. Pada awalnya, Otto Ihalauw direkomendasikan Partai Golkar sebagai calon bupati, tetapi rekomendasi tersebut dicabut di mana partai ini akhirnya mencalonkan Bernard Sagrim sebagai calon bupati (Kocu, 2007: 74-77). Dalam Pilkada 2005, Otto Ihalauw yang berpasangan dengan Herman Tom Dedaida berhadapan dengan empat pasangan calon lainnya dengan memperoleh suara 45,18% suara pemilih. Di antara pasangan-pasangan calon dalam Pilkada 2005, hanya Otto Ihalauw yang berlatar belakang etnis non-Papua.⁷⁰

70 Pilkada Sorong Selatan 2005 diikuti lima pasangan calon, yakni: Rudy Way-Ahmad Agia, Otto Ihalauw-Herman Tom Dedaida, Bernard Sagrim-Amos Massei, Hendrikus Momot-Aminadap Asmuruf, dan Thobias Salossa-H. Mustafa Wugaje (Sumber: KPU Kabupaten Sorong Selatan, 2005).

Walaupun Otto Ihalauw pada Pilkada 2005 tidak diusung oleh Partai Golkar, seiring perjalanan waktu, dia berhasil menduduki posisi ketua partai ini untuk kepengurusan di Kabupaten Sorong Selatan. Aktivitas Otto Ihalauw sebagai ketua partai dapat dinyatakan berhasil. Partai Golkar berhasil memperoleh lima kursi di DPRD Kabupaten Sorong Selatan pada Pileg 2009. Perolehan 5 dari 20 kursi di DPRD menjadikan Partai Golkar sebagai partai mayoritas di Kabupaten Sorong Selatan.⁷¹

Dalam Pilkada 2010, Otto Ihalauw dengan status *incumbent* (petahana) tampak relatif lebih siap dibandingkan pada saat menghadapi Pilkada 2005. Pada Pilkada 2010, Otto Ihalauw relatif lebih mudah memilih partai untuk dijadikan pengusung. Statusnya sebagai ketua Partai Golkar menjadikan dirinya harus diusung melalui partai ini. Demikian pula dukungan dari DPP Partai Golkar atas pencalonannya diperoleh dengan mudah; di mana kesediaan dukungan DPP Partai Golkar tersebut didasarkan pada survei yang menyatakan bahwa Otto Ihalauw kemungkinan akan menjadi pemenang dalam Pilkada 2010.⁷²

Dengan jumlah lima kursi di DPRD, Partai Golkar sebenarnya tidak perlu menggandeng partai lain untuk berkoalisi dalam mengusung calon. Namun, dalam pencalonan Otto Ihalauw, Partai Golkar melakukan koalisi dengan menggandeng partai lain. Partai Golkar menjatuhkan pilihan pada PKS dan Partai Hanura untuk mengusung Otto Ihalauw sebagai calon, meski sejatinya ada partai politik lain yang juga berkeinginan mengusung Otto Ihalauw dalam pencalonan.

71 Dari 20 kursi yang ada, komposisi keanggotaan DPRD Sorong Selatan, hasil Pemilihan Umum 2009 adalah 5 kursi untuk P. Golkar, 3 kursi untuk P. Demokrat, masing-masing 2 kursi untuk PKS dan Partai Hanura, dan masing-masing 1 kursi untuk PAN, Partai Kedaulatan, PDP, PPD, PDK, PDS, PDI-P, dan PNBKI (Sumber: KPU Kabupaten Sorong Selatan, 2009).

72 DPP Partai Golkar memberikan dukungan (mengusulkan) calon atas dasar survei yang diselenggarakan oleh lembaga independen Indo Barometer. Survei yang dilakukan terhadap Otto Ihalauw menunjukkan bahwa kemungkinan yang bersangkutan memenangkan Pilkada 2010 sebesar 52,1 %.

Dalam kapasitasnya sebagai bupati yang sedang menjabat dan sekaligus sebagai ketua Partai Golkar, Otto Ihalauw melakukan tindakan yang simpatik dalam hubungannya dengan partai-partai politik lainnya di Sorong Selatan. Hal ini dibuktikan pada saat lahirnya partai-partai politik baru menjelang Pileg 2009. Sebagaimana diketahui bahwa menjelang Pileg 2009, hadirnya sejumlah partai politik baru memerlukan persyaratan adanya cabang partai politik di tingkat lokal. Demikian pula halnya di Sorong Selatan, partai-partai politik baru lahir sebagai cabang partai di tingkat nasional. Sebagai bupati yang memiliki kewenangan, Otto Ihalauw dalam hal menyikapi kemunculan partai-partai baru bertindak simpatik dengan tidak menghambat kelahirannya, bahkan dia dapat dinyatakan memfasilitasi yang mendorong bagi kehadiran partai-partai baru tersebut. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh seorang informan yang menyatakan bahwa sebenarnya Otto Ihalauw bisa menghambat atau mempersulit terbentuknya partai-partai politik baru di Sorong Selatan, tetapi justru melakukan tindakan yang bisa dikatakan memfasilitasi berdirinya partai-partai politik tersebut.⁷³

Apabila ditilik dari posisi Otto Ihalauw sebagai ketua Partai Golkar, tindakan memfasilitasi yang mendorong kehadiran partai-partai baru bisa dikatakan mengundang pesaing bagi Partai Golkar yang dipimpinnya dalam pemilihan umum legislatif. Namun, Otto Ihalauw melakukan tindakan memfasilitasi itu dengan perhitungan tersendiri, yakni dengan melakukan ‘investasi politik’ dalam rangka memperoleh dukungan pada Pilkada 2010.

Dalam memperkuat posisinya, baik sebagai bupati yang tengah menjabat ataupun sebagai ketua partai, Otto Ihalauw juga memanfaatkan keberadaan institusi gereja dan adat. Dia sadar sepenuhnya akan keberadaan dua institusi ini masih cukup penting dalam percaturan politik di Sorong Selatan. Otto Ihalauw yang dikenal religius tak segan turun tangan membantu kegiatan yang

73 Wawancara dengan Ansar Sija (etnis Makassar, seorang guru agama, dan Ketua GP Ansor Sorong Selatan) pada 17 Juli 2010, di Teminabuan, Sorong Selatan.

diselenggarakan gereja, bahkan membantu pembangunan tempat ibadah tersebut. Perihal kegiatan Otto Ihalauw dalam kaitannya dengan gereja, seorang informan mengungkapkan bahwa Otto Ihalauw dapat dinyatakan sebagai orang yang taat beragama, rajin melakukan ibadah di gereja, dan juga memberi bantuan untuk aktivitas gereja. Apa yang dilakukannya menunjukkan bahwa dia merupakan orang yang religius dan dekat dengan gereja.⁷⁴

Sementara itu dalam hubungannya dengan kelompok adat, Otto berupaya membangun jaringan komunikasi yang berkesinambungan tidak hanya dengan para tetua dari suku tertentu namun dari semua etnis yang ada baik Papua asli maupun pendatang secara proporsional. Tindakan Otto Ihalauw dalam memanfaatkan institusi gereja maupun kelompok adat (etnis) sebagaimana diungkap di atas jelas memberi dampak positif baginya karena di mata anggota komunitas, baik yang berbasis gereja maupun adat/suku, menilai Otto Ihalauw sebagai figur pimpinan yang mengayomi semua dengan tidak memihak pada golongan atau kelompok tertentu.

Deskripsi di atas menunjukkan bahwa perjalanan karier politik Otto Ihalauw relatif lancar tanpa hambatan yang berarti. Posisi sebagai bupati menjadikan Otto Ihalauw memiliki sumber daya normatif berupa kewenangan yang sah (*legitimate*) untuk memimpin Sorong Selatan. Selain sumber daya normatif, posisi jabatan bupati pada masa pemerintahan periode pertama juga menjadikan yang bersangkutan memiliki sumber daya keahlian yang berwujud informasi dan kemampuan teknis di bidang pemerintahan. Oleh karena itu, karier politik Otto Ihalauw bisa dijadikan bekal baginya untuk mobilisasi dukungan guna meraih kemenangan dalam kontestasi Pilkada.

74 Wawancara dengan Kenan Thesia, etnis Tehit dan tinggal di Wermit (Distrik Teminabuan), pada 20 Juli 2010 di Teminabuan, Sorong Selatan.

Otto Ihalauw di Tengah Kelompok-kelompok Etnis

Kelompok etnis yang ada di Kabupaten Sorong Selatan dapat dipilah menjadi kelompok etnis Papua asli dan kelompok etnis pendatang non-Papua. Kelompok etnis Papua asli ada tiga, yakni kelompok yang dikenal sebagai orang Maybrat, orang Tehit, dan orang Imekko. Sementara itu, mereka yang beretnis non-Papua, dari etnis mana pun berasal, dikenal sebagai kelompok pendatang.

Otto Ihalauw yang termasuk dalam kelompok etnis pendatang tak bisa lepas untuk berinteraksi dengan kelompok-kelompok etnis yang ada. Dalam konteks mobilisasi dukungan untuk meraih kekuasaan melalui mekanisme Pilkada, bahasan diawali dengan memaparkan pengangkatan Otto Ihalauw sebagai anak adat suku Tehit. Pengangkatan dirinya sebagai anak adat suku Tehit berpengaruh signifikan dalam upayanya memobilisasi dukungan. Selanjutnya, dibahas pula mengenai persepsi masyarakat yang berada dalam kelompok-kelompok etnis terhadap Otto Ihalauw sebagai individu yang berlatar belakang etnis non-Papua.

1. Pengangkatan sebagai Anak Adat Suku Tehit

Dalam perjalanan karier di jajaran birokrasi, Otto Ihalauw pernah menduduki posisi sebagai Kepala Distrik Teminabuan sejak 1993 hingga 1996. Saat menjabat sebagai Kepala Distrik Teminabuan, Otto Ihalauw diangkat menjadi bagian dari keluarga besar etnis Tehit. Tepatnya pada 1996, Otto Ihalauw diangkat sebagai anak adat suku Tehit melalui upacara adat.⁷⁵ Adapun alasan yang mendasari pengangkatannya sebagai anak adat Tehit tidak lepas dari jasa Otto Ihalauw kepada kelompok etnis Tehit. Dalam posisinya sebagai Kepala Distrik Teminabuan, di mana mayoritas penduduk yang bermukim di distrik tersebut adalah

⁷⁵ Wawancara dengan Michael Momot, Ketua Dewan Adat Suku Tehit, pada 19 Juli 2010 di Teminabuan, Sorong Selatan. Melalui upacara adat yang digelar di tanah lapang, tetua adat suku (etnis) Tehit memberi 'kain timur' kepada Otto Ihalauw sebagai pertanda bahwa yang bersangkutan diangkat sebagai anak adat Tehit. Pengangkatan sebagai anak adat menjadikan Otto Ihalauw punya hak dan kewajiban sebagaimana yang dimiliki orang Tehit.

kelompok etnis Tehit, Otto Ihalauw dipandang oleh para tetua adat sebagai pejabat pemerintah yang bersedia menampung dan menyalurkan aspirasi yang ada pada kelompok etnis Tehit.

Pengangkatan Otto Ihalauw sebagai anak adat dilakukan melalui upacara adat yang ditandai dengan pemberian sehelai *Kain Timur* oleh tetua adat. Pemberian *Kain Timur* tersebut dapat diinterpretasikan sebagai bentuk ‘balas jasa’ atas upaya Otto Ihalauw yang memperjuangkan aspirasi etnis Tehit; pada sisi lain, pemberian tersebut mengandung makna bahwa Otto Ihalauw terbebani kewajiban untuk mengembalikan *Kain Timur* yang diterimanya. Pengembalian yang diharapkan oleh kelompok etnis Tehit berupa perlindungan dan pembangunan yang menjadikan taraf kesejahteraan hidup orang-orang Tehit lebih meningkat. Pengangkatannya sebagai anak adat membawa implikasi bahwa Otto Ihalauw punya hak dan kewajiban sebagaimana yang dimiliki oleh orang Tehit, yang bersangkutan menjadi bagian dari keluarga besar etnis Tehit dan punya kedekatan emosional dengan sesama anggota etnis tersebut.

Pengangkatan Otto Ihalauw sebagai anak adat etnis Tehit menjadikannya diterima sebagai layaknya orang Papua asli. Dalam kesehariannya, baik dalam posisinya sebagai birokrat maupun sebagai warga masyarakat pada umumnya, Otto Ihalauw tidak menunjukkan bahwa dirinya orang non-Papua. Sehubungan dengan hal itu, seorang informan menyatakan:

“Otto Ihalauw dalam kehidupan sehari-hari bersikap dan bertindak seperti orang Papua. Dia lahir, besar, dan bekerja sebagai birokrat di Papua. Kesederhanaan dan keterbukaannya menjadikannya diterima banyak pihak. Dia tak lagi dipandang sebagai pendatang, masyarakat memandangnya sebagai orang asli. Tak heran bila dia diangkat dan diterima sebagai anak adat suku Tehit.”⁷⁶

76 Wawancara dengan Michael Momot pada 19 Juli 2010; hal senada juga diungkapkan oleh Yunus Duwit dan Suroso dalam wawancara pada 15 Juli 2010. Wawancara tersebut dilakukan di Teminabuan, Sorong Selatan.

Dengan sikap dan tindakan sebagaimana layaknya orang Papua asli, gejala berupa penolakan terhadap diri Otto Ihalauw tidak muncul. Terkait dengan pengangkatannya sebagai anak adat suku Tehit, anggota masyarakat yang berasal dari luar kelompok etnis Tehit juga menerima kehadiran Otto Ihalauw sebagai layaknya orang Papua asli. Hal ini dikarenakan, sebagaimana sudah diungkap di bagian terdahulu, Otto Ihalauw dalam posisinya sebagai pejabat pemerintah tidak mengistimewakan etnis Tehit secara berlebihan. Ia selalu mengupayakan adanya perlakuan yang relatif sama bagi semua anggota masyarakat tanpa memandang asal usul etnis. Hal ini memunculkan persepsi positif dari masyarakat bahwa Otto Ihalauw adalah pejabat pemerintah yang mampu bertindak tidak memihak pada kelompok etnis tertentu; dan persepsi ini merupakan modal baginya untuk membangun basis dukungan pada saat ia berkompetisi dalam arena Pilkada.

2. Pemahaman Otto Ihalauw terhadap Masyarakat

Bahasan pemahaman Otto Ihalauw tentang masyarakat Sorong Selatan difokuskan pada pemahaman karakter dan tradisi yang masih berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa berlangsungnya aktivitas sosial kemasyarakatan tidak bisa lepas dari pengaruh karakter dan tradisi masyarakat. Karakter dan tradisi berpengaruh terhadap sikap dan tindakan yang pada gilirannya berpengaruh pada aktivitas keseharian masyarakat, termasuk aktivitas mobilisasi dukungan.

a. Pemahaman tentang Karakter Masyarakat

Berbekal pengetahuan dan pengalamannya menduduki posisi jabatan birokrasi, Otto Ihalauw berhasil memahami kelompok-kelompok etnis di Sorong Selatan serta tradisinya. Pengetahuan dan pemahaman tentang kelompok-kelompok etnis dan tradisi di Sorong Selatan diperoleh Otto Ihalauw tatkala yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Distrik Teminabuan. Sehubungan

dengan hal itu, Michael Momot, seorang informan yang juga merupakan Ketua Dewan Adat Suku Tehit, mengungkapkan:

“Otto Ihalauw tahu dan paham kelompok-kelompok etnis di Sorong Selatan. Bahkan bisa dikatakan dia dekat dengan kelompok-kelompok etnis, hal ini dibuktikan dengan pengangkatannya sebagai anak adat suku Tehit. Pengetahuan dan pemahamannya yang baik tentang kelompok-kelompok etnis karena selain lahir dan besar di Papua, karier birokrasi menjadikannya dekat dan paham kehidupan di masyarakat, terutama saat menjabat kepala distrik.”⁷⁷

Berdasarkan pernyataan di atas, diketahui bahwa Otto Ihalauw tidak hanya memahami kelompok etnis Tehit saja. Ia memahami keberadaan kelompok-kelompok etnis lain di Sorong Selatan. Bahkan, Otto Ihalauw memahami bahwa keberadaan kelompok-kelompok masyarakat tidak hanya tampil dalam wujud kelompok etnis; mereka juga tampil dalam wujud kelompok-kelompok yang lebih kecil dari kelompok etnis. Kelompok etnis terdiri dari beberapa sub-etnis, dan satu sub-etnis terdiri dari beberapa kelompok semacam marga yang di dalamnya terdiri dari beberapa *kereth*.

Demikian pula Otto Ihalauw yang juga mengetahui dan memahami bahwa masyarakat Sorong Selatan dilekati karakter kesetiaan yang relatif kuat terhadap kelompok, dan simpul ikatan masyarakat lebih kuat pada kelompok marga daripada kelompok etnis/suku. Terkait hal ini, informan menyatakan bahwa:

77 Wawancara dengan Michael Momot, Ketua DAS Tehit, pada 19 Juli 2010 di Teminabuan, Sorong Selatan.

Pada 1993, Otto Ihalauw diangkat sebagai Kepala Distrik Teminabuan yang ketika itu masih menjadi bagian dari Kabupaten Sorong; dan pada 1996, di tengah masa jabatan sebagai Kepala Distrik, ia diangkat sebagai anak adat suku (etnis) Tehit.

“Otto Ihalauw mengetahui dan memahami adanya kesetiaan yang mendalam terhadap kelompoknya. Kesetiaan ditujukan kepada kelompok etnis, marga dan *kereth*, dan kesetiaan itu semakin menguat ke arah kelompok yang semakin kecil. Jadi orang pertama kali setia pada *kereth*, disusul setia pada marga, baru kemudian setia pada etnisnya.”⁷⁸

Dari pernyataan di atas, dapat diinterpretasikan bahwa Otto Ihalauw mengetahui dan memahami bahwa masyarakat Sorong Selatan bersetia tidak hanya kepada kelompok etnis saja, tetapi juga ada kesetiaan yang berjenjang. Kesetiaan paling mendasar ditujukan kepada keluarga inti, kemudian melebar kepada *kereth*, melebar lagi menjadi kesetiaan kepada marga, kepada sub-etnis, dan terakhir kesetiaan kepada kelompok etnis. Hal ini karena di dalam kelompok etnis terdapat beberapa kelompok marga, di dalam kelompok marga terdapat beberapa *kereth*, dan di dalam *kereth* terdiri dari beberapa keluarga inti yang satu dengan lainnya masih ada hubungan keluarga (darah).

Kesetiaan tersebut berlandaskan ikatan kelompok dan, disadari atau tidak disadari, menghadirkan sikap ‘kami’ dan ‘mereka’ dalam diri masyarakat. Sikap ini muncul karena anggota kelompok mencari identitas diri; di mana ‘kami’ menunjukkan sebagai ‘bagian’ dari kelompok atau *in-group*, dan ‘mereka’ menunjukkan ‘bukan bagian’ dari kelompok atau *out-group* (Eriksen, 1994: 23-42).

Selain itu, informan di atas juga menyatakan bahwa Otto Ihalauw mengetahui dan memahami bahwa simpul masyarakat Sorong Selatan lebih mengarah pada kelompok marga (selanjutnya disebut marga) daripada kelompok etnis/suku. Marga merupakan kumpulan individu dari satu keluarga besar yang terdiri dari beberapa *kereth*; dan marga punya posisi lebih otonom dibandingkan dengan kelompok etnis. Relatif besarnya otonomi di tingkat marga dapat diketahui dari proses pengambilan keputusan tentang sesuatu hal yang dianggap

78 Wawancara dengan Michael Momot, Ketua Dewan Adat Suku Tehit, pada 19 Juli 2010 di Teminabuan, Sorong Selatan.

penting di masyarakat. Keputusan diambil secara musyawarah di lingkup marga, bukan di tingkat kelompok etnis. Hal ini memungkinkan suatu kelompok etnis yang terdiri dari beberapa marga menghasilkan keputusan yang tidak sama mengenai hal tertentu. Adanya perbedaan keputusan antara marga yang satu dengan lainnya dimusyawarahkan dalam kelompok etnis, dan kepala suku/etnis berperan sebagai fasilitator.

Selain itu, Otto Ihalauw memahami pula bahwa masyarakat Sorong Selatan memiliki harga diri tinggi. Pemahaman Otto Ihalauw tentang harga diri masyarakat yang tinggi diperoleh dari realitas adanya persaingan di antara kelompok-kelompok etnis untuk menjadi yang terbaik di antara mereka.⁷⁹

Dalam suasana setiap kelompok menjunjung harga diri dan martabatnya, Otto Ihalauw sebagai kandidat beretnis non-Papua melakukan tindakan netral. Untuk keperluan ini, sebagaimana diulas di bagian depan, setiap kelompok diperlakukan relatif sama. Terkait dengan mobilisasi dukungan yang dilakukan Otto Ihalauw, kelompok yang tidak dimobilisasi bisa memaknainya sebagai bentuk bahwa Otto Ihalauw tidak mengakui keberadaan kelompok itu; dan hal ini dipandang sebagai penurunan harga diri yang pada gilirannya menjatuhkan martabat kelompok. Sehubungan dengan hal itu, Otto Ihalauw berupaya tidak menjatuhkan harga diri dan martabat kelompok dengan melakukan tindakan yang tidak membedakan antara kelompok yang satu dengan yang lain dalam mobilisasi dukungan.

b. Pemahaman tentang Tradisi

Tradisi masyarakat Sorong Selatan yang relatif menonjol ialah perihal pertukaran *Kain Timur*. Walaupun kehidupan masyarakat berubah seiring perjalanan waktu, esensi tradisi pertukaran *Kain Timur* masih melekat di masyarakat Sorong Selatan. Esensi tradisi

⁷⁹ Wawancara dengan Michael Momot, Ketua DAS Tehit, pada 19 Juli 2010 di Teminabuan, Sorong Selatan.

pertukaran *Kain Timur* adalah bahwa barangsiapa menerima pemberian wajib mengembalikan dengan jumlah lebih besar. Sehubungan dengan hal itu, Boelaars (1986: 134) menyatakan bahwa suatu pemberian pembukaan disusul dengan pemberian balasan yang lebih berharga, dan pemberian balasan itu disusul lagi dengan pemberian pengukuhan. Seandainya pihak penerima lalai untuk melakukan pembayaran kembali, pihak pemberi tidak hanya sekedar menunjukkan kemarahannya, tetapi bisa pula mengancam untuk melakukan pembunuhan. Pemberian harus disusul dengan pemberian balasan dalam jumlah lebih banyak; semakin banyak pemberian dilakukan berarti yang bersangkutan akan menerima pemberian balasan dalam jumlah yang lebih banyak lagi.

Otto Ihalauw memahami realitas di masyarakat bahwa tradisi pertukaran *Kain Timur* mengisyaratkan adanya kewajiban bagi pihak penerima untuk mengembalikan sesuatu yang telah diterima disertai *bunga* sebagai tambahannya. Sebagai ilustrasi, seseorang yang menerima pemberian *Kain Timur* berkewajiban mengembalikannya dalam jumlah lebih banyak. Apabila ia tidak melakukan pemberian balasan, ia akan menerima sanksi. Sanksi bisa berupa pengucilan yang bersangkutan dalam kehidupan bermasyarakat. Terkait dengan tradisi pertukaran *Kain Timur* yang masih berlangsung di Kabupaten Sorong Selatan, Otto Ihalauw berpendapat sebagai berikut:

“Tradisi pertukaran *Kain Timur* yang dikenal di masyarakat ‘kepala burung’ sampai saat sekarang ini masih berlaku di Sorong Selatan. Tradisi ini masih dijadikan panduan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya menyangkut relasi atau hubungan yang terkait dengan memberi (saling memberi). Di mana pihak yang menerima pemberian punya kewajiban untuk mengembalikan dalam jumlah yang lebih banyak. Apabila pengembalian ini tidak dilakukan, maka yang bersangkutan akan menerima sanksi. Sanksi yang sering muncul di masyarakat berupa pengucilan.”⁸⁰

80 Wawancara dengan Otto Ihalauw pada 21 Juli 2010 di Teminabuan, Sorong Selatan.

Esensi tradisi pertukaran *Kain Timur* tersebut sedikit banyak mirip dengan pemberian hadiah atau sumbangan sebagaimana disebut oleh Mauss (1990) dan Hyde (1983) sebagai *gift*. Konsep pemberian *gift* atau hadiah menghadirkan mekanisme memberi, menerima, dan mengembalikan pemberian yang diterima. Konsep *gift* ini secara tidak langsung menciptakan hubungan yang mengikat antara pemberi dan penerima; dengan adanya kewajiban untuk mengembalikan pemberian, pihak penerima terbebani semacam utang yang wajib dilunasinya. Demikian halnya dengan esensi tradisi pertukaran *Kain Timur*, di dalamnya juga terkandung semacam hubungan utang-piutang antara pihak pemberi dan penerima. Dalam hubungan tersebut, apabila terjadi pengingkaran pihak penerima untuk memenuhi kewajiban melakukan pemberian balasan, maka yang bersangkutan dapat dikenai sanksi.

Terkait dengan hal di atas, Otto Ihalauw memahami bahwa tradisi pertukaran *Kain Timur* bisa dimanfaatkan sebagai instrumen untuk mewujudkan kepentingan politik. Dalam hal ini Otto Ihalauw menyatakan bahwa “pemberian yang dilakukan seseorang merupakan modal baginya untuk mengikat pihak penerima guna mendukung tujuan politik pihak pemberi”. Dalam kaitannya dengan mobilisasi dukungan untuk meraih kekuasaan, tradisi pertukaran *Kain Timur* dimaknai bahwa semakin banyak pemberian dilakukan, semakin banyak pula dukungan yang mengalir kepada pihak pemberi.

Otto Ihalauw memahami pula bahwa kemampuan seseorang dalam mengumpulkan *Kain Timur* dalam jumlah banyak bisa menjadikan yang bersangkutan sebagai orang yang punya kedudukan dan pengaruh di dalam komunitasnya. Perihal ini, Otto Ihalauw menyatakan pendapatnya bahwa:

“Di masyarakat, orang yang punya *Kain Timur* dalam jumlah banyak akan punya pengaruh. Semakin banyak *Kain Timur* yang dimiliki oleh seseorang,

maka semakin besar pula pengaruh yang dimiliki. Kepemilikan *Kain Timur* menunjukkan besar kecilnya pengaruh yang dimiliki seseorang”.⁸¹

Terkait dengan hal itu, Otto Ihalauw memaknainya bahwa seseorang yang punya *Kain Timur* dalam jumlah banyak diposisikan sebagai *patron*, dan dalam posisinya sebagai *patron* yang bersangkutan ditaati oleh anggota komunitas yang berada dalam posisi sebagai *client*. Sehubungan dengan hal itu, Otto Ihalauw menyadari dan memahami bahwa mekanisme tradisi pertukaran *Kain Timur* bisa dimanfaatkan untuk memupuk pengaruh yang pada gilirannya bisa diterapkan untuk mobilisasi dukungan.

Pemahaman Otto Ihalauw tentang tradisi pertukaran *Kain Timur* dilengkapi dengan pemahaman tentang tradisi kehidupan meramu yang pernah ada di masyarakat. Sebagaimana halnya dengan orang asli Papua pada umumnya, kelompok etnis di Sorong Selatan juga mengenal tradisi kehidupan meramu. Tradisi kehidupan meramu menunjukkan bahwa masyarakat Sorong Selatan punya kebiasaan untuk mencari makan dengan cara berladang di satu tempat untuk kemudian pindah ke tempat lain. Bila satu tempat tidak lagi memberi hasil ladang yang baik, ladang tersebut akan ditinggalkan untuk pindah ke tempat lain yang menjanjikan hasil ladang lebih baik. Esensi dari tradisi kehidupan meramu, apabila dikaitkan dengan esensi tradisi pertukaran *Kain Timur*, adalah bahwa masyarakat Sorong Selatan hanya bersedia menerima pemberian yang dinilai paling menguntungkan baginya. Pada saat ada dua atau lebih pihak menawarkan pemberian, maka pemberian yang diterima merupakan pemberian yang dinilai menguntungkannya; dan pemberian yang diterimanya akan dikembalikan disertai *bunga* sebagai tambahannya.

Dalam konteks Pilkada, Otto Ihalauw menyadari dan memahami bahwa masyarakat Sorong Selatan berkecenderungan

81 Wawancara dengan Otto Ihalauw pada 21 Juli 2010 di Teminabuan, Sorong Selatan.

kuat untuk tidak menerima dua atau lebih pemberian sekaligus yang ditawarkan oleh para kandidat yang berkompetisi. Otto Ihalauw meyakini bahwa masyarakat hanya bersedia menerima salah satu pemberian yang ditawarkan; hal ini karena masyarakat terbebani kewajiban untuk melakukan pengembalian balasan yang berupa dukungan terhadap kandidat pemberi dalam kontestasi Pilkada. Pemberian yang ditawarkan kandidat lain ditolak karena tidak mungkin bagi masyarakat, untuk pada saat yang sama, juga memberikan dukungan kepada dua atau lebih kandidat sekaligus. Masyarakat hanya menerima pemberian yang dinilai paling baik dan menguntungkan baginya. Otto Ihalauw menyadari dan memahami bahwa tindakan masyarakat itu mengacu pada esensi tradisi pertukaran *Kain Timur* dan tradisi meramu.

Selain pemahaman tentang tradisi di atas, Otto Ihalauw juga memahami bahwa pola hubungan *patronase* mewarnai interaksi antar anggota masyarakat dalam aktivitas kehidupan. Pengamatan Otto Ihalauw terhadap interaksi antar anggota masyarakat diungkapkan melalui pendapatnya sebagai berikut:

“Masyarakat Sorong Selatan dalam bersikap dan bertindak cenderung mengikuti sikap dan tindakan tokoh adat (yang sekaligus tokoh etnis). Masyarakat lebih percaya dan patuh kepada tokoh adat (etnis) karena masih kentalnya pola hubungan *patronase*. Masyarakat lebih cenderung mengikuti apa perkataan dan perintah tokohnya daripada taat pada pihak lain”.⁸²

Pengamatan Otto Ihalauw di atas menjadikan dirinya yakin bahwa di masyarakat yang masih relatif kental pola hubungan *patronase*, pola hubungan tersebut bisa dimanfaatkan untuk menggalang dukungan. Otto Ihalauw memanfaatkan keberadaan tokoh adat (etnis) dalam posisinya sebagai tokoh panutan untuk keperluan mobilisasi dukungan.

82 Wawancara dengan Otto Ihalauw pada 21 Juli 2010 di Teminabuan, Sorong Selatan.

c. Persepsi Masyarakat terhadap Otto Ihalauw

Sebagai seorang individu beretnis non-Papua, perjalanan karier politik Otto Ihalauw dipengaruhi oleh persepsi masyarakat yang hidup di tengah kelompok-kelompok etnis. Sulit dipungkiri bahwa persepsi masyarakat terhadap Otto Ihalauw dipengaruhi kepentingan kelompok-kelompok etnis tersebut.

Pada umumnya, mereka yang beretnis Papua punya keinginan agar yang menjadi pimpinan di daerahnya adalah orang asli Papua. Oleh karena itu, menjelang Pilkada tidak jarang terdengar isu *putra asli* untuk menjadi pemimpin di kampung halaman sendiri. Seorang informan menyatakan bahwa perbincangan isu *putra asli* mengemuka di tengah masyarakat menjelang berakhirnya masa pemerintahan Otto Ihalauw periode pertama. Informan tersebut menyatakan bahwa sering muncul pernyataan sebaiknya jabatan bupati dipegang oleh orang asli karena lebih mengetahui kebutuhannya, dan sudah selayaknya kalau mereka (orang asli) menjadi pemimpin di negerinya sendiri.⁸³

Isu *putra asli* cukup ramai diperbincangkan oleh setiap kelompok etnis Papua asli menjelang berakhirnya pemerintahan Otto Ihalauw periode 2005-2010. Isu tersebut dapat dimaknai penolakan terhadap Otto Ihalauw yang beretnis non-Papua untuk mencalonkan diri dalam Pilkada 2010. Beredarnya keinginan tersebut memengaruhi persepsi sebagian anggota masyarakat bahwa Otto Ihalauw tidak punya pengetahuan yang memadai tentang Sorong Selatan karena ia bukan seorang *putra asli*. Dalam persepsi mereka, tidak memadai atau kurangnya pengetahuan akan berpengaruh terhadap kemampuan menjadi seorang bupati. Hal ini menyebabkan latar belakang keluarga, rekam jejak karier birokrasi dan politik dari seorang Otto Ihalauw menjadi kurang dipertimbangkan.

83 Wawancara dengan Septon Athabu pada tanggal 17 Juli 2010 di Teminabuan, Sorong Selatan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, adalah menarik untuk diperhatikan bahwa mereka yang meramalkan isu mengenai *putra asli* yang layak menjadi pemimpin justru mengalami kesulitan dalam memilih pemimpin yang disebut sebagai seorang *putra asli*. Kesulitan ini berpangkal pada ikatan primordial yang relatif kental melekat pada setiap kelompok etnis asli yang ada. Setiap kelompok etnis punya ambisi untuk mengajukan calon pemimpin; dan pada saat yang bersamaan tersimpan rasa takut pada setiap etnis apabila yang menjadi pemimpin berasal dari kelompok lain walaupun sesama orang Papua. Ketakutan ini didasarkan pada kebiasaan pemimpin dari etnis tertentu berkecenderungan menyingkirkan orang-orang dari kelompok etnis lainnya dari lingkaran kekuasaan. Dikhawatirkan posisi-posisi jabatan birokrasi yang strategis hanya diisi oleh birokrat yang sama etnisnya dengan bupati. Kekhawatiran ini sebagaimana diungkapkan oleh seorang informan yang menyatakan bahwa bila orang Papua asli yang menjadi bupati, dikhawatirkan akan muncul ‘bupati-bupati kecil’. ‘Bupati-bupati kecil’ adalah orang-orang yang sama etnisnya dengan bupati terpilih, tetapi merasa peranannya seperti bupati, di mana ia bahkan bisa melakukan tindakan-tindakan yang melampaui peran bupati itu sendiri.⁸⁴

Kekhawatiran seperti tersebut di atas ditengarai semakin menguat terutama di kalangan jajaran birokrasi pemerintahan. Para birokrat merasa takut tidak bisa menduduki posisi jabatan struktural apabila bupati tidak sama etnisnya dengan mereka. Kekhawatiran para birokrat tersebut bergulir ke tengah masyarakat; dan kekhawatiran ini dapat dimaklumi karena dengan tidak adanya pejabat birokrasi yang berasal dari kelompok etnis tertentu akan berpengaruh terhadap sumber-sumber ekonomi dan harga diri kelompok-kelompok tersebut.⁸⁵ Kekhawatiran yang meluas

84 Wawancara dengan Septon Athabu pada 17 Juli 2010 di Teminabuan, Sorong Selatan.

85 Seorang pejabat birokrasi dipandang sebagai *patron* bagi orang-orang dengan latar belakang etnis yang sama dengannya. Sebagai *patron*, pejabat tersebut mempunyai

di tengah masyarakat tersebut pada gilirannya menyurutkan isu *putra asli* sebagai bupati; dan pada saat bersamaan muncul kecenderungan pada orang-orang asli untuk memilih calon yang bukan dari etnis Papua. Situasi ini memberi keuntungan bagi Otto Ihalauw yang dianggap bukan *putra asli*.

Kondisi di atas mengubah persepsi masyarakat terhadap Otto Ihalauw; dalam pandangan masyarakat Otto Ihalauw yang beretnis non-Papua layak dipilih menjadi bupati karena bisa bertindak netral tidak memihak kelompok etnis tertentu. Dipadukan dengan perjalanan karier yang relatif lancar, baik sebagai birokrat ataupun pejabat politik, Otto Ihalauw lebih dipercaya daripada calon-calon bupati lainnya. Kepercayaan ini tidak berlebihan karena diharapkan bisa merangkul semua kelompok etnis di daerahnya. Selain Otto Ihalauw dipercaya punya kemampuan untuk mengelola jalannya roda pemerintahan.⁸⁶

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa hadirnya seorang pemimpin, dalam hal ini bupati, yang berlatar belakang etnis non-Papua masih dibutuhkan walaupun sebenarnya kurang disukai. Persepsi seperti ini berlaku juga terhadap Otto Ihalauw. Orang Papua asli berpandangan bahwa kehadiran Otto Ihalauw sebagai pemimpin di Sorong Selatan masih dibutuhkan. Meski demikian, mereka tetap ingin menjadikan anggota kelompok etnisnya sebagai pemimpin (bupati).

Sementara itu, pandangan orang-orang non-Papua yang berstatus pendatang terhadap Otto Ihalauw lebih didasarkan pada pertimbangan praktis dalam kaitannya dengan pekerjaan mereka di sektor perdagangan. Otto Ihalauw sepanjang pemerintahannya periode 2005-2010 dinilai tidak menghambat sektor perdagangan

kewajiban memenuhi kebutuhan ekonomi kelompoknya; posisi sebagai pejabat juga meningkatkan harga diri kelompoknya. Wawancara dengan Yoseph Bless, etnis Maybrat, pada 23 Juli 2010 di Teminabuan, Sorong Selatan.

86 Wawancara dengan Suroso, Sekretaris Bappeda Kabupaten Sorong Selatan, pada 24 Juli 2010 di Teminabuan, Sorong Selatan.

di mana mayoritas pendatang bekerja; bahkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan lebih mendorong perkembangan sektor ini.⁸⁷ Dalam pandangan para pendatang, mereka merasa lebih cocok dipimpin oleh sesama pendatang walaupun tidak berasal dari etnis yang sama daripada dipimpin oleh orang Papua asli. Hal ini berangkat dari rasa kurang percaya dari para pendatang terhadap orang Papua asli.

Sehubungan dengan pandangan para pendatang terhadap orang Papua, menarik disimak pendapat seorang informan pendatang yang menyatakan bahwa pendatang sulit untuk bisa mempercayai orang asli sebagai pemimpin. Hal ini antara lain karena selama ini orang Papua masih terpecah menjadi beberapa kelompok etnis, dan di antara kelompok-kelompok etnis tersebut terjadi persaingan satu dengan lainnya. Sulit bagi orang asli untuk menjadi pemimpin selama masih ada konflik antar kelompok.⁸⁸

Persepsi informan beretnis non-Papua ini jelas memberi keuntungan kepada Otto Ihalauw yang bukan berasal dari etnis Papua. Para pendatang tidak begitu mempersoalkan latar belakang etnis Otto Ihalauw; dalam persepsi mereka bahwa yang pantas menjadi pemimpin adalah figur yang punya kemampuan untuk memberi perlindungan kepada mereka.

87 Kebijakan membangun pasar baru di sekitar Wersar (wilayah 'atas' Teminabuan) merupakan bukti bahwa Otto Ihalauw memfasilitasi perkembangan sektor perdagangan. Walaupun ada sedikit gesekan antar kelompok dalam pembangunan pasar tersebut, namun dengan pendekatan yang tidak memihak salah satu kelompok pembangunan pasar dapat diselesaikan. Sementara itu pasar lama (Pasar Ampera) tidak serta-merta ditutup; perpindahan dari pasar lama ke pasar baru dilakukan tidak secara paksa. Kebijakan ini memberi citra positif bagi Otto Ihalauw bahwa dirinya punya kemampuan sebagai pemimpin yang tidak merugikan kelompok tertentu dan bertindak proporsional. Keterangan ini diperoleh dari wawancara dengan Ansar Sinja, (etnis Makassar, pedagang di Pasar Ampera), pada 17 Juli 2010 di Teminabuan, Sorong Selatan.

88 Wawancara dengan seorang sopir jurusan Teminabuan – Kota Sorong pada 25 Juli 2010. Informan tersebut berlatar belakang etnis Makassar dan sudah sekitar 5 tahun sebagai sopir; dia menyatakan bahwa sulit untuk mempercayai orang asli Papua, apalagi mempercayainya sebagai pemimpin, karena orang-orang asli lebih mendahulukan kepentingan kelompok etnis masing-masing yang berujung pada konflik.

Berdasarkan pada uraian di atas, secara ringkas dapat dinyatakan bahwa persepsi masyarakat terhadap Otto Ihalauw adalah bahwa yang bersangkutan merupakan figur yang layak dipilih menjadi pemimpin (bupati) walaupun beretnis non-Papua. Adanya persepsi masyarakat seperti ini, dan ditambah bekal sumber daya yang dimiliki, akan mempermudah Otto Ihalauw melakukan mobilisasi dukungan dalam kontestasi Pilkada.

Otto Ihalauw dan Sumber Daya

Sebagaimana dipaparkan pada uraian terdahulu, sumber daya dikaji dari keberagaman tipe atau jenisnya dan dari asal usul keberadaannya. Tipe sumber daya tertentu bisa berasal dan berada di ranah negara, dan bisa pula berasal dan berada di ranah masyarakat. Tak tertutup kemungkinan tipe sumber daya tersebut berasal dan berada di dua ranah sekaligus. Paparan berikut diawali bahasan tipe sumber daya yang dimiliki Otto Ihalauw dan disusul bahasan asal usul dan keberadaan sumber daya.

1. Tipe Sumber Daya

Sebagaimana diungkapkan pada uraian sebelumnya, Otto Ihalauw punya sumber daya bertipe normatif, personal, dan keahlian. Berikut dipaparkan tipe atau jenis sumber daya yang dimiliki Otto Ihalauw sebagai kandidat yang berkontestasi dalam Pilkada.

a. Sumber Daya Normatif

Andrain (1992: 134) menyatakan bahwa sumber daya normatif dapat berwujud kebenaran moral, religi, tradisi, atau kewenangan yang sah (*legitimate*). Kepemilikan sumber daya normatif memberi 'hak' moral bagi pemiliknya untuk menjalankan kekuasaan. Demikian pula dengan Otto Ihalauw, sebagai seorang aktor ia memiliki sumber daya normatif. Kepemilikan Otto Ihalauw atas sumber daya normatif menjadikan dirinya memperoleh

kepatuhan dari masyarakat. Kepatuhan tersebut diperoleh karena Otto Ihalauw memiliki wewenang yang sah (*legitimate*) sebagai seorang bupati yang tengah berkuasa.

Dalam posisinya sebagai bupati, Otto Ihalauw memiliki kewenangan yang absah untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di Sorong Selatan. Kewenangan tersebut mencakup pembuatan dan pelaksanaan berbagai kebijakan, seperti kebijakan rekrutmen aparat, kebijakan anggaran, kebijakan perencanaan, dan kebijakan-kebijakan lain yang menjadi kewenangannya sebagai bupati.

Sebagai sumber daya normatif, kewenangan menetapkan kebijakan rekrutmen aparat tampak pada proses penempatan atau pengangkatan pejabat pada posisi jabatan struktural. Posisi jabatan struktural merupakan posisi strategis dalam struktur organisasi pemerintahan. Posisi jabatan struktural ini tak jarang diperebutkan oleh kelompok-kelompok etnis sebagaimana diungkapkan informan yang menyatakan:

“Kelompok-kelompok etnis ada yang berupaya agar pejabat birokrasi berasal dari kelompoknya. Kalau menjadi pejabat bisa mendapatkan keuntungan, misalnya, lebih mudah memasukkan anggota kelompoknya menjadi pegawai negeri. Oleh karena itu, persaingan antar kelompok etnis tak mungkin dihindari untuk menempatkan orangnya pada jabatan birokrasi”.⁸⁹

Sehubungan dengan pernyataan informan di atas, dapat dinyatakan bahwa posisi jabatan struktural dipandang bisa menaikkan derajat atau status kelompok etnis dihadapan kelompok-kelompok lainnya. Lebih penting, posisi jabatan struktural juga dipandang sebagai sumber ekonomi bagi kelompok etnis yang menempatkan anggotanya pada posisi jabatan tersebut. Otto Ihalauw, dengan kewenangannya sebagai bupati, bisa mengangkat pejabat struktural yang dinilai bisa menggalang

89 Wawancara dengan Michael Momot (Ketua Dewan Adat Suku Tehit) dan Yunus Duwit pada 21 Juli 2010 di Teminabuan, Sorong Selatan.

dukungan dari kelompok etnisnya. Pejabat tersebut bersedia melakukan penggalangan dukungan dengan pertimbangan sebagai bentuk pembalasan atas pengangkatan dirinya sebagai pejabat struktural.⁹⁰

Demikian pula halnya dengan penempatan atau pengangkatan pejabat yang menduduki posisi kepala distrik. Posisi ini strategis karena seorang kepala berhadapan langsung dengan masyarakat. Otto Ihalauw menempatkan pejabat berlatar belakang etnis sama dengan mayoritas penduduk yang berdomisili di distrik bersangkutan.⁹¹ Kalaupun posisi jabatan kepala distrik tidak diisi oleh pejabat beretnis sama dengan mayoritas penduduk, atau bahkan diisi oleh pejabat beretnis non-Papua, pejabat yang menduduki posisi jabatan kepala distrik merupakan birokrat yang telah lama dikenal oleh penduduk distrik yang bersangkutan. Oleh karenanya, pejabat yang ditempatkan sebagai kepala distrik relatif mudah menggalang massa. Kepala-kepala distrik ini bersedia menggalang massa karena mereka menganggap jabatan yang diemban merupakan pemberian Otto Ihalauw, dan mereka merasa berkewajiban untuk mengembalikan pemberian tersebut dalam bentuk menggalang dukungan.

Sementara itu, sumber daya normatif berupa kewenangan di bidang anggaran tampak pada kebijakan Otto Ihalauw dalam menempatkan aparat pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Mereka yang ditempatkan sebagai anggota tim merupakan aparat yang terlibat dalam penentuan prioritas program dan kegiatan pembangunan. Sementara itu, penentuan prioritas program dan kegiatan pembangunan lebih banyak ditentukan oleh kepentingan aparat anggota tim yang berbasis pada kepentingan etnis.⁹² Oleh

90 Data dan analisis yang menunjukkan pengangkatan pejabat struktural berdasarkan pertimbangan etnisitas yang pada gilirannya bisa menghadirkan dukungan dapat dilihat pada bahasan tentang 'Mobilisasi Dukungan di Ranah Birokrasi'.

91 Data dan analisis yang menunjukkan pengangkatan Kepala Distrik dapat dilihat pada bahasan tentang 'Mobilisasi Dukungan di Ranah Birokrasi'.

92 Studi yang dilakukan Suroso (2009) tentang 'Proses Politik Dalam Penganggaran di Kabupaten Sorong Selatan' menyatakan bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah

karena itu, dalam penempatan aparat sebagai anggota tim, Otto Ihalauw berupaya menempatkan aparat yang diharapkan bisa memanfaatkan posisinya untuk menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan. Upaya yang dilakukan aparat tersebut, pada gilirannya dapat menghadirkan dukungan dari kelompok etnis yang diprioritaskan dalam pembangunan.

Sumber daya normatif yang dimiliki Otto Ihalauw juga dikarenakan yang bersangkutan berposisi sebagai ketua Partai Golkar Sorong Selatan. Posisi sebagai ketua partai menjadikan Otto Ihalauw memiliki kewenangan yang melakat pada jabatan tersebut. Dengan kewenangannya sebagai ketua partai, Otto Ihalauw bisa mengarahkan terbentuknya koalisi partai yang mendukung pencalonannya dalam Pilkada 2010. Koalisi Partai Golkar, PKS dan Partai Hanura dibentuk dengan pertimbangan untuk memperoleh dukungan massa sebanyak mungkin; dan koalisi ini bisa terbentuk atas campur tangan Otto Ihalauw dalam posisinya sebagai ketua partai. Terkait dengan hal itu, seorang politisi PKS menyatakan:

“Koalisi yang terbentuk untuk mengusung calon Bupati dalam Pilkada 2010 antara PKS dengan Partai Golkar tak bisa lepas dari peran Otto Ihalauw selaku ketua Partai Golkar. Partai Golkar, dengan jumlah perolehan kursi di DPRD sebanyak lima kursi sebenarnya tak perlu berkoalisi dngan partai lain untuk mengusung calonnya dalam Pilkada. Namun, Otto Ihalauw selaku ketua partai punya pertimbangan bahwa Partai Golkar perlu membangun koalisi dengan partai lain untuk mengusung calonnya”.⁹³

Sebagai sumber daya normatif, kewenangan sebagai bupati sekaligus ketua partai dimanfaatkan Otto Ihalauw dalam membangun relasi yang harmonis dengan DPRD. Hubungan yang harmonis ini antara lain tampak pada proses penetapan RAPBD menjadi APBD yang berlangsung setiap tahun tidak

dibentuk dengan mempertimbangkan keterwakilan etnis yang ada; dan faktor etnisitas ternyata relatif kuat dalam memengaruhi pengambilan kebijakan.

93 Wawancara dengan Ahmad Samsuddin, anggota DPRD Kanupaten Sorong Selatan dari PKS, pada 18 Juli 2010 di Teminabuan, Sorong Selatan

mengalami hambatan yang berarti. Demikian pula halnya dengan proses penetapan Peraturan-peraturan Daerah lainnya juga berlangsung relatif lancar. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Sorong, Alex Duwit, yang menyatakan bahwa:

“Proses penetapan RAPBD ataupun Peraturan Daerah lainnya berjalan lancar karena adanya jalinan hubungan harmonis antara Otto Ihalauw selaku Bupati dengan pihak DPRD. Hubungan yang harmonis tersebut menjadikan penetapan Peraturan Daerah tak menemukan hambatan yang berarti.”⁹⁴

Hubungan harmonis dengan DPRD tersebut, pada gilirannya, menciptakan stabilitas jalannya roda pemerintahan yang menjadikan Otto Ihalauw bisa lebih berkonsentrasi menghadapi Pilkada. Hubungan harmonis dengan DPRD tersebut lebih banyak ditentukan oleh Otto Ihalauw dalam posisinya sebagai ketua partai.

Selain itu, sumber daya normatif yang dimiliki Otto Ihalauw berupa statusnya sebagai anak adat suku (etnis) Tehit. Pengangkatan sebagai anak adat suku (etnis) Tehit menjadikan Otto Ihalauw punya hak dan kewajiban sebagaimana halnya anggota kelompok etnis Tehit. Dalam posisinya sebagai anak adat suku (etnis) Tehit, Otto Ihalauw tak jarang diundang dalam pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh kelompok etnis Tehit. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, Otto Ihalauw yang juga berkedudukan sebagai Bupati Sorong Selatan sering diminta masukan usul atau saran. Sehubungan dengan hal itu, Michael Momot, selaku Ketua Dewan Adat Suku Tehit, menyatakan bahwa:

94 Wawancara dengan Alex Duwit, Sekretaris DPRD Kabupaten Sorong Selatan. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Suroso dalam wawancaranya yang dilakukan secara terpisah.

“Sebagai anak adat Suku Tehit, Otto Ihalauw dimintai sumbang saran terkait dengan aktivitas yang ada dalam suku. Sebagai anak adat yang berposisi sebagai Bupati, keterlibatan Otto Ihalauw untuk memberi sumbang saran kepada suku Tehit merupakan hal yang wajar; dan dia dengan terbuka menyampaikan saran-sarannya. Bahkan posisinya sebagai anak adat suku Tehit menjadikannya lebih mudah berinteraksi dengan kelompok-kelompok etnis asli lainnya.”⁹⁵

Hal di atas menunjukkan bahwa dengan statusnya sebagai anak adat suku (etnis) Tehit), Otto Ihalauw bisa lebih mudah berinteraksi dengan orang Tehit dan juga dengan orang Papua lainnya, dan kondisi ini menguntungkan baginya untuk menghadapi kontestasi Pilkada, terutama dalam hal mobilisasi dukungan.

Paparan di atas menunjukkan bahwa sumber daya normatif yang dimiliki Otto Ihalauw ada yang dikarenakan posisinya sebagai bupati dan ada pula yang dikarenakan statusnya sebagai ketua partai. Status sebagai anak adat (etnis) Tehit yang disandang Otto Ihalauw juga menambah sumber daya normatif yang dimiliki. Sumber daya normatif tersebut pada umumnya tampak dalam bentuk kewenangan menetapkan berbagai kebijakan, di mana kebijakan-kebijakan tersebut pada gilirannya bisa dimanfaatkan untuk berlangsungnya mobilisasi dukungan.

b. Sumber Daya Personal

Sumber daya personal dapat tampil dalam wujud kharisma, popularitas, atau daya tarik pribadi (Andrain, 1992: 134). Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa kepemilikan sumber daya personal mengacu pada kualitas pribadi yang dimiliki aktor. Seorang aktor dengan kharisma, popularitas atau daya tarik pribadi lainnya merupakan gambaran seorang pemegang sumber daya yang dapat menyebabkan massa tertarik dan patuh kepadanya.

95 Wawancara dengan Michael Momot (Ketua Dewan Adat Suku Tehit) pada 21 Juli 2010 di Teminabuan, Sorong Selatan.

Demikian pula halnya dengan Otto Ihalauw, sumber daya personal yang dimiliki tampil dalam bentuk pribadi yang sederhana, santun, ramah, terbuka, pemaaf, dan religius. Kepemilikan sumber daya tersebut tak bisa dilepaskan dari latar belakang keluarga. Latar belakang keluarga besar dapat dinyatakan berperan dalam membentuk Otto Ihalauw sebagai individu yang sederhana dan religius. Hal ini tak bisa dilepaskan dari silsilah keluarga. Dari garis ayah, kakeknya adalah seorang tokoh agama sekaligus sebagai pengabar Injil di kawasan Sorong Selatan; dan dari garis ibu, kakeknya dikenal sebagai pendidik. Oleh karena tak mengherankan bila Otto Ihalauw tumbuh dan berkembang sebagai pribadi yang sederhana, santun, terbuka, pemaaf, dan religius.

Sumber daya personal lain yang dimiliki Otto Ihalauw tak bisa dipisahkan dari latar belakang etnisitas. Otto Ihalauw yang berasal dari etnis non-Papua dapat dinyatakan sebagai sumber daya personal baginya untuk mengikuti kontestasi Pilkada. Dengan latar belakang dari etnis Maluku (Ambon), memberi keuntungan bagi Otto Ihalauw dalam berkontestasi dengan para kandidat lain yang berlatar belakang etnis asli Papua. Demikian pula, di tengah persaingan antar sesama kelompok etnis Papua, posisi sebagai kandidat berlatar belakang etnis non-Papua justru memberi keuntungan bagi Otto Ihalauw. Relatif kuat ikatan kelompok etnis asli menjadikan orang di luar kelompok menjadi bukan sebagai 'kami', tetapi orang di luar kelompok etnis asli adalah sebagai 'mereka'. Persaingan di antara sesama kelompok etnis asli Papua yang menajam membawa dampak kecenderungan untuk tidak mempercayai orang di luar kelompoknya. Kondisi ini memunculkan kecenderungan orang asli lebih mempercayai orang non-Papua daripada orang asli di luar kelompok etnisnya. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa Otto Ihalauw memiliki sumber daya personal yang berupa asal usul etnisnya.

Ringkasnya, paparan di atas menunjukkan bahwa sumber daya personal yang dimiliki Otto Ihalauw tampil dalam bentuk karakter

pribadi sebagai figur yang sederhana, santun, ramah, terbuka, pemaaf, dan religius. Di samping itu, sumber daya personal lainnya berupa asal usul Otto Ihalauw yang beretnis non-Papua. Pada umumnya, sumber daya personal tersebut dimanfaatkan untuk menggalang dukungan dalam aktivitas sehari-hari yang sifatnya sedikit banyak tidak formal.

c. Sumber Daya Keahlian

Sumber daya keahlian antara lain dapat berwujud penguasaan atas informasi, pengetahuan ataupun keahlian teknis lainnya yang ada pada diri sang aktor (Andrain, 1992: 135). Pada umumnya, sumber daya keahlian lebih banyak digunakan untuk memperoleh kepatuhan massa di masyarakat maju dibandingkan di masyarakat terbelakang. Kecenderungan yang muncul adalah bahwa kepemilikan sumber daya keahlian dalam jumlah banyak dan beragam cenderung lebih mudah memperoleh kepatuhan massa. Demikian pula sebaliknya, kepemilikan sumber daya keahlian dalam jumlah dan ragam yang sedikit bisa menjadi penyebab rendahnya kepatuhan massa.

Dalam hal sumber daya keahlian, Otto Ihalauw memilikinya dalam bentuk pengetahuan atau keahlian dan informasi di bidang pemerintahan. Sumber daya keahlian yang dimiliki Otto Ihalauw diperoleh melalui jenjang pendidikan yang ia tempuh dan perjalanan kariernya sebagai birokrat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong.

Sumber daya keahlian berupa pengetahuan atau keahlian di bidang pemerintahan diperoleh melalui jenjang pendidikan di Akademi Pemerintahan Dalam Negeri, Jayapura dan di Institut Ilmu Pemerintahan, Jakarta. Otto Ihalauw pun menambah ilmunya di Program Pasca Sarjana (S-2) Ilmu Politik dengan konsentrasi Politik Lokal dan Otonomi Daerah.

Selain melalui jenjang pendidikan formal, pengetahuan dan keahliannya di bidang pemerintahan juga diperoleh pada

saat Otto Ihalauw meniti karier mulai dari jenjang staf sampai menduduki jabatan politik, Bupati Sorong Selatan periode 2000-2005. Selepas menempuh pendidikan di Akademi Pemerintahan Dalam Negeri, Otto Ihalauw berkarier sebagai pegawai staf di lingkungan Setwilda Kabupaten Sorong. Jenjang jabatan yang pertama diemban adalah sebagai Kepala Sub Bagian Pengendalian dan Pelaksanaan Program. Setelah lulus dari Institut Ilmu Pemerintan, Otto Ihalauw menduduki posisi sebagai Kepala Seksi Pengumpulan Data, kemudian secara berurutan diangkat sebagai Kepala Sub Bagian Perangkat Wilayah/Daerah, pejabat Kepala Distrik Teminabuan, Kepala Bagian Tata Pemerntahan, Asisten I Sekretaris Daerah, dan Kepala Pemberdayaan Masyarakat. Perjalanan karier tersebut dijalani Otto Ihalauw di Kabupaten Sorong. Dengan dibentuknya Kabupaten Sorong Selatan, Otto Ihalauw ditunjuk sebagai pejabat (*caretaker*) Bupati; dan kemudian terpilih sebagai bupati definitif pada Pilkada 2005.

Pengangkatan Otto Ihalauw sebagai pejabat (*caretaker*) Bupati merupakan bukti sekaligus mengindikasikan bahwa yang bersangkutan punya pengetahuan dan keahlian di bidang pemerintahan yang memadai dan layak untuk memimpin Sorong Selatan sebagai kabupaten pemekaran. Sulit untuk dibantah bahwa pengetahuan dan keahlian ini diperoleh Otto Ihalauw melalui jenjang pendidikan dan karier birokrasi cukup panjang.

2. Asal-usul Sumber Daya

Sumber daya, dikaji dari sisi asal usul keberadaannya, dibedakan menjadi sumber daya yang ada di ranah negara (*state resources*) dan yang ada di ranah luar negara (*non-state resources*) atau di ranah masyarakat. Berikut dipaparkan asal usul keberadaan sumber daya.

a. Sumber Daya Negara

Pada umumnya sumber daya yang berasal dan berada di ranah negara dimiliki kandidat yang berstatus petahana. Hal

ini dikarenakan hanya kandidat petahana yang punya peluang paling besar untuk bisa mengakses sumber daya negara; sementara kandidat lainnya dapat dinyatakan sangat kecil peluangnya untuk bisa mengakses sumber daya tersebut. Oleh karena itu, dalam kenyataannya kepemilikan sumber daya negara cenderung dimonopoli oleh kandidat petahana yang punya kewenangan jabatan. Demikian pula halnya dengan Otto Ihalauw, sebagai kandidat petahana memiliki beragam sumber daya negara.

Perjalanan karier Otto Ihalauw, sebagaimana diuraikan di atas, membuka peluang baginya untuk mengakses dan memanfaatkan beragam sumber daya yang ada di ranah negara. Salah satu sumber daya negara yang potensial adalah jajaran birokrasi. Birokrasi merupakan sumber daya potensial karena fungsinya sebagai instrumen pelaksana kebijakan yang mengharuskan berhadapan langsung dengan masyarakat. Dalam posisinya sebagai kandidat petahana, Otto Ihalauw sebagai pucuk pimpinan bagi jajaran birokrasi, bisa menjadikan birokrasi sebagai sumber daya untuk berlangsungnya mobilisasi.

Birokrasi sebagai sumber daya bukan hanya karena fungsinya sebagai instrumen pelaksana kebijakan, namun juga dikarenakan kondisi sosio-kultural yang menjadikan birokrasi sebagai *patron* bagi masyarakat. Dalam pandangan masyarakat, para aparat birokrasi merupakan patron yang melindungi dan memenuhi kebutuhan hidup bagi anggota kelompok etnisnya. Dalam posisinya sebagai patron, para aparat birokrasi relatif mudah memobilisasi dukungan anggota masyarakat yang membutuhkan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan hidup darinya. Sehubungan dengan hal itu menarik disimak pernyataan informan yang mengungkapkan bahwa:

“Dalam posisinya sebagai patron, aparat birokrasi punya kewajiban memenuhi kebutuhan ekonomi para anggota kelompok etnis dari mana aparat tersebut berasal. Pemenuhan kebutuhan yang merupakan kewajiban ini akan memperoleh imbalan berupa kepatuhan para anggota kelompok

etnisnya; dan dalam kondisi ini menjadikan aparat birokrasi relatif mudah untuk melakukan mobilisasi para anggota kelompok etnisnya.”⁹⁶

Relatif kentalnya pola hubungan patronasenya, sebagaimana diungkap di atas, menjadikan birokrasi sebagai salah satu sumber daya yang potensial dalam konteks mobilisasi dukungan. Oleh karena itu, jajaran birokrasi sebagai sumber daya yang ada di ranah negara dimanfaatkan Otto Ihalauw untuk berlangsungnya mobilisasi dukungan guna meraih kemenangan dalam kontestasi Pilkada.⁹⁷

Selain birokrasi, sumber daya yang berasal dan berada di ranah negara adalah kewenangan terkait penyusunan anggaran. Otto Ihalauw punya sumber daya ini karena posisinya sedang menjabat sebagai Bupati. Otto Ihalauw punya kewenangan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan perencanaan proyek-proyek pembangunan. Dengan kewenangannya tersebut, Otto Ihalauw bisa merancang sedemikian rupa pemanfaatan APBD dan penentuan proyek-proyek pembangunan sebagai sumber daya untuk menopang keikutsertaannya dalam Pilkada.⁹⁸ Pemanfaatan APBD memang diprioritaskan untuk pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang langsung berkaitan dengan kebutuhan masyarakat; namun pemanfaatan APBD bisa pula menaikkan popularitas diri Otto Ihalauw di mata masyarakat. Dalam pandangan masyarakat, Otto Ihalauw merupakan figur pimpinan yang memperhatikan kebutuhan masyarakat melalui proyek-proyek pembangunan yang dilaksanakannya. Hal tersebut diungkapkan beberapa informan yang pada intinya mengukapkan bahwa proyek-proyek pembangunan di bawah pemerintahan Otto Ihalauw dirasakan

96 Wawancara dengan Suroso pada 21 Oktober 2009 di Yogyakarta.

97 Data dan analisis yang menunjukkan bahwa Otto Ihalauw memanfaatkan birokrasi untuk memobilisasi dukungan dapat dilihat pada bahasan tentang ‘Mobilisasi Dukungan di Ranah Birokrasi’.

98 Wawancara dengan Suroso, Sekretaris Bappeda Kabupaten Sorong Selatan, pada 15 Juli 2010 di Teminabuan, Sorong Selatan.

manfaatnya oleh masyarakat. Pembangunan jalan, pasar, rumah sakit dan sekolah direspons positif oleh masyarakat karena mereka merasakan manfaatnya.⁹⁹

Uraian di atas menunjukkan bahwa anggaran pemerintah daerah merupakan sumber daya negara yang potensial. Apabila penggunaannya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sumber daya tersebut bisa dipergunakan sebagai instrumen untuk mobilisasi dukungan dalam kontestasi Pilkada.

Selain hal di atas, dalam posisinya sebagai kandidat petahana, Otto Ihalauw punya kewenangan untuk terlibat dalam merumuskan kebijakan pemerintah daerah. Kewenangan untuk membuat kebijakan merupakan sumber daya yang berasal dan berada di ranah negara. Kebijakan pemerintah daerah, baik yang berupa peraturan daerah maupun peraturan bupati, dapat dimanfaatkan sedemikian rupa sebagai sumber daya untuk berlangsungnya mobilisasi dukungan. Dalam kenyataannya, kebijakan pemerintah daerah tidak sekadar untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan daerah saja; namun kebijakan tersebut bisa menghadirkan dukungan apabila memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, apabila kebijakan tersebut tidak mampu memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat, maka dukungan terhadap pemerintah daerah cenderung turun yang membawa dampak relatif sulit untuk menghadirkan mobilisasi dukungan. Sehubungan dengan hal itu, Otto Ihalauw mengungkapkan bahwa:

⁹⁹ Wawancara dengan beberapa anggota masyarakat yang dilakukan secara terpisah; antara lain dengan: Melkianus Konjol pada 19 Juli 2010, Kenan Thesia pada 20 Juli 2010, dan Yustus Saflembolo pada 23 Juli 2010; wawancara dilakukan di Teminabuan, Sorong Selatan.

“Untuk memperoleh simpati dan dukungan masyarakat, kebijakan yang dibuat pemerintah harus sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Jangan harap ada dukungan apabila kebijakan yang dibuat tidak sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat; justru yang diperoleh protes yang bisa mengganggu jalannya roda pemerintahan dan pembangunan itu sendiri.”¹⁰⁰

Sebagai sumber daya yang berada di ranah negara, kewenangan membuat kebijakan yang berupa peraturan bupati sepenuhnya berada di tangan Otto Ihalauw. Namun, dalam hal kewenangan membuat kebijakan yang berupa peraturan daerah, Otto Ihalauw harus melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam hal membuat peraturan daerah, Otto Ihalauw punya sumber daya tambahan berupa lima kursi DPRD diisi oleh kader Partai Golkar yang dipimpinya.¹⁰¹ Hal ini makin memperkuat posisi Otto Ihalauw sebagai Bupati dalam membuat peraturan daerah bersama dengan DPRD.

Berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya negara tersebut, Otto Ihalauw menghadapi rintangan karena hubungan kerja yang kurang baik dengan Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.¹⁰² Hubungan kerja Otto Ihalauw selaku Bupati dengan Herman Tom Dedaida selaku Wakil Bupati dapat dinyatakan tidak serasi. Di antara mereka, terkadang muncul keputusan yang berbeda dalam hal persetujuan atas kebijakan pembangunan. Kasus menonjol yang mengindikasikan ketidakserasian hubungan di antara mereka adalah berkaitan dengan investasi perkebunan sagu di Inanwatan (wilayah Kokoda, bagian selatan dari Kabupaten Sorong Selatan. Proses tarik menarik persetujuan atas investasi perkebunan sagu mengindikasikan gesekan antara Bupati dengan Wakil Bupati. Hubungan kerja yang kurang baik ini menjadi semakin meruncing tatkala Herman Tom Dedaida menjadi salah

100 Wawancara dengan Otto Ihalauw pada 21 Juli 2010 di Teminabuan, Sorong Selatan.

101 Komposisi keanggotaan DPRD Sorong Selatan hasil pemilihan umum 2009 dapat dilihat pada bahasan tentang ‘Keberadaan Partai-partai Politik’.

102 Wawancara dengan Martinus Salamuk (etnis Tehit, Kepala BKD Kabupaten Sorong Selatan) pada 17 Januari 2011 di Yogyakarta.

satu kompetitor Otto Ihalauw dengan mencalonkan diri sebagai kandidat dalam Pilkada 2010. Kondisi ini menjadikan persaingan dalam memperebutkan dan memanfaatkan sumber daya yang berada di ranah negara berlangsung tidak sehat.

Demikian pula hubungan kerja antara Otto Ihalauw dengan Sekretaris Daerah yang dijabat Agustinus Saa yang berasal dari Maybrat (tepatnya dari sub-etnis Aifat) berjalan tidak begitu baik. Hubungan kerja yang kurang harmonis ini karena Agustinus Saa sebagai Ketua Baperjakat merasa jarang dilibatkan dalam proses rekrutmen dan mutasi pegawai. Hubungan yang kurang harmonis tersebut menjadikan Otto Ihalauw terkendala dalam memanfaatkan sumber daya birokrasi; paling tidak Otto Ihalauw menghadapi kendala dalam memanfaatkan jajaran birokrasi yang berasal dari kelompok etnis Maybrat yang menjadikan Agustinus Saa sebagai patronnya.

Ringkasnya, uraian di atas menunjukkan bahwa sumber daya yang berasal dan berada di ranah negara yang dimiliki Otto Ihalauw antara lain berupa kewenangan mengatur dan memimpin birokrasi, kewenangan menentukan alokasi anggaran dan proyek-proyek pembangunan serta kewenangan lain yang melekat dalam posisinya sebagai bupati. Kepemilikan sumber daya negara tersebut dimonopoli Otto Ihalauw karena yang bersangkutan berposisi sebagai kandidat petahana. Sementara kandidat-kandidat lain, sangat kecil, atau bahkan tidak mungkin, untuk bisa memiliki sumber daya negara karena peluang untuk mengakses sumber daya tersebut sangat sulit. Dalam posisinya sebagai kandidat petahana, Otto Ihalauw memanfaatkan semua sumber daya untuk berlangsungnya mobilisasi dukungan dalam kontestasi Pilkada.

b. Sumber Daya Masyarakat

Apabila kepemilikan sumber daya negara cenderung dimonopoli kandidat petahana, maka kepemilikan sumber daya

yang berasal dan berada di ranah masyarakat sulit dimonopoli oleh satu kandidat tertentu. Hal ini dikarenakan sumber daya masyarakat bisa diakses oleh semua kandidat tanpa terkecuali. Namun, kandidat petahana juga memiliki peluang relatif besar untuk mengakses sumber daya masyarakat. Dalam posisinya sebagai kandidat petahana, Otto Ihalauw relatif mudah membangun jaringan dengan kelompok-kelompok etnis yang ada. Jaringan ini terbentuk karena adanya kebutuhan dari dua belah pihak, baik pemerintah maupun kelompok-kelompok etnis.

Pihak pemerintah memerlukan dukungan dari kelompok-kelompok etnis dalam menyelenggarakan roda pemerintahan dan pembangunan; sementara di sisi lain, kelompok-kelompok etnis memerlukan pengakuan formal atas keberadaannya dari pemerintah.¹⁰³ Hubungan saling membutuhkan antara pemerintah di satu sisi dengan kelompok-kelompok etnis di sisi lain menjadikan Otto Ihalauw relatif mudah membangun jaringan. Jaringan hubungan atau relasi tersebut pada gilirannya dimanfaatkan sebagai sumber daya untuk berlangsungnya mobilisasi dukungan guna meraih kemenangan dalam kontestasi Pilkada.

Berkaitan dengan kelompok etnis, sumber daya masyarakat lain yang dimiliki Otto Ihalauw, sebagaimana telah dibahas pada uraian sebelumnya, adalah diangkat dan diakuinya yang bersangkutan sebagai anak adat suku Tehit. Pengangkatan dan pengakuan sebagai anak adat suku Tehit menjadikan Otto Ihalauw layaknya orang Papua asli dengan segala hak dan kewajiban yang melekat pada seorang anak adat. Status sebagai anak adat merupakan sumber daya, di mana suku Tehit menjadi pendukung potensial bagi Otto Ihalauw sebagai anak adat yang mengikuti kontestasi Pilkada. Dengan status tersebut, Otto Ihalauw punya hak dan kewajiban sebagai anak adat suku (etnis) Tehit, termasuk bisa memobilisasi anggota kelompok etnis tersebut.

103 Wawancara dengan Michael Momot, Ketua Dewan Adat Suku Tehit, pada 19 Juli 2010 di Teminabuan, Sorong Selatan.

Berbekal sumber daya normatif berupa kewenangan sebagai Bupati, Otto Ihalauw relatif mudah mengakses dan memanfaatkan sumber daya masyarakat lainnya, yakni institusi gereja. Relatif mudah membangun jaringan dengan institusi gereja juga didukung sumber daya personal, yakni latar belakang keluarga Otto Ihalauw yang kental nuansa religius.¹⁰⁴ Institusi gereja dapat dinyatakan sebagai sumber daya masyarakat karena bagi masyarakat Sorong Selatan, dan juga Papua pada umumnya, institusi tersebut dipandang sebagai salah satu lembaga yang mampu membantu menyelesaikan persoalan kehidupan di masyarakat. Sehubungan dengan hal itu, seorang informan menyatakan bahwa:

“Gereja punya peran penting di tengah kehidupan masyarakat. Gereja tak hanya dipandang sebagai institusi keagamaan saja, namun juga bisa membantu masyarakat dalam menyelesaikan persoalan kehidupan sehari-hari. Gereja bisa membantu menyelesaikan pemenuhan kebutuhan ekonomi.”¹⁰⁵

Sebagai konsekuensi institusi gereja dijadikan sandaran masyarakat dalam menyelesaikan persoalan kehidupan, institusi ini tidak lagi sekadar berperan sebagai instrumen keagamaan. Institusi gereja bisa pula dimanfaatkan sebagai instrumen politik, dalam hal ini sebagai instrumen untuk menggalang dukungan masyarakat.

Pemanfaatan institusi gereja sebagai sumber daya yang berada di ranah masyarakat bisa dilakukan oleh semua kandidat. Oleh karena itu, para kandidat harus saling bersaing memperebutkannya. Dalam persaingan tersebut, Otto Ihalauw tidak hanya berbekal sumber daya normatif berupa kewenangan sebagai Bupati; namun juga mengandalkan sumber daya personal yang dimiliki sebagai aktor yang berlatar belakang keluarga religius. Oleh karena itu,

104 Ulasan tentang latar belakang keluarga Otto Ihalauw dapat dilihat pada bahasan tentang ‘Otto Ihalauw: Seorang Birokrat Non-Papua yang menjadi Papua’.

105 Wawancara dengan Yunus Duwit, etnis Maybrat (Ayamaru), pada 15 Juli 2010 di Teminabuan, Sorong Selatan.

Otto Ihalauw tidak mengalami hambatan yang berarti dalam memanfaatkan institusi gereja sebagai sumber daya masyarakat.

Sumber daya lainnya yang berasal dan berada di ranah masyarakat adalah media massa. Dalam konteks Pilkada, media massa dapat dimanfaatkan untuk mensosialisasikan dan mengkampanyekan kandidat dalam upayanya memenangkan kontestasi. Oleh karena itu, bagi setiap kandidat, media massa merupakan sumber daya yang harus diakses dan dimanfaatkan untuk menopang keikutsertaannya dalam Pilkada.

Sumber daya normatif berupa jabatan Bupati yang melekat pada diri Otto Ihalauw menjadikan yang bersangkutan relatif mudah membangun relasi dengan media massa. Hal ini karena media massa, terutama surat kabar,¹⁰⁶ membutuhkan Otto Ihalauw selaku Bupati sebagai sumber informasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sorong Selatan. Dalam keadaan seperti ini, jaringan relasi dengan media massa terbentuk dengan sendirinya; dan Otto Ihalauw tinggal merawat jaringan yang sudah terbangun. Dalam hal merawat jaringan dengan media massa, sebagai kandidat yang sedang memegang jabatan, Otto Ihalauw memanfaatkan Bagian Hubungan Masyarakat pada jajaran birokrasi pemerintah daerah; dan melalui jajaran birokrasi ini pula jaringan media massa bisa dioptimalkan sebagai sumber daya masyarakat untuk menggalang dukungan massa guna meraih kemenangan dalam kontestasi Pilkada.

Selain media massa, jaringan dengan pengusaha juga merupakan sumber daya bagi Otto Ihalauw. Pemanfaatan jaringan pengusaha sebagai sumber daya dipermudah oleh posisi Otto Ihalauw sebagai kandidat petahana.¹⁰⁷ Hal ini karena

106 Terdapat beberapa surat kabar harian yang beredar di Kabupaten Sorong Selatan, khususnya di kota Teminabuan. Surat kabar yang relatif mudah ditemukan adalah Papua barat Pos dan Radar Sorong.

107 Otto Ihalauw berhasil membangun jaringan dengan pengusaha, baik yang berdomisili di Teminabuan maupun di kota Sorong. Wawancara dengan Yustus Saffembolo pada 23 Juli 2010 di Teminabuan, Sorong Selatan. Dinyatakan oleh Yustus Saffembolo bahwa

kebutuhan pemerintah daerah untuk menggandeng sektor swasta (pengusaha) dalam melaksanakan proyek-proyek pembangunan. Kenyataan menunjukkan bahwa tanpa kehadiran para pengusaha, Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan mengalami kesulitan untuk merealisasikan proyek-proyek pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut, Otto Ihalauw dalam posisinya sebagai Bupati dituntut harus mampu menghadirkan para pengusaha. Kondisi ini yang membuka peluang bagi Otto Ihalauw untuk bisa mengakses para pengusaha yang pada gilirannya dijadikan sumber daya untuk berlangsungnya mobilisasi dukungan.

Sumber daya potensial lain yang berasal dari luar negara adalah partai politik. Dalam konteks Pilkada, partai politik merupakan sumber daya yang dapat dipergunakan sebagai pengusung pencalonan kandidat. Selain itu, partai politik dapat dimanfaatkan sebagai mesin politik untuk memobilisasi dukungan bagi kandidat. Dalam hal partai politik sebagai sumber daya, Otto Ihalauw diuntungkan dengan posisinya sebagai ketua Partai Golkar Sorong Selatan. Dalam posisinya sebagai ketua partai, Otto Ihalauw memiliki peluang relatif besar untuk memanfaatkan partai guna memobilisasi dukungan massa.

Sumber daya berupa partai politik yang dimiliki Otto Ihalauw tidak hanya berasal dari Partai Golkar, namun juga berasal dari PKS dan Partai Hanura.¹⁰⁸ Ketiga partai politik ini merupakan sumber daya yang berfungsi sebagai mesin politik untuk mengusung dan memenangkan Otto Ihalauw dalam kontestasi Pilkada. Dibandingkan dengan para kandidat lain, Otto Ihalauw

Otto Ihalauw punya hubungan dekat dan baik dengan beberapa pengusaha seperti Haji Nur, Haji Muhadi dan sejumlah pengusaha lainnya.

Sumber lain, yakni Buku Panduan Acara Pengambilan Sumpah/Janji serta Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan periode 2010-2015, menyebutkan bahwa terdapat 15 rekanan pengusaha yang diundang menghadiri acara pelantikan tersebut. Kelima belas rekanan pengusaha tersebut, baik yang beralamat di Teminabuan maupun di kota Sorong, dapat diinterpretasikan sebagai pendukung bagi pencalonan Otto Ihalauw.

108 Dalam Pilkada 2010, pasangan Otto Ihalauw-Samsuddin Anggiluli dicalonkan oleh Partai Golkar, PKS dan Partai Hanura sebagai partai pengusung.

memiliki sumber daya partai politik yang paling besar. Hal ini karena tiga partai politik yang mengusung pencalonannya punya sembilan dari 20 kursi di DPRD setempat.¹⁰⁹ Sementara itu para kandidat lain, masing-masing hanya didukung partai-partai politik yang punya tidak lebih dari lima kursi.¹¹⁰ Berdasarkan jumlah kursi partai pengusung di DPRD, Otto Ihalauw dapat dinyatakan punya massa pendukung yang lebih besar dibandingkan para kandidat lain.

Berdasarkan pada uraian di atas dapat dinyatakan bahwa sumber daya yang berasal dan berada di ranah masyarakat yang dimiliki Otto Ihalauw cukup beragam. Sumber daya tersebut berupa kelompok-kelompok etnis, institusi gereja, media massa, dan partai politik. Dalam memanfaatkan sumber daya, Otto Ihalauw memiliki peluang paling besar dibandingkan dengan kandidat-kandidat lainnya.

109 Partai Golkar mempunyai 5 kursi, PKS dan Partai Hanura masing-masing mempunyai 2 kursi di DPRD Kabupaten Sorong Selatan.

110 Pasangan Dance Yulian Flassy-H. Mustafa Wugadje diusung P. Demokrat (3 kursi), Otto Ihalauw-Samsuddin Anggiluli diusung P. Golkar, PKS dan P. Hanura (9 kursi), Origenes Ijje-Adrianus Dahar diusung PDK, PDS, PPDI, PNBK, dan PDI-P (5 kursi) Yunus Saflombolo-Djoni Harry Bowaire diusung PDP, P. Kedaulatan dan PAN (3 kursi), dan Herman Tom Dedaida-Frans Howay diusung partai-partai politik yang tidak punya kursi di DPRD.

V

Partai Politik dan Pemilihan Kepala Daerah dalam Bingkai Politik Etnisitas dan Politik Kain Timur

PAPARAN pada bab ini membahas tentang partai politik di masyarakat berbasis etnisitas yang masih terlekat tradisi. Adapun tujuannya, selain dimaksudkan untuk menjelaskan keberadaan partai politik di tengah politik etnisitas, juga untuk menjelaskan aktivitas dari partai politik tersebut yang dipengaruhi tradisi yang esensinya masih dijadikan rujukan masyarakat. Dikarenakan masih relatif kentalnya pengaruh etnisitas dan tradisi, paparan pada bab ini menjadi relevan untuk mengetahui dan memahami keberadaan dan peran partai politik di masyarakat.

Bab ini diawali dengan paparan yang mengulas keberadaan partai politik. Paparan tersebut meliputi bahasan terkait dengan proses kehadiran, basis dukungan, dan aktivitas partai. Terkait dengan keberadaan partai politik juga dipaparkan bahasan tentang persepsi atau pandangan masyarakat terhadap partai. Bahasan diakhiri dengan mengulas aktivitas partai politik di tengah masyarakat yang terlekat sikap ‘kami’ dan ‘mereka’, serta pengaruh tradisi pertukaran *Kain Timur* terhadap keberadaan dan peran partai politik.

Keberadaan Partai-partai Politik

Saat ini, kehadiran partai politik sangat marak, tak terkecuali di Kabupaten Sorong Selatan. Maraknya jumlah partai politik tidak lepas dari persyaratan bahwa pendirian partai politik baru mengharuskan adanya pengurus di tingkat lokal. Untuk dapat

mengikuti Pemilihan Legislatif, partai politik harus punya pengurus di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam jumlah tertentu.¹¹¹

Di Kabupaten Sorong Selatan tercatat ada 29 partai politik¹¹² yang mengikuti pemilu legislatif 2009, dan tidak semuanya bisa memperoleh kursi di DPRD. Dari jumlah tersebut, hanya 12 partai politik yang memperoleh suara dalam jumlah yang memenuhi persyaratan untuk dikonversikan menjadi perolehan kursi di DPRD. Tabel berikut menunjukkan distribusi perolehan suara dan kursi partai-partai politik di DPRD Kabupaten Sorong Selatan.

Tabel 5-1. Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik pada Pemilihan Legislatif 2009

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	Perolehan Kursi
1.	Partai Golkar	5.190	5
2.	Partai Demokrat	3.355	3
3.	PKS	2.235	2
4.	PAN	1.913	1
5.	PPDI	1.767	1
6.	Partai Hanura	1.613	2
7.	Partai Kedaulatan	1.426	1
8.	PDI-P	874	1
9.	PDP	535	1

111 Pada saat pilkada Kabupaten Sorong Selatan berlangsung (tahun 2010) masih berlaku Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang 'Partai Politik'; di mana pasal 3 ayat 2 (d) Undang-undang ini menyatakan bahwa kepengurusan partai politik harus ada pada 60% dari jumlah provinsi, 50% dari jumlah kabupaten/kota pada setiap provinsi yang bersangkutan, dan 25% dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota yang bersangkutan.

112 Partai-partai politik peserta Pemilihan Umum Legislatif tahun 2009 di Kabupaten Sorong Selatan ada 29 partai politik; yakni: 1) Hanura, 2) PPRN, 3) Gerindra, 4) Barnas, 5) PKS, 6) PAN, 7) PPIB, 8) Kedaulatan, 9) PKB, 10) PPI, 11) PNI Marhaenisme, 12) PDP, 13) Pakar Pangan, 14) PPDI, 15) PDK, 16) Republikan, 17) Golkar, 18) PPP, 19) PDS, 20) PNBKI, 21) PBB, 22) PDI-P, 23) PBR, 24) Patriot, 25) Demokrat, 26) PKDI, 27) PIS, 28) PSI, dan 29) Buruh (Sumber: Panwaslu Kabupaten Sorong Selatan, 2009).

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	Perolehan Kursi
10.	PDS	474	1
11.	PDK	456	1
12.	PNBKI	344	1

Sumber : KPU Kabupaten Sorong Selatan, 2009, *Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah, Perolehan Kursi dan Penetapan Calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sorong Selatan.*

Mencermati komposisi perolehan suara partai politik, tampak selain partai politik 'lama' juga terdapat sejumlah partai politik 'baru' yang punya kursi di DPRD Kabupaten Sorong Selatan.¹¹³ Salah satu di antara partai politik 'baru' yang memperoleh suara dalam jumlah yang cukup signifikan adalah Partai Hanura. Sebagai partai politik 'baru', Partai Hanura memperoleh 1.613 suara atau setara dengan dua kursi di DPRD.¹¹⁴ Sementara itu partai politik 'lama', seperti PDI-P, tidak memperoleh suara yang memadai sehingga hanya punya satu kursi di DPRD. Fenomena ini dapat dibaca bahwa, selain dimungkinkan partai politik 'baru' memang bekerja keras memenangkan pemilu, kemenangan partai politik tersebut ditengarai karena faktor ketokohan calon anggota DPRD dari partai politik bersangkutan.

Sementara itu, dari komposisi kursi yang dimiliki oleh partai politik di DPRD menunjukkan bahwa hanya Partai Golkar dan Partai Demokrat yang dapat mengusung pasangan calon kepala daerah tanpa bergabung atau berkoalisi dengan partai lainnya. Hal ini karena persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPRD tidak dapat dipenuhi oleh partai-partai politik kecuali Partai Golkar dan Partai Demokrat.¹¹⁵ Partai-

113 Partai politik 'baru' yang dimaksud adalah partai politik yang baru pertama kali ikut pemilu legislatif di tahun 2009; dan partai politik 'lama' adalah partai politik yang pernah ikut dalam Pemilihan Legislatif sebelumnya.

114 Perolehan suara Partai Hanura 1.613, di bawah perolehan suara PAN dan PPDI; berdasarkan perhitungan KPU Kabupaten Sorong Selatan, Partai Hanura memperoleh dua kursi di DPRD, sementara PAN dan PPDI memperoleh masing-masing 1 kursi.

115 Sebagaimana disyaratkan pasal 59 Undang-Undang No. 32 tahun 2004 sebagaimana diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 12 tahun 2008. Sementara

partai politik lainnya apabila berniat mengusung pasangan calon harus bergabung atau berkoalisi sehingga persyaratan minimal punya sekurang-kurangnya 15% atau sebanyak tiga kursi.

Sehubungan dengan partai politik, hal yang menarik adalah proses kemunculan atau kelahiran partai-partai politik tersebut. Sebagaimana diungkap di atas, pada era pasca-Orde Baru, kehadiran partai-partai politik sangat marak; tidak terkecuali di Kabupaten Sorong Selatan. Kehadiran partai-partai politik 'baru' tidak bisa dilepaskan dari peran/pengaruh tokoh adat (etnis).

Sistem politik bercorak demokratis membuka peluang bagi setiap warga untuk mendirikan partai politik. Peluang ini dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh adat (etnis) untuk mendirikan partai politik. Alasan yang menjadi latar belakang pendirian partai politik relatif beragam. Alasan umum yang paling sering dikemukakan adalah untuk menyalurkan dan mewujudkan kepentingan dan kebutuhan anggota kelompoknya. Dalam posisinya sebagai tokoh adat (etnis), para pendiri partai bisa relatif mudah menggalang dukungan dari anggota kelompoknya untuk keperluan pendirian partai politik.

Di balik alasan yang bersifat umum tersebut, diperoleh keterangan tentang alasan yang sifatnya lebih mendasar bagi berdirinya partai politik. Seorang informan memberi keterangan sebagai berikut:

"Pendirian partai politik lebih didasarkan pada kepentingan ekonomi daripada sebagai penyalur kepentingan dan kebutuhan para anggotanya. Dengan mendirikan partai politik, terbuka peluang untuk memperoleh posisi jabatan politik, seperti anggota DPRD; dan pada gilirannya dari jabatan politik tersebut diharapkan bisa diperoleh akses untuk memperoleh sumber-sumber ekonomi."¹¹⁶

itu DPRD Kabupaten Sorong Selatan mempunyai 20 kursi, dengan demikian partai politik yang dapat mengusung pasangan calon dalam pilkada harus memiliki sekurang-kurangnya 3 kursi ($15\% \times 20 = 3$).

116 Wawancara dengan Wim Safesa pada 9 Mei 2009 di Sorong, Wawancara dengan Ahmad Samsuddin pada 18 Juli 2010 dan Pieter Konjol pada 19 Juli 2010 (dua wawancara dilakukan di Teminabuan, Sorong Selatan) mengungkapkan hal yang senada dengan pernyataan Wim Safesa.

Dalam konteks yang berlangsung di Kabupaten Sorong Selatan, pembentukan partai politik baru menjadikan tokoh adat (etnis) sebagai pendirinya berpeluang menduduki jabatan politik. Selanjutnya, melalui jabatan politik tersebut dapat dikontrol akses sumber-sumber ekonomi yang pada gilirannya bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kehidupan ekonomi kelompoknya. Tokoh adat (etnis) yang mendirikan partai politik bersedia menjamin kehidupan ekonomi kelompok karena kewajiban yang melekat pada dirinya sebagai *patron* bagi para anggotanya. Dalam kondisi hubungan patronase tersebut, para anggota kelompok menunjukkan kesetiaan mendukung pendirian partai yang dibentuk oleh tokoh tersebut. Pembentukan partai-partai politik yang lebih didasarkan pada kepentingan ekonomi tersebut membawa konsekuensi bagi keberadaan partai politik yang bersangkutan di tengah panggung politik Sorong Selatan. Tampak sekali, terutama bagi partai-partai ‘baru’, ikatan ideologi partai tidak hadir. Demikian pula, keterikatan juga bukan karena visi dan misi dari partai politik. Keterikatan para anggota partai lebih dikarenakan keberadaan tokoh adat (etnis) sebagai pendiri dari partai tersebut. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh informan yang memberikan keterangan sebagai berikut:

“Pembentukan partai politik lebih ditentukan oleh peran para tokoh adat (etnis), bukan ditentukan oleh visi-misi partai, apalagi oleh ideologi partai. Oleh karena itu, bertumbuh dan berkembangnya partai-partai politik sangat tergantung pada kemampuan dan aktivitas yang dilakukan oleh para tokoh adat (etnis) sebagai pendirinya.”¹¹⁷

Berdasarkan pada uraian di atas, tak berlebihan bila dinyatakan basis dukungan terhadap keberadaan partai politik adalah kelompok-kelompok etnis atau marga yang ada di masyarakat.

117 Wawancara dengan Wim Saflesa pada 9 Mei 2009 di Sorong. Senada dengan pernyataan Wim Saflesa, Ahmad Samsuddin dan Pieter Konjol dalam wawancaranya menyatakan bahwa tumbuh dan berkembangnya partai-partai politik lebih ditentukan kemampuan dan aktivitas tokoh-tokoh partai (wawancara dengan Ahmad Samsuddin dilakukan pada 18 Juli 2010 dan dengan Pieter Konjol dilakukan pada 19 Juli 2010; keduanya di Teminabuan, Sorong Selatan).

Konsekuensi dari basis dukungan ini adalah relatif sulit bagi partai tertentu untuk merekrut anggota yang berasal dari luar kelompok etnis atau marga pendiri partai tersebut. Kesulitan untuk merekrut anggota partai dari kelompok etnis atau marga yang lain juga dikarenakan adanya sikap ‘kami’ dan ‘mereka’ di tengah kehidupan masyarakat.

Konsekuensi lainnya, partai politik cenderung akan menjadi lemah apabila sang tokoh sebagai pendiri pindah ke partai lain atau mengundurkan diri dari partai; hal ini karena tindakan tokoh tersebut akan diikuti oleh para anggota kelompok. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa perpindahan seorang tokoh dari satu partai ke partai yang lainnya akan diikuti oleh para pengikutnya. Para pengikut cenderung untuk mengikuti perpindahan itu dengan pertimbangan bahwa sang tokoh merupakan *patron* yang harus ditaati. Dengan tindakan mengikuti perpindahan sang tokoh, para anggota partai merasa lebih terlindungi dan terjamin pemenuhan kebutuhan hidupnya.¹¹⁸ Berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan tersebut, tidak berlebihan apabila dinyatakan bahwa loyalitas anggota terhadap partai dapat digolongkan dalam kategori rendah, loyalitas lebih ditujukan kepada tokoh partai yang juga tokoh adat (etnis).

Menyimak proses kehadiran partai politik sebagaimana diungkapkan di atas, serta masih kuat hubungan patronase dan kesetiaan kelompok, dapat dinyatakan bahwa keberadaan partai politik dan keberadaan kelompok etnis atau marga saling tumpang tindih. Secara ekstrim bahkan dapat dinyatakan ada kecenderungan bahwa partai politik merupakan bentuk lain dari kelompok etnis atau marga.

Ketumpang-tindihan antara partai politik dengan kelompok etnis atau marga memberi pengaruh terhadap pandangan atau persepsi masyarakat mengenai partai politik. Partai politik dalam

118 Wawancara dengan Wim Saffesa, salah seorang anggota DPRD Kabupaten Selatan periode 2004-2009 dari Partai Amanat Nasional, pada 9 Mei 2009 di Kota Sorong.

pandangan atau persepsi masyarakat tak lebih dari sekadar instrumen atau alat untuk memenuhi kepentingan kelompok etnis atau marga, terutama untuk pemenuhan kepentingan ekonomi.¹¹⁹ Pandangan tersebut ada di kalangan elite (tokoh) maupun massa. Kesamaan pandangan elite (tokoh) dan massa terhadap partai politik sekaligus memperkuat bukti masih kental pola hubungan *patronase* di masyarakat.

Dalam hal aktivitas yang dilakukan partai politik, dapat dinyatakan bahwa partai-partai politik ada di Sorong Selatan jarang menjalankan peran yang seharusnya dilakukan oleh sebuah partai. Aktivitas partai-partai politik baru tampak menjelang diselenggarakan pemilihan umum anggota legislatif (pemilu) ataupun pemilihan kepala daerah (Pilkada). Bahkan seorang informan secara ekstrem menyatakan bahwa keberadaan partai politik “berakhir” seiring dengan selesainya penyelenggaraan pemilihan (pemilu ataupun Pilkada); dan partai politik akan hadir kembali tatkala kontestasi pemilihan diadakan. Seorang informan yang enggan disebut jati dirinya menyatakan sebagai berikut:

“Partai-partai politik yang ada di Kabupaten Sorong Selatan keberadaannya hanya terasa pada saat pemilu dan Pilkada saja. Pada saat pemilu dan Pilkada, kantor partai kelihatan ramai dan banyak aktivitas. Tapi pada hari biasa, setelah pemilu dan Pilkada usai, partai-partai politik tidak terasa keberadaannya, kantor sepi tidak kelihatan ada aktivitas.”¹²⁰

Sebagaimana diungkap di atas, aktivitas partai politik relatif menonjol pada saat dilangsungkannya pemilihan anggota legislatif ataupun pemilihan kepala daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, pola hubungan antara partai dengan konstituennya lebih didasarkan pada pola hubungan yang ada pada kelompok etnis atau marga. Dalam melakukan aktivitas tersebut yang lebih

119 Wawancara dengan beberapa informan yang tidak bersedia disebut identitasnya. Wawancara dilakukan secara terpisah pada 19 Juli 2010 di Teminabuan, Sorong Selatan.

120 Seorang informan yang enggan disebut jati dirinya dalam wawancara yang diadakan pada 19 Juli 2010 di Teminabuan, Sorong Selatan.

menonjol bukan peran partai, tetapi yang lebih tampak peran kelompok etnis atau marga. Oleh karenanya, tidak berlebihan apabila dinyatakan bahwa untuk mobilisasi dukungan dalam kontestasi pemilu ataupun Pilkada yang berperan melakukan penggalangan adalah instrumen etnisitas, bukan instrumen partai politik.

Partai Politik di tengah Sikap ‘Kami’ dan ‘Mereka’

Politik etnisitas di Sorong Selatan menghadirkan adanya sikap ‘kami’ dan ‘mereka’ di tengah masyarakat. Sebagaimana dibahas pada bab terdahulu, sikap ‘kami’ dan ‘mereka’ hadir tak lepas dari keberadaan kelompok-kelompok etnis. Selain itu, sikap tersebut juga hadir karena berlangsungnya corak hubungan patronase dalam bingkai kesetiaan primordial yang ada di masyarakat. ‘Kami’ mengacu pada individu-individu yang berada di dalam satu kelompok tertentu, dan ‘mereka’ menunjukkan kepada individu-individu yang berada di luar kelompok. Hal ini selaras dengan pendapat Eriksen (1994: 23-42) yang menyatakan bahwa ‘kami’ menunjukkan sebagai ‘bagian’ dari kelompok atau *in-group*, dan ‘mereka’ menunjukkan ‘bukan bagian’ dari kelompok atau *out-group*.

Sebagaimana dibahas pada bab terdahulu, kesetiaan kelompok yang ada di masyarakat Sorong Selatan merupakan kesetiaan berjenjang. Apabila anggota masyarakat berhadapan dengan orang-orang dari kelompok marga lain, walaupun dari kelompok etnis yang sama, maka ke-‘kami’-an mengacu pada lingkup kesamaan marga. Namun, ketika anggota kelompok etnis asli berinteraksi dengan anggota kelompok etnis asli lainnya, maka ke-‘kami’-an mengacu pada lingkup kesamaan kelompok etnis. Demikian pula, ketika orang asli Papua berinteraksi dengan orang non-Papua, maka ke-‘kami’-an menunjukkan kesamaan sebagai orang asli Papua. Sedangkan yang disebut sebagai ‘mereka’ adalah orang di luar marga-nya apabila interaksi terjadi pada lingkup kelompok etnis; ‘mereka’ adalah orang di luar etnis-nya, apabila

interaksi terjadi pada lingkup orang Papua asli; dan 'mereka' dapat pula merujuk pada orang non-Papua apabila interaksi berlangsung antara orang asli Papua dengan non-Papua.

Sikap 'kami' dan 'mereka' yang ada di masyarakat tak jarang memunculkan persaingan yang berujung konflik antar kelompok. Demikian pula, adanya sikap tersebut menjadikan warga menempatkan martabat dan harga diri kelompok pada tingkat yang relatif tinggi. Dalam pandangan warga, kelompoknya adalah yang terbaik dibandingkan kelompok-kelompok yang lain. Penghargaan dan pembelaan terhadap kelompok dilakukan warga karena kesetiaan terhadap kelompok yang berujung pada sikap ke-'kami'-an yang mengikat mereka.

Sikap 'kami' dan 'mereka' di masyarakat memberi pengaruh terhadap keberadaan dan peran partai politik. Keberadaan partai politik yang tumpang tindih dengan kelompok etnis atau marga menjadikan anggota partai menganggap orang yang bukan anggota partai sebagai 'mereka'. Dalam pandangan anggota partai, hanya sesama anggota partai yang bisa disebut dengan 'kami'. Demikian pula dengan adanya sikap tersebut yang mendorong masyarakat menempatkan harga diri dan martabat partai ke tingkat yang relatif tinggi.

Sebagaimana diungkap pada bahasan tentang 'Keberadaan Partai-partai Politik' di atas, tumpang tindihnya keberadaan partai politik dengan kelompok etnis atau marga membawa konsekuensi bagi partai politik dalam merekrut anggota. Partai politik mengalami kesulitan untuk merekrut anggota yang berasal dari luar kelompok etnis atau marga pendiri partai tersebut. Kesulitan tersebut menjadi semakin bertambah dengan adanya sikap 'kami' dan 'mereka', dan kondisi ini menjadikan keanggotaan partai cenderung semakin eksklusif.

Sikap 'kami' dan 'mereka' yang ada di masyarakat juga berpengaruh terhadap dukungan yang berhasil didulang oleh aktor politik, dalam hal ini anggota DPRD, dalam pemilihan umum

anggota legislatif. Dalam hal jumlah suara yang didulang, bagi seorang anggota DPRD yang terpilih, tampak ada keterkaitan asal usul calon dengan suara yang diperolehnya. Pemilih tampak tidak mempertimbangkan partai politik yang mengusung calon anggota DPRD, namun pemilih lebih mendasarkan pada pertimbangan kesamaan etnis dengan calon dalam menjatuhkan pilihannya.¹²¹ Berkaitan dengan hal tersebut, seorang informan juga menyatakan bahwa para pemilih dalam menentukan pilihannya lebih mempertimbangkan kesamaan etnisitas daripada partai politik yang mengusung calon anggota DPRD; dinyatakan sebagai berikut:

“Dalam pemilihan umum 2009 yang lalu, calon yang terpilih menjadi anggota DPRD lebih mengandalkan dukungan suara dari kelompok etnis dari mana calon tersebut berasal. Agar bisa terpilih, calon tidak bisa hanya mengandalkan dukungan suara dari konstituen partai. Hal ini karena masyarakat lebih patuh kepada tokoh adat daripada tunduk kepada instruksi partai politik. Dalam pemilihan umum, partai politik tak lebih hanya sebagai perahu untuk bisa mengikuti pencalonan dalam kontestasi pemilihan umum.”¹²²

Pernyataan informan di atas selaras dengan hasil hitungan peroleh suara para calon yang lebih banyak didukung oleh anggota kelompok etnisnya. Tabel berikut menunjukkan adanya korelasi antara etnis asal calon terpilih dengan penyumbang suara terbanyak baginya.

121 Data dari KPU Kabupaten Sorong Selatan (diolah) menunjukkan bahwa anggota DPRD terpilih pada pemilu 2009 meraup suara terutama di wilayah di mana kelompok etnis yang bersangkutan berdomisili.

122 Wawancara dengan Suroso pada 21 Oktober 2009 di Yogyakarta. Hal senada dengan pernyataan Suroso diungkapkan oleh Hengky Gogoba, Josef Basna dan Pieter Konjol pada 3 dan 23 November, dan 7 Desember 2009 di Yogyakarta yang diwawancarai secara terpisah.

Tabel 5–2. Asal Etnis Anggota DPRD 2009- 2014 dan Distrik Penyumbang Suara Terbanyak

Partai Politik	Calon Terpilih	Asal Etnis Calon Terpilih	Jumlah Suara	Distrik Penyumbang Suara
Golkar	Dominggus Meres	Tehit	804	Teminabuan (801)
Golkar	Thonce Sagisolo, S.H.	Tehit	503	Sawiat (349)
Golkar	Thomas Saupar	Imekko	742	Kais (451)
Golkar	Merry Wugaje	Imekko	381	Kokoda (308)
Golkar	Yosias Homer	Maybrat	304	Moswaren (304)
Demokrat	Rico Sia	Non-Papua	580	Teminabuan (252)
Demokrat	Salomina Salamuk, S.E.	Tehit	556	Teminabuan (311)
Demokrat	Heinje Kena	Imekko	394	Inanwatan (329)
Hanura	Jhoni Boltal	Tehit	318	Teminabuan (206)
Hanura	Arens Howay	Maybrat	298	Wayer (271)
PKS	Ahmad Samsuddin, S.E.	Non-Papua	503	Teminabuan (502)
PKS	M. Gandhi Siradjuddin, S.T.	Non-Papua	676	Kokoda (641)
PAN	Pieters J.M. Konjol, S.E.	Tehit	755	Teminabuan (532)
Kedaulatan	Yonathan Salambauw	Tehit	803	Kokoda (731)
PDP	Jevries N. Kewetari, S.P.	Imekko	287	Inanwatan (220)
PPDI	Bartholomeus Dorowe	Imekko	557	Kokoda (534)
PDK	Mathias Sagrim	Meybrat	361	Teminabuan (323)
PDS	Beti Monsafe	Imekko	106	Kais (102)
PDI-P	Lukman Kasop	Imekko	415	Kokoda (400)
PNBKI	Fransina Tiba	Imekko	245	Inanwatan (232)

Sumber : KPUD Sorong Selatan, 2009, *Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah, Perolehan Kursi dan Penetapan Calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sorong Selatan*, diolah.

Tabel di atas menunjukkan bahwa anggota DPRD terpilih memperoleh suara dukungan terutama dari wilayah di mana kelompok etnisnya berdomisili. Anggota terpilih berasal dari kelompok etnis Tehit, memperoleh dukungan suara paling banyak dari distrik di Teminabuan atau Sawiat di mana kelompok etnis Tehit merupakan penduduk mayoritas. Para anggota terpilih dari kelompok etnis Imekko, mereka mendulang dukungan suara paling banyak di distrik Inanwatan, Kais, dan Kokoda di mana kelompok etnis Imekko mendominasi. Demikian pula halnya, anggota terpilih dari kelompok etnis Maybrat, mereka

memperoleh suara dukungan terbanyak di distrik Moswaren dan Wayer di mana banyak domisilinya kelompok etnis Maybrat.

Hal yang menarik dari tabel di atas adalah anggota terpilih yang berasal dari etnis non-Papua, suara dukungan yang diperoleh tampaknya tidak ada kaitan dengan etnisitas. Namun, bila dicermati lebih mendetail, anggota terpilih dari etnis non-Papua, tepatnya dari kelompok etnis Buton, Bugis, Makassar, memperoleh suara dukungan terbanyak di distrik Teminabuan karena selain yang bersangkutan bermukim, juga karena di distrik tersebut mayoritas kelompok etnis tersebut melakukan aktivitasnya di bidang ekonomi (perdagangan di sektor riil) di Distrik Teminabuan.

Tabel 5-2 di atas juga menunjukkan adanya pengecualian, seorang anggota terpilih dari kelompok etnis tertentu memperoleh dukungan paling banyak di distrik di mana kelompok etnis tadi bukan mayoritas; seperti halnya anggota terpilih, Yonathan Salambauw, yang berasal dari kelompok etnis Tehit memperoleh suara terbanyak di distrik Kokoda yang penduduknya mayoritas orang Imekko. Demikian halnya dengan anggota terpilih non-Papua yang memperoleh dukungan terbanyak di distrik di mana kelompok etnis asal anggota tersebut bukan merupakan penghuni mayoritas; seperti halnya anggota terpilih, M. Gandhi Siradjuddin, yang berasal dari kelompok etnis Bugis, Buton, Makassar yang memperoleh suara relatif banyak di distrik Kokoda di mana kelompok etnis Bugis, Buton, Makassar bukan merupakan penduduk mayoritas. Pengecualian ini, menurut informasi yang diperoleh, karena kuatnya strategi anggota terpilih tersebut menggalang dukungan, bukan strategi partai politik yang mencalonkannya.

Ringkasnya, berdasarkan analisis di atas, dapat dinyatakan bahwa sikap 'kami' dan 'mereka' semakin menjadikan partai politik tidak bisa melepaskan diri dari bayang-bayang kelompok etnis atau marga. Keberadaan dan peran yang dilakukan partai politik

dapat dinyatakan relatif sama sebangun dengan keberadaan dan peran dari kelompok etnis atau marga. Loyalitas anggota terhadap partai politik pada hakekatnya merupakan loyalitas anggota terhadap tokoh partai yang sekaligus juga tokoh dari kelompok etnis atau marga dari mana yang bersangkutan berasal.

Partai Politik dalam Irama Tradisi Pertukaran *Kain Timur*

Sampai saat ini, esensi tradisi pertukaran *Kain Timur* masih dijadikan rujukan masyarakat Sorong Selatan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana diungkap pada bab terdahulu, esensi tradisi tersebut mengisyaratkan bahwa pihak yang menerima pemberian berkewajiban melakukan pengembalian balasan yang disertai tambahan sebagai bunganya. Mekanisme hubungan timbal balik dalam tradisi ini mengandung unsur utang-piutang antara pihak pemberi dengan pihak penerima. Pihak pemberi memaknai pemberiannya sebagai tabungan atau investasi, dan pihak penerima memaknai pemberian itu sebagai utang yang wajib dikembalikan (dilunasi). Mekanisme hubungan pertukaran ini berlangsung terus menerus tanpa terputus, dan pada akhirnya dapat dinyatakan menjerat atau mengunci kedua belah pihak, pemberi dan penerima, untuk melepaskan diri dari hubungan pertukaran tersebut.

Partai-partai politik yang ada di Kabupaten Sorong Selatan tak bisa menghindarkan diri dari tradisi pertukaran *Kain Timur* yang esensinya masih dijadikan rujukan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, keberadaan yang diawali dari kelahiran partai sampai dengan aktivitas peran yang dilakukan partai tak bisa lepas dari pengaruh esensi tradisi tersebut.

Sebagaimana diungkap pada uraian terdahulu (khususnya pada bahasan tentang 'Perjalanan Karier Otto Ihalauw di Pentas Politik'), proses kelahiran sejumlah partai difasilitasi oleh Otto Ihalauw dalam kapasitasnya sebagai Bupati yang sedang menjabat sekaligus sebagai ketua Partai Golkar. Kala

itu, menjelang pemilihan umum anggota legislatif 2009, Otto Ihalauw melakukan tindakan yang simpatik terkait dengan kelahiran partai-partai politik. Sebagaimana diketahui bahwa menjelang pemilihan umum legislatif 2009, hadirnya sejumlah partai politik baru memerlukan persyaratan adanya cabang partai politik di tingkat lokal. Dalam posisinya sebagai Bupati yang memiliki kewenangan, Otto Ihalauw menyikapi kemunculan partai-partai baru dengan melakukan tindakan simpatik, yakni tidak menghambat kelahiran partai-partai politik baru. Bahkan, Otto Ihalauw dapat dinyatakan memfasilitasi yang mendorong bagi kehadiran partai-partai baru tersebut.¹²³ Apabila ditilik dari posisi Otto Ihalauw sebagai ketua Partai Golkar, maka tindakan memfasilitasi yang mendorong kehadiran partai-partai baru bisa dikatakan mengundang pesaing bagi Partai Golkar yang dipimpinnya dalam pemilihan umum anggota legislatif.

Partai-partai politik baru memaknai fasilitas yang diberikan Otto Ihalauw sebagai bentuk pemberian yang harus dikembalikan. Sesuai dengan tradisi pertukaran *Kain Timur*, partai-partai politik tersebut melakukan pengembalian balasan dalam bentuk memberi dukungan terhadap pemerintahan Otto Ihalauw periode pertama dan dukungan dalam Pilkada 2010. Pengembalian yang dilakukan partai-partai politik tersebut sudah diperhitungkan oleh Otto Ihalauw karena dia memaknai memfasilitasi berdirinya partai-partai politik sebagai bentuk tabungan atau investasi politik dalam rangka memperoleh dukungan pada Pilkada 2010.

Esensi tradisi pertukaran *Kain Timur* tampak pula mewarnai relasi atau hubungan antar anggota, terutama antara pimpinan dengan anggota, dalam suatu partai politik. Sebagaimana diungkap di atas, pendirian partai politik lebih didasarkan pada pertimbangan kepentingan ekonomi. Oleh karena itu, tidak

123 Wawancara dengan Ansar Sija (etnis Makassar, seorang guru agama, dan Ketua GP Ansor Sorong Selatan) pada 17 Juli 2010, di Teminabuan, Sorong Selatan. Tindakan memfasilitasi berdirinya partai-partai politik baru, secara tersirat juga diakui oleh Otto Ihalauw dalam wawancara dengannya yang dilakukan pada 21 Juli 2010 di Teminabuan, Sorong Selatan.

mengherankan apabila hubungan antar anggota juga lebih didasarkan pada pertimbangan kepentingan ekonomi. Sepanjang pimpinan partai yang sekaligus juga tokoh adat (etnis) mampu memenuhi kebutuhan ekonomi para anggotanya, hubungan di antara mereka relatif harmonis; namun bila pimpinan partai kurang bisa memenuhi kebutuhan ekonomi para anggotanya, hubungan berubah menjadi kurang atau bahkan tidak baik. Hal ini menunjukkan bahwa pola hubungan yang ada di tingkat internal diwarnai corak hubungan antara pihak pemberi dengan pihak penerima.

Para anggota memaknai pemenuhan kebutuhan ekonomi sebagai bentuk pemberian dari pimpinan, dan mereka melakukan pengembalian balasan dengan menunjukkan loyalitasnya. Berkurang atau tidak adanya pemenuhan kebutuhan ekonomi, dimaknai para anggota sebagai berkurangnya pemberian; dan hal ini dibalas dengan pengembalian berupa penurunan loyalitas. Sementara itu, dari sisi pimpinan partai yang sekaligus juga tokoh adat (etnis), pemenuhan kebutuhan ekonomi bagi para anggotanya dimaknai sebagai bentuk tabungan atau investasi. Semakin terpenuhi kebutuhan ekonomi para anggota, berarti semakin besar tabungan atau investasi yang dilakukan; dan pada gilirannya kondisi ini akan mendatangkan semakin besar dukungan atau loyalitas dari para anggota.

Selain berpengaruh pada saat kelahiran partai politik, esensi tradisi pertukaran *Kain Timur* juga berpengaruh pada saat pembentukan koalisi partai pengusung pencalonan Otto Ihalauw dalam Pilkada 2010. Sebagaimana diungkap pada bahasan sebelumnya, Otto Ihalauw yang berpasangan dengan Samsuddin Anggiluli diusung oleh koalisi Golkar, PKS, dan Partai Hanura.

Untuk dapat berkoalisi dengan PKS, Partai Golkar melakukannya dengan cara memilih Samsuddin Anggiluli yang beragama Islam untuk mendampingi Otto Ihalauw sebagai calon wakil bupati dalam Pilkada 2010. Pilihan terhadap Samsuddin

Anggiluli dapat dimaknai sebagai pemberian kepada PKS, di mana secara psikologis PKS terangkat posisinya di pentas politik karena calon yang berpasangan dengan Otto Ihalauw beragama Islam. Walaupun Samsuddin Anggiluli bukan kader PKS, dipilihnya ia untuk mendampingi Otto Ihalauw sebagai calon wakil bupati tetap bisa dimaknai sebagai bentuk pemberian dengan argumen agama yang dipeluknya.

Dengan mengusung Samsuddin Anggiluli sebagai calon wakil bupati berpasangan dengan Otto Ihalauw, Partai Golkar berpengharapan akan lebih mudah memperoleh dukungan warga yang beragama Islam. Samsuddin Anggiluli yang beretnis asli Papua dan beragama Islam memang merupakan daya tarik tersendiri untuk bisa menggaet dukungan dari kalangan warga beretnis asli sekaligus juga mereka yang berlatar belakang muslim.

Sementara itu, pertimbangan Partai Golkar berkoalisi dengan Partai Hanura tidak begitu banyak informasi yang diperoleh. Sebuah informasi menyatakan bahwa Partai Hanura bersedia menjalin koalisi karena memprediksikan Otto Ihalauw sebagai kandidat petahana akan menjadi pemenang dalam kontestasi Pilkada. Dengan kemenangan ini, secara psikologis Partai Hanura terangkat posisinya karena menjadi bagian dari koalisi partai pengusung pemenang Pilkada 2010. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa ajakan koalisi dapat dimaknai sebagai pemberian (yang berupa kesempatan) dari Partai Golkar kepada Partai Hanura. Partai Hanura, sebagai pihak penerima melakukan pengembalian balasan dalam bentuk mobilisasi para konstituennya mendukung kandidat yang diusung Partai Golkar.

Terbentuknya koalisi partai pengusung sebagaimana diungkap di atas tak lepas dari pengaruh tradisi pertukaran *Kain Timur*. Partai Golkar bersedia membangun koalisi dengan partai-partai politik lain sebagai bentuk tabungan atau investasi yang diharapkan dapat menghadirkan dukungan dalam Pilkada. Bagi partai-partai politik yang tergabung dalam koalisi, ajakan membentuk koalisi

dimaknai sebagai pemberian yang wajib ditindaklanjuti dengan pengembalian balasan berupa dukungan kepada pasangan Otto Ihalauw-Samsuddin Anggiluli.

Selain itu, secara umum dapat dinyatakan bahwa hubungan atau relasi partai-partai politik dengan Otto Ihalauw dapat dinyatakan tidak ada rintangan yang berarti. Partai-partai politik dalam membangun relasi dengan Otto Ihalauw dalam kedudukannya sebagai Bupati juga diwarnai corak hubungan yang didasarkan pada esensi tradisi pertukaran *Kain Timur*. Hubungan yang harmonis antara partai-partai politik dengan Otto Ihalauw sepanjang masa jabatannya periode pertama memberi keuntungan bagi kedua belah pihak. Bermula dari niat membangun hubungan harmonis dengan partai-partai politik, Otto Ihalauw berbekal pengetahuan yang dimiliki (pengetahuan merupakan sumber keahlian) menyadari bahwa dalam sistem politik demokratis yang tengah berlangsung perlu dibuka ruang yang sama bagi setiap warga untuk berpartisipasi melalui partai politik. Oleh karenanya, Otto Ihalauw membangun relasi dengan partai-partai politik untuk diajak bersama-sama menumbuh-kembangkan partisipasi politik warga. Atas ajakan tersebut, partai-partai politik memberi respons positif untuk bersama-sama mengembangkan partisipasi politik warga.

Dari relasi tersebut bisa dianalisis bahwa partai-partai politik memaknai ajakan Otto Ihalauw untuk secara bersama-sama menumbuh-kembangkan partisipasi politik warga sebagai bentuk pemberian. Pemberian ini berupa adanya peluang atau kesempatan yang kondusif bagi partai-partai politik untuk mengkonsolidasikan dan mengembangkan organisasi partai. Sesuai dengan esensi tradisi pertukaran *Kain Timur*, partai-partai politik melakukan pengembalian balasan dalam bentuk tidak mengganggu jalannya pemerintahan yang dipimpin Otto Ihalauw periode 2005-2010. Hampir tidak ada gangguan yang berarti dari partai-partai politik terhadap kepemimpinan Otto Ihalauw.

Pilkada 2010: Kemenangan Otto Ihalauw

Pilkada 2010 merupakan Pilkada yang ke dua kali diselenggarakan di Kabupaten Sorong Selatan. Pilkada yang pertama diselenggarakan pada 2005. Pada Pilkada 2005, Otto Ihalauw yang berpasangan dengan Herman Tom Dedaida memenangkan kontestasi pemilihan dengan memperoleh 12.929 suara atau 45,18% dari jumlah suara sah. Pasangan Otto Ihalauw-Herman Tom Dedaida mengalahkan empat pasangan calon lainnya.¹²⁴ Lima pasangan calon yang berkontestasi pada Pilkada 2005 berlatar belakang sebagai birokrat, dan mereka berasal dari etnis asli Papua kecuali Otto Ihalauw yang berasal dari Ambon (Maluku). Kemenangan pasangan Otto Ihalauw-Herman Tom Dedaida dengan perolehan suara 45,18% cukup mengejutkan, prediksi dari beberapa kalangan pada waktu itu menyatakan walaupun pasangan ini menang, kemenangannya tidak sebesar suara yang diperolehnya.¹²⁵ Kemenangan dengan suara relatif besar dari pasangan ini diperkirakan karena posisi Otto Ihalauw pada waktu itu sebagai pejabat (*caretaker*) bupati. Namun, ada pula yang menganalisis kemenangan pasangan tersebut karena suara yang mendukung pasangan-pasangan calon lainnya terpecah.¹²⁶

Pada Pilkada 2010, sebagaimana Pilkada sebelumnya, juga diikuti oleh lima pasangan calon dan semua pasangan calon berlatar belakang etnis Papua, kecuali Otto Ihalauw yang berposisi sebagai bupati yang sedang menjabat dan berasal dari etnis non-

124 KPU Kabupaten Sorong Selatan, *Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 2005*. Pilkada Sorong Selatan pada 2005 diikuti oleh lima pasangan calon; pasangan-pasangan calon tersebut adalah (a) Rudy Way-Ahmad Agia, (b) Otto Ihalauw-Herman Tom Dedadida, (c) Bernard Sagrim-Amos Massei, (d) Hendrikus Momot-Aminadap Asmuruf, dan (e) Thobias Salossa-H. Mustafa Wugaje. Dalam Pilkada tersebut, pasangan Otto Ihalauw-Herman Tom Dedaida memperoleh 28.617 suara dari jumlah total 32.621 suara atau 45,18%.

125 Wawancara dengan Joseph Bless, Sekretaris KPU Kabupaten Sorong Selatan 2005, pada 22 Juli 2010 di Teminabuan, Sorong Selatan.

126 Dalam penelitiannya, Edward M. Kocu (2007) menyatakan bahwa rivalitas antaretnis relatif tajam, dan hal ini menjadikan suara untuk pasangan-pasangan calon berlatar belakang etnis asli menjadi terpecah. Kemenangan pasangan Otto Ihalauw-Herman Tom Dedaida antara lain dikarenakan suara untuk pasangan-pasangan calon lain (berlatar belakang etnis asli) mengalami perpecahan.

Papua. Tabel 5-3 berikut ini menunjukkan pasangan-pasangan calon pada Pilkada 2010.

Tabel 5-3. Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Peserta Pilkada Sorong Selatan, 2010

No. Urut	Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati	Partai Politik Pengusung	Etnis/Agama	Pekerjaan Terakhir
1	Cabup: Dr. Dance Yulian Flassy Cawabup: Hj. Mustafa Wugaje, S.Ag.	P. Demokrat	Tehit/Nasrani Inanwatan (Imekko)/Islam	Sekretaris Bappeda Prov. Papua Barat Kasi Madrasah Kanwil Kementerian Agama Prov. Papua Barat
2	Cabup: Drs. Otto Ihalauw Cawabup: Samsuddin Anggiluli, S.E.	P. Golkar, PKS, P. Hanura	Ambon (Maluku)/Nasrani Kokoda (Imekko)/Islam	Bupati Kab. Sorong Selatan 2005-2010 Kabid Aset pada Bag. Keuangan dan Aset Daerah Sorong Selatan
3	Cabup: Dr. (C) Origenes Ijie, S.E., M.M. Cawabup: Adrianus Dahar, S.E.	PDK, PDS, PPDI, PNBK, PDI-P	Ayamuru (Maybrat)/Nasrani Kokoda (Imekko)/Nasrani	Kabid Aset pd Bag. Keuangan dan Aset Daerah Prov. Papua Barat Peg. pada PT. Ferry Persero Cab. Teminabuan
4	Cabup: Ir. Herman Tom Dedaida, M.Si. Cawabup: Frans Howay, S.Sos.	Koalisi Parpol Non Kursi di DPRD	Inanwatan (Imekko)/Nasrani Tehit/Nasrani	Wakil Bupati Kab. Sorong Selatan 2005- 2010 Plt. Sekt. Daerah Kab. Sorong Selatan 2009

5	Cabup: Yunus Saflombolo, S.E., M.T.P. Cawabup: Djoni Harry Bowaire	PDP, P. Kedaulatan, PAN	Tehit/Nasrani Kokoda (Imekko)/ Nasrani	Kabid Sosial Budaya Bappeda Kab. Biak Numfor Swasta (PT. Henrison Irian Arar Sorong)
---	---------------------------------------------------------------------------	-------------------------	-----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: KPU Kabupaten Sorong Selatan, 2010.

Pasangan-pasangan calon pada Pilkada 2010 berlatar belakang sebagai birokrat karier. Bupati dan Wakil Bupati periode 2005-2010 mencalonkan diri tidak lagi dalam satu paket pasangan. Otto Ihalauw, sebagai kandidat petahana, memilih pasangan baru yaitu Samsuddin Anggiluli sebagai calon wakil bupati; dan Herman Tom Dedaida yang masih berposisi sebagai wakil bupati, mencalonkan diri sebagai calon bupati berpasangan dengan Frans Howay, seorang birokrat senior, sebagai calon wakil bupati.

Dalam Pilkada 2010, hanya Partai Golkar dan Partai Demokrat yang dapat mengusung pasangan calon tanpa berkoalisi dengan partai lainnya karena kedua partai tersebut masing-masing memiliki lima dan tiga kursi di DPRD Kabupaten Sorong Selatan. Hal ini terkait dengan persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPRD¹²⁷ tidak dapat dipenuhi oleh partai-partai politik kecuali Partai Golkar dan Partai Demokrat.

Namun, dalam mengusung pasangan calon, Partai Golkar yang memiliki lima kursi tetap membangun koalisi dengan Partai Hanura dan PKS. Sementara Partai Demokrat, karena sudah memenuhi persyaratan tiga kursi, tidak membangun koalisi dalam mengusung pasangan calon; dan partai-partai politik lainnya harus bergabung atau berkoalisi satu dengan lainnya dalam mengusung pasangan calon. Hal menarik dalam Pilkada 2010 adalah adanya

¹²⁷ Sebagaimana disyaratkan pasal 59 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 12 tahun 2008. Sementara itu, DPRD Kabupaten Sorong Selatan punya 20 kursi, dengan demikian partai politik yang dapat mengusung pasangan calon dalam pilkada harus memiliki sekurang-kurangnya tiga kursi ($15\% \times 20 = 3$).

pasangan calon yang diusung oleh partai-partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD; pasangan calon ini diajukan atas dasar persyaratan 15% dari akumulasi perolehan suara sah dari partai-partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD. Pasangan Herman Tom Dedaida-Frans Howay merupakan pasangan calon yang diusung oleh partai-partai yang tidak memiliki kursi di DPRD.

Jumlah pemilih terdaftar pada Pilkada 2010 sebanyak 33.067 pemilih. Mereka memberikan suara pada 123 TPS yang tersebar di 13 distrik yang ada di lingkungan Kabupaten Sorong Selatan. Pasangan Otto Ihalauw-Samsuddin Anggiluli menjadi pemenang dalam Pilkada ini dengan perolehan suara sebesar 60,35 % dari jumlah suara sah. Dibandingkan dengan Pilkada 2005, suara yang diperoleh Otto Ihalauw mengalami kenaikan dari 45,18% menjadi 60,35%. Perolehan suara yang cukup signifikan ini tentu tidak dapat dilepaskan dari kemampuan Otto Ihalauw tersebut memanfaatkan sumber daya untuk mobilisasi dukungan.

Ringkasnya, kemenangan Otto Ihalauw dalam Pilkada 2010 dengan perolehan suara 60,35% tak lepas dari kemampuannya memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk melakukan mobilisasi dukungan. Ragam dan asal usul sumber daya yang dimiliki Otto Ihalauw tak lepas dari latar belakang keluarga dan kesuksesannya dalam meniti karier di jajaran birokrasi maupun di pentas politik. Demikian pula halnya dengan pemahaman Otto Ihalauw terhadap masyarakat menjadikan pemanfaatan sumber daya berlangsung optimal dalam rangka memobilisasi dukungan. Bahkan tak berlebihan untuk dinyatakan bahwa pemahamannya tentang masyarakat merupakan sumber daya tersendiri sehingga bisa menghantarkan Otto Ihalauw yang beretnis non-Papua memenangkan Pilkada dan menjadi Bupati Sorong Selatan.

VI

Tradisi Pertukaran *Kain Timur* dan Mobilisasi Dukungan

BAB INI membahas tentang tradisi pertukaran *Kain Timur* sebagai instrumen untuk memobilisasi dukungan guna meraih kekuasaan. Bahasan tradisi pertukaran *Kain Timur* dalam kaitannya dengan mobilisasi dukungan dipilah menjadi dua berdasarkan arena aktivitas di mana mobilisasi tersebut berlangsung. Pertama, mobilisasi dukungan dalam aktivitas pemerintahan dan kemasyarakatan; dan kedua, mobilisasi dukungan dalam aktivitas elektoral.

Politik *Kain Timur*: Mobilisasi dalam Aktivitas Pemerintahan dan Kemasyarakatan

Uraian berikut membahas mobilisasi dukungan dalam aktivitas pemerintahan dan kemasyarakatan. Bahasan dipilah menjadi analisis mengenai mobilisasi dukungan di ranah birokrasi, ranah politik, dan ranah kemasyarakatan. Mobilisasi dukungan di ranah birokrasi dilakukan karena penyelenggaraan Pilkada tidak bisa lepas dari birokrasi sebagai salah satu struktur penyelenggara pemerintahan. Demikian pula mobilisasi dukungan di ranah politik juga harus dilakukan karena Pilkada merupakan proses rekrutmen politik untuk meraih kekuasaan. Sementara itu, mobilisasi di ranah kemasyarakatan dilakukan karena terkait dengan upaya pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, di mana hal tersebut pada gilirannya bisa memengaruhi upaya memenangkan kontestasi Pilkada. Mobilisasi dukungan pada tiga ranah tersebut

dilakukan Otto Ihalauw sebagai kandidat petahana secara simultan. Hal ini karena aktivitas di ranah-ranah tersebut terkait satu dengan yang lain dan hadir secara bersamaan dalam rangka penyelenggaraan Pilkada.

1. Mobilisasi Dukungan di Ranah Birokrasi

Dalam posisinya sebagai kandidat petahana, Otto Ihalauw memiliki sumber daya normatif berupa kewenangan untuk mengatur dan memimpin birokrasi pemerintahan. Atas dasar kewenangan tersebut, Otto Ihalauw memanfaatkan jaringan birokrasi untuk menggalang dukungan massa. Langkah pertama yang ditempuh adalah menggalang dukungan di kalangan birokrasi itu sendiri, dan kemudian pada gilirannya jaringan birokrasi dimanfaatkan untuk memobilisasi dukungan massa.

Berbekal sumber daya kewenangan sebagai Bupati, mobilisasi pada jaringan birokrasi dilakukan Otto Ihalauw melalui pertimbangan keterwakilan etnisitas. Sehubungan dengan hal ini, Martinus Salamuk selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah menyatakan bahwa:

“Keterwakilan etnisitas dijadikan pertimbangan mengisi jabatan struktural oleh Otto Ihalauw selaku Bupati. Hal ini karena beliau perlu dukungan dari kelompok-kelompok etnis yang ada di masyarakat. Meskipun demikian, Otto Ihalauw bukannya mengabaikan sama sekali pertimbangan kemampuan pejabat.¹²⁸

Penjelasannya, dengan diterapkan prinsip keterwakilan etnis berarti setiap kelompok etnis yang ada memperoleh jatah menduduki posisi jabatan struktural birokrasi. Bagi kelompok-kelompok etnis, penempatan anggotanya dalam jabatan struktural dimaknai sebagai pemberian Otto Ihalauw kepada kelompok yang wajib dikembalikan. Adapun proses pengembaliannya dilakukan melalui anggota kelompok yang menduduki posisi jabatan

128 Wawancara dengan Martinus Salamuk, Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Sorong Selatan pada 16 Juli 2010 di Teminabuan, Sorong Selatan.

struktural. Pengembalian diwujudkan dalam bentuk mobilisasi dukungan yang dilakukan pejabat tersebut terhadap kelompok etnis di mana yang bersangkutan berasal.

Pertimbangan keterwakilan etnisitas dalam pengisian jabatan struktural birokrasi tidak bisa dipisahkan dari pertimbangan kesetiaan primordial. Relatif kental kesetiaan primordial menjadikan kelompok-kelompok etnis sensitif terhadap pengisian jabatan struktural birokrasi. Ketidakpuasan terhadap pengisian jabatan birokrasi memunculkan tuntutan yang dapat mengganggu stabilitas jalannya roda pemerintahan. Bukti di lapangan menunjukkan hal itu ketika berlangsung pelantikan pejabat eselon III dan IV pada bulan Mei 2009 lalu. Otto Ihalauw dalam posisinya sebagai Bupati sudah berupaya menempatkan para pejabat tersebut dengan mengedepankan pertimbangan keterwakilan etnisitas; namun kelompok-kelompok yang tidak puas dengan pengangkatan tersebut melakukan upaya unjuk rasa yang bertujuan menggagalkan upacara pelantikan. Kelompok etnis yang tidak puas dengan pengangkatan pejabat mengerahkan massa dan menuntut Bupati mengangkat orang dari etnisnya pada posisi jabatan tertentu.¹²⁹ Hal ini menunjukkan bahwa setiap kelompok etnis berkeinginan dan punya kepentingan agar ada anggotanya yang menduduki posisi dalam jabatan birokrasi sebagai wakil dari kelompoknya. Meratanya keterwakilan etnis dalam jabatan struktural pada gilirannya mempermudah mobilisasi dukungan kelompok-kelompok etnis yang ada.

Pengisian jabatan struktural birokrasi selain mempertimbangkan keterwakilan etnisitas juga mempertimbangkan persepsi masyarakat perihal jabatan birokrasi. Masyarakat menilai bahwa jabatan birokrasi merupakan status sosial yang cukup tinggi dan mampu menunjukkan eksistensi suatu kelompok etnis. Sehubungan dengan hal itu menarik disimak pernyataan informan sebagai berikut:

129 Upaya unjuk rasa menuntut pembatalan pelantikan pejabat eselon III dan IV berlangsung pada 6 Mei 2009, dan penulis menyaksikan secara langsung.

“Keberadaan suatu kelompok etnis akan naik kalau mampu menempatkan orangnya dalam posisi jabatan birokrasi pemerintahan. Penempatan pejabat itu dipandang mewakili kelompok etnisnya, dan diharapkan bisa menyalurkan atau memperjuangkan kepentingan kelompoknya.”¹³⁰

Berdasarkan hal di atas, dapat dinyatakan bahwa seorang birokrat yang menduduki jabatan struktural dipandang mampu mengangkat derajat sosial etnis di mana yang bersangkutan berasal sekaligus memudahkan kelompok etnis tersebut dalam menyalurkan aspirasi kepentingannya. Penempatan seseorang pada jabatan struktural berpengaruh terhadap dukungan yang diberikan kelompok etnis. Dengan terwakilinya setiap kelompok etnis pada jabatan struktural, semua kelompok etnis diharapkan memberikan dukungan kepada Otto Ihalauw.

Konsekuensi pertimbangan keterwakilan etnisitas dalam pengisian jabatan struktural birokrasi adalah munculnya hubungan saling menguntungkan antara birokrat yang menduduki posisi jabatan struktural dengan para anggota kelompok etnis di mana pejabat tersebut berasal. Sang birokrat akan didukung sekuat tenaga agar tetap dalam posisi jabatannya, namun pada saat yang sama harus memperhatikan aspirasi kepentingan kelompok etnisnya dan memenuhi kebutuhan materi ekonomi yang terkadang dituntut oleh para anggota kelompoknya. Dalam kondisi ini, posisi jabatan birokrasi menjadi sumber ekonomi dan harga diri kelompok etnis.

Upaya pengisian jabatan struktural atas dasar pertimbangan keterwakilan etnis yang diterapkan Otto Ihalauw tampak pada sebaran pejabat eselon II pada jajaran Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan. Data pada Badan Kepegawaian Daerah menunjukkan bahwa pada saat ini jumlah pejabat eselon II sebanyak 27 orang; yang terdiri dari satu orang pejabat eselon IIa yakni Sekretaris Daerah, dan 26 orang lainnya merupakan

130 Wawancara dengan Michael Momot pada 19 Juli 2010, dan dengan Yunus Duwit pada 21 Juli 2010 di Teminabuan, Sorong Selatan.

pejabat eselon IIb yang menduduki posisi jabatan seperti Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas ataupun Kepala Badan. Setiap kelompok etnis, baik asli Papua maupun pendatang, punya anggota yang menduduki posisi jabatan struktural. Tabel berikut menunjukkan sebaran pejabat eselon II berdasarkan asal etnis.

Tabel 6-1. Latar Belakang Etnisitas Pejabat Eselon II

No.	Kelompok etnis	Jumlah
1.	Tehit	10
2.	Imekko	3
3.	Maybrat	8
4.	Non-Papua	6
Jumlah		27

Sumber: BKD Kabupaten Sorong Selatan, 2010, diolah.

Hal menarik dari tabel di atas adalah sebaran asal etnis dari pejabat eselon II yang tidak merata/imbang. Imekko sebagai salah satu kelompok etnis besar hanya memperoleh jatah 3 orang pada posisi jabatan eselon II. Keadaan ini tidak menimbulkan gejolak dari orang Imekko karena mereka menyadari keterbatasan jumlah sumber daya birokrat yang berasal dari Imekko yang memenuhi persyaratan kepangkatan. Dikarenakan pejabat struktural eselon II yang berasal dari kelompok etnis Imekko lebih sedikit dibanding pejabat dari kelompok-kelompok etnis lainnya, Otto Ihalauw menempatkan orang Imekko dalam jumlah cukup banyak pada jajaran eselon di bawahnya, yakni eselon III.¹³¹

Pertimbangan keterwakilan etnisitas dalam pengisian jabatan struktural birokrasi yang ditempuh Otto Ihalauw sebagaimana dipaparkan di atas dapat dinyatakan relatif berhasil. Keberhasilan tersebut tidak hanya dalam hal penggalangan dukungan, namun juga berhasil dalam menciptakan stabilitas jalannya roda pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Dengan

131 Wawancara dengan Suroso, Sekretaris Bappeda Kabupaten Sorong Selatan, pada 24 Juli 2010 di Teminabuan, Sorong Selatan.

menempatkan pejabat sebagai wakil dari setiap kelompok etnis dapat dinyatakan sebagai cara yang efektif untuk meredam gejolak persaingan etnisitas.

Upaya pengisian jabatan didasarkan pertimbangan keterwakilan etnisitas juga diterapkan pada pengisian jabatan kepala distrik. Otto Ihalauw menerapkan pertimbangan keterwakilan etnisitas dalam pengisian jabatan kepala distrik karena jabatan ini dinilai strategis untuk menggalang dukungan. Bahkan posisi jabatan kepala distrik lebih strategis dibandingkan jabatan struktural karena posisi kepala distrik lebih dekat dan sering berhubungan secara langsung dengan masyarakat. Kebanyakan asal etnis dari pejabat yang menduduki posisi kepala distrik ialah sama. Sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 6-2. Latar Belakang Etnisitas Kepala Distrik

No	Distrik	Nama Pejabat	Asal Klpk Etnis
1.	- Teminabuan	Mesakh F. Kokurule, S.Pd.	Non-Papua
2.	- Wayer	Yohana K. Saul	Non-Papua
3.	- Moswaren	Drs. Yulianus Bosawer, M.Si.	Maybrat
4.	- Seremuk	Karel Sremere, S.Sos.	- Tehit
5.	- Inanwatan	George Japsenam	- Non-Papua
6.	- Sawiyat	Albert Snahan, S.Sos.	- Tehit
7.	- Kokoda	Hengki Gogoba, S.Sos.	- Imekko
8.	- Kais	Yakonias Tigore, S.E.	- Imekko
9.	- Kokoda Utara	Yunus Kokurule, S.H.	- Non-Papua
10.	- Matemani	Marten Nebore, S.IP.	- Imekko
11.	- Konda	Izak Meres, SH	- Tehit
12.	- Fokour	Moses Blessia, A.Md.Kes	- Tehit
13.	- Saifi	Simon Sesa	- Tehit

Sumber: BKD Kabupaten Sorong Selatan, 2010, diolah.

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar posisi jabatan kepala distrik diisi oleh pejabat berlatar belakang etnis sama dengan mayoritas penduduk yang berdomisili di distrik bersangkutan. Kalaupun posisi jabatan kepala distrik tidak

diisi oleh pejabat beretnis sama dengan mayoritas penduduk, atau bahkan diisi oleh pejabat beretnis non-Papua, pejabat yang menduduki posisi jabatan kepala distrik merupakan birokrat yang telah lama dikenal oleh penduduk distrik yang bersangkutan. Oleh karenanya, pejabat yang ditempatkan sebagai kepala distrik relatif mudah menggalang massa. Kepala-kepala distrik ini bersedia menggalang massa karena mereka menganggap jabatan yang diemban merupakan pemberian dari Otto Ihalauw. Pada gilirannya, mereka melakukan pengembalian balasan dalam bentuk mobilisasi dukungan. Penggalangan massa mudah dilakukan karena kepala distrik beretnis sama dengan mayoritas penduduk atau telah dikenal cukup baik di distriknya.

Upaya pengisian jabatan dengan pertimbangan keterwakilan etnisitas juga terjadi pada penempatan aparat dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Penerapan cara ini punya pengaruh dalam proses pengambilan kebijakan. Cara pengisian jabatan dengan pertimbangan keterwakilan etnisitas berpengaruh terhadap kebijakan yang diambil Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam kasus penentuan prioritas program dan kegiatan pembangunan. Penentuan prioritas program dan kegiatan lebih banyak ditentukan oleh kepentingan birokrat anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah berbasis orientasi etnisitas.¹³²

Sebagaimana halnya pejabat yang menempati posisi jabatan struktural atau jabatan kepala distrik, birokrat yang tergabung dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah juga menganggap bahwa keterlibatan mereka dalam tim sebagai suatu bentuk pemberian dari Otto Ihalauw. Mereka berkewajiban melakukan pengembalian balasan kepada Otto Ihalauw yang diwujudkan dalam bentuk penggalangan massa. Sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah, mereka memperjuangkan kepentingan kelompoknya masing-

132 Studi yang dilakukan Suroso (2009) tentang 'Proses Politik Dalam Penganggaran di Kabupaten Sorong Selatan' menyatakan bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah dibentuk dengan mempertimbangkan keterwakilan etnis yang ada; dan faktor etnisitas ternyata relatif kuat dalam memengaruhi pengambilan kebijakan.

masing; dan dengan perjuangan itu mereka bisa menggalang anggota kelompok etnis untuk memberi dukungan kepada Otto Ihalauw. Jadi, peran mereka yang tergabung dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah sebagai perantara dalam upaya berlangsungnya mobilisasi dukungan.

Pengisian jabatan struktural dengan pertimbangan keterwakilan etnisitas juga nampak pada proses pengisian jabatan sekretaris kampung. Temuan lapangan menunjukkan, dalam hal pengangkatan sekretaris kampung, mereka yang diangkat pada umumnya berasal dari etnis mayoritas di kampung bersangkutan. Dengan pengangkatan ini berarti bahwa kelompok mayoritas yang ada di kampung tersebut terwakili dengan menduduki posisi jabatan sekretaris kampung. Pada gilirannya, proses pengangkatan sekretaris kampung dengan mempertimbangkan keterwakilan etnisitas membuah hasil hadirnya aliran dukungan yang relatif deras kepada Otto Ihalauw. Etnis mayoritas yang ada di kampung tersebut merasa diakui keberadaannya, dan pengakuan itu dipandang sebagai bentuk pemberian yang wajib ditindaklanjuti dengan pengembalian balasan. Mereka yang diangkat sebagai sekretaris kampung berkewajiban untuk bertindak sebagai koordinator dalam rangka memobilisasi orang-orang kampung mendukung Otto Ihalauw dalam kontestasi Pilkada.

Terkait dengan pengangkatan sekretaris kampung sebagai pegawai negeri sipil, Otto Ihalauw juga mengangkat sekretaris kampung dalam wilayah Kabupaten Maybrat. Hal ini dikarenakan pada saat proses pengangkatan berlangsung, wilayah Maybrat masih dalam proses menjadi kabupaten baru/kabupaten pemekaran. Otto Ihalauw selaku Bupati Sorong Selatan tetap melakukan proses pengangkatan sekretaris kampung yang masuk dalam Kabupaten Maybrat sebagai kabupaten pemekaran. Keputusan Otto Ihalauw untuk tetap memproses pengangkatan sekretaris kampung yang ada di Kabupaten Maybrat, walaupun sudah bukan lagi menjadi tugas kewajibannya, merupakan upaya untuk menarik simpati warga Maybrat yang masih berdomisili

dan menjadi warga Sorong Selatan.¹³³ Proses pengangkatan sekretaris kampung di wilayah Maybrat dipandang oleh komunitas Maybrat yang berdomisili di Sorong Selatan sebagai bentuk pemberian; mereka punya kewajiban untuk mengembalikan pemberian tersebut dalam bentuk memberikan dukungan pada saat dilangsungkan Pilkada.

Sebagai upaya mobilisasi dukungan di ranah birokrasi dapat pula ditelusuri pada saat penyeleksian dan penerimaan pegawai negeri sipil. Proses rekrutmen untuk menjadi pegawai negeri sipil juga menempatkan isu etnisitas sebagai pertimbangan utama seorang calon diterima atau tidak menjadi pegawai negeri sipil, informasinya sebagai berikut:

“Dalam proses rekrutmen, penerimaan PNS mempertimbangkan keterwakilan etnis yang ada pada instansi yang akan ditempati, apabila ada kelompok etnis belum terwakili dan kelompok etnis itu berpengaruh, maka calon dari kelompok etnis itu diutamakan untuk diterima. Kalau dari kelompok etnis itu tidak ada yang mendaftar, maka kompetensi penerimaan pegawai negeri sipil dilakukan.¹³⁴

Pertimbangan etnisitas dalam penerimaan pegawai negeri sipil di lingkungan Kabupaten Sorong tersebut direspons oleh kelompok-kelompok etnis yang ada dalam bentuk kesediaan mendukung Otto Ihalauw. Kelompok etnis (atau dalam wujud kelompok yang lebih kecil, seperti *kereth*) menyatakan siap memberi dukungan kepada Otto Ihalauw dalam kontestasi Pilkada apabila anggota kelompoknya menjadi pegawai negeri sipil diterima.¹³⁵

133 Wawancara dengan Martinus Salamuk, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sorong Selatan, pada 16 Juli 2010 di Teminabuan, Sorong Selatan.

134 Wawancara dengan Suroso, Sekretaris Bappeda Kabupaten Sorong Selatan, pada 24 Juli 2010. Di Teminabuan, Sorong Selatan.

135 Temuan lapangan menunjukkan banyak pernyataan kesanggupan dari kelompok etnis (atau *kereth*) memberi dukungan kepada Otto Ihalauw dalam kontestasi pilkada apabila anggota kelompoknya diterima sebagai pegawai negeri sipil. Salah satu bukti adalah pernyataan dukungan dari kelompok masyarakat yang berdiam di empat kampung di Distrik Fokour, kelompok ini menyatakan dukungan terhadap Otto Ihalauw dengan disertai permohonan kepada Otto Ihalauw selaku Bupati untuk menerima ‘anak-anak

Selain menjadikan etnisitas sebagai salah satu pertimbangan penerimaan pegawai negeri sipil, menarik diperhatikan langkah-langkah Otto Ihalauw dalam proses rekrutmen tersebut. Setiap tahun, sebagaimana halnya dengan pemerintah daerah lainnya, Kabupaten Sorong Selatan membuka penerimaan pegawai negeri sipil. Proses penerimaan pegawai negeri sipil yang diselenggarakan pada 2008 belum diumumkan hasilnya sampai menjelang Pilkada diselenggarakan.¹³⁶ Tertunda atau ditundanya pengumuman hasil penerimaan pegawai negeri sipil ditengarai sebagai upaya untuk menyandera para pendaftar (termasuk pula menyandera kelompok etnis di mana yang bersangkutan berasal) sehingga mempertimbangkan pilihannya dalam Pilkada. Dalam diri pendaftar terbangun pandangan kalau tidak mendukung Otto Ihalauw sulit bagi mereka untuk diterima menjadi pegawai negeri sipil. Pandangan ini tidak hanya terbangun dikalangan pendaftar, tetapi juga pada keluarga ataupun kelompok darimana para pendaftar berasal. Oleh karena itu, sebelum pengumuman penerimaan dikeluarkan, mereka menunjukkan sikap dan perilaku mendukung Otto Ihalauw.

Terkait dengan upaya mobilisasi dukungan di ranah birokrasi, Otto Ihalauw dalam mengangkat seseorang untuk menduduki posisi jabatan struktural juga mempertimbangkan ketokohan pejabat yang bersangkutan di masyarakat.¹³⁷ Pertimbangan ini dilakukan karena selaras dengan pola hubungan patronase yang masih terasa berlangsung di Sorong Selatan. Ketokohan pejabat di masyarakat menjadikan yang bersangkutan berposisi

kami' dari empat kampung tersebut sebagai pegawai negeri sipil.

136 Wawancara dengan Martinus Salamuk, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sorong Selatan, pada 16 Juli 2010 di Teminabuan, Sorong Selatan.

137 Para pejabat yang mendukung Otto Ihalauw merupakan tokoh (dalam kelompok etnisnya) yang dapat menarik simpati massa; dan mereka ditempatkan dalam posisi jabatan strategis, seperti halnya posisi Ketua Bappeda, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, dan Kepala-kepala Distrik. Mutasi atau rotasi jabatan eselon II dan III pada jajaran birokrasi Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dilaksanakan sekitar 1 tahun sebelum Pilkada 2010, tepatnya pada Mei 2009, sehingga ada rentang waktu untuk penggalangan massa.

sebagai *patron* di tengah komunitas kelompoknya. Kondisi ini mempermudah bagi sang pejabat untuk memobilisasi kelompok etnisnya untuk mendukung Otto Ihalauw.

Dalam rangka mobilisasi dukungan di ranah birokrasi, Otto Ihalauw juga melakukan terobosan mengirim sejumlah aparat birokrasi untuk menempuh studi lanjut. Berbasis argumen untuk meningkatkan kualitas aparat, dalam posisinya sebagai Bupati, Otto Ihalauw punya kewenangan untuk mengirim beberapa orang staf pada jajaran birokrasi untuk mengikuti studi lanjut pada jenjang Strata-2 di Universitas Gadjah Mada.¹³⁸ Mereka yang dikirim untuk menempuh studi lanjut bukan semata-mata didasarkan pertimbangan kebutuhan teknis administratif, namun lebih pada pertimbangan latar belakang etnisitas dari aparat yang dikirim studi lanjut. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa pengiriman sejumlah aparat birokrasi menempuh studi lanjut dibingkai dengan isu etnisitas.

Pertimbangan etnisitas menjadikan kebijakan pengiriman sejumlah birokrat menempuh studi lanjut ini relatif mudah memperoleh dukungan dari para tetua adat yang merupakan tokoh etnis. Hal ini terlihat pada kehadiran para tetua adat saat pelepasan mereka yang akan menempuh studi lanjut. Kebijakan ini dapat diinterpretasikan sebagai investasi politik Otto Ihalauw; dengan memberi kesempatan para aparat birokrasi yang berasal dari etnis asli Papua diharapkan dapat memberi dampak positif. Para aparat birokrasi dapat diikat untuk mendukung dirinya dalam kontestasi Pilkada 2010 karena telah menerima pemberian berupa kesempatan menempuh studi lanjut. Pada gilirannya, kelompok-kelompok etnis asal para birokrat tersebut juga akan memberi dukungan kepada Otto Ihalauw karena kelompoknya memperoleh kesempatan mengirimkan anggotanya menempuh studi lanjut.

138 Sebanyak 17 orang, termasuk Otto Ihalauw, menempuh pendidikan jenjang Strata-2 Program Studi Ilmu Politik dengan Konsentrasi Politik Lokal dan Otonomi Daerah Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, mulai semester I periode 2006/2007.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa mobilisasi dukungan yang dilakukan Otto Ihalauw selaras dengan mekanisme pertukaran yang ada pada tradisi *Kain Timur*. Mekanisme pengangkatan atau penempatan pejabat struktural, Tim Anggaran, Kepala Distrik dan Sekretaris Kampung dapat dimaknai sebagai bentuk pemberian Otto Ihalauw kepada para pejabat yang diangkat atau ditempatkan pada posisi-posisi jabatan tersebut. Demikian pula halnya dengan mekanisme penerimaan pegawai negeri sipil juga dapat dimaknai sebagai bentuk pemberian Otto Ihalauw kepada kelompok etnis di mana calon pegawai yang diterima berasal. Mereka yang memperoleh pemberian dari Otto Ihalauw memaknainya sebagai utang yang wajib dikembalikan; sementara itu, Otto Ihalauw memaknai pemberian itu sebagai bentuk tabungan atau investasi yang hasilnya akan diperoleh melalui pengembalian balasan. Mereka yang menerima pemberian berkewajiban melakukan pengembalian balasan dalam bentuk dukungan kepada Otto Ihalauw. Pengembalian balasan berupa dukungan dapat dimaknai sebagai pembayaran utang dari mereka yang pernah memperoleh pemberian dari Otto Ihalauw. Sementara itu, pengembalian balasan berupa dukungan dapat dimaknai oleh Otto Ihalauw sebagai hasil dari tabungan atau investasi yang dilakukan.

Mekanisme hubungan antara Otto Ihalauw sebagai pihak pemberi dengan pihak penerima berlangsung terus menerus tanpa terputus. Pengembalian balasan berupa dukungan yang diterima Otto Ihalauw wajib ditindaklanjuti dengan pemberian berikutnya kepada mereka yang melakukan pengembalian balasan. Mekanisme hubungan ini berlangsung terus-menerus.

Mekanisme hubungan pertukaran itu bisa berlangsung karena antara Otto Ihalauw dan mereka yang terlibat dalam hubungan tersebut bisa saling menerima keberadaan masing-masing. Selain itu, berlangsungnya hubungan pertukaran itu juga dikarenakan Otto Ihalauw mampu mendayagunakan sumber daya yang dimiliki. Sumber daya normatif berupa kewenangan sebagai Bupati dan

ditopang sumber daya personal dan keahlian dimanfaatkan oleh Otto Ihalauw dalam mekanisme yang menghasilkan mobilisasi dukungan bagi dirinya.

2. Mobilisasi Dukungan di Ranah Politik

Berstatus sebagai kandidat petahana dan ketua Partai Golkar, Otto Ihalauw tidak menemui kesulitan yang berarti dalam memobilisasi dukungan di ranah politik. Posisi sebagai kandidat petahana dan ketua partai menunjukkan bahwa Otto Ihalauw memiliki sumber daya normatif berupa kewenangan yang melekat pada jabatan yang disandanginya. Berbekal sumber daya yang melekat pada statusnya tersebut, Otto Ihalauw tidak menemui kesulitan untuk menentukan partai politik yang mencalonkannya sebagai kandidat bupati dalam Pilkada 2010. Hal ini karena Partai Golkar yang dipimpinnya punya lima kursi di DPRD yang berarti telah memenuhi persyaratan sebagai partai politik pengusung.¹³⁹ Dikarenakan jumlah kursi Partai Golkar telah memenuhi persyaratan, dalam mengajukan kandidat dalam Pilkada 2010 tidak perlu membangun koalisi dengan partai politik lain; namun dalam pencalonan Otto Ihalauw, Partai Golkar melakukan koalisi dengan menggandeng PKS dan Partai Hanura. Dasar pertimbangan pencalonan Otto Ihalauw dilakukan melalui koalisi adalah untuk memperbesar jumlah dukungan. Hal ini berarti bahwa dengan bergabungnya PKS dan Partai Hanura dalam koalisi berpotensi untuk melancarkan berlangsungnya mobilisasi dukungan.

Dengan bangunan koalisi di atas, Otto Ihalauw memperoleh keuntungan berupa dukungan yang relatif besar karena PKS dan Partai Hanura masing-masing punya dua kursi di DPRD. Artinya, dua partai politik ini punya massa pendukung yang signifikan

¹³⁹ Partai Golkar, lima kursi (25% dari keseluruhan kursi) dapat mengajukan pasangan calon dalam pilkada tanpa harus berkoalisi dengan partai politik lain karena telah memenuhi persyaratan minimal, yakni 15% dari jumlah semua kursi.

dibanding massa pendukung partai-partai politik lainnya.¹⁴⁰ Sementara itu, keuntungan yang diperoleh PKS dan Partai Hanura berupa simpati dari para pendukung Otto Ihalauw. Sebagaimana diketahui dalam posisinya sebagai kandidat petahana, Otto Ihalauw punya banyak pendukung karena keberhasilannya dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan pada periode pertama (2000-2005). PKS dan Partai Hanura yang tergabung dalam koalisi mengharapkan simpati dan dukungan dari pendukung Otto Ihalauw pada Pemilihan Legislatif yang akan datang (2014). Harapan PKS dan Partai Hanura didasarkan pada pandangan bahwa dua partai politik ini berada dalam kubu yang sama dengan Otto Ihalauw.

Dalam rangka mobilisasi dukungan, Otto Ihalauw juga menjalin hubungan harmonis dengan DPRD. Dalam posisinya sebagai ketua Partai Golkar yang punya lima kursi di DPRD, Otto Ihalauw tidak menemui hambatan berarti dalam menjalin hubungan dengan pihak DPRD.¹⁴¹ Jalinan hubungan menjadi semakin harmonis karena posisi ketua DPRD ada di tangan Partai Golkar. Hubungan yang harmonis itu menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi berlangsungnya pemerintahan yang stabil. Sehubungan dengan hal itu, Otto Ihalauw sebagai kandidat petahana membutuhkan kehadiran pemerintahan yang stabil tanpa gangguan dari DPRD sebagai mitra kerja. Dengan pemerintahan yang stabil, Otto Ihalauw dapat lebih berkonsentrasi menghadapi Pilkada yang diikutinya. Otto Ihalauw dinilai berhasil memimpin pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan; dan hal ini dapat meningkatkan elektabilitasnya yang pada gilirannya dapat meningkatkan dukungan pada dirinya dalam kontestasi Pilkada.

140 Selain Partai Demokrat, partai-partai politik di luar koalisi Partai Golkar, PKS dan Partai Hanura masing-masing mempunyai satu kursi. Partai Demokrat punya tiga kursi dan mencalonkan pasangan Dance Flassy-Mustafa Wugadje, dalam Pilkada 2010.

141 Wawancara dengan Suroso, Sekretaris Bappeda Kabupaten Sorong Selatan, pada 24 Juli 2010. Di Teminabuan, Sorong Selatan.

Selain upaya yang dipaparkan di atas, dalam rangka mobilisasi dukungan di ranah politik Otto Ihalauw juga menempuh cara tidak menghambat pencalonan sejumlah orang sebagai calon dalam Pileg 2009. Seorang informan memberikan keterangan bahwa dalam pencalonan anggota DPRD, beberapa orang didukung oleh Otto Ihalauw untuk mencalonkan diri. Walaupun orang-orang tersebut mencalonkan diri bukan dari Partai Golkar, tetapi pencalonannya tetap didukung. Dukungan yang diberikan berupa tindakan Otto Ihalauw selaku pejabat yang berwenang sekaligus ketua partai yang tidak menghambat proses pencalonan. Bagi Otto Ihalauw tindakan ini merupakan investasi politik; apabila orang-orang yang didukung terpilih menjadi anggota DPRD, mereka bisa dimanfaatkan untuk menggalang dukungan baginya Pilkada.¹⁴²

Dari informasi di atas dapat dinyatakan bahwa upaya mendorong pencalonan beberapa orang menjadi anggota DPRD didasarkan pada pertimbangan hubungan saling menguntungkan. Tindakan Otto Ihalauw didasarkan pada perhitungan bahwa mereka yang disokong dalam pemilihan anggota legislatif, apabila terpilih menjadi anggota DPRD pada gilirannya akan memberikan dukungan kepada Otto Ihalauw dalam Pilkada 2010 sebagai bentuk balas budi. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka yang terpilih menjadi anggota DPRD tersebut punya konstituen yang lebih loyal.¹⁴³ Konstituen tersebut akan mudah digiring untuk mendukung Otto Ihalauw dalam kontestasi Pilkada, apabila para calon tersebut terpilih menjadi anggota DPRD.

142 Wawancara dengan Ansar Sija (berasal dari etnis Makassar, aktivis PKS, dan Ketua GP Ansor Sorong Selatan) pada 17 Juli 2010, di Teminabuan, Sorong Selatan.

143 Para pemilih yang merupakan konstituen ternyata lebih loyal kepada anggota DPRD sebagai individu yang ditokohkan dari pada loyal kepada partai politik di mana anggota DPRD tersebut bernaung. Hal ini menunjukkan bahwa pilihan seseorang dalam pemilihan anggota legislatif lebih didasarkan pada pertimbangan ketokohan calon dari pada partai politik yang menjadi kendaraannya. Wawancara dengan Yunus Duwit dan Suroso pada 15 Juli 2010 di Teminabuan, Sorong Selatan.

Bahasan mobilisasi dukungan di ranah politik mengisyaratkan bahwa Otto Ihalauw memanfaatkan sumber daya normatif, personal dan keahlian yang dimilikinya secara simultan. Upaya membangun koalisi partai-partai politik, membangun relasi harmonis dengan DPRD maupun mendorong pencalonan sejumlah orang dalam Pemilihan Legislatif merupakan upaya membangun hubungan saling menguntungkan; dan upaya ini dilakukan tidak lepas dari pengaruh tradisi pertukaran *Kain Timur*. Uluran tangan membangun koalisi dengan partai-partai politik lain, menjalin hubungan harmonis dengan DPRD dan mendukung pencalonan sebagai anggota legislatif dimaknai sebagai bentuk tabungan atau investasi Otto Ihalauw. Partai-partai politik yang diajak berkoalisi, DPRD, dan orang-orang yang didukung dalam pencalonannya sebagai anggota legislatif memaknai tindakan Otto Ihalauw sebagai bentuk pemberian yang wajib ditindaklanjuti dengan pengembalian balasan berupa dukungan dalam Pilkada 2010. Pengembalian balasan itu disusul dengan pemberian berikutnya dari Otto Ihalauw demi terjaminnya kelangsungan dukungan kepada dirinya.

Mekanisme hubungan pertukaran tersebut berlangsung tanpa rintangan berarti karena pihak yang terlibat bisa menerima keberadaannya masing-masing. Keberadaan Otto Ihalauw sebagai pihak pemberi bisa diterima oleh partai-partai politik yang berkoalisi, DPRD maupun orang-orang yang didorong dalam pencalonannya sebagai anggota legislatif. Demikian pula sebaliknya, Otto Ihalauw bisa pula menerima keberadaan mereka.

3. Mobilisasi Dukungan di Ranah Kemasyarakatan

Berbekal sumber daya normatif yang memberi kewenangan pada dirinya, dan ditopang sumber daya keahlian dan personal yang dimilikinya, Otto Ihalauw sebagai kandidat petahana menggalang dukungan melalui kebijakan yang dibuatnya. Tujuan utama dari kebijakan-kebijakan yang dirumuskannya adalah untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di

Kabupaten Sorong Selatan yang dipimpinnya; namun di samping itu kebijakan-kebijakan tersebut dimanfaatkan pula sebagai cara untuk memobilisasi dukungan masyarakat. Kebijakan-kebijakan pembangunan yang dirumuskan dibungkus dengan isu pemerataan; dan hal ini dapat dimaknai bahwa melalui kebijakan-kebijakannya, Otto Ihalauw bertindak secara proporsional sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat. Kebijakan yang proporsional tersebut direspons positif oleh setiap kelompok masyarakat karena dinilai relatif adil dan tidak merugikan kelompok tertentu.

Kebijakan yang relatif menonjol dan memperoleh tanggapan positif dari masyarakat adalah kebijakan pembangunan rumah sakit di Teminabuan.¹⁴⁴ Sebelumnya, rumah sakit yang ada dalam kondisi kurang memadai untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Selain hanya menyediakan sejumlah kecil kamar rawat inap, rumah sakit yang ada belum dilengkapi dengan peralatan yang memadai. Dalam kondisi rumah sakit seperti ini, pelayanan kesehatan harus dirujuk ke kota Sorong atau Manokwari yang berjarak relatif jauh dan memberi beban yang berat bagi masyarakat Sorong Selatan.

Kebijakan pembangunan rumah sakit ditindak-lanjuti dengan kebijakan pengadaan (pengisian) dokter spesialis yang belum ada di Sorong Selatan. Pada awalnya banyak kalangan yang pesimistis terhadap rencana pembangunan rumah sakit tersebut; kepedulian masyarakat bawah terhadap pembangunan rumah sakit juga relatif rendah, bahkan terkesan bersikap masa bodoh. Kebijakan pembangunan rumah sakit tersebut didasarkan pertimbangan pemerataan pembangunan. Adapun artinya, Otto Ihalauw sebagai Bupati dalam berbagai kesempatan selalu mensosialisasikan bahwa kebijakan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesehatan

144 Otto Ihalauw berinisiatif membangun rumah sakit tingkat kabupaten karena di kawasan selatan dari wilayah 'kepala burung' Papua belum terdapat rumah sakit yang memadai, baik dari sisi besarnya dan peralatan serta tenaga medis. Melalui kebijakan ini diharapkan masyarakat Sorong Selatan dan sekitarnya tidak lagi perlu ke kota Sorong atau Manokwari untuk keperluan kesehatan.

masyarakat tanpa memandang latar belakang dari mana yang bersangkutan berasal. Dalam mensosialisasikan kebijakannya tersebut, Otto Ihalauw selalu menyatakan bahwa rumah sakit yang dibangun tidak diperuntukkan bagi kelompok etnis tertentu, dan pembangunan rumah sakit tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kesehatan agar masyarakat tidak perlu berobat ke luar Sorong Selatan.

Kebijakan pembangunan rumah sakit tersebut direspons positif karena masyarakat tidak mengkhawatirkan adanya perlakuan diskriminatif dalam pelayanan kesehatan. Masyarakat merespons bahwa kebijakan tersebut diberlakukan secara adil dan merata bagi setiap warga tanpa memandang latar belakang kelompoknya. Kelompok etnis yang satu merasa tidak diperlakukan berbeda dengan kelompok etnis lainnya. Sehubungan dengan hal ini patut disimak pernyataan seorang informan yang mengungkapkan bahwa pembangunan rumah sakit Teminabuan untuk semua anggota masyarakat tanpa memandang dari kelompok mana berasal. Pelayanan yang tidak memandang latar belakang pasien, menjadikan tak ada kelompok yang merasa diperlakukan tidak adil. Semua kelompok diperlakukan sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan.¹⁴⁵

Dalam pandangan kelompok-kelompok etnis, kebijakan pembangunan rumah sakit sebagai bentuk pemberian dari Otto Ihalauw; dan kelompok-kelompok merespons dalam bentuk memberi dukungan kepada Otto Ihalauw sebagai pengembalian balasan. Artinya, Otto Ihalauw melalui kebijakan pembangunan rumah sakit mampu menghadirkan dukungan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingannya dalam kontestasi Pilkada yang diikutinya.

Selain kebijakan pembangunan rumah sakit, Otto Ihalauw juga melakukan gebrakan dengan kebijakan di bidang ekonomi,

145 Wawancara dengan Kenan Thesia, etnis Tehit, pada 20 Juli 2010 di Teminabuan, Sorong Selatan.

khususnya kebijakan yang terkait dengan pembangunan pasar yang direncanakan sebagai pengganti Pasar Ampera.¹⁴⁶ Pasar Ampera merupakan pasar lama yang berlokasi di pinggir pantai dan dalam kondisi kurang memadai untuk menampung kegiatan ekonomi yang terus berkembang. Sementara itu, pasar sentral yang rencana dibangun di Wersar berada di lokasi yang relatif luas dan diharapkan dapat menampung pedagang dalam jumlah lebih banyak.

Tak dipungkiri bahwa pembangunan pasar memunculkan persoalan dalam proses pemindahan para pedagang dari Pasar Ampera ke pasar baru. Sejumlah pedagang enggan pindah ke pasar baru karena ketakutan kehilangan pembeli yang menjadi langganannya. Untuk sementara pasar baru yang sudah selesai pembangunannya mengalami kekosongan, ditambah lagi persoalan tanah untuk pasar tersebut disengketakan oleh beberapa kelompok etnis yang saling mengklaim kepemilikannya.¹⁴⁷

Untuk mendorong pemindahan Pasar Ampera (pasar lama) ke pasar baru di Wersar, Otto Ihalauw mengeluarkan kebijakan memberi prioritas para pedagang yang ada di pasar lama dan orang-orang yang bermukim di sekitar pasar baru untuk didahulukan memperoleh tempat berjualan di lokasi tersebut. Kebijakan Otto Ihalauw tersebut jelas berdampak positif bagi pencitraannya sebagai pemimpin (bupati) yang tanggap dan bertanggungjawab untuk menata kota dan pencitraannya sebagai pemimpin yang memperhatikan kepentingan masyarakat bawah yang berprofesi sebagai pedagang. Hal yang lebih penting, dia juga dicitrakan tidak meninggalkan orang-orang asli Papua dengan

146 Wawancara dengan Suroso, Sekretaris Bappeda Kabupaten Sorong Selatan, di Teminabuan, Sorong Selatan pada 15 Juli 2010. Rencananya, pasar dibangun di kampung Wersar.

147 Pada saat penelitian lapangan dilakukan, persoalan pemindahan pedagang dan lahan untuk pasar belum terselesaikan. Dikarenakan persoalan tersebut, pasar dalam keadaan kosong selama beberapa bulan walaupun pembangunan fisiknya telah selesai. Pada saat ini, pasar sudah diisi oleh beberapa pedagang yang menghidupkan aktivitas perdagangan. Meskipun demikian, kegiatan perdagangan di Pasar Ampera (pasar lama) masih tetap berlangsung.

mengalokasikan tempat berjualan di pasar baru kepada mereka. Hal ini karena di pasar lama aktivitas perdagangan didominasi oleh orang yang berasal dari kelompok etnis pendatang.

Selain itu, dengan kewenangan sebagai Bupati yang merupakan sumber daya normatif, Otto Ihalauw menerapkan kebijakan pembangunan infrastruktur yang diharapkan dapat memobilisasi dukungan dalam Pilkada 2010. Kebijakan tersebut adalah kebijakan pembangunan infrastruktur jalan yang ditujukan untuk memperlancar transportasi guna menunjang aktivitas masyarakat, terutama di bidang ekonomi. Pembangunan infrastruktur dilakukan dengan membangun jalan yang menghubungkan Teminabuan-Tofot-Haha- Wolon; dan jalan yang menghubungkan Tofot-Sodrofoyo-Wensnahan-Klamit. Seorang informan menanggapi pembangunan infrastruktur jalan tersebut sebagai berikut:

“Pembangunan jalan yang menghubungkan satu distrik ke distrik mendapat tanggapan positif dari warga karena transportasi menjadi semakin lancar dan waktu tempuh menjadi semakin pendek. Diharapkan dengan pembangunan jalan, perekonomian akan menjadi lebih baik yang artinya hidup masyarakat menjadi lebih baik pula”.¹⁴⁸

Respons positif atas pembangunan infrastruktur jalan sebagaimana diungkap informan di atas menunjukkan bahwa masyarakat mendukung kebijakan pembangunan yang dilakukan Otto Ihalauw. Dukungan mengalir karena kebijakan pemerintahan Otto Ihalauw dinilai memenuhi kebutuhan masyarakat. Dukungan masyarakat ini dengan mudah digeser oleh Otto Ihalauw untuk kepentingannya dalam kontestasi Pilkada 2010 yang diikutinya.

148 Wawancara dengan Yunus Duwit pada 15 Juli 2010 di Teminabuan, Sorong Selatan. Hal menarik untuk dicatat sehubungan dengan pembangunan jalan tersebut. Pada saat menjelang akhir masa jabatan Otto Ihalauw sebagai Bupati pada periode pertama, proyek pembangunan jalan tersebut dinilai bermasalah sehingga dijadikan isu negatif untuk menyerangnya dalam kampanye Pilkada 2010. Meskipun demikian, di kalangan masyarakat lapisan bawah, pembangunan jalan tersebut direspons positif.

Selain pembangunan infrastruktur jalan, Otto Ihalauw membuat kebijakan yang mengupayakan adanya penerangan listrik selama 24 jam di Teminabuan sebagai ibukota kabupaten. Pada tahun terakhir periode pertama masa pemerintahannya, Otto Ihalauw berhasil mengupayakan aliran listrik sepanjang siang-malam, di mana sebelumnya aliran listrik di Teminabuan hanya berlangsung pada malam hari saja. Meskipun hanya di Teminabuan, upaya penerangan listrik sepanjang siang dan malam tersebut berhasil mengangkat citra Otto Ihalauw dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan. Terkait dengan hal ini, seorang warga menyatakan sebagai berikut:

“Dalam menjalankan pemerintahan, Otto Ihalauw dapat dinyatakan berhasil. Dengan aliran listrik di siang hari, masyarakat bisa lebih mudah mengakses informasi dan hiburan melalui siaran radio dan televisi. Demikian pula, aliran listrik sepanjang siang-malam juga berdampak terhadap aktivitas ekonomi warga, terutama bagi para nelayan yang membutuhkan balok es untuk menyimpan hasil tangkapannya.”¹⁴⁹

Adanya penerangan listrik sepanjang siang dan malam di Teminabuan tersebut menjadikan Otto Ihalauw dinilai berhasil dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan. Penilaian ini oleh Otto Ihalauw dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menghadirkan dukungan masyarakat kepada dirinya dalam dalam kontestasi Pilkada 2010.

Hal yang menarik sepanjang masa pemerintahannya periode 2005-2010, Otto Ihalauw bekerja sama dengan pihak kampus, dalam hal ini menerima kedatangan mahasiswa KKN UGM selama kurang lebih selama dua bulan.¹⁵⁰ Kerja sama dengan pihak kampus bisa berlangsung karena sumber daya personal yang dimiliki Otto Ihalauw. Sumber daya personal berupa kemampuan

149 Wawancara dengan Suroso, Sekretaris Bappeda Kabupaten Sorong Selatan, pada 15 Juli 2010 di Teminabuan, Sorong Selatan.

150 Mahasiswa KKN UGM Yogyakarta terdiri dari 22 orang dengan latar belakang fakultas yang beragam. Mereka menjalani masa KKN selama dua bulan, Juli-Agustus 2009, dan tinggal di Teminabuan walaupun ada aktivitas yang dilakukan di Moswaren.

pribadi Otto Ihalauw menjalin relasi dengan UGM merupakan pintu masuk kehadiran mahasiswa KKN di Sorong Selatan.

Kehadiran mahasiswa KKN di Sorong Selatan menggarap berbagai bidang, mulai dari mengajari pembuatan pupuk kompos, pemasangan tenaga listrik mikro hidro, sampai dengan di bidang pendidikan etika bagi anak-anak sekolah dasar. Kebijakan Otto Ihalauw membuka pintu bagi kehadiran mahasiswa KKN juga dibingkai dengan isu pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. Kepada masyarakat disosialisasikan bahwa kehadiran mahasiswa KKN akan melakukan pembangunan bersama-sama dengan warga masyarakat. Mahasiswa KKN memberi penyuluhan terkait dengan bidang yang selama ini belum disentuh atau dikerjakan oleh pihak Pemerintah Daerah. Sebagai ilustrasi, pembuatan pupuk kompos dan pemasangan tenaga listrik mikro hidro merupakan hal baru bagi masyarakat. Pengetahuan dan ketrampilan membuat pupuk kompos dan mengoperasikan tenaga listrik mikro hidro diperoleh dari mahasiswa KKN, bukan dari pihak Pemerintah Daerah. Keberadaan mahasiswa KKN selama dua bulan direspons positif oleh masyarakat; dan memberi pencitraan terhadap Otto Ihalauw sebagai figur pemimpin (bupati) yang memperhatikan kebutuhan masyarakat dengan upaya yang dinilai jarang atau bahkan tidak dilakukan pemimpin lainnya. Dalam pandangan masyarakat, kebijakan mendatangkan mahasiswa KKN untuk membangun bersama rakyat sebagai gambaran bahwa Otto Ihalauw adalah figur pemimpin yang bertanggung jawab dan berani melakukan terobosan demi pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Kebijakan menerima mahasiswa KKN yang membawa manfaat bagi masyarakat dimaknai sebagai bentuk pemberian dari Otto Ihalauw yang wajib ditindaklanjuti dengan pengembalian balasan berupa dukungan. Dukungan masyarakat ini bisa sangat mudah dimanfaatkan Otto Ihalauw untuk kepentingannya dalam Pilkada 2010.

Dalam rangka memobilisasi dukungan masyarakat, Otto Ihalauw mengombinasikan dengan memanfaatkan keberadaan

institusi adat yang termanifestasikan dalam wujud kelompok-kelompok etnis. Berbekal sumber daya normatif berupa kewenangan sebagai Bupati dan ditopang sumber daya personal dan keahlian yang dimilikinya, Otto Ihalauw menetapkan kebijakan yang mengakui keberadaan kelompok-kelompok etnis. Dengan diterapkan kebijakan itu, Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan mengakui keberadaan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) dan Dewan Anak Suku (DAS).¹⁵¹ Jumlah LMA dan DAS yang ada sama dengan jumlah kelompok-kelompok etnis, yakni Tehit, Imekko, dan Maybrat. Kegiatan LMA dan DAS adalah untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing kelompok etnis, seperti pertemuan para *kereth* yang ada pada setiap kelompok etnis.

Berbekal sumber daya normatif berupa kewenangan sebagai Bupati menjadikan Otto Ihalauw leluasa membuat kebijakan terkait dengan LMA dan DAS. Setelah menerapkan kebijakan yang memfasilitasi berdirinya LMA dan DAS, Otto Ihalauw menindaklanjuti dengan kebijakan memberi tunjangan kepada para tokoh adat (etnis) dalam bentuk dana berjumlah sekitar Rp 1.000.000,00 yang diberikan per tiga bulan sekali.¹⁵² Dengan adanya kebijakan ini, para tokoh adat (etnis) yang ada dalam LMA dan DAS menjadi semakin giat mendorong partisipasi para anggotanya dalam kegiatan yang datang dari inisiatif pemerintah. Partisipasi ini dengan mudah digeser menjadi mobilisasi dukungan untuk kepentingan Otto Ihalauw. Hal ini

151 Wawancara dengan Michael Momot, Ketua DAS Tehit, di Teminabuan, Sorong Selatan. Dalam wawancara dinyatakan bahwa Lembaga Masyarakat Adat (LMA) dan Dewan Anak Suku (DAS) pada prinsipnya tidak memiliki perbedaan mendasar. Keduanya memiliki fungsi mewadahi keberadaan dan menyatukan suku-suku dari masyarakat asli Papua. Perbedaannya ialah LMA mempunyai AD/ART yang dibuat sendiri dengan memperoleh pengesahan dari Pemerintah Daerah; sementara itu DAS tidak memiliki AD/ART namun mendasarkan pada hukum adat yang tidak tertulis.

152 Wawancara dengan Hengky Gogoba (etnis Imekko) pada 28 Agustus 2009, di Yogyakarta; dan Michael Momot (etnis Tehit dan sekaligus Ketua DAS Tehit) pada 19 Juli 2010 di Teminabuan, Sorong Selatan. Mereka menyatakan bahwa berdasarkan SK Bupati (yang tidak disebutkan nomor dan tanggalnya) kepada tokoh adat yang menjadi ketua DAS ataupun LMA diberi tunjangan sebesar Rp 1 juta yang diberikan per tiga bulan.

karena kebijakan-kebijakan yang memfasilitasi berdirinya LMA dan DAS serta kebijakan memberi tunjangan atau insentif kepada para tokoh adat (etnis) yang aktif di LMA dan DAS dipandang sebagai bentuk pemberian. Pemberian ini ditindaklanjuti dengan melakukan pemberian balasan dalam wujud dukungan.

Keberadaan etnis pendatang (non-Papua) juga dimanfaatkan oleh Otto Ihalauw untuk menggalang dukungan. Dalam posisinya sebagai Bupati yang memiliki sumber daya kewenangan formal, Otto Ihalauw memanfaatkan keberadaan paguyuban kelompok kerukunan dari para pendatang yang salah satunya adalah KKSS (Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan). KKSS beranggotakan masyarakat dari kelompok etnis Bugis, Buton, Makassar. Anggota kelompok kerukunan ini pada dasarnya lebih berorientasi pada kegiatan berdagang daripada terlibat politik praktis; bahkan kerap muncul sikap enggan untuk berpolitik praktis. Sehubungan dengan hal ini, informan berasal dari kelompok etnis pendatang yang menyatakan bahwa hubungan antara Otto Ihalauw dengan para pendatang dapat dinyatakan baik. Otto Ihalauw tidak menghalang aktivitas organisasi para pendatang, bahkan tak jarang organisasi para pendatang memperoleh bantuan darinya.¹⁵³

Untuk memobilisasi kelompok pendatang, Otto Ihalauw dalam posisinya sebagai Bupati memberi jaminan kepada kelompok pendatang untuk bisa melakukan kegiatan ekonomi (berdagang) secara leluasa. Dengan adanya jaminan ini, kelompok pendatang memaknainya sebagai bentuk pemberian dari Otto Ihalauw. Walaupun berstatus sebagai etnis non-Papua, mereka yang tergabung dalam kelompok pendatang tetap menghormati tradisi yang ada di masyarakat; dan oleh karenanya mereka menindaklanjuti jaminan yang diterima dengan pemberian balasan berupa dukungan kepada Otto Ihalauw.

153 Wawancara dilakukan secara dengan Ansar Sija pada 17 Juli 2010, dan Ahmad Samsuddin pada 18 Juli 2010, di Teminabuan, Sorong Selatan.

Selain hal di atas, berbekal sumber daya normatif dengan kewenangannya sebagai Bupati dan sumber daya personal sebagai figur yang sederhana dan religius, Otto Ihalauw relatif mudah membangun komunikasi dengan organisasi atau institusi gereja. Otto Ihalauw menyadari sepenuhnya bahwa gereja merupakan institusi yang dapat mengikat masyarakat selain ikatan atas dasar etnisitas. Keterikatan yang relatif erat dengan gereja karena institusi ini dalam persepsi masyarakat merupakan lembaga yang tak jarang membantu menyelesaikan persoalan kehidupan sehari-hari, seperti pemenuhan kebutuhan pokok berupa pangan dan kesehatan.

Berdasarkan pada hal tersebut di atas, dalam upaya mobilisasi dukungan, Otto Ihalauw melibatkan diri secara langsung dalam berbagai aktivitas yang diselenggarakan gereja. Selain rutin menghadiri aktivitas ritual keagamaan, dalam posisinya sebagai Bupati tidak jarang memfasilitasi aktivitas yang diselenggarakan gereja.¹⁵⁴ Tindakan Otto Ihalauw memfasilitasi aktivitas gereja dapat dimaknai sebagai bentuk pemberian; dan sebagai konsekuensinya, gereja melakukan pengembalian balasan dalam bentuk memobilisasi dukungan umat yang ditujukan kepada Otto Ihalauw. Dalam memanfaatkan institusi gereja sebagai cara menggalang dukungan, Otto Ihalauw diuntungkan latar belakang sebagai keluarga religius di mana kakeknya merupakan pengabar Injil di kawasan Sorong Selatan beberapa dekade lalu. Latar belakang keluarga tersebut merupakan sumber daya personal bagi Otto Ihalauw yang terbukti bisa dimanfaatkan untuk berlangsungnya penggalangan dukungan sebagaimana dipaparkan di atas.

Ringkasnya, bahasan di ranah kemasyarakatan menunjukkan bahwa dengan bekal sumber daya normatif, personal dan keahlian yang dimilikinya, Otto Ihalauw memanfaatkan tradisi

154 Otto Ihalauw relatif aktif di gereja Marthen Luther di Teminabuan. Wawancara dengan Kenan Thesia, etnis Tehit, pada 20 Juli 2010 di Kampung Wermit, Teminabuan, Sorong Selatan.

pertukaran *Kain Timur* sebagai instrumen untuk mobilisasi dukungan. Tradisi pertukaran *Kain Timur* yang dimanfaatkan untuk melakukan mobilisasi dukungan mengisyaratkan bahwa pihak penerima berkewajiban untuk melakukan pengembalian balasan. Sehubungan dengan hal itu, hadirnya mobilisasi dukungan dapat dilacak melalui penerapan kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi (pembangunan pasar), pembangunan infrastruktur, dan memfasilitasi aktivitas institusi adat dan gereja. Masyarakat Sorong Selatan menilai kebijakan pembangunan pasar, kebijakan pembangunan infrastruktur jalan dan listrik, dan kebijakan memfasilitasi institusi adat dan gereja sebagai bentuk pemberian dari Otto Ihalauw; dan masyarakat sebagai pihak yang telah menerima pemberian berkewajiban untuk melakukan pengembalian balasan yang dilakukan dalam bentuk memberi dukungan kepada Otto Ihalauw dalam Pilkada 2010. Demikian pula, jaminan rasa aman bagi kelompok etnis pendatang untuk melakukan kegiatan ekonomi (berdagang) dimaknai sebagai bentuk pemberian dari Otto Ihalauw; hadirnya rasa aman menjadikan kelompok etnis pendatang mengalirkan dukungannya kepada Otto Ihalauw.

Dengan bekal sumber daya normatif yang berwujud kewenangan sebagai Bupati, Otto Ihalauw mengeluarkan kebijakan pemerintahan dan pembangunan sekaligus untuk kepentingan melakukan mobilisasi dukungan. Kebijakan-kebijakan pemerintahan dan pembangunan yang dikeluarkan dimaknai sebagai tabungan dan investasi yang pada gilirannya bisa mengalirkan dukungan dari masyarakat yang memperoleh manfaat dari kebijakan-kebijakan itu. Sementara itu, kewajiban melakukan pengembalian balasan oleh masyarakat dimaknai sebagai bentuk pelunasan utang kepada Otto Ihalauw yang telah memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kebijakan-kebijakannya.

Politik *Kain Timur*: Mobilisasi Dukungan dalam Aktivitas Elektoral

Uraian berikut ini membahas mobilisasi dukungan yang dilakukan Otto Ihalauw sebagai salah satu kandidat dalam aktivitas elektoral. Berbekal sumber daya yang dimiliki, baik yang berupa sumber daya normatif, personal ataupun keahlian, Otto Ihalauw menggalang dukungan dalam setiap tahap aktivitas Pilkada. Uraian diawali dengan bahasan mobilisasi dukungan dalam tahap pencalonan, dilanjutkan bahasan mobilisasi dukungan dan pembentukan tim sukses, bahasan mobilisasi dukungan dalam tahap kampanye, dan diakhiri dengan bahasan mobilisasi dukungan untuk mengawal hari pemilihan dan penghitungan suara.

1. Mobilisasi Dukungan dalam Tahap Pencalonan

Pencalonan Otto Ihalauw sebagai kandidat bupati pada Pilkada 2010 bukan hanya didasarkan pada pertimbangan yang bersangkutan berposisi sebagai kandidat petahana dan pertimbangan yang bersangkutan memangku jabatan sebagai ketua partai; namun pencalonannya juga didasarkan pada hasil survei yang dilakukan DPP Partai Golkar memberi rekomendasi pencalonan atas dasar survei yang diselenggarakan oleh lembaga independen, Indo Barometer. Hasil survei menunjukkan bahwa Otto Ihalauw dimungkinkan memenangkan Pilkada 2010 dalam kisaran angka 52,1%.

Pada tahap pencalonan, setiap kandidat dituntut untuk memilih calon pendamping dan partai politik pengusung yang tepat agar bisa memenangkan kontestasi Pilkada. Upaya memilih calon pendamping sebagai pasangan sulit dipisahkan dari upaya memilih partai politik pengusung pencalonan. Hal ini karena aktivitas pemilihan calon pendamping diwarnai oleh pertimbangan kepentingan partai-partai pengusung, dan sebaliknya kehadiran partai-partai pengusung karena pertimbangan probabilitas

pasangan kandidat untuk keluar sebagai pemenang. Sebagai calon yang berlatar belakang etnis non-Papua, Otto Ihalauw dituntut untuk cermat dalam memilih calon pendamping sebagai calon Wakil Bupati. Masyarakat Sorong Selatan yang masih kental ikatan etnisitasnya mengharuskan Otto Ihalauw memilih orang asli Papua sebagai calon yang mendampinginya dalam Pilkada. Otto Ihalauw juga berhitung bahwa calon wakilnya harus berbeda dengan dirinya dari sisi keyakinan agama. Oleh karena itu, dalam memilih calon pendamping, isu etnisitas dan agama menjadi pertimbangan utama.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Otto Ihalauw menjatuhkan pilihan kepada Samsuddin Anggiluli yang beretnis asli Papua dan beragama Islam sebagai calon Wakil Bupati yang mendampinginya. Samsuddin Anggiluli adalah orang Imekko di mana umat muslim mencapai jumlah relatif banyak, dan dia berlatar belakang sebagai seorang birokrat di Kabupaten Sorong Selatan.¹⁵⁵ Pilihan Otto Ihalauw terhadap Samsuddin Anggiluli sebagai pasangan yang mendampinginya diharapkan bisa menghadirkan dukungan, baik dari orang Papua asli maupun pendatang yang mayoritas umat muslim. Sehubungan dengan hal itu perlu dibahas terkait dengan pertanyaan mengapa pilihan jatuh kepada Samsuddin Anggiluli, dan bukan kepada orang asli Muslim lainnya?

Pilihan menentukan pasangan jatuh kepada Samsuddin Anggiluli bukan sekadar pertimbangan bahwa yang bersangkutan orang Papua asli dan beragama Islam, karena sisi jaringan keluarga Samsuddin Anggiluli pun turut dijadikan pertimbangan. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa istri Samsuddin Anggiluli ternyata punya pertalian keluarga dengan Agustinus Saa yang berlatar belakang sebagai orang Aifat (salah satu sub-etnis yang ada dalam kelompok etnis Maybrat) yang pernah menjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong Selatan pada masa

155 Samsudin Anggiluli adalah seorang birokrat dengan posisi jabatan sebagai Kepala Bidang Aset pada Bagian Keuangan Kabupaten Sorong Selatan.

pemerintahan Otto Ihalauw periode 2005-2010. Agustinus Saa sewaktu menjabat sebagai Sekretaris Daerah tampak berambisi untuk maju mencalonkan diri sebagai calon Bupati dalam Pilkada 2010. Setelah pindah posisi dan tidak lagi menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong Selatan, rumor Agustinus Saa berniat maju sebagai calon Bupati Sorong Selatan menyusut¹⁵⁶; Otto Ihalauw berupaya menangkap para pendukung Agustinus Saa yang berasal dari Maybrat di kabupaten Sorong Selatan untuk beralih mendukungnya. Dalam hal ini, Samsuddin Anggiluli, melalui istrinya, diharapkan dapat meraup dukungan dari orang Maybrat, khususnya dari etnis Aifat. Seorang informan menyatakan:

“Orang-orang Maybrat yang berasal dari Aifat cenderung memberi dukungan kepada pasangan Otto Ihalauw-Samsuddin Anggiluli. Hal ini karena istri Samsuddin Anggiluli berasal dari Aifat, dan juga punya pertalian darah yang dekat dengan Agustinus Saa yang juga pejabat berasal dari Aifat”.¹⁵⁷

Selain pertimbangan di atas, Samsuddin Anggiluli dipilih sebagai pasangannya karena yang bersangkutan berlatar belakang birokrat yang dapat dinyatakan masih relatif junior.¹⁵⁸ Posisi Samsuddin Anggiluli sebagai birokrat junior tidak lebih sebagai bawahan Otto Ihalauw yang sedang memegang jabatan bupati; posisi ini secara psikologis memengaruhi hubungan di antara keduanya. Otto Ihalauw akan relatif mudah untuk melakukan kontrol terhadap Samsuddin Anggiluli. Pertimbangan ini

156 Sewaktu menjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong Selatan kuat berembus rumor bahwa Agustinus Saa berniat mencalonkan diri sebagai calon Bupati Sorong Selatan pada Pilkada 2010. Namun seiring dengan terbentuknya Kabupaten Maybrat sebagai kabupaten baru (lepas dari Kabupaten Sorong Selatan) dan Agustinus Saa diangkat sebagai Sekretaris Daerah di kabupaten baru, rumor tersebut menyusut karena dikabarkan yang bersangkutan akan mencalonkan diri sebagai calon Bupati Maybrat. Wawancara dengan Yunus Duwit pada 15 Juli 2010 di Teminabuan, Sorong Selatan.

157 Wawancara dengan Yunus Duwit pada 15 Juli 2010 di Teminabuan, Sorong Selatan.

158 Samsuddin Anggiluli belum begitu lama meniti kariernya sebagai seorang birokrat yang dimulai sekitar tahun 2007-2008. Wawancara dengan Suroso, Sekretaris Bappeda Kabupaten Sorong Selatan pada 24 Juli 2010 di Teminabuan, Sorong Selatan.

dilakukan Otto Ihalauw untuk dapat membentuk pemerintahan yang mudah dikendalikan seandainya terpilih sebagai bupati periode berikutnya. Otto Ihalauw berkaca pada pengalaman masa pemerintahan periode pertama, 2005-2010, di mana dengan Wakil Bupati hanya bisa menjalin kerja sama pada tahun pertama pemerintahannya; demikian halnya dengan Sekretaris Kabupaten yang kurang harmonis pada tahun-tahun terakhir pemerintahannya.

Jadi dalam hal memilih calon pendamping sebagai Wakil Bupati dalam Pilkada 2010; Otto Ihalauw tidak sekadar mempertimbangkan isu etnisitas dan agama, namun juga mempertimbangkan kelancaran roda pemerintahan kelak seandainya memenangkan Pilkada dan terpilih sebagai bupati. Pertimbangan faktor hubungan keluarga antara istri Samsuddin Anggiluli dengan Agustinus Saa yang merupakan tokoh salah satu etnis asli menunjukkan bahwa Otto Ihalauw menyadari ikatan etnisitas diperhitungkan dalam kontestasi perebutan kekuasaan melalui Pilkada. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa dipilihnya Samsuddin Anggiluli sebagai calon pendamping bertujuan untuk memudahkan mobilisasi dukungan.

Uraian di atas menunjukkan bahwa dalam memilih calon pendamping, Otto Ihalauw memanfaatkan mekanisme pertukaran sebagaimana yang ada pada tradisi pertukaran *Kain Timur*. Berbekal sumber daya yang dimiliki, Otto Ihalauw mampu menyiasati tradisi pertukaran *Kain Timur* untuk kepentingannya melakukan mobilisasi dukungan. Dipilihnya Samsuddin Anggiluli bagi orang beretnis Papua asli yang beragama Islam (terutama orang-orang dari kelompok etnis Imekko) dimaknai sebagai pemberian; dan mereka menindaklanjuti pemberian tersebut dengan melakukan pengembalian balasan berupa dukungan kepada Otto Ihalauw.

Sejatinya dengan lima kursi di DPRD, Partai Golkar tidak perlu berkoalisi dengan partai politik lain dalam mengusung pasangan calon pada kontestasi Pilkada 2010. Namun, pencalonan

pasangan Otto Ihalauw-Samsuddin Anggiluli melalui koalisi yang dilakukan oleh Partai Golkar, PKS, dan Partai Hanura. Jatuhnya pilihan calon pendamping kepada Samsuddin Anggiluli ternyata dapat dikaitkan dengan jatuhnya pilihan Otto Ihalauw kepada PKS sebagai salah satu partai politik pengusung. Tak tertutup kemungkinan bahwa salah satu alasan mengapa PKS bersedia mengusung pasangan ini karena faktor agama yang dipeluk Samsuddin Anggiluli. Ketua DPD PKS Sorong Selatan menyatakan sebagai berikut:

“Salah satu faktor yang menjadikan PKS bersedia untuk mengusung pencalonan pasangan Otto Ihalauw-Samsuddin Anggiluli adalah agama yang dipeluk Samsuddin Anggiluli. Dia dipandang sebagai wakil umat Islam Sorong Selatan dalam Pilkada meski hanya berposisi sebagai calon wakil bupati”.¹⁵⁹

Sementara itu, Otto Ihalauw menggandeng PKS dengan pertimbangan untuk meraih dukungan dari pemilih muslim terutama kalangan pendatang. Para pendatang, terutama yang berlatar belakang etnis Bugis, Buton, dan Makassar, merupakan suara potensial untuk direbut dalam Pilkada. Salah seorang tokoh masyarakat beretnis Bugis, Buton, Makassar merupakan inisiator dan deklarator berdirinya PKS di Kabupaten Sorong Selatan¹⁶⁰; dan untuk merebut suara pemilih beretnis Bugis, Buton, Makassar dapat dilakukan dengan cara menggandeng PKS sebagai partai pengusung. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa dalam rangka mobilisasi dukungan, Otto Ihalauw membingkai dengan isu agama dalam membangun koalisi partai politik pengusung.

159 Wawancara dengan Ahmad Samsuddin, Ketua DPD PKS Kabupaten Sorong Selatan, pada 18 Juli 2010 di Teminabuan, Sorong Selatan.

160 Salah seorang tokoh pendatang beretnis Bugis, Buton, dan Makassar adalah Haji Nur; dia dapat dinyatakan menjadi panutan bagi pendatang Bugis, Buton, Makassar. Haji Nur adalah inisiator dan deklarator PKS Kabupaten Sorong Selatan, dan berbagai sumber menyatakan bahwa dia pula yang berperan sebagai salah seorang penyandang dana. Wawancara dengan Ahmad Samsuddin, Ketua DPD PKS Kabupaten Sorong Selatan pada 18 Juli 2010; dan juga wawancara dengan Ansar Sija (etnis Makassar, aktivis PKS Sorong Selatan) pada 17 Juli 2010.

Pertimbangan menggandeng Partai Hanura tidak begitu banyak informasi yang diperoleh. Sebuah sumber menyatakan bahwa karena Partai Hanura punya dua kursi di DPRD setempat, maka dilirik untuk diajak berkoalisi dalam pencalonan Otto Ihalauw.¹⁶¹ Kursi Partai Hanura ditambah kursi milik Partai Golkar dan PKS akan menjadikan partai pengusung pasangan Otto Ihalauw-Samsuddin Anggiluli punya sembilan kursi. Diharapkan apabila Otto Ihalauw memenangkan Pilkada, dan juga diharapkan koalisi utuh, maka roda pemerintahan dalam kaitan relasi eksekutif dan legislatif akan relatif lancar. Selain itu, Partai Hanura juga menunjukkan minat untuk masuk dalam koalisi mengusung pencalonan Otto Ihalauw karena partai ini memprediksikan bakal memenangkan Pilkada. Prediksi tersebut didasarkan pada pertimbangan Otto Ihalauw sebagai kandidat petahana sekaligus dinilai posisinya kuat di masyarakat oleh Partai Hanura.

Berdasarkan pada uraian di atas tampak sekali bahwa pertimbangan dalam memilih calon yang menjadi pasangannya, dan dalam menentukan partai-partai politik yang diajak berkoalisi untuk mencalonkannya, didasarkan pada pertimbangan yang saling terkait satu dengan lainnya. Pertimbangan dalam memilih pasangan dijadikan bahan pertimbangan dalam memilih partai politik yang mencalonkan; demikian pula sebaliknya, pertimbangan dalam memilih partai politik yang mencalonkan dijadikan bahan perhitungan dalam memilih siapa yang akan dijadikan pasangan. Dalam hal ini, Otto Ihalauw menerapkan mekanisme pertukaran, sebagaimana halnya yang terdapat pada tradisi pertukaran *Kain Timur*, untuk memilih calon pendamping dan membangun koalisi partai pengusung. Dipilihnya Samsuddin Anggiluli sebagai calon pendamping dan ajakan berkoalisi sebagai partai pengusung dimaknai PKS sebagai bentuk pemberian. Demikian pula dengan Partai Hanura, ajakan menjadi bagian

161 Wawancara dengan Otto Ihalauw, kandidat petahana, pada 21 Juli 2010 di Teminabuan, Sorong Selatan.

dari koalisi partai pengusung juga dimaknai sebagai pemberian. Dengan pemaknaan itu, baik PKS maupun Partai Hanura berkewajiban melakukan pengembalian balasan yang diwujudkan dalam bentuk dukungan terhadap pasangan Otto Ihalauw-Samsuddin Anggiluli.

Walaupun secara resmi pasangan Otto Ihalauw-Samsuddin Anggiluli terdaftar dan ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan dalam Pilkada 2010,¹⁶² namun upaya untuk menggagalkan pencalonan tersebut terus berlangsung. Upaya ini dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak menginginkan Otto Ihalauw maju sebagai calon dalam Pilkada. Beragam cara ditempuh untuk mengganjal pencalonan Otto Ihalauw.¹⁶³ Salah satu di antaranya adalah ancaman pengunduran diri atau pembatalan pencalonan dari semua pasangan kompetitor. Bila ancaman tersebut menjadi kenyataan, Pilkada hanya diikuti pasangan Otto Ihalauw-Samsuddin Anggiluli, dan berdasarkan peraturan yang berlaku bisa membatalkan terselenggaranya kontestasi Pilkada.

Sehubungan dengan hal itu, Otto Ihalauw mengantisipasi dengan melakukan upaya agar ada satu pasangan calon lainnya yang tidak mundur, dan keadaan ini akan menjadikan Pilkada tetap berlangsung karena diikuti paling tidak oleh dua pasang calon. Pasangan tersebut adalah Yunus Saflembolo-Djoni Harry Bowaire; pasangan ini tidak berniat untuk mengundurkan diri karena dalam proses pencalonannya didukung oleh Otto Ihalauw. Awalnya, pasangan Yunus Saflembolo-Djoni Harry Bowaire,

162 Pasangan Otto Ihalauw-Samsuddin Anggiluli secara resmi terdaftar dan ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan dalam Pilkada 2010 melalui Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan No. 17 Tahun 2010 Tanggal 18 Juli 2010.

163 Berbagai cara mengganjal pencalonan Otto Ihalauw, antara lain dengan tersebarnya isu bahwa calon bupati harus 'putra asli' Papua, tersebarnya isu bahwa terjadi penyimpangan pelaksanaan proyek pembangunan dalam masa pemerintahan periode 2005-2010. Cara mengganjal pencalonan yang sering muncul adalah ancaman pengunduran diri semua pasangan kandidat kompetitor sehingga membatalkan terselenggaranya kontestasi Pilkada. Wawancara dengan Otto Ihalauw pada 21 Juli 2010 di Teminabuan, Sorong Selatan.

pada detik-detik menjelang penutupan pendaftaran, mengalami kesulitan berkenaan dengan partai politik yang mengusungnya. Pasangan ini baru punya dua partai politik pengusung dengan total dua kursi di DPRD; dan tentunya tidak bisa untuk dijadikan partai pengusung. Pasangan ini memerlukan satu partai politik lagi yang punya paling tidak satu kursi di DPRD untuk dapat mencalonkan diri. Sehubungan dengan hal tersebut, Otto Ihalauw menyodorkan PAN, salah satu partai politik pendukungnya, untuk berperan sebagai pengusung bagi pasangan Yunus Safflembolo-Djoni Harry Bowaire.¹⁶⁴ Terpenuhinya persyaratan menjadikan mulusnya pencalonan pasangan Yunus Safflembolo-Djoni Harry Bowaire; dan keadaan ini menjadikan ancaman mundur dari pasangan-pasangan calon lainnya menjadi kendur karena walaupun mereka menarik mundur, Pilkada tetap berlangsung dengan menyisakan pasangan Otto Ihalauw-Samsuddin Anggiluli dan Yunus Safflembolo-Djoni Harry Bowaire.

Bahasan di atas mengisyaratkan bahwa dalam rangka mobilisasi dukungan, Otto Ihalauw dengan bekal sumber daya yang dimiliki berupaya menerapkan mekanisme pertukaran sebagaimana yang terkandung dalam tradisi pertukaran *Kain Timur*. Otto Ihalauw memanfaatkan tradisi pertukaran *Kain Timur* sedemikian rupa sehingga dalam tahap pencalonan pihak-pihak yang terkait merasa terlibat dalam mekanisme pertukaran tersebut. Dalam tahap pencalonan kelompok etnis dari mana calon pendamping berasal, dan juga partai-partai politik yang tergabung dalam koalisi partai pengusung, menjadi terikat atau terkunci dengan pemberian yang diterima dari Otto Ihalauw. Kelompok etnis dari mana calon pendamping berasal dan partai-partai politik yang tergabung sebagai partai pengusung memaknai pemberian dari Otto Ihalauw sebagai utang yang harus dikembalikan (dilunasi). Sementara itu bagi Otto Ihalauw, pemberian yang dilakukan

164 Wawancara dengan Otto Ihalauw, pada 21 Juli 2010 di Teminabuan, Sorong Selatan. Otto Ihalauw menawarkan PAN sebagai pengusung pasangan Yunus Safflembolo-Djoni Harry Bowaire; PAN memang mengusung pasangan ini sebagai calon, namun berjanji pada Otto Ihalauw di lapangan tidak akan mengubah dukungan.

dimaknai sebagai tabungan atau investasi, di mana tabungan atau investasi tersebut pada gilirannya menghasilkan dukungan bagi dirinya melalui mekabisme pengembalian balasan.

2. Mobilisasi Dukungan dan Pembentukan Tim Sukses

Langkah awal yang ditempuh Otto Ihalauw untuk memenangkan Pilkada adalah membentuk tim sukses yang punya tugas utama menjadikan Otto Ihalauw dilantik sebagai Bupati Sorong Selatan periode 2010–2015. Komposisi tim sukses terdiri dari perwakilan partai-partai politik pengusung, para tokoh yang mewakili kelompok etnis dan kelompok kerukunan komunitas pendatang. Oleh karena itu, terbentuknya tim sukses tidak lepas dari upaya memobilisasi dukungan dari segenap elemen pendukung pencalonan pasangan Otto Ihalauw-Samsuddin Anggiluli. Pembentukan tim sukses ditetapkan dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh pasangan Otto Ihalauw-Samsuddin Anggiluli.¹⁶⁵

Tim sukses diketuai oleh Thomas Saupar dari Partai Golkar yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Sorong Selatan, sekretaris tim ditempati Ahmad Syamsuddin dari PKS yang merupakan anggota DPRD Sorong Selatan, dan bendahara diisi oleh Elisa Marende seorang kader Partai Golkar dan berprofesi sebagai pengusaha (pemilik hotel) di Teminabuan. Salah satu kader Partai Hanura ditempatkan dalam posisi sebagai salah seorang wakil ketua. Hal yang menarik adalah penempatan wakil ketua tim sukses lainnya berasal dari PAN yang bukan merupakan partai pengusung.¹⁶⁶ Sementara itu, tokoh-tokoh adat dari semua kelompok etnis yang ada, baik etnis asli maupun pendatang,

165 Pasangan Otto Ihalauw-Samsuddin Anggiluli mengeluarkan Surat Keputusan No. 1/ KPTS/OTTO-SAM/V/2010 tentang Pengesahan Struktur dan Komposisi Pondok Layanan Tim Sukses Otto-Sam Tingkat Kabupaten Sorong Selatan. Berdasarkan komposisi keanggotaan tampak bahwa anggota Tim Sukses punya latar belakang beragam, baik dari asal etnisitas, partai politik, maupun pekerjaan.

166 Pada Pilkada 2010, PAN mengusung pasangan Yunus Safflebolo-Djoni Harry Bowaire.

dan para Ketua Dewan Penasihat dari masing-masing partai pengusung duduk dalam posisi penasihat.

Hal yang menarik dibahas adalah proses pembentukan tim sukses tersebut. Tim sukses dibentuk dengan hati-hati dan pertimbangan yang cermat. Sebelum nama-nama yang masuk dalam jajaran tim sukses ditetapkan, inventarisasi orang-orang yang layak menjadi anggota tim sukses dilakukan. Mereka terdiri dari semua tokoh adat yang mewakili etnis yang ada, tokoh-tokoh partai pengusung dan pendukung, dan mereka yang pernah menjadi tim sukses Otto Ihalauw pada Pilkada 2005 lalu. Mereka dipilih atas dasar pertimbangan komitmen dukungan, kemampuan yang bersangkutan, kebutuhan dalam Pilkada, dan prinsip keterwakilan.

Tim sukses yang dibentuk pasangan Otto Ihalauw-Samsuddin Anggiluli tidak hanya di tingkat kabupaten saja, namun dibentuk pula tim sukses di tingkat distrik dan kampung. Pengangkatan tim sukses tingkat distrik dan kampung, sebagaimana halnya pengangkatan tim sukses tingkat kabupaten, juga didasarkan surat keputusan yang ditandatangani pasangan Otto Ihalauw-Samsuddin Anggiluli. Surat keputusan tersebut punya pengaruh bagi para anggota tim sukses, yakni merasa dipercaya dan dihargai jerih payahnya sebagai anggota tim sukses. Namun selain itu, yang lebih penting, surat keputusan tersebut dijadikan pegangan bagi para anggota tim sukses untuk meminta imbalan atau balas jasa atas kesediaan dan kinerja mereka sebagai tim sukses. Hal ini bisa dibaca bahwa kesediaan dan kinerja mereka sebagai tim sukses adalah bentuk pemberian kepada pasangan Otto Ihalauw-Samsuddin Anggiluli; dan pada saat kemenangan Pilkada diraih maka pasangan ini harus mengembalikan pemberian yang telah diterimanya.

Tim sukses yang penunjukan dan pengangkatannya didasarkan pada surat keputusan merupakan tim sukses yang dapat disebut sebagai tim sukses formal. Di samping itu masih ada pula tim

sukses yang tidak diketahui khalayak umum, tim sukses ini dapat dinyatakan sebagai tim sukses bayangan yang terdiri dari sekelompok orang yang jumlahnya lebih sedikit. Disebut sebagai tim sukses bayangan karena tidak dikukuhkan secara formal, dan oleh karena itu penunjukkan dan pengangkatan orang-orang yang ada dalam tim sukses bayangan tidak berdasarkan surat keputusan. Mereka yang duduk dalam tim sukses bayangan merupakan *think-tank* yang sebenarnya bagi pasangan Otto Ihalauw-Samsuddin Anggiluli. Rumusan strategi untuk memenangkan pasangan Otto Ihalauw- Samsuddin Anggiluli lebih banyak didasarkan pada saran dan masukan yang diberikan tim sukses bayangan. Terkait dengan tim sukses bayangan, seorang informan menyatakan sebagai berikut:

“Di samping tim sukses yang diketahui masyarakat umum, ada pula tim sukses bayangan yang tidak begitu dikenal. Tim sukses bayangan bekerja secara diam-diam (tersembunyi). Tim sukses ini terdiri dari sejumlah kecil orang, dan mereka lebih berperan dalam menentukan strategi dan taktik sebagai upaya memenangkan Pilkada.”¹⁶⁷

Berdasarkan uraian di atas, mobilisasi dukungan dalam rangka pembentukan tim sukses dilakukan dengan pertimbangan keterwakilan etnisitas dan keterwakilan partai-partai politik pengusung. Hubungan antara mereka yang duduk dalam tim sukses dengan Otto Ihalauw sebagai kandidat berupa hubungan sebagaimana halnya yang terdapat dalam tradisi pertukaran *Kain Timur*. Dalam hubungan ini, Otto Ihalauw berposisi sebagai pihak penerima, dan mereka yang duduk dalam tim sukses berposisi sebagai pihak pemberi. Otto Ihalauw memaknai pemberian yang diterima merupakan utang kepada mereka yang tergabung dalam tim sukses; sementara itu, anggota tim sukses memaknai kesediaan dan peran yang dilakukan sebagai bentuk tabungan atau investasi. Apabila Otto Ihalauw berhasil menjadi pemenang

167 Wawancara dengan Suroso pada 24 Juli 2010 di Teminabuan, Sorong Selatan.

dalam kontestasi Pilkada, keberhasilan kinerja tim sukses harus ditindaklanjuti dengan pengembalian balasan dalam bentuk yang telah disepakati kedua belah pihak.

Keberadaan tim sukses tak dapat dilepaskan dari pondok layanan, di mana pondok layanan adalah tempat berkumpulnya tim sukses dan para pendukung pasangan Otto Ihalauw-Samsuddin Anggiluli dalam Pilkada 2010. Pondok layanan dijadikan semacam markas bagi tim sukses. Pondok layanan ada di tingkat kabupaten, distrik dan kampung sebagaimana halnya tim sukses yang juga ada pada setiap tingkat tersebut.

Pondok layanan dirancang sedemikian rupa sehingga merupakan tempat yang relatif nyaman bagi para pendukung pasangan Otto Ihalauw-Samsuddin Anggiluli berkumpul dalam rangka memobilisasi dukungan. Pilihan sebutan pondok layanan bukan tanpa pertimbangan matang. Sebutan pondok layanan dipilih karena berkonotasi damai, teduh dan bernuansa religius. Konotasi ini seiring dengan keinginan Otto Ihalauw yang mengedepankan strategi *kasih* untuk merangkul semua kalangan masyarakat dalam Pilkada, dan sebutan pondok layanan dipandang sesuai atau cocok dengan motto kampanye pasangan Otto Ihalauw-Samsuddin Anggiluli yakni ‘membangun bersama rakyat’. Dalam hal ini, Otto Ihalauw dalam wawancaranya menyatakan sebagai berikut:

“Pondok layanan merupakan tempat para pendukung dan simpatisan berkumpul. Sebutan pondok layanan mengandung maksud bahwa kami memang bekerja dan mengabdikan untuk melayani kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, dengan sebutan itu kami merasa menjadi lebih dekat dengan masyarakat dalam rangka ‘membangun bersama rakyat’ sebagai motto kampanye kami.”¹⁶⁸

Pondok layanan dibentuk di tingkat kabupaten, distrik dan kampung; jumlah keseluruhan sekitar 500 pondok. Minimal

168 Wawancara dengan Otto Ihalauw pada 21 Juli 2010 di Teminabuan, Sorong Selatan.

di setiap kampung ada satu pondok layanan. Pembentukan pondok layanan tidak hanya atas inisiatif tim sukses, namun juga atas inisiatif partai-partai politik pengusung pasangan Otto Ihalauw-Samsuddin Anggiluli dan kelompok-kelompok masyarakat yang bersimpati pada pasangan ini.¹⁶⁹ Sebagai bagian dari strategi, melalui pondok layanan diupayakan terkumpul sebanyak mungkin suara dukungan bagi pasangan Otto Ihalauw-Samsuddin Anggiluli. Setiap pondok layanan ditargetkan mampu mengumpulkan dukungan sebesar 40 suara; dengan demikian dari 500 pondok layanan diharap terkumpul 20.000 suara pemilih.¹⁷⁰ Jumlah yang lebih dari cukup untuk pasangan Otto Ihalauw-Samsuddin Anggiluli memenangkan kontestasi Pilkada.

Untuk merealisasikan target tersebut, dengan menjadikan pondok layanan sebagai pusat kegiatan, dilakukan pendaftaran nama-nama calon pemilih yang akan memberikan suara kepada pasangan Otto Ihalauw-Samsuddin Anggiluli. Pendaftaran nama ini dimaksudkan untuk menguatkan komitmennya tetap menjatuhkan pilihan kepada pasangan tersebut pada saat hari pemilihan. Selain itu setiap pondok layanan melakukan berbagai aktivitas, seperti kegiatan kampanye konvensional memasang spanduk, bendera dan baliho; namun yang lebih penting lagi pondok layanan dijadikan tempat para pendukung pasangan Otto Ihalauw berkumpul. Walaupun hanya sekadar berkumpul, keberadaan para pendukung di pondok layanan memberi efek psikologis untuk menarik perhatian masyarakat. Anggota masyarakat yang belum punya pilihan tetap, dengan melihat para pendukung di pondok layanan dalam jumlah relatif banyak, diharapkan akan beralih memilih pasangan Otto Ihalauw-Samsuddin Anggiluli. Demikian pula bagi anggota masyarakat yang masih ragu atau belum mantap untuk memilih pasangan

169 Wawancara dengan Ansar Sija, etnis Makassar, pada 17 Juli 2010. Diilustrasikan olehnya bahwa di Pasar Ampera Teminabuan ada dua pondok layanan yang dibiayai oleh PKS sebagai salah satu partai politik pengusung dan Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan.

170 Wawancara dengan Yustus Saftembolo, etnis Tehit, aktivis KNPI Kabupaten Sorong Selatan, pada 23 Juli 2010 di Teminabuan, Sorong Selatan.

Otto Ihalauw-Samsuddin Anggiluli, dengan menyaksikan jumlah orang yang banyak di pondok layanan akan memantapkan mereka menjatuhkan pilihan pada pasangan tersebut. Untuk menunjang aktivitas para pendukung, setiap pondok layanan, apabila dinilai dengan uang, diberi dana sebesar Rp 5 juta secara bertahap. Terkait dengan dana operasional pondok layanan, seorang anggota tim sukses menyatakan sebagai berikut:

“Setiap pondok layanan diberi dana operasional awal Rp 1 juta, dan pada tahap-tahap berikutnya (empat tahap) diberi logistik bahan makanan seharga Rp 1 juta per tahap (untuk empat tahap sebesar Rp 4 juta); total pemberian ke setiap pondok layanan apabila dinilai dengan uang sebesar Rp 5 juta. Jumlah pondok layanan yang ada sekitar 500, sehingga total dana yang dibutuhkan sebesar $500 \times \text{Rp } 5 \text{ juta} = \text{Rp } 2,5 \text{ milyar}$.”¹⁷¹

Besaran dana operasional tersebut berasal dari tim sukses yang ada di pondok layanan tingkat kabupaten. Di samping dana operasional tersebut masih ada dana lain yang mengalir dari para simpatisan ke pondok layanan di kampung yang jumlahnya bervariasi. Jumlah dana sebesar itu mengindikasikan bahwa kegiatan di pondok layanan tak mengalami kesulitan yang berarti.

3. Mobilisasi Dukungan dalam Tahap Kampanye

Hakekat dari kampanye adalah mempromosikan diri agar dipilih. Demikian pula halnya dengan kampanye Pilkada yang merupakan upaya mempromosikan diri agar dipilih dalam Pilkada. Setiap pasangan calon dalam Pilkada 2010 melakukan hal tersebut sebagai upaya untuk menjadi pemenang. Berbekal sumber daya normatif, personal, dan keahlian yang dimiliki, Otto Ihalauw tidak menjadikan etnisitas sebagai isu kampanye untuk memobilisasi dukungan. Pasangan Otto Ihalauw-Samsuddin Anggiluli dalam kampanyenya justru menonjolkan isu pembangunan. Adapun

171 Wawancara dengan Septon Athabu, salah satu anggota tim sukses tingkat kabupaten, pada 17 Juli 2010.

dasar pertimbangan tidak mengusung isu etnisitas sebagai tema kampanye karena Otto Ihalauw berlatar belakang etnis non-Papua. Jika isu etnisitas diusung sebagai tema kampanye justru mempersulit posisinya sebagai kandidat non-Papua. Kelompok-kelompok etnis asli akan mempersoalkan pencalonannya karena bagi mayoritas orang Papua berkeinginan posisi jabatan Bupati/Wakil Bupati diduduki oleh orang asli sebagai putra daerah.¹⁷²

Dalam kampanyenya, Otto Ihalauw mengangkat isu pembangunan sebagai tema kampanye. Hal ini dilakukan karena pada masa pemerintahannya di periode pertama (2005-2010), Otto Ihalauw berkomitmen melaksanakan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Sorong Selatan. Otto Ihalauw berupaya konsisten dengan komitmennya tersebut, dan oleh karena itu dalam kampanyenya diusung slogan ‘membangun bersama rakyat’.

Selain itu, dalam rangka mobilisasi dukungan, kampanye pasangan Otto Ihalauw-Samsuddin Anggiluli dalam mengikis sekat-sekat kelompok etnis memanfaatkan semboyan dan simbol yang berkaitan dengan agama. Hal ini karena institusi gereja dapat mencairkan kesetiaan primordial atas dasar etnisitas. Pasangan Otto Ihalauw-Samsuddin Anggiluli dalam kampanyenya selain mengemukakan slogan ‘membangun bersama rakyat’ juga mengemukakan semboyan ‘menjemput tanda heran’. Terkait dengan semboyan ini, seorang informan yang memberikan keterangan sebagai berikut:

172 Di masyarakat beredar SK MRP No. 14/2009 tentang syarat Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota harus orang Papua asli. Beredarnya SK ini dimanfaatkan sejumlah kalangan untuk menggagalkan pencalonan Otto Ihalauw yang beretnis non-Papua. Otto Ihalauw merespons penolakan dengan mempertanyakan payung hukum bagi SK MRP No. 14/2009 karena UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua tidak menyebutkan persyaratan orang Papua asli untuk jabatan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota. Selain itu, Otto Ihalauw juga merespons bahwa dirinya tetap bisa mencalonkan diri sebagaimana dipersyaratkan SK MRP No. 14/2009 karena dirinya telah diangkat sebagai anak adat oleh suku (etnis) Tehit.

“Semboyan ‘menjemput tanda heran’ merupakan potongan kalimat dari penginjil kebangsaan Belanda, Samuel Izaak Kijne. Kalimat lengkapnya ‘mari kita lihat dan jemput tanda heran yang satu ke tanda heran yang lain’. Adapun makna ‘tanda heran’ adalah perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik.”¹⁷³

Semboyan yang dikemukakan oleh seorang penginjil Belanda, Samuel Izaak Kijne, ini demikian populer di kalangan masyarakat pada dekade 1950-an dan 1960-an. Adapun arti dari semboyan itu adalah berisi ajakan kepada masyarakat untuk melakukan kebajikan dan kebaikan sebagai bentuk peningkatan kualitas hidup. Kualitas hidup yang lebih baik merupakan manifestasi dari rasa heran yang harus diwujudkan melalui kebajikan dalam bermasyarakat.

Semboyan tersebut oleh tim kampanye Otto Ihalauw-Samsuddin Anggiluli dengan jitu dimodifikasi menjadi ‘mari *kitorang* menjemput tanda heran berikutnya’. Semboyan atau slogan ini mengandung arti ajakan kepada masyarakat untuk secara bersama-sama melakukan perubahan (pembangunan) untuk kehidupan yang lebih baik. Dalam kampanyenya kata ‘berikutnya’ mendapat penekanan; hal ini untuk menunjukkan bahwa Otto Ihalauw pada masa pemerintahan periode pertama sudah melakukan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pada masa pemerintahan berikutnya tetap mengajak masyarakat untuk bersama-sama melanjutkan pembangunan.

Upaya mengoptimalkan kampanye dengan menggunakan semboyan atau slogan yang bernuansa religius tersebut mampu memobilisasi dukungan dari kalangan masyarakat yang lebih luas karena melintasi sekat-sekat kelompok etnis. Pemanfaatan semboyan tersebut dalam kampanye juga memberi citra positif pada diri Otto Ihalauw sebagai seorang yang religius; citra ini mendukung slogan kampanye ‘membangun bersama rakyat’ yang

173 Wawancara dengan Suroso; hal senada juga dikemukakan oleh Yunus Duwit. Wawancara dilakukan pada 15 Juli 2010 di Teminabuan, Sorong Selatan.

dilakukan dengan penuh kasih tanpa membedakan kelompok yang satu dengan yang lainnya.

Guna memobilisasi dukungan yang lebih banyak, pasangan Otto Ihalauw-Samsuddin Anggiluli menyiapkan materi kampanye bertema pembangunan berdasarkan kajian yang dilakukan lembaga atau instansi yang berkompeten, yakni Bappeda. Dalam menyiapkan materi kampanye pasangan calon ini diberi masukan berupa informasi terkait dengan pembangunan yang sudah dan yang akan dilaksanakan. Bantuan yang berupa informasi untuk keperluan kampanye dapat ditafsirkan bahwa pasangan calon ini memanfaatkan sumber daya normatif yang berada di ranah negara untuk pemenangan Pilkada. Hal ini dimungkinkan karena posisi Otto Ihalauw sebagai kandidat petahana, dan Bappeda merupakan instansi yang dipimpin seorang pejabat yang merupakan teman dekatnya.¹⁷⁴

Selain memanfaatkan keberadaan Bappeda dalam hal menyiapkan materi kampanye, juga tampak pemanfaatan fasilitas instansi pemerintah dalam kampanye pasangan Otto Ihalauw-Samsuddin Anggiluli.¹⁷⁵ Pemanfaatan fasilitas instansi pemerintah untuk kepentingan kampanye merupakan bentuk pemanfaatan sumber daya normatif yang ada di ranah negara; dan hal ini hanya dapat dilakukan oleh Otto Ihalauw sebagai kandidat petahana. Upaya mengoptimalkan kampanye juga dilakukan melalui keterlibatan aparat birokrasi secara terselubung. Terkait dengan hal ini menarik disimak keterangan yang diberikan informan yang enggan disebut jati dirinya. Keterangannya sebagai berikut:

174 Wawancara dengan Otto Ihalauw, pada 21 Juli 2010 di Teminabuan, Sorong Selatan. Posisi jabatan Ketua Bappeda Sorong Selatan dipegang Roy Kambuaya, seorang birokrat karier beretnis Maybrat; pengangkatan Roy Kambuaya menjadi Kepala Bappeda dilakukan pada Mei 2009. Penempatan Roy Kambuaya pada posisi Kepala Bappeda merupakan bagian dari strategi Otto Ihalauw menempatkan orang-orangnya dalam posisi strategis untuk kepentingannya dalam pilkada.

175 Berdasarkan pengamatan di lapangan, pemanfaatan fasilitas instansi pemerintah yang paling sering adalah penggunaan kendaraan bermotor untuk kepentingan kampanye yang dilakukan aparat birokrasi pendukung pasangan Otto Ihalauw-Samsuddin Anggiluli.

“Sudah menjadi rahasia umum bahwa birokrasi terlibat dalam upaya pemenangan salah satu kandidat, khususnya kandidat yang berstatus petahana. Namun relatif sulit untuk membuktikan keterlibatannya karena aparat birokrasi melakukannya secara tersembunyi atau terselubung. Dalam batas-batas yang wajar keterlibatan aparat birokrasi dalam kampanye pemenangan kami kira masih bisa diterima walaupun hal itu melanggar ketentuan yang berlaku.”¹⁷⁶

Keterlibatan aparat birokrasi dalam kampanye dapat dinyatakan relatif efektif karena mereka lebih menguasai materi kampanye yang berkaitan dengan permasalahan pemerintahan dan pembangunan. Selain itu, pada umumnya mereka juga berposisi sebagai tokoh masyarakat di komunitasnya, sehingga kampanye yang dilakukan lebih efektif.

Selain hal di atas, dalam upaya mobilisasi dengan mengoptimalkan kampanye, pasangan Otto Ihalauw-Samsuddin Anggiluli mengundang tokoh-tokoh partai pengusung dari tingkat nasional dan provinsi untuk berkampanye. Undangan bagi para tokoh partai tersebut disosialisasikan ke masyarakat dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa pasangan ini sepenuhnya memperoleh dukungan dari partai-partai politik pengusung, walaupun pada kenyataannya tidak semua tokoh partai tersebut bisa memenuhi undangan untuk berkampanye.

Selain itu, untuk penggalangan massa, pasangan Otto Ihalauw-Samsuddin Anggiluli juga memanfaatkan tokoh-tokoh adat (etnis) dalam kampanyenya. Pemanfaatan para tokoh ini sekaligus juga membuktikan bahwa pasangan ini memperoleh dukungan dari kelompok-kelompok etnis yang ada. Keberhasilan Otto Ihalauw memanfaatkan tokoh-tokoh adat (etnis) tidak lepas dari sumber daya personal yang dimilikinya, yakni kemampuan pribadi Otto Ihalauw menjalin relasi personal dengan para tokoh tersebut. Sehubungan dengan hal ini seorang informan menyatakan bahwa:

176 Wawancara dengan informan yang enggan disebut jati dirinya pada 15 Juli 2010 di Teminabuan, Sorong Selatan.

“Otto Ihalauw tidak kesulitan dalam hal memanfaatkan tokoh-tokoh adat untuk kepentingan kampanye. Hal ini karena selama ini ada hubungan yang relatif baik antara Otto Ihalauw dengan tokoh-tokoh adat. Dikarenakan hubungan sedemikian baik, tokoh-tokoh adat tidak sepenuhnya menyadari dirinya menjadi juru kampanye”.¹⁷⁷

Optimalisasi kampanye juga dilakukan dengan cara memasang baliho yang bergambar pasangan Otto Ihalauw-Samsuddin Anggiluli didampingi tokoh nasional yang merupakan petinggi partai politik pengusung. Pemasangan baliho tersebut sekaligus sebagai respons terhadap baliho kompetitor yang terlebih dahulu memasang gambar tokoh nasional dari partai pengusungnya. Pemasangan foto tokoh nasional yang mendampingi foto pasangan Otto Ihalauw-Samsuddin Anggiluli dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pasangan ini mendapat dukungan kuat di tingkat nasional.¹⁷⁸

Sosialisasi slogan kampanye ‘membangun bersama rakyat’ dioptimalkan juga melalui media massa cetak. Kolom ‘Membangun Sorong Selatan’ merupakan rubrik yang secara periodik hadir di surat kabar harian Radar Sorong yang berisi aktivitas pemerintahan Otto Ihalauw.¹⁷⁹ Walaupun surat kabar hanya beredar di sekitar ibukota Teminabuan, kolom ‘Membangun Sorong Selatan’ relatif efektif dalam mengkampanyekan Otto Ihalauw sebagai kandidat petahana untuk dipilih kembali dalam kontestasi Pilkada.

Media lain yang digunakan untuk memobilisasi dukungan dilakukan dengan menyebarkan keping-keping VCD yang berisi pemaparan visi-misi pasangan Otto Ihalauw-Samsuddin

177 Wawancara dengan Michael Momot, Ketua Dewan Adat Suku Tehit, pada 19 Juli 2010 di Teminabuan, Sorong Selatan.

178 Baliho pasangan Otto Ihalauw-Samsuddin Anggiluli berdampingan dengan gambar Jusuf Kalla dan para petinggi Partai Golkar bertebaran di antara baliho para kompetitor yang juga menyertakan gambar tokoh nasional dari partai yang mengusungnya, seperti baliho bergambar pasangan Dance Flassy-Mustafa Wugaje yang berdampingan dengan foto Andi Mallarangeng, tokoh Partai Demokrat yang mengusung pasangan ini.

179 Pemanfaatan surat kabar sebagai media kampanye cukup efektif walaupun kehadiran surat kabar di Sorong Selatan terlambat satu hari karena masalah transportasi pengangkutan/pengiriman.

Anggiluli dan gambar-gambar keberhasilan pembangunan Sorong Selatan. Keping-keping VCD diedarkan melalui pondok layanan di kampung-kampung untuk kemudian disaksikan penayangannya secara bersama-sama. Selain keping-keping VCD, melalui pondok layanan diedarkan pula keping-keping CD yang berisi beberapa lagu yang salah satunya lagu 'Bapak Pembangunan'. Lagu ini berisi keberhasilan Otto Ihalauw sebagai Bupati dalam melaksanakan pembangunan di Sorong Selatan.¹⁸⁰ Keping VCD sebagai media kampanye ternyata efektif; hal ini dikarenakan tayangan VCD dapat menggantikan kehadiran Otto Ihalauw yang tidak bisa hadir di semua pondok layanan terkait dengan keterbatasan waktu.

Dalam memobilisasi dukungan, pasangan Otto Ihalauw-Samsuddin Anggiluli juga memanfaatkan keberadaan organisasi Dharma Wanita. Organisasi Dharma Wanita yang diketuai istri bupati di tingkat kabupaten punya jaringan sampai tingkat distrik yang diketuai istri kepala distrik. Oleh karena itu, kegiatan Dharma Wanita dapat dijadikan sebagai bentuk kegiatan kampanye. Sehubungan dengan hal ini, Hengky Gogoba, Kepala Distrik Kokoda, menyatakan bahwa pada saat kunjungan Dharma Wanita Kabupaten di Kokoda, diinformasikan pencalonan kembali Otto Ihalauw dalam Pilkada mendatang. Informasi merupakan imbauan untuk mendukung Otto Ihalauw.¹⁸¹ Pemanfaatan organisasi Dharma Wanita untuk kepentingan kampanye dapat dinyatakan bahwa pasangan Otto Ihalauw-Samsuddin Anggiluli memanfaatkan sumber daya normatif yang berada di ranah negara.

180 Keping-keping VCD dan CD selain dibagikan ke semua pondok layanan, juga dibagikan ke tokoh-tokoh adat/masyarakat. Diharapkan melalui tokoh-tokoh ini visi-misi pasangan Otto Ihalauw-Samsuddin Anggiluli dan keberhasilan pembangunan Kabupaten Sorong Selatan dapat disebarkan ke masyarakat luas.

181 Wawancara dengan Hengky Gogoba, kepala Distrik Kokoda, pada 28 Agustus 2009 di Yogyakarta. Dinyatakannya bahwa disela-sela kegiatan Dharma Wanita di Distrik Kokoda, kunjungan Dharma Wanita tingkat Kabupaten menyatakan dan mempromosikan pencalonan kembali Otto Ihalauw dalam Pilkada mendatang. Kegiatan yang dilakukan Dharma Wanita tersebut masih jauh dari tanggal pelaksanaan Pilkada, namun pemberitahuan bernada kampanye pencalonan Otto Ihalauw mulai terdengar.

Pemanfaatan organisasi Dharma Wanita untuk kepentingan kampanye hanya bisa dilakukan kandidat petahana karena yang bersangkutan memiliki status sebagai pembina organisasi ini. Hal ini sulit atau bahkan tidak mungkin dilakukan oleh pasangan-pasangan calon lain yang bukan petahana.

Ringkasnya, bahasan mobilisasi dukungan dalam tahap kampanye menunjukkan bahwa Otto Ihalauw memanfaatkan mekanisme pertukaran sebagaimana halnya yang ada pada tradisi pertukaran *Kain Timur*. Tema kampanye yang dikemukakan Otto Ihalauw bersentuhan dengan pemenuhan kebutuhan dan kepentingan, seperti keberhasilan pembangunan, persatuan dan kesatuan dalam bermasyarakat, dan kerukunan beragama; tema-tema tersebut oleh masyarakat dimaknai sebagai pemberian. Bagi masyarakat, pemberian itu merupakan utang yang harus dikembalikan. Sementara itu, Otto Ihalauw memaknai pemberian yang dilakukan sebagai bentuk tabungan atau investasi yang pada gilirannya menghasilkan dukungan kepada dirinya melalui mekanisme pengembalian balasan.

4. Mobilisasi Dukungan untuk Mengawal Hari Pemilihan/ Penghitungan Suara

Hari pemilihan dan penghitungan suara dinilai merupakan titik krusial karena merupakan puncak dari serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Pilkada. Keberhasilan atau kegagalan pasangan calon tampak pada kegiatan tersebut; manipulasi atau kecurangan ditengarai banyak terjadi di dalamnya. Oleh karena itu, diperlukan tindakan mengawal kegiatan tersebut untuk menghindari manipulasi dan kecurangan; tindakan tersebut harus dipersiapkan sedemikian rupa sebagai bagian dari cara untuk memenangkan kontestasi Pilkada.

Sehubungan dengan hal di atas, pasangan Otto Ihalauw-Samsuddin Anggiluli menyiapkan sejumlah saksi untuk memantau pelaksanaan pemilihan dan penghitungan suara. Penentuan saksi

dilakukan melalui seleksi yang dilakukan oleh tim sukses. Dalam hal ini Otto Ihalauw menyatakan sebagai berikut:

“Mereka yang dijadikan saksi adalah para pendukung yang loyalitas dan komitmennya tak diragukan lagi; dan untuk mempersiapkan saksi yang dapat diandalkan, tim sukses melakukan seleksi wawancara. Para saksi selain harus memiliki loyalitas dan komitmen tinggi, juga harus merupakan individu-individu yang jujur sekaligus tahan banting menghadapi intimidasi pihak kompetitor.”¹⁸²

Mereka yang terpilih sebagai saksi dibekali surat tugas. Adapun makna surat tugas selain untuk memenuhi persyaratan administrasi Pilkada, juga sebagai pegangan bagi yang bersangkutan untuk memperoleh imbalan dari pasangan Otto Ihalauw-Samsuddin Anggiluli. Hal ini menunjukkan bahwa di kalangan masyarakat Sorong Selatan segala sesuatu tidak berjalan secara sukarela; pengorbanan loyalitas dan komitmen sebagai saksi tidak semata-mata gratis. Hal ini selaras dengan esensi tradisi pertukaran *Kain Timur* yang ditandai aktivitas memberi, menerima, dan melakukan pengembalian balasan. Loyalitas dan komitmen para saksi dipandang sebagai bentuk pemberian yang harus dikembalikan Otto Ihalauw dalam bentuk materi ataupun non-materi sebagaimana telah disepakati dua belah pihak.

Dalam hal mengawal hari pemilihan/penghitungan suara tak bisa dihindari kemungkinan terjadinya politik uang. Untuk mengantisipasi terjadinya politik uang yang disinyalir berlangsung pada hari pemilihan, pendukung pasangan Otto Ihalauw-Samsuddin Anggiluli melakukan kegiatan ronda pada malam menjelang hari pemilihan. Kegiatan ini dilakukan oleh para simpatisan yang dikoordinir tim sukses tingkat kampung dengan memanfaatkan pondok layanan sebagai markas. Di samping kegiatan ronda, diadakan pula acara yang menjadikan warga berkumpul di pondok layanan pada malam menjelang hari pemilihan; cara ini dimaksudkan untuk mengurangi kemungkinan

182 Wawancara dengan Otto Ihalauw pada 21 Juli 2010 di Teminabuan, Sorong Selatan.

warga bertemu dengan pihak-pihak yang melakukan praktik politik uang.¹⁸³

Selain itu, menjelang hari pemilihan ditengarai pula kemungkinan terjadinya pergerakan (perpindahan) penduduk dari Kabupaten Sorong dan Kabupaten Maybrat masuk ke Sorong Selatan. Pergerakan penduduk ini terjadi karena adanya hubungan kekerabatan etnis antara mereka yang masuk ke Sorong Selatan dengan para pasangan calon. Pasangan Otto Ihalauw-Samsuddin Anggiluli mengkhawatirkan berlangsungnya pergerakan penduduk karena pasangan ini yang paling dirugikan. Semua pasangan kandidat lainnya punya hubungan kekerabatan etnis dengan penduduk di Kabupaten Sorong dan Kabupaten Maybrat, sementara itu Otto Ihalauw sebagai kandidat beretnis non-Papua tidak punya hubungan kekerabatan etnis dengan penduduk di dua kabupaten tersebut. Oleh karena itu, pergerakan atau perpindahan penduduk menjelang hari pemilihan ditengarai akan dilakukan simpatisan para kandidat lain. Kedatangan mereka dimaksudkan untuk mendukung pasangan calon tertentu, dan kalau situasi memungkinkan akan ikut terlibat dalam pemberian suara.

Sebelumnya, kekhawatiran bakal terjadi pergerakan (perpindahan) penduduk menjelang hari pemilihan mengemuka pada saat rapat kerja bupati di lingkungan Provinsi Papua Barat pada Maret 2010 di Teminabuan. Melalui arena rapat kerja yang diikuti para bupati tersebut diputuskan untuk mengadakan *sweeping* terhadap penduduk luar yang masuk ke Sorong Selatan pada hari pemilihan. Agar tidak menyolok kegiatan *sweeping* ini dilakukan bersama-sama dengan *sweeping* kartu tanda penduduk dan minuman keras.¹⁸⁴ Kegiatan *sweeping* tersebut merupakan usulan dari Otto Ihalauw selaku Bupati Sorong Selatan di mana Pilkada 2010 akan diselenggarakan. Dengan argumentasi agar Pilkada berjalan lancar, rapat kerja para bupati memutuskan

183 Wawancara dengan Yustus Safflembolo pada 23 Juli 2010 di Teminabuan, Sorong Selatan.

184 Wawancara dengan Otto Ihalauw pada 21 Juli 2010 di Teminabuan, Sorong Selatan.

kebijakan *sweeping* tersebut. Adanya kebijakan *sweeping* dapat dinyatakan sebagai kecerdikan Otto Ihalauw melihat peluang untuk diputuskan suatu kebijakan yang berlaku umum, namun pada intinya untuk kepentingannya dalam Pilkada. Hal ini menunjukkan kepiawaian Otto Ihalauw memanfaatkan sumber daya normatif berupa posisi jabatannya sebagai Bupati dan sumber daya keahlian yang dimilikinya.

Selanjutnya, penetapan pasangan calon sebagai pemenang oleh KPU belum menjamin yang bersangkutan dilantik menjadi Bupati/Wakil Bupati. Format Pilkada membuka peluang terhadap keberatan atas keputusan pemenang yang dikeluarkan KPU. Pasangan calon yang berkeberatan atas penetapan pemenang oleh KPU dapat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Sehubungan adanya mekanisme tersebut, pasangan Otto Ihalauw-Samsuddin Anggiluli mempersiapkan strategi dengan membentuk tim advokasi yang bertugas mendampingi dan menjadi penasihat pasangan Otto Ihalauw-Samsuddin Anggiluli di bidang hukum. Dalam hal ini Otto Ihalauw menyatakan:

“Pembentukan tim advokasi merupakan suatu keharusan sebagai langkah antisipatif. Hal ini berkaca pada pengalaman Pilkada-Pilkada di tempat lain yang selalu memunculkan gugatan atas proses dan hasil Pilkada. Langkah antisipasi ini bisa dikatakan sebagai bagian strategi memenangkan Pilkada.¹⁸⁵

Ringkasnya, pengawalan hari pemilihan dan penghitungan suara dilakukan dengan cara memobilisasi sejumlah orang untuk bertindak sebagai saksi. Berbekal sumber daya yang dimiliki, Otto Ihalauw memobilisasi sejumlah orang sebagai saksi dengan memanfaatkan mekanisme pertukaran sebagaimana yang ada pada tradisi *Kain Timur*. Di satu sisi, kesediaan dan peran menjadi saksi dimaknai sejumlah orang sebagai bentuk pemberian kepada Otto Ihalauw. Di sisi lain, Otto Ihalauw memaknai kinerja para saksi sebagai utang, dan oleh karenanya berkewajiban melakukan

185 Wawancara dengan Otto Ihalauw pada 21 Juli 2010 di Teminabuan, Sorong Selatan.

pengembalian balasan atas kesediaan sejumlah orang mengawal dan mengawasi jalannya pemilihan dan penghitungan suara.

Rangkuman bahasan mobilisasi dukungan dalam aktivitas pemerintahan dan kemasyarakatan, dan dalam aktivitas elektoral sebagaimana dikemukakan di atas tersaji dalam uraian singkat berikut. Esensi dari tradisi pertukaran *Kain Timur* dapat dinyatakan tidak berbeda jauh dengan pemberian hadiah atau sumbangan sebagaimana disebut oleh Mauss (1990) dan Hyde (1983) sebagai *gift*. Mauss dan Hyde menyatakan bahwa *gift* melukiskan mekanisme memberi, menerima, dan kewajiban mengembalikan pemberian. Tradisi pertukaran *Kain Timur* selain menekankan adanya kewajiban pihak penerima melakukan pengembalian balasan, juga menekankan bahwa dalam mekanisme pertukaran terkandung elemen utang-piutang antara pihak pemberi dan pihak penerima. Kewajiban melakukan pengembalian balasan merupakan kewajiban pihak penerima untuk membayar utang kepada pihak pemberi; dan selanjutnya, sebagai pihak yang menerima pengembalian balasan, pihak pemberi pertama juga punya kewajiban melakukan pengembalian balasan. Demikian mekanisme pertukaran yang terkandung dalam tradisi ini berlangsung terus tanpa terputus.

Selain itu, untuk membedakan dengan konsep *gift* sebagaimana dikemukakan Mauss dan Hyde, tradisi pertukaran *Kain Timur* mengandung unsur menabung dan investasi. Tradisi ini mengisyaratkan bahwa mekanisme pertukaran yang mewajibkan pihak penerima melakukan pengembalian balasan dalam jumlah yang lebih besar (bernilai) menunjukkan adanya unsur menabung (investasi) yang dilakukan pihak pemberi. Pihak pemberi akan menerima hasil tabungan (investasi) tatkala yang bersangkutan menerima pengembalian balasan.

Sehubungan dengan hal di atas, prinsip yang terkandung dalam tradisi pertukaran *Kain Timur* membentuk hubungan antara pihak pemberi dan pihak penerima yang bersifat timbal balik atau *reciprocal*. Hubungan timbal balik ini selain bisa

dijelaskan melalui pola hubungan yang bercorak ketergantungan antara pihak pemberi dan pihak penerima, juga bisa dijelaskan melalui kekuatan ‘mengunci’ yang terkandung dalam tradisi itu sendiri. Artinya, tradisi ini punya kekuatan memaksa yang membebankan kewajiban kepada pihak penerima untuk melakukan pengembalian balasan. Kekuatan ‘mengunci’ ini hadir karena dalam mekanisme pertukaran dari tradisi *Kain Timur* menunjukkan adanya kewajiban mengembalikan pemberian yang dimaknai sebagai utang, dan mekanisme tersebut berlangsung terus tanpa terputus.

Dalam konteks politik, pemberian dalam bentuk apapun merupakan modal yang berupa tabungan atau investasi bagi pihak pemberi untuk mengikat pihak penerima guna mendukung tujuan politis pihak pemberi. Hal ini bisa dimaknai bahwa semakin banyak pemberian dilakukan, akan semakin banyak dukungan yang mengalir kepada pihak pemberi. Namun, pihak pemberi yang menerima pengembalian balasan juga dilekati kewajiban untuk mengembalikan pengembalian balasan tersebut.

Hubungan timbal balik dalam tradisi pertukaran *Kain Timur* mengisyaratkan bahwa pemberi bisa diposisikan sebagai pihak yang berkedudukan dan berperan sebagai *patron*, dan penerima diposisikan sebagai pihak yang berkedudukan dan berperan sebagai *client*. Dalam kedudukan dan peran seperti ini, pihak penerima tak bisa menghindar untuk tidak tunduk kepada pihak pemberi. Selain itu, dalam hubungan tersebut dapat dinyatakan pula bahwa pihak penerima menjadi terikat atau terkunci dengan pemberian yang telah diterimanya; dan mereka tidak bisa mengelak untuk tidak tunduk pada keinginan pihak pemberi. Namun, sejatinya yang terikat atau terkunci bukan hanya salah satu pihak saja; mekanisme pertukaran menunjukkan bahwa pihak pemberi dan pihak penerima ternyata saling mengunci satu terhadap yang lain. Hal ini karena mekanisme pertukaran antara pihak pemberi dengan penerima berlangsung secara terus menerus.

Melalui mekanisme memberi, menerima dan melakukan pengembalian balasan sebagaimana termanifestasikan dalam proses pertukaran *Kain Timur*, seorang aktor (kandidat) bisa memobilisasi dukungan untuk meraih kekuasaan dengan syarat yang bersangkutan punya kemampuan memanfaatkan dan memanipulasi sumber daya yang ada. Mobilisasi dukungan dilakukan dalam aktivitas pemerintahan dan kemasyarakatan yang meliputi mobilisasi dukungan di ranah birokrasi, ranah politik, dan ranah kemasyarakatan. Demikian pula mobilisasi dukungan dilakukan dalam aktivitas elektoral yang meliputi mobilisasi dukungan pada tahap pencalonan, kampanye, pemilihan, dan penghitungan/penetapan pemenang. Dalam menggalang dukungan, kandidat melakukannya dengan memanfaatkan tradisi pertukaran *Kain Timur* sebagai instrumen mobilisasi.

Dengan mengacu pada pendapat Helmke and Levitsky (2004), Lauth (2000), ataupun North (1990), dapat dinyatakan bahwa tradisi pertukaran *Kain Timur* dapat dikategorikan sebagai institusi informal. Sebagai institusi informal yang mengatur aktivitas masyarakat, tradisi pertukaran *Kain Timur* dapat dimanfaatkan untuk menggalang dukungan massa; dan untuk keperluan itu dibutuhkan kemampuan aktor (kandidat) untuk menyiasati tradisi guna menghadirkan adanya mobilisasi dukungan.

VII

Tradisi, Mobilisasi, dan Kekuasaan : Sebuah Refleksi

BAB INI berisi refleksi tentang konsep tradisi¹⁸⁶ sebagai instrumen mobilisasi dukungan untuk meraih kekuasaan. Refleksi yang dikemukakan didasarkan pada temuan kajian yang dipaparkan pada bab-bab sebelumnya. Pada bab ini dikemukakan bahwa mobilisasi dukungan untuk meraih kekuasaan tidak harus memanfaatkan partai politik. Mobilisasi dukungan bisa dihadirkan melalui tradisi pertukaran sebagai instrumen meraih kekuasaan.

Selain itu, paparan pada bab ini berisi catatan penutup yang merupakan benang merah bahasan dan dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan bagaimana memanfaatkan tradisi pertukaran *Kain Timur* sebagai instrumen mobilisasi dukungan untuk meraih kekuasaan. Pada catatan penutup dikemukakan pula implikasi dari hasil kajian ini. Bab ini diakhiri dengan catatan yang berisi agenda ke depan untuk menindaklanjuti kajian ini.

Tradisi dan Mobilisasi Dukungan untuk Meraih Kekuasaan

Salah satu sumber kekuasaan bisa berwujud kedudukan atau posisi jabatan politik. Aktor yang menduduki posisi jabatan secara

186 Tradisi merupakan adat istiadat, ritus-ritus, ajaran-ajaran sosial, pandangan-pandangan, nilai-nilai, aturan-aturan perilaku, dan sebagainya. Tradisi merupakan unsur warisan sosio kultural yang dilestarikan masyarakat dalam kurun waktu yang panjang (Bagus, 2005: 115-116). Tradisi juga bisa dimaknai sebagai adat yang punya akar di masa lalu dan mengandung aura sakral. Tradisi adalah cara hidup yang merupakan bagian dari kultur manusia (Outhwaite, ed., 2008: 895)

otomatis memiliki kekuasaan yang ada pada jabatan tersebut. Di masyarakat yang kehidupannya bercorak demokratis, kekuasaan bisa diperoleh melalui upaya pencapaian (*achievement*) dengan mengikuti kontestasi pemilihan. Upaya pencapaian meraih kekuasaan tersebut mensyaratkan hadirnya mobilisasi dukungan agar aktor dapat memenangkan kontestasi pemilihan.

Kajian yang selama ini dilakukan menunjukkan bahwa mobilisasi dukungan dilakukan oleh partai politik (Budiardjo, 1981; Liddle, 1992; Fitriyah, 2005, Asfar, 2005). Dalam fungsinya sebagai institusi yang berupaya meraih kekuasaan dengan menempatkan anggotanya dalam jabatan politik, partai politik punya fungsi untuk melakukan mobilisasi dukungan. Secara teoritik, bahkan dapat dinyatakan bahwa partai politik tidak hanya sekadar berfungsi menghadirkan mobilisasi dukungan, tetapi partai sekaligus dapat pula dinyatakan sebagai instrumen atau alat untuk berlangsungnya mobilisasi dukungan.

Namun, fungsi partai politik melakukan mobilisasi dukungan tidak diketemukan dalam kajian yang dilakukan di Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat. Dalam mekanisme Pilkada tahun 2010, berlangsungnya mobilisasi dukungan yang menghantarkan kemenangan aktor (kandidat) bukan karena partai politik. Dalam Pilkada itu, partai politik tak lebih menjalankan peran sebagai pengusung kandidat dalam Pilkada.

Tidak bekerjanya partai politik dalam melakukan mobilisasi dukungan karena keberadaan partai tumpang tindih, bahkan dapat dinyatakan nyaris identik, dengan keberadaan kelompok etnis yang ada di masyarakat. Keberadaan partai politik lebih merepresentasikan keberadaan kelompok etnis; dan oleh karenanya aktivitas partai cenderung lebih mencerminkan aktivitas kelompok etnis. Konsekuensinya, fungsi yang semestinya dilakukan partai politik diambil alih oleh kelompok etnis.

Sementara itu, kelompok-kelompok etnis dalam aktivitas kehidupannya cenderung lebih banyak dituntun dan diarahkan

oleh tradisi yang ada. Tradisi dijadikan rujukan yang memandu masyarakat beraktivitas, dan oleh karena itu tradisi bisa dijadikan instrumen bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan pendapat Helmke dan Levitsky (2004), Lauth (2000), ataupun North (1990) yang menyatakan bahwa interaksi antar warga dipandu seperangkat aturan yang disebut sebagai institusi; dan tradisi merupakan salah satu institusi informal (*informal institution*) yang memandu interaksi antar warga dalam kehidupan sehari-hari. Dengan dijadikan tradisi sebagai aturan yang memandu interaksi antar warga, tradisi bisa dilekati karakter '*instrumentalis*'.

Dikarenakan partai politik tumpang tindih dan nyaris sama dengan kelompok etnis, tradisi sebagai instrumen bisa dimanfaatkan untuk melakukan peran yang seharusnya dijalankan oleh partai politik. Peran partai politik dalam melakukan mobilisasi bisa diambil alih dengan memanfaatkan tradisi sebagai instrumen untuk penggalangan massa. Namun, tidak semua tradisi yang ada di masyarakat bisa dimanfaatkan sebagai instrumen mobilisasi. Tradisi yang bisa dimanfaatkan untuk mobilisasi adalah tradisi pertukaran, yakni tradisi yang menghadirkan dua pihak yang saling berhubungan secara timbal balik (*reciprocal*) untuk mempertukarkan sesuatu. Tradisi hubungan pertukaran ini mirip dengan konsep *gift* (Mauss, 1990; Hyde, 1983) yang melukiskan adanya aktivitas memberi, menerima, dan kewajiban mengembalikan pemberian yang diterima. Namun, tradisi hubungan pertukaran ini kurang tepat untuk dinyatakan sebagai tradisi pemberian hadiah atau *gift* karena dalam tradisi ini terkandung unsur utang-piutang. Selain bersifat timbal-balik (*reciprocal*) dan mengandung unsur utang-piutang, tradisi pertukaran yang dimanfaatkan sebagai instrumen mobilisasi di dalamnya mengandung unsur menabung atau investasi.

Dalam tradisi pertukaran yang dijadikan instrumen mobilisasi dukungan, pihak yang pertama melakukan pemberian memaknai tindakannya bukan sekadar sebagai pemberian hadiah, tetapi

sebagai bentuk tabungan atau investasi bagi dirinya. Dinyatakan sebagai tabungan atau investasi karena melalui pemberian yang dilakukan, dirinya akan memperoleh pengembalian balasan dalam jumlah dan nilai yang lebih besar. Sementara itu, pihak yang menerima pemberian memaknai pemberian yang diterima sebagai utang yang wajib ditindaklanjuti dengan pengembalian balasan sebagai bentuk pelunasan utang. Pihak pemberi pertama memaknai pengembalian balasan yang diterima juga sebagai utang yang harus disusul dengan melakukan pengembalian balasan. Demikian mekanisme hubungan pertukaran berlangsung terus-menerus antara pihak pemberi dengan pihak penerima.

Dalam mekanisme tradisi pertukaran tersebut terkandung beberapa aspek yang terkait satu dengan lainnya. Selain aspek ekonomi, dalam mekanisme tradisi tersebut terkandung pula aspek sosio-kultural dan aspek politik. Pemberian non-materi yang di dalamnya terkandung aspek sosio-kultural dan aspek politik, seperti pemberian berupa penghargaan atau pengangkatan dalam posisi jabatan tertentu. Dalam mekanisme hubungan pertukaran ini, pengembalian balasan yang dilakukan pihak penerima tidak selalu sama dengan pemberian yang diterima. Pemberian dalam bentuk penempatan atau pengangkatan dalam posisi jabatan struktural birokrasi, dikembalikan dalam wujud pengerahan massa untuk mendukung pihak pemberi.

Dikarenakan dalam mekanisme tradisi hubungan pertukaran tersebut terlekat beragam aspek, maka bekerjanya aspek atau elemen tersebut menjadikan tradisi pertukaran mengandung kapasitas politik. Oleh karenanya, tradisi pertukaran bisa dimanfaatkan sebagai instrumen mobilisasi dukungan untuk meraih kekuasaan.

Pemanfaatan tradisi pertukaran sebagai instrumen mobilisasi dukungan mensyaratkan tersedianya sumber daya; dan sumber daya tersebut dapat dinyatakan sebagai modal bagi aktor (kandidat). Perihal sumber daya, Andrain (1992) menyatakan bahwa terdapat

5 jenis sumber daya yang meliputi sumber daya fisik, ekonomi, normatif, personal, dan keahlian; Maguire (1995), sebagaimana dikutip oleh Muhtadi (2012), membedakan sumber daya *tangible* dan *intangible*; Budiardjo (1984) menyebut sumber daya sebagai sumber kekuasaan yang terdiri dari kedudukan, kekayaan, dan kepercayaan. Sementara itu, Bourdieu (1986) memilah sumber daya menjadi modal sosial, modal kultural, modal ekonomi, dan modal simbolik.

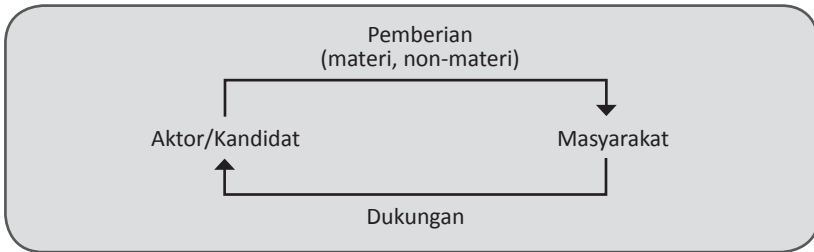
Berbagai pendapat tentang jenis atau ragam sumber daya di atas punya persamaan fungsi, yakni: sebagai modal yang didayagunakan aktor (kandidat) dalam memanfaatkan tradisi sebagai instrumen mobilisasi. Studi atau kajian ini mengacu pendapat Andrain dalam mengulas sumber daya yang didayagunakan aktor (kandidat) untuk memanfaatkan tradisi sebagai instrumen mobilisasi dukungan. Kemampuan aktor (kandidat) dalam mendayagunakan sumber daya menjadi penentu mobilisasi dukungan.

Bekerjanya tradisi pertukaran sebagai instrumen mobilisasi dukungan ada di tengah masyarakat yang terlekat sikap 'kami' dan 'mereka'. Sebagaimana dinyatakan Eriksen (1994), sikap 'kami' mengacu pada sikap menjadi bagian dari kelompok (*in group*), dan sikap 'mereka' mengacu pada sikap tidak menjadi bagian dan di luar kelompok (*out group*). Sikap yang melekat di masyarakat tersebut ternyata terkikis oleh pemanfaatan tradisi pertukaran sebagai instrumen mobilisasi dukungan. Sikap 'kami' dan 'mereka' menjadi tidak signifikan tatkala aktor (kandidat) mampu menyiasati tradisi pertukaran untuk melakukan mobilisasi dukungan. Demikian pula, latar belakang etnisitas aktor (kandidat) menjadi tidak signifikan ketika tradisi pertukaran dimanfaatkan untuk melakukan mobilisasi dukungan.

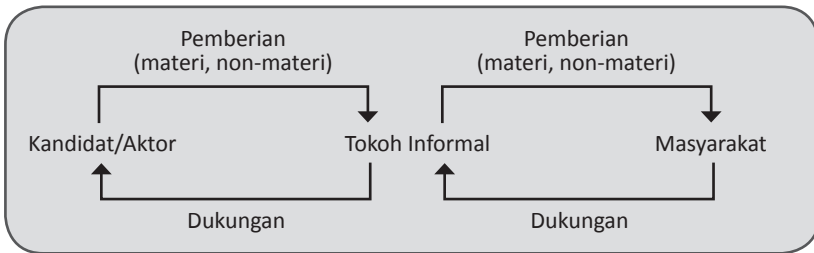
Tradisi pertukaran sebagai instrumen mobilisasi dukungan menghadirkan mekanisme hubungan pertukaran antara aktor (kandidat) sebagai pihak pemberi dengan masyarakat sebagai pihak penerima. Mekanisme hubungan tersebut bisa bersifat

langsung dan tidak langsung. Gambar berikut melukiskan mekanisme hubungan pertukaran yang menghadirkan mobilisasi dukungan.

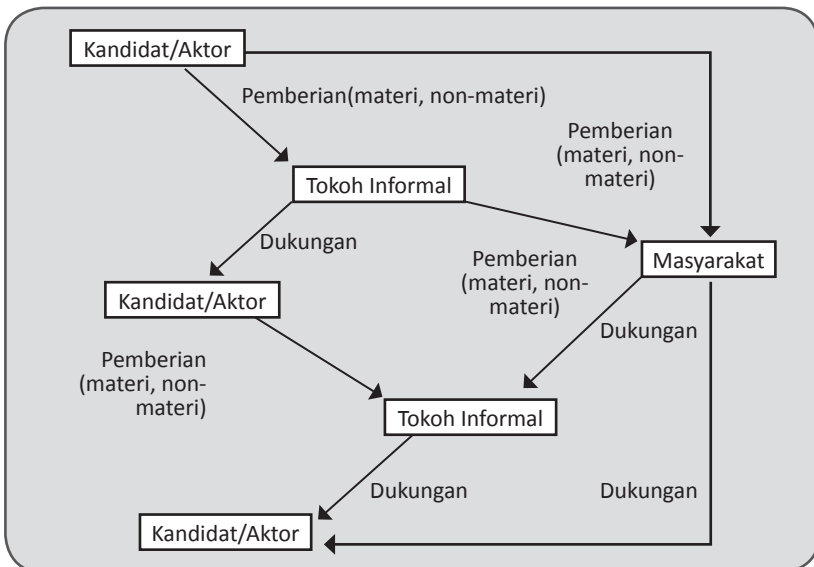
Gambar 7-1. Hubungan Langsung



Gambar 7-2. Hubungan Tidak Langsung



Gambar 7-3. Kombinasi hubungan langsung dan tidak langsung



Mekanisme hubungan pertukaran di atas menunjukkan pola hubungan *patronase* sebagaimana dikemukakan Abercrombie dan Hill (1976), Eisenstadt dan Roniger (1980), dan Pelras (2009). Dalam mekanisme hubungan pertukaran ini, pihak pemberi berposisi sebagai *patron* dan pihak penerima berposisi sebagai *client*. Hubungan pertukaran di atas menunjukkan mekanisme hubungan yang bersifat langsung dan tidak langsung. Pola hubungan langsung menunjukkan aktor (kandidat) yang berupaya meraih kekuasaan berposisi sebagai pihak pemberi, dan masyarakat berposisi sebagai pihak penerima. Aktor (kandidat) memberi sesuatu yang berupa materi ataupun non-materi kepada masyarakat. Masyarakat mengembalikan pemberian tersebut dalam bentuk dukungan kepada aktor (kandidat). Selanjutnya, aktor (kandidat) yang menerima pengembalian, dalam rangka merawat dukungan dari masyarakat, akan memberi lagi dalam jumlah dan nilai yang lebih besar dari pemberian pertama, dan masyarakat akan mengembalikan dengan sikap dan tindakan yang lebih mendukung kandidat. Demikian mekanisme hubungan pertukaran berlangsung terus menerus tanpa terputus.

Pola hubungan tidak langsung terselenggara tatkala muncul figur yang menjalankan peran perantara dalam hubungan transaksi pertukaran. Figur perantara sering dimainkan oleh tokoh informal (tokoh adat atau etnis) yang ada di masyarakat. Pertama kali, hubungan berlangsung antara aktor (kandidat) yang berposisi sebagai pihak pemberi dengan figur perantara yang berposisi sebagai pihak penerima. Aktor (kandidat) dalam posisinya sebagai *patron* memberi sesuatu, baik berupa materi ataupun non-materi, kepada figur perantara yang berposisi sebagai *client*. Selanjutnya figur perantara, yang dimainkan tokoh informal, mengubah posisinya dan menjadikan dirinya sebagai *patron* dan menjalin hubungan dengan masyarakat atas dasar mekanisme memberi, menerima, dan mengembalikan pemberian. Masyarakat, dalam posisinya sebagai *client*, mengembalikan pemberian yang diterima dengan menunjukkan ketaatan sebagai bentuk dukungan kepada

tokoh informal. Pengembalian dalam bentuk dukungan dari masyarakat tersebut, oleh tokoh informal (tokoh adat atau etnis) diteruskan kepada kandidat sebagai bentuk pengembalian dari sesuatu yang pernah diterimanya. Pengembalian dilakukan dalam jumlah dan nilai yang lebih besar. Pengembalian tersebut dikembalikan lagi sebagai balas-membalas pemberian.

Pemberian yang dilakukan dalam konteks tradisi pertukaran dapat dinyatakan sebagai tabungan atau investasi bagi yang melakukannya. Pemberian yang dilakukan aktor (kandidat) melalui tokoh informal atau langsung kepada masyarakat dapat dinyatakan sebagai bentuk tabungan atau investasi. Tabungan atau investasi ini akan membuahkan hasil berupa pengembalian balasan dari tokoh informal atau dari masyarakat dalam bentuk dukungan. Secara politis, pemberian dalam bentuk apapun merupakan tabungan atau investasi bagi pihak pemberi untuk mengikat pihak penerima guna mendukung tujuan politis pihak pemberi. Hal ini bisa dimaknai bahwa semakin banyak pemberian dilakukan, semakin banyak dukungan yang mengalir kepada pihak pemberi. Sebaliknya, semakin sedikit pemberian dilakukan, semakin sedikit pula dukungan yang mengalir kepada pihak pemberi.

Namun, tradisi pertukaran yang menghadirkan mekanisme memberi-menerima yang bersifat timbal balik (*reciprocal*) dapat dinyatakan sebagai 'racun', baik bagi pihak pemberi maupun pihak penerima. Hal ini karena kedua belah terbebani kewajiban untuk melakukan pengembalian balasan sepanjang yang bersangkutan masih menerima pemberian. Selain itu, tradisi pertukaran ini mengisyaratkan pula bahwa pengembalian balasan yang dilakukan harus disertai 'bunga' sebagai tambahannya. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa tradisi pertukaran ini menjerat kedua belah pihak dalam pola hubungan yang dilekati karakter 'riba'.

Tradisi pertukaran sebagai instrumen mobilisasi untuk meraih kekuasaan lebih tepat diterapkan dalam kontestasi pemilihan yang berprinsip *the winner takes all*, seperti Pilkada yang memilih

pimpinan ekektif (Bupati, Walikota, atau Gubernur). Hal ini karena prinsip *the winner takes all* merupakan prinsip pemilihan di mana aktor (kandidat) yang memperoleh atau mengumpulkan suara terbanyak menjadi pemenang; artinya, kontestasi pemilihan hanya menghasilkan satu pemenang saja.

Sehubungan dengan hal itu, tradisi pertukaran sebagai instrumen mobilisasi diragukan tingkat efektivitasnya untuk menggalang dukungan dalam kontestasi pemilihan yang menghasilkan pemenang lebih dari satu, seperti halnya pemilihan anggota legislatif. Dalam kontestasi pemilihan yang tidak berprinsip *the winner takes all* dimungkinkan mobilisasi dukungan bisa berlangsung efektif melalui pemanfaatan isu kesetiaan kelompok (primordial). Penjelasaannya, dalam pemilihan berprinsip bukan *the winner takes all*, aktor (kandidat) dimungkinkan memanfaatkan isu kesetiaan primordial dalam menggalang dukungan karena yang bersangkutan hanya membutuhkan suara pemilih dari wilayah pemilihan di mana mayoritas anggota kelompok tertentu bermukim. Prinsip pemilihan ini tidak mengharuskan aktor (kandidat) untuk meraih suara pemilih di semua wilayah pemilihan, aktor (kandidat) hanya membutuhkan suara pemilih dari wilayah pemilihan di mana yang bersangkutan dicalonkan.

Tradisi pertukaran sebagai institusi informal (*informal institution*) dapat dijadikan instrumen untuk menghadirkan mobilisasi dukungan. Hal ini karena dalam tradisi pertukaran tersebut mengisyaratkan adanya mekanisme hubungan yang bersifat timbal-balik (*reciprocal*) serta mengisyaratkan adanya mekanisme menabung atau investasi. Dalam mekanisme tradisi pertukaran tersebut terkadang aspek ekonomi, aspek sosio-kultural dan aspek politik. Dikarenakan dalam mekanisme pertukaran tersebut terlekat beragam aspek, maka bekerjanya beberapa aspek tersebut menjadikan tradisi pertukaran mengandung kapasitas politik. Oleh karenanya, tradisi pertukaran, seperti halnya tradisi pertukaran *Kain Timur*, bisa dimanfaatkan sebagai instrumen

mobilisasi dukungan untuk meraih kekuasaan. Pemanfaatan tradisi pertukaran sebagai instrumen mobilisasi mensyaratkan ketersediaan sumber daya; dan sumber daya itu didayagunakan untuk menyiasati tradisi pertukaran guna menghadirkan mobilisasi. Kemampuan aktor (kandidat) mendayagunakan sumber daya untuk menyiasati tradisi pertukaran menjadi penentu keberhasilan mobilisasi dukungan.

Kemampuan aktor (kandidat) menyiasati tradisi pertukaran sebagai institusi informal sejatinya bisa dirujuk pada teori strukturasi sebagaimana dikemukakan oleh Giddens (1995)¹⁸⁷, di mana hubungan antara struktur dengan agensi (pelaku) bersifat saling memengaruhi. Tradisi pertukaran *Kain Timur* dapat dinyatakan sebagai struktur yang terbentuk dari dan sekaligus membentuk perulangan praktik sosial yang tidak hanya bersifat mengekang (*constraining*), tetapi juga bersifat memberdayakan (*enabling*) agensi atau pelaku. Namun, dalam hubungan tersebut, aktor (kandidat) merupakan agensi atau pelaku yang tidak pasif; aktor (kandidat) dapat memengaruhi tradisi pertukaran *Kain Timur* sebagai struktur. Dalam konteks kajian ini, berbekal sumber daya yang dimiliki, aktor (kandidat) mampu menyiasati tradisi pertukaran *Kain Timur* untuk menghadirkan mobilisasi dukungan.

Catatan Penutup

Catatan penutup dikemukakan untuk menjelaskan secara ringkas bagaimana pemanfaatan tradisi sebagai instrumen untuk mobilisasi dukungan yang dilakukan seorang kandidat non-Papua untuk meraih kekuasaan, menjadi Bupati Sorong Selatan, dalam pemilihan kepala daerah langsung tahun 2010. Catatan penutup juga mengemukakan implikasi kajian yang dilakukan terhadap studi mobilisasi dukungan.

187 Kajian tentang teori strukturasi dapat pula ditemukan dalam tulisan: (1) B. Herry-Priyono 'Anthony Giddens, Suatu Pengantar'. Gramedia, Jakarta, 2002; dan (2) George Ritzer dan Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern, terjemahan, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 505-546.

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, temuan studi ini menunjukkan bahwa mobilisasi dukungan ditentukan oleh kemampuan kandidat memanfaatkan tradisi pertukaran *Kain Timur*. Pemanfaatan tradisi pertukaran untuk menghadirkan mobilisasi dukungan dimungkinkan karena partai politik tidak bekerja secara optimal dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Hal ini dikarenakan keberadaan partai politik tumpang tindih dengan keberadaan kelompok etnis; dan pada gilirannya kelompok etnis mengambil alih fungsi partai politik dalam hal melakukan mobilisasi massa.

Kemampuan kandidat dalam memanfaatkan tradisi tersebut ditentukan oleh sumber daya yang dimilikinya. Semakin beragam dan banyak sumber daya yang tersedia, semakin besar potensi kemampuan kandidat untuk memanfaatkan tradisi sebagai instrumen mobilisasi dukungan. Dalam Pilkada Sorong Selatan, Otto Ihalauw yang beretnis non-Papua dan berstatus kandidat petahana memiliki sumber daya normatif, personal, dan keahlian yang berasal dan ada di ranah negara dan ranah masyarakat.

Otto Ihalauw lebih sering memanfaatkan sumber daya normatif untuk melakukan mobilisasi. Hal ini karena Otto Ihalauw berstatus sebagai kandidat petahana atau kandidat yang sedang memangku jabatan Bupati yang sedang diperebutkan. Dengan kewenangannya sebagai Bupati dan ditopang sumber daya personal dan keahlian yang dimiliki, Otto Ihalauw menerapkan pertimbangan keterwakilan etnisitas untuk menghadirkan mobilisasi dukungan di ranah birokrasi. Dalam hal mobilisasi dukungan di ranah politik, Otto Ihalauw memanfaatkan sumber daya normatif, personal dan keahlian yang dimilikinya secara simultan. Upaya membangun koalisi partai-partai politik, membangun relasi harmonis dengan DPRD maupun mendukung pencalonan sejumlah orang dalam Pemilihan Legislatif didasarkan pada pertimbangan hubungan saling menguntungkan. Sementara itu, dalam posisinya sebagai kandidat petahana, Otto Ihalauw berbekal kewenangannya sebagai Bupati memanfaatkan

kebijakan-kebijakan pemerintahan dan pembangunan untuk menghadirkan mobilisasi dukungan di ranah kemasyarakatan. Dengan kebijakan-kebijakan itu, Otto Ihalauw berupaya memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang pada gilirannya bersedia memberi dukungan dalam Pilkada.

Mobilisasi dukungan di tiga ranah tersebut hadir tidak lepas dari pengaruh tradisi pertukaran *Kain Timur*. Di ranah-ranah tersebut, mereka yang memperoleh pemberian baik berupa materi maupun non-materi punya kewajiban untuk melakukan pengembalian sebagai balasan dalam bentuk dukungan kepada Otto Ihalauw dalam Pilkada 2010. Mereka melakukan pengembalian balasan karena memaknai pemberian yang diterima sebagai utang yang harus dilunasi. Sementara itu, tindakan Otto Ihalauw melakukan pemberian dapat dimaknai sebagai bentuk tabungan atau investasi yang hasilnya dipetik pada Pilkada 2010, yakni berupa dukungan kepada dirinya.

Mekanisme pertukaran yang didasari esensi tradisi pertukaran *Kain Timur* juga mewarnai berlangsungnya mobilisasi dukungan dalam tahap pencalonan, tahap kampanye, dan tahap penghitungan suara. Mereka yang bersedia terlibat dalam tahap-tahap tersebut memaknainya sebagai bentuk pemberian kepada Otto Ihalauw; dan pada gilirannya Otto Ihalauw berkewajiban untuk mengembalikan sebagai balasan dalam bentuk materi ataupun non-materi. Kesediaan terlibat dalam tahap-tahap Pilkada dapat dimaknai sebagai bentuk dukungan kepada Otto Ihalauw, dan kesediaan ini dilakukan karena mereka berpengharapan memperoleh pengembalian balasan dari Otto Ihalauw bila yang bersangkutan memenangkan Pilkada. Hal tersebut bisa diartikan bahwa mereka yang bersedia terlibat dalam tahap-tahap Pilkada memaknai sebagai bentuk tabungan atau investasi yang hasilnya akan dipetik kelak apabila Otto Ihalauw menjadi pemenang dalam kontestasi Pilkada. Sementara itu, dari sisi Otto Ihalauw, kesediaan dari mereka dalam tahap-tahap Pilkada dimaknai

sebagai utang yang wajib ditindaklanjuti dengan pengembalian balasan.

Dalam rangka mobilisasi dukungan, pemanfaatan tradisi pertukaran *Kain Timur* menampilkan hubungan langsung sekaligus tidak langsung antara Otto Ihalauw dengan masyarakat. Hubungan langsung ditandai adanya pemberian, baik berupa materi maupun non-materi, dari Otto Ihalauw kepada masyarakat. Dalam posisinya sebagai pihak penerima, selaras dengan esensi tradisi pertukaran *Kain Timur*, masyarakat berkewajiban melakukan pengembalian balasan dalam bentuk memberi dukungan.

Hubungan tidak langsung terselenggara tatkala muncul figur yang menjalankan peran perantara dalam hubungan antara Otto Ihalauw dengan masyarakat; dan figur perantara sering dimainkan oleh tokoh informal (tokoh adat atau etnis) yang ada di masyarakat. Pertama kali, hubungan berlangsung antara Otto Ihalauw dengan figur perantara. Dalam posisinya sebagai kandidat, Otto Ihalauw memberi sesuatu, baik berupa materi ataupun non-materi, kepada tokoh informal (adat atau etnis) yang memainkan peran sebagai figur perantara. Selanjutnya, tokoh informal dalam posisinya sebagai *patron* melakukan pemberian kepada masyarakat. Masyarakat, dalam posisinya sebagai *client*, mengembalikan pemberian yang diterima dengan menunjukkan ketaatan sebagai bentuk dukungan kepada tokoh informal. Pengembalian dalam bentuk dukungan dari masyarakat tersebut, oleh tokoh informal (tokoh adat atau etnis) diteruskan kepada Otto Ihalauw sebagai bentuk pengembalian dari sesuatu yang pernah diterimanya.

Studi ini juga menunjukkan bahwa latar belakang etnisitas Otto Ihalauw yang non-Papua tidak signifikan dalam konteks menghadirkan mobilisasi dukungan bagi dirinya. Dalam hal ini, kemampuan Otto Ihalauw mendayagunakan sumber daya untuk menyasiasi tradisi pertukaran *Kain Timur* yang menentukan keberhasilan mobilisasi dukungan.

Berdasarkan pada hasil kajian di atas, studi ini menarik kesimpulan bahwa tradisi yang bisa dimanfaatkan untuk menghadirkan mobilisasi dukungan adalah tradisi pertukaran. Tradisi pertukaran, sebagaimana halnya tradisi pertukaran *Kain Timur*, menghadirkan pola hubungan timbal balik (*reciprocal*) bercorak patronase antara pihak pemberi dengan pihak penerima. Pola hubungan patronase menjadi penjelas berlangsungnya mobilisasi dukungan. Dalam posisinya sebagai *patron*, pihak pemberi menjamin kelangsungan hidup pihak penerima dengan pemberian yang dilakukan. Sementara itu, dalam posisinya sebagai *client*, pihak penerima menunjukkan loyalitas atas pemberian yang diterima. Mobilisasi dukungan mengalir sebagai bentuk loyalitas *client* terhadap *patron*.

Mobilisasi dukungan menjadi besar karena kekuatan yang terkandung dalam tradisi pertukaran itu sendiri. Hal ini karena tradisi pertukaran berhasil ‘mengunci’ pihak penerima dengan kewajiban yang sifatnya memaksa pihak penerima untuk melakukan pengembalian balasan dalam bentuk dukungan. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa pemanfaatan tradisi pertukaran sebagai instrumen mobilisasi tergantung pada kemampuan kandidat mendayagunakan sumber daya yang dimiliki.

Adapun implikasi dari hasil kajian ini: Pertama, pemanfaatan tradisi pertukaran *Kain Timur* sebagai instrumen mobilisasi dukungan menjadikan partai politik semakin sulit berkembang. Peran partai politik sebagai penggerak sekaligus instrumen mobilisasi yang tidak optimal menjadikan keberadaan partai politik tidak menempati posisi kunci dalam rangka mobilisasi dukungan untuk memenangkan kontestasi pemilihan. Dengan tidak menempati posisi kunci menjadikan partai politik semakin tidak dimanfaatkan dalam upaya menggalang dukungan. Pada gilirannya, dalam jangka panjang, kondisi ini tidak mendukung bagi tumbuh dan berkembangnya partai politik.

Kedua, temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa jarak yang menghubungkan masyarakat dengan partai politik menjadi semakin jauh. Peran partai politik yang tidak optimal dalam mobilisasi dukungan menjadikan intensitas hubungan antara partai politik dengan masyarakat relatif rendah. Kondisi ini membawa implikasi, yakni masyarakat menjadi semakin tidak mengetahui dan tidak memahami secara mendalam mengenai keberadaan dan peran yang diemban partai politik. Selanjutnya, kondisi ini tidak kondusif bagi berlangsungnya sistem politik yang bercorak demokratis.

Ketiga, temuan penelitian ini adalah bahwa mobilisasi dukungan digerakkan oleh mekanisme pertukaran antara pihak pemberi dengan pihak penerima yang berlangsung terus menerus tanpa putus. Mekanisme pertukaran seperti ini membawa implikasi, yakni berpotensi merusak kinerja organisasi pemerintahan. Aktor (kandidat) yang menjadi pemenang kontestasi pemilihan dan berhasil menduduki jabatan politik punya kewajiban untuk melakukan pengembalian balasan kepada para pemilih yang telah memberi dukungan pada saat kontestasi pemilihan diselenggarakan. Mereka yang menerima pengembalian balasan juga punya kewajiban melakukan pengembalian balasan lagi. Kondisi ini tentu saja berpotensi merusak kinerja organisasi pemerintahan yang akuntabel.

Keempat, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa berlangsungnya mobilisasi dukungan dikarenakan adanya proses pertukaran antara aktor (kandidat) dengan masyarakat. Temuan ini membawa implikasi, yakni terciptanya kondisi yang tidak mendukung bagi hadirnya aktivitas politik warga (partisipasi politik warga) yang didasarkan pada alasan selain pertimbangan tukar-menukar. Kondisi ini relatif sulit menghadirkan aktivitas politik (partisipasi politik) warga yang bersifat mandiri.

Kelima, implikasi temuan berikutnya ialah kemungkinan terbuka ruang yang kondusif bagi berlangsungnya praktik *money*

politics (politik uang) untuk melakukan mobilisasi dukungan. Ada persamaan antara tradisi pertukaran dan praktik *money politics*, yakni adanya mekanisme tukar-menukar. Adanya persamaan ini yang menjadikan kemungkinan terbuka ruang bagi berlangsungnya praktik politik uang. Walaupun sesungguhnya, dalam tradisi pertukaran yang bisa dijadikan instrumen mobilisasi dukungan terkandung unsur utang-piutang dan unsur menabung atau investasi yang lebih bersifat jangka panjang daripada praktik politik uang.

Agenda Ke Depan

Kajian studi ini menunjukkan bahwa mobilisasi dukungan bisa dilakukan dengan memanfaatkan tradisi pertukaran, dalam hal ini tradisi pertukaran *Kain Timur*. Tradisi pertukaran *Kain Timur* membentuk hubungan timbal-balik atau *reciprocal* yang bercorak ketergantungan antara pihak pemberi dan pihak penerima. Hubungan dalam tradisi pertukaran *Kain Timur* juga punya kekuatan ‘saling mengunci’ antara pihak pemberi dan pihak penerima. Adapun artinya, tradisi ini punya kekuatan untuk memaksa yang membebankan kewajiban bagi kedua belah pihak untuk melakukan pengembalian balasan. Kekuatan ‘saling mengunci’ hadir karena dalam mekanisme pertukaran dari tradisi *Kain Timur* adanya kewajiban untuk mengembalikan pemberian yang dimaknai sebagai utang; dan mekanisme ini berlangsung terus menerus tanpa terputus.

Namun, masyarakat di Sorong Selatan selain mengenal tradisi pertukaran *Kain Timur* juga mengenal tradisi meramu. Tradisi meramu merupakan kebiasaan masyarakat untuk mencari makan dengan cara berladang di suatu tempat untuk kemudian berpindah ke tempat lain bila satu tempat tidak lagi memberi hasil ladang yang baik. Esensi dari tradisi meramu menunjukkan bahwa hasil yang lebih baik dan menguntungkan dijadikan pertimbangan bagi seseorang dalam melakukan aktivitas pekerjaannya.

Dalam kaitannya dengan esensi tradisi pertukaran *Kain Timur*, pemberian yang diterima oleh seseorang adalah pemberian yang dinilai paling baik dan menguntungkan baginya. Seseorang akan beralih pada tawaran pemberian lain, apabila tawaran pemberian yang lain tersebut memberikan hasil yang lebih baik dan menguntungkannya.

Sementara itu, hasil kajian studi ini menunjukkan adanya kekuatan 'saling mengunci' antara pihak pemberi dan pihak penerima yang menjadikan mekanisme pertukaran berlangsung terus-menerus tanpa terputus. Pertanyaannya adalah bagaimana halnya dengan esensi tradisi meramu yang dinyatakan masih dirasakan di masyarakat Sorong Selatan. Esensi tradisi meramu bisa menjadikan hubungan pihak pemberi dan pihak penerima bisa terputus karena pihak penerima mengalihkan tawaran pemberian kepada pihak pemberi yang lain yang dinilai lebih baik dan menguntungkannya. Dalam kajian ini, pengalihan ke tawaran pemberian yang lain tidak ditemukan. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah esensi tradisi meramu sudah hilang di tengah kehidupan masyarakat ataukah karena kuatnya esensi tradisi pertukaran ini dalam konteks mobilisasi dukungan dalam Pilkada. Tidak adanya pengaruh esensi tradisi meramu dalam upaya mobilisasi menjadi agenda menarik untuk ditelusuri lebih lanjut dalam bentuk kajian atau penelitian tersendiri.

Sebagaimana diungkap di atas, kajian ini menunjukkan bahwa tradisi pertukaran *Kain Timur* bisa dimanfaatkan sebagai instrumen untuk meraih kekuasaan melalui upaya mobilisasi dukungan. Tradisi pertukaran ini bisa dimanfaatkan untuk menggagal mobilisasi dalam kontestasi pemilihan yang berprinsip *the winner takes all*. Hal ini karena prinsip *the winner takes all* merupakan prinsip pemilihan di mana aktor (kandidat) yang memperoleh atau mengumpulkan suara terbanyak menjadi pemenang; artinya, kontestasi pemilihan hanya menghasilkan satu pemenang saja.

Sehubungan dengan hal itu, tradisi pertukaran sebagai instrumen mobilisasi perlu dikaji lebih lanjut tingkat efektivitasnya untuk menggalang dukungan dalam kontestasi pemilihan yang tidak berprinsip *the winner takes all*, yakni kontestasi pemilihan yang menghasilkan pemenang lebih dari satu, seperti halnya pemilihan anggota legislatif. Dalam kontestasi pemilihan yang tidak berprinsip *the winner takes all*, aktor (kandidat) tidak harus meraih suara pemilih di semua wilayah pemilihan, aktor (kandidat) hanya membutuhkan suara pemilih dari wilayah pemilihan di mana yang bersangkutan dicalonkan. Hal ini menimbulkan keingintahuan, bisakah tradisi pertukaran *Kain Timur* dimanfaatkan untuk menggalang mobilisasi dukungan untuk meraih kekuasaan melalui kontestasi pemilihan yang tidak berprinsip *the winner takes all*, seperti halnya pemilihan anggota legislatif?

Menindaklanjuti kajian ini, agenda ke depan antara lain: *Pertama*, melakukan kajian terkait dengan ada tidaknya pengaruh dari esensi tradisi meramu untuk menggalang mobilisasi dukungan dalam kontestasi Pilkada. Apabila masih ada pengaruh dari esensi tradisi meramu maka kekuatan ‘saling mengunci’ antara pihak pemberi dan pihak penerima bisa memudar. Kemudian mekanisme pertukaran di antara mereka juga bisa dihentikan atau diputus keberlangsungannya. *Kedua*, melakukan kajian pemanfaatan tradisi pertukaran *Kain Timur* dalam kontestasi pemilihan yang tidak berprinsip *the winner takes all*, di mana pihak yang menjadi pemenang kontestasi lebih dari satu orang, seperti dalam pemilihan anggota legislatif.

Daftar Pustaka

- Abdilah S., Ubed. 2002. *Politik Identitas Etnis (Pergulatan Tanda Tanpa Identitas)*. Jakarta: Yayasan Indonesiatera.
- Abercrombie, Nicholas, dan Stephan Hill. 1976. "Paternalism and Patronase", dalam *The British Journal of Sociology*, Vol. 27, No. 4, (Desember).
- Andrain, Charles F. 1992. *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Andrianto, Tuhana Taufiq. 2001. *Mengapa Papua Bergolak?* Yogyakarta: Gama Global Media.
- Antlov, Hans dan Sven Cederroth (ed.). 1994. *Leadership on Java: Gentle Hints, Authoritarian Rule*. Surrey: Nordic Institute of Asian Studies.
- Aragon, Lorraine V. 2007. "Persaingan Elit di Sulawesi Tengah", dalam Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken (ed.), *Politik Lokal di Indonesia*, Jakarta: KITLV-Yayasan Obor Indonesia.
- Asfar, Muhammad. 2005. "Sistem Pilkada Langsung: Beberapa Problema, Implikasi Politik dan Solusinya", dalam *Jurnal Politika*, Akbar Tandjung Institute, Jakarta, Vol. 1, No. 1.
- Bagus, Lorens. 2005. *Kamus Filsafat*. PT. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Barnett, H.G. 1959. "Peace and Progress in New Guinea", dalam *American Anthropologist*, New Series, Vol. 61, No. 6.
- Baswedan, Anis. 2007. "Pengantar", dalam Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken (eds.), *Politik Lokal di Indonesia*, Jakarta: KITLV-Yayasan Obor Indonesia.
- Boellaars, Jan. 1986. *Manusia Irian, Dahulu-Sekarang-Masa Depan*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Bourdieu, Pierre. 1986. "The Forms of Capital", dalam J. Richardson (ed.), *Handbook of Theory and Research for Sociology of Education*, Greenwood, New York.
- Budiardjo, Miriam. 1981. *Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Budiardjo, Miriam. 1984. "Konsep Kekuasaan: Tinjauan Kepustakaan", dalam Miriam Budiardjo (ed.), *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Coleman, James S. 2009. *Dasar-dasar Teori Sosial*. Bandung: Nusa Media.
- Davis, Gerald F., dkk. 2005. *Social Movements and Organization Theory*. Cambridge: Cambridge.
- Dahl, Robert A. 1978. *Modern Political Analysis*. New Delhi: Prentice-Hall of India.
- Eindhoven, Myrna. 2007. "Penjajah Baru? Identitas, Representasi, dan Pemerintahan di Kepulauan Mentawai Pasca-Orde Baru", dalam Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken (ed.), *Politik Lokal di Indonesia*, Jakarta: KITLV-Yayasan Obor Indonesia.
- Eisenstadt, S.N. dan Louis Roniger. 1980. "Patron-Client Relations as a Model of Structuring Social Exchange", dalam *Comparative Studies in Society and History*, Vol. 22, No. 1, (Januari).
- Eriksen, Thomas Hylland. 1994. *Ethnicity and Nationalism*. London-New York: Pluto Press.

- Fitriyah. 2005. "Sistem dan Proses Pilkada Secara Langsung", dalam *Analisa*, CSIS, Jakarta. Vol. 34, No. 3.
- Furnival, J.S. 1976. *Netherlands India: A Study of Plural Economy*. Amsterdam: B.W. Israel BV.
- Gaffar, Afan. 1999. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Giddens, Anthony. 1995. *The Constitution of Society: Teori Strukturasi untuk Analisa Sosial*. Pasuruan: Pedati.
- Guibernau, Montserrat dan John Rex (ed.). 1999. *The Ethnicity*. Cambridge: Polity Press.
- Hadi, Syamsul dkk. 2007. *Disintegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik Lokal dan Dinamika Internasional*. Jakarta: CIRES FISIP UI-Yayasan Obor Indonesia.
- Haryanto. 2005. *Kekuasaan Elit: Suatu Bahasan Pengantar*. Yogyakarta: Program S-2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah-Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fisipol Universitas Gadjah Mada.
- Helmke, Gretchen, dan Steven Levitsky. 2004. "Informal Institutions and Comparative Politics: A Research Agenda", dalam *Jurnal Perspectives on Politics*, Vol. 2, No. 4, Desember.
- Hutchinson, John dan Anthony D. Smith (ed.). 1996. *Ethnicity*. New York: Oxford University Press.
- Hyde, Lewis. 1983. *The Gift, Imagination and the Erotic Life of Property*. New York: Vintage Books (Random House).
- Karoba, Sem (dkk.). 2005. *Papua Menggugat: Politik Otonomisasi dan Politisasi Otonomi*. Yogyakarta: Galang Press.
- Klandermans, Bert. 1997. *Social Psychology of Protest*. Massachusetts: Blackwell Publishers.
- Klinken, Gerry van. 2007. *Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia*. Jakarta: KITLV-Yayasan Obor Indonesia.
- Kocu, Eduard M. 2007. *Prisoner's Dilemma (Studi Tentang Rivalitas Etnis Terhadap Perilaku Memilih Dalam Pilkada*

- Sorong Selatan, Papua Barat*). Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Ilmu Politik Konsentrasi Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM (Tesis, Tidak Dipublikasikan).
- Koentjaraningrat. 2002. “Kebudayaan Penduduk Pantai Utara Irian Jaya”, dalam Koentjaraningrat (ed.), *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Jambatan.
- Lauth, Hans-Joachim. 2000. “Informal Institutions and Democracy”, dalam *Journal Democratization*, Vol. 7, No. 4 (Winter).
- Legg, Keith R. 1983. *Tuan, Hambam, dan Politisi*. Jakarta: PT Sinar Harapan.
- Liddle, R. William. 1992. *Partisipasi dan Partai Politik, Indonesia pada Awal Orde Baru*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Maguire, Diarmuid. 1995. “Opposition Movements and Opposition Parties: Equal Partners or Dependent Relations in the Struggle for Power and Reform ?” dalam J. Craig Jenkins dan Bert Klandermans (ed.), *The Politics of Social Protest: Comparative Perspectives on States and Social Movements*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Malley, Michael. 2001. “Daerah: Sentralisasi dan Perlawanan”, dalam Donald K. Emmerson (ed.), *Indonesia Beyond Soeharto*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mansoben, Johszua Robert. 1994. *Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya, Indonesia: Studi Perbandingan*. Leiden: University of Leiden (Disertasi).
- Mas’oed, Mohtar, dan Nasikun. 1987. *Sosiologi Politik*. Yogyakarta: PAU-Studi Sosial, Universitas Gadjah Mada.
- Massink, Jan. 2001. “Revolusi Kain Timur di Ayamaru”, dalam Pim Schoorl, *Belanda di Irian Jaya*. Jakarta: KITLV-Garba Budaya.
- Mauss, Marcel. 1990. *The Gift*. London: Routledge.

- McAdam, Doug, John D. McCarthy, dan Mayer N. Zald (ed.). 1996. *Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Miedema, Jelle dan Ger Reesink. 2004. *One Head, Many Faces*. Leiden: KITLV Press.
- Mietzner, Marcus. 2009. "Autonomy, Democracy, and Internal Conflict: The 2006 Gubernatorial Elections in Papua", dalam Maribeth Erb and Priyambudi Sulistiyanto (eds.), *Deepening Democracy in Indonesia?* Singapura: Institute of Southeast Asian Studies.
- Mietzner, Marcus dan Edward Aspinall. 2010. "Problems of Democratisation in Indonesia: An Overview", dalam Edward Aspinall and Marcus Mietzner (ed.), *Problems of Democratisation in Indonesia; Elections, Institutions and Society*. Singapura: Institute of Southeast Asian Studies.
- Muhtadi, Burhanuddin. 2012. *Dilema PKS: Suara dan Syariah*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Nordholt, Henk Schulte dan Gerry van Klinken. 2007. "Pendahuluan", dalam Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken (ed.), *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: KITLV-Yayasan Obor Indonesia.
- North, Douglass C. 1990. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Oberschall, Anthony. 1973. *Social Conflicts and Social Movements*. New Jersey: Prentice Hall.
- Osborne, Robin. 2001. *Kibaran Sampari, Gerakan Pembebasan OPM dan Perang Rahasia di Papua Barat*. Jakarta: Penerbit Elsam.
- Outhwaite, William (ed.). 2008. *Ensiklopedi Pemikiran Sosial Modern*. Jakarta: PT Kencana Perdana Media Group.

- Pelras, Christian. 2009. "Hubungan Patron-Klien pada Masyarakat Bugis dan Makassar di Sulawesi Selatan", dalam Roger Tol dkk. (ed.), *Kuasa dan Usaha di Masyarakat Sulawesi Selatan*. Jakarta: Ininnawa-KITLV.
- Petersen, William, dkk. 1982. *Concepts of Ethnicity*. Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press.
- Pigay, Decki Natalis. 2000. *Evolusi Nasionalisme dan Sejarah Konflik Politik di Papua*. Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan.
- Priyono, B. Herry. 2002. *Anthony Giddens, Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Ramandey, Frist Bernard (ed.). 2008. *Mengadili Demokrasi dan Perjuangan Damai Rakyat Papua*. Jayapura: LSP-Otsus Papua.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2004. *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Kencana.
- Sangganafa, N. dan Koentjaraningrat. 1994. "Pertukaran Kain Timur di Daerah Kepala Burung", dalam Koentjaraningrat dkk., *Irian Jaya, Membangun Masyarakat Majemuk*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- School, Pim. 2001. *Belanda di Irian Jaya*. Jakarta: KITLV-Penerbit Garba Budaya.
- Sidel, John T. 2005. "Bosisme dan Demokrasi di Filipina, Thailand, dan Indonesia: Menuju Kerangka Analisis Baru tentang Orang Kuat Lokal", dalam John Harris, Kristian Stokke, Olle Tornquist, dkk., *Politisasi Demokrasi: Politik Lokal Baru*. Jakarta: Demos.
- Subianto, Benny. 2009. "Ethnic Politics and the Rise of the Dayak-Bureaucrats in Local Elections: *Pilkada* in Six Kabupaten in West Kalimantan", dalam Maribeth Erb dan Priyambudi Sulistiyanto (ed.), *Deepening Democracy in Indonesia?*, Singapura: Institute of Southeast Asian Studies.
- Sugiono, Bambang dkk. 2001. "Akar Permasalahan dan Alternatif Proses Penyelesaian Konflik di Papua", dalam Sayadi

- (penyunting), *Aceh, Jakarta. Papua: Akar Permasalahan dan Penyelesaian Konflik*. Jakarta: Yayasan Penguatan Partisipasi Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Sipil Indonesia (YAPPIKA).
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Suroso. 2009. *Politik Penganggaran (Studi Tentang Proses Politik Dalam Penganggaran di Kabupaten Sorong Selatan)*. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Ilmu Politik Konsentrasi Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM (Tesis, Tidak Dipublikasikan).
- Syarkawi. 2007. *Fisibilitas Politik Identitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung (Studi Kasus Pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah)*. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Ilmu Politik Konsentrasi Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM (Tesis, Tidak Dipublikasikan).
- Tanasaldy, Taufiq. 2007. "Politik Identitas Etnis di Kalimantan Barat", dalam Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken (ed.), *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: KITLV-Yayasan Obor Indonesia.
- Tilly, Charles. 1978. *From Mobilization to Revolution*. Massachusetts: Addison-Wesley, Reading.
- Timmer, Jaap. 2007. "Desentralisasi Salah Kaprah dan Politik Elit di Papua", dalam Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken (ed.), *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: KITLV-Yayasan Obor Indonesia.
- Uhlin, Anders. 1997. *Indonesia and the "Third Wave of Democratization", the Indonesian Pro-Democracy Movement in a Changing World*, Nordic Institute of Asian Studies Democracy in Asia, Series No. 1. Surrey: Curzon Press.
- Wilson, John. 1973. *Introduction to Social Movements*. New York: Basic Books, Inc.

Widjojo, Muridan S. (ed.). 2009. *Papua Road Map*. Jakarta: LIPI, Yayasan TIFA, dan Yayasan Obor Indonesia.

Wonda, Sendinus. 2007. *Tenggelamnya Rumpun Melanesia, Pertarungan Politik NKRI di Papua Barat*. Abepura, Jayapura: Penerbit Deiyai.

Indeks

A

- Aifat 42, 43, 46—48, 51, 54, 63, 70, 100, 101, 132, 188, 189
- Aitinyo 42, 43, 46—48, 51, 54, 63, 70
- Aktivitas elektoral 39, 161, 187, 211, 213
- Aktivitas pemerintahan 39, 161, 205, 211, 213
- Anak adat 9—99, 105—108, 123, 124, 133, 201
- Andrain 25, 28, 30, 33, 35, 94, 119, 124, 126, 218, 219, 233
- Asli Papua 22, 54—56, 64, 65, 72, 75, 98, 113, 115, 118, 125, 146, 154—165, 171, 179, 183, 188
- Ayamaru 42, 43, 46—48, 51, 54, 63, 70, 134, 157, 236

B

- BBM (Buton, Bugis, Makasar) 47, 54—56, 61, 150
- Birokrasi 20, 31, 39, 59, 93—96, 98, 99, 105, 107, 108, 115, 116, 120, 127—129, 132, 135, 159, 161—165, 169—171, 203, 204, 213, 218, 225

- Birokrat 21, 94—99, 106, 116, 117, 121, 126, 156, 158, 164—167, 171, 188, 189, 203
- Budaya meramu 53, 72, 73, 90, 114, 230, 231, 232
- Bupati 22, 94, 99—101, 103, 116, 122—124, 127, 129, 131, 134—136, 151, 155, 157—159, 162, 163, 168, 169, 171, 172, 177, 180, 183—186, 188—190, 193, 195, 201, 206, 209, 210, 223—225

E

- Etnis
- etnisitas 18, 21—23, 31, 36, 41, 44—51, 53—58, 60—67, 70, 72, 73, 78, 93, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 103—110, 11—118, 120—125, 128, 131—134, 137, 142—153, 156, 162—172, 175, 178—180, 183—186, 188, 190, 191, 194—196, 199, 201, 202, 204, 209, 216, 217, 221, 225, 227

H

- Hyde 70, 89, 112, 211, 217, 235

- I**
- Ikatan 194, 195, 201, 202, 204, 216, 217, 225
- primordial 45, 65, 89, 94, 98, 108, 109, 116, 125, 143, 185, 188, 190
- Imekko 45—48, 50—53, 60, 61, 63, 69, 70, 72, 74, 75, 91, 101, 105, 149, 150, 157, 158, 165, 166, 183, 188, 190
- Institusi formal 33, 34, 36, 37, 39
- Institusi informal 33—37, 39, 213, 217, 223, 224
- Instrumen
- mobilisasi dukungan 17, 18, 20, 23, 24, 31, 35, 36, 44, 112, 128, 130, 134—146, 161, 186, 213, 215—219, 222—225, 228, 230, 231, 232
- K**
- Kandidat
- Aktor 22, 23, 27, 31, 32, 39, 62, 65, 93, 110, 114, 119, 125, 127, 128, 130, 132, 134—137, 154, 158, 162, 173, 174, 176, 187, 192, 193, 197, 201—205, 207, 209, 213, 216, 218, 219, 221—225, 227—229, 231, 232
- Kekuasaan 17,—22, 24—29, 44, 68, 83, 93, 94, 105, 112, 116, 119, 161, 190, 213, 215, 216, 218, 219, 221, 222, 224, 231, 232
- Kelompok etnis 21—23, 31, 36, 41, 44—51, 53—57, 60—67, 69, 70, 72, 73, 78, 93, 97, 98, 100, 105—110, 113, 115—118, 120, 122—125, 128, 132, 133, 137, 143—150, 162—166, 168—172, 178, 180, 183, 184, 186, 188, 190,
- 194, 195, 201, 202, 204, 216, 217, 225
- Kepemimpinan pria berwibawa 69, 71, 73, 85, 86, 90
- Keterwakilan etnisitas 57, 162—168, 197, 225
- Kontestasi 18, 23, 27, 33, 38, 104, 114, 119, 124, 125, 129, 130, 132, 133, 135, 136, 145, 146, 148, 154, 156, 161, 168, 169, 171, 174, 175, 178, 180, 181, 187, 190, 193, 198, 199, 205, 207, 216, 222, 223, 226, 228, 229, 231, 232
- L**
- Lingkungan sosial alami 37
- Lingkungan sosial terbangun 37
- M**
- Mansoben 53, 71, 73, 75—86, 88—90, 236
- Marga
- Kereth 63, 64, 108, 109, 169, 183
- Mauss 70, 89, 112, 211, 217, 236
- Maybrat 43, 45—48, 51—54, 60, 61, 63, 69, 70, 72, 74, 75, 77, 78, 91, 100, 105, 117, 132, 134, 149, 157, 165, 166, 168, 183, 188, 189, 203, 209
- N**
- Non-Papua 22, 23, 39, 45—49, 67, 93, 94, 134, 149, 165, 166, 224
- O**
- Otonomi Khusus 21, 22, 201
- Otto Ihalauw 23, 93—115, 117—137, 151—159, 162—210, 225, 226, 227

P

- Partai politik 20, 23, 102, 103, 122, 123, 124, 131, 136, 137, 139—145, 147, 148, 150—155, 158, 173—187, 190—192, 194—197, 199, 204, 205, 215—217, 225, 228, 229
- Patronage, ketokohan 57—62, 114, 129, 143—146, 170, 221, 228
- Pemberian (gift) 82, 89, 106, 111, 114, 155, 184, 218, 222
- Pemekaran 41, 42
- Pemilihan legislatif 140
- Pencalonan, Kampanye 180, 187, 198—207, 213, 226
- Pendatang 22, 23, 41, 45—49, 54—58, 61, 62, 64—67, 74, 75, 98, 104—106, 117, 118, 165, 180, 184, 186, 188, 191, 195
- Pengembalian
balasan 23, 34, 53, 74, 79, 83, 85, 89, 114, 151, 152—155, 167, 168, 172, 176, 178, 182, 185, 186, 190, 193, 195, 198, 207, 208, 211, 212, 213, 218, 222, 226—230
- Persepsi masyarakat 94, 98, 105, 107, 115, 117—119, 139, 144, 163, 185
- Pertukaran Kain Timur 24, 215, 223—228, 230—232
- Pertukaran keramik 53, 70
- Pilkada 93, 101, 156, 157, 233, 235, 238
- Politik etnisitas 139
- Politik Kain Timur 139, 161, 187
- Politik uang 208, 230

S

- Saling mengunci 212, 230—232
- Sorong Selatan 19, 23, 34—39, 41—64, 66, 67, 69, 72, 73, 74, 79, 85, 90, 93, 95, 97—111, 113—118, 120—125, 127, 129—131, 133—137, 139—143, 145, 146, 148, 149, 151, 152, 156—159, 162, 164—170, 174, 175, 177—186, 188, 189, 191—195, 197, 198, 199, 201—206, 208—210, 216, 224, 225, 230, 231, 236, 239
- Strukturasi 224
- Sumber daya (resources) 28—31, 35, 94, 122, 124—127, 135—137, 172, 181

T

- Tehit 23, 45, 47—53, 58—61, 63, 64, 66, 69, 70, 72, 74, 75, 90, 97—101, 104—110, 120, 123, 124, 131, 133, 149, 150, 157, 158, 165, 166, 178, 183, 185, 199, 201, 205
- The winner takes all 222, 223, 231, 232
- Timbal-balik (reciprocal) 63, 217, 223, 230
- Tradisi masyarakat
esensi tradisi 17, 19, 23, 24, 29, 32, 34—39, 44, 53, 54, 58, 69, 70—75, 79, 84, 85, 90, 91, 95, 107, 110—114, 119, 139, 151—155, 161, 172, 176, 184, 185, 190, 192, 194, 197, 207, 208, 210—213, 215, 217—219, 222—228, 230—232

Tentang Penulis

Penulis adalah Staf Pengajar di Jurusan Politik dan Pemerintahan Fisipol Universitas Gadjah Mada Yogyakarta; menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di kota kelahirannya Purworejo, Jawa Tengah; menyelesaikan program S-1 dan S-3 di Universitas Gadjah Mada; dan program S-2 di *Ateneo de Manila University, Philippines*.